BADAN POM

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga melayani bangsa



LAPORAN KINERJA

INTERIM TRIWULAN I

BPOM DI PANGKAL PINANG

2025

JALAN PULAU BANGKA, AIR ITAM
PANGKALPINANG, KEP. BANGKA BELITUNG.

KATA PENGANTAR



Puji syukur senantiasa kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga Laporan Kinerja Triwulan I 2025 Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkal Pinang dapat diselesaikan. Laporan kinerja ini merupakan pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran dalam rangka mencapai Sasaran Strategis yang telah dilaksanakan pada Triwulan I 2025 yang merupakan tahun pertama dalam periode Renstra 2025-2029.

Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan I 2025 Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkal Pinang mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi. Dengan kata lain, timbul kewajiban bagi setiap instansi pemerintah untuk mengukur dan sekaligus menginformasikan capaian kinerjanya. Hal ini juga berarti bahwa instansi pemerintah diwajibkan untuk mengubah orientasi pelaporan dari kemampuan menyerap anggaran menjadi kemampuan untuk menunjukkan capaian kinerja *output* maupun *outcome*.

Laporan kinerja triwulan I tahun 2025 ini disusun sebagai bagian dari upaya Balai POM di Pangkal Pinang untuk memberikan pertanggungjawaban kinerja pengawasan obat dan makanan di wilayah Kep. Bangka Belitung. Dalam Laporan Kinerja Balai POM di Pangkal Pinang Triwulan I Tahun 2025 tertuang Perjanjian Kinerja dan Indikator yang mengacu pada Renstra BPOM di Pangkal Pinang Tahun 2025-2029, pengukuran capaian kinerja terhadap target kinerja triwulan I dan membandingkan realisasi kinerja terhadap target Tahun 2025, evaluasi dan hasil analisis pengukuran kinerja serta realisasi anggaran.

Pada laporan kinerja triwulan I tahun 2025 ini dilakukan revisi dikarenakan terdapat penyesuaian rumus perhitungan pada Form RHPK iklan pangan olahan yang dilakukan oleh Direktorat Pengawasan Pangan Olahan, khususnya komponen Kesesuaian Proporsi Media Iklan sehingga menyebabkan perubahan realisasi Triwulan I Tahun 2025 pada indikator Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan Balai POM di Pangkal Pinang.

Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan perhatian dan dukungan kepada Balai POM di Pangkal Pinang dalam melaksanakan tugas-tugas pengawasan obat dan makanan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Kami berharap semoga Laporan Kinerja ini akan memberian nformasi yang bermanfaat atas kinerja yang telah dicapai dan menjadi acuan dalam upaya perbaikan secara berkesinambungan untuk peningkatan kinerja Balai POM di Pangkal Pinang di masa yang akan datang.

Pangkal Pinang, 25 Agustus 2025

Agus Riyanto, S.Farm, Apt.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i
Daftar Isi iii
Daftar Lampiran v
Daftar Tabel vii
Daftar Gambar xiv
Ringkasan Eksekutif xx
Highlight xxiv

BAB I. Pendahuluan 1
1.1 Latar Belakang 2
1.2 Gambaran Umum Organisasi 3
1.3 Struktur Organisasi 8
1.4 Isu Strategis 9

BAB II. Perencanaan Kinerja 12
2.1 Rencana Strategis 13
2.2 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 18
2.3 Perjanjian Kinerja (PK) 20
2.4 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) 25
2.5 Metode dan Kriteria Pencapaian Indikator 34

BAB III. Akuntabilitas Kinerja 37
3.1 Capaian Kinerja 38
3.2 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sakip Tahun 2023 190
3.3 Realisasi Anggaran 194
3.4 Analisis Efisiensi Kegiatan 200

BAB IV. Penutup 207
4.1 Kesimpulan 208
4.2 Saran 211

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Kegiatan (RHPK)

1) Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti sesuai ketentuan_150425
2) Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD_ESO ke BPOM
3) Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
4) persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar
5) Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan (1)
6) Persentase Keputusan_Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti Stakeholder
7) Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan
8) Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan (termasuk IRTP) yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan
9) Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
10) Persentase sarana distribusi Pangan Olahan (termasuk PIRT) yang diperiksa sesuai ketentuan
11) Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Keten
12) Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan
13) Jumlah Desa Pangan Aman
14) Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas 2025
15) Persentase UMKM memperoleh rekomendasi sertifikat CP OBA, Kos dan atau IP-CPPOB
16) Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Lampiran 2. Rencana Kinerja 2025 Balai POM di Pangkal Pinang
Lampiran 3. Perjanjian Kinerja 2025 Balai POM di Pangkal Pinang
Lampiran 4. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Balai POM di Pangkal Pinang
Lampiran 5. SK Indikator Kinerja Utama Revisi Tahun 2025-2029 Balai POM di Pangkal Pinang
Lampiran 6. Realisasi Indikator Kinerja Utama Balai POM di Pangkal Pinang Triwulan I Tahun 2025
Lampiran 7. Matriks Tingkat Efisiensi Kinerja Per Ouput Balai POM di Pangkal Pinang Triwulan I Tahun 2025
Lampiran 8. Matriks Tingkat Efisiensi Kinerja Per Indikator Balai POM di Pangkal Pinang Triwulan I Tahun 2025
Lampiran 9. Matriks Tingkat Efisiensi Kinerja Per Sasaran Strategis Balai POM di Pangkal Pinang Triwulan I 2025
Lampiran 10. RAPK Triwulan I 2025 BPOM di Pangkalpinan
Lampiran 11. Nilai IKPA Triwulan I 2025
Lampiran 12. Tabel Keselarasan Data Kinerja Triwulan I 2025
Lampiran 13. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Tahun 2025
Lampiran 14. Penyesuaian anggaran
Lampiran 15. Matriks Reviu Target
Lampiran 16. Nota Dinas Pemberitahuan Indikator yang Dikecualikan dari Perhitungan Nilai Kinerja Organisasi (NKO)
Lampiran 17. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah
Lampiran 18. Permohonan Perubahan Data pada Aplikasi Simetris
Lampiran 19. Surat Direktur Pengawasan Peredaran Pangan Olahan terkait Hasil Evaluasi Persentase Iklan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan
Lampiran 20. Penghargaan BPOM Pangkal Pinang

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Sarana dan Prasarana Balai POM di Pangkal Pinang	7
Tabel 2.1	Tabel Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Triwulan I 2025	17
Tabel 2.2	Perjanjian Kinerja Balai POM di Pangkal Pinang Triwulan I 2025 ..	20
Tabel 2.3	Tabel Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Balai POM di Pangkal Pinang Triwulan I 2025	24
Tabel 2.4	Tabel Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Revisi Balai POM di Pangkal Pinang Triwulan I 2025	29
Tabel 2.5	Kriteria Predikat Kinerja.....	34
Tabel 2.6	Kriteria Predikat realisasi kinerja triwulan dengan target tahunan ..	35
Tabel 2.7	Kriteria Predikat Indikator Kinerja.....	35
Tabel 3.1	Nilai Kinerja Organisasi Triwulan I Tahun 2025	42
Tabel 3.2	Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	46
Tabel 3.3	Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Tahun 2025 Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	48
Tabel 3.4	Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Indikator Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	51
Tabel 3.5	Tindak Lanjut Rekomendasi Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	53
Tabel 3.6	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Telah Melaporkan KTD/ESO	56
Tabel 3.7	Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Tahun 2025 Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Telah Melaporkan KTD/ESO	56
Tabel 3.8	Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Indikator Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Telah Melaporkan KTD/ESO .	58
Tabel 3.9	Tindak Lanjut Rekomendasi Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Telah Melaporkan KTD/ESO	58
Tabel 3.10	Persentase Sampel Pangan Olahan Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	59

Tabel 3.11 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Tahun 2025 Persentase Sampel Pangan Olahan Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan 61
Tabel 3.12 Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Indikator Persentase Sampel Pangan Olahan Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan 63
Tabel 3.13 Tindak Lanjut Rekomendasi Persentase Sampel Pangan Olahan Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan 64
Tabel 3.14 Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan yang Diuji Sesuai Standar 66
Tabel 3.15 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Tahun 2025 Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan yang Diuji Sesuai Standar 67
Tabel 3.16 Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Indikator Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan yang Diuji Sesuai Standar 68
Tabel 3.17 Tindak Lanjut Rekomendasi Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan yang Diuji Sesuai Standar 69
Tabel 3.18 Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan 70
Tabel 3.19 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Tahun 2025 Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan 71
Tabel 3.20 Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Indikator Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan 73
Tabel 3.21 Tindak Lanjut Rekomendasi Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan 74
Tabel 3.22 Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti oleh Stakeholder 77
Tabel 3.23 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Tahun 2025 Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti oleh Stakeholder 78
Tabel 3.24 Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Indikator Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti oleh Stakeholder 79
Tabel 3.25 Tindak Lanjut Rekomendasi Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti oleh Stakeholder 82

Tabel 3.26 Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan 84
Tabel 3.27 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Tahun 2025 Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan 84
Tabel 3.28 Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Indikator Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan 86
Tabel 3.29 Tindak Lanjut Rekomendasi Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan 87
Tabel 3.30 Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan 88
Tabel 3.31 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Tahun 2025 Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan 88
Tabel 3.32 Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Indikator P ersentase Sarana Produksi Pangan Olahan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan 90
Tabel 3.33 Tindak Lanjut Rekomendasi Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan 92
Tabel 3.34 Persentase Fasilitas Distribusi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan 93
Tabel 3.35 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Tahun 2025 Persentase Fasilitas Distribusi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan 93
Tabel 3.36 Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Indikator Persentase Fasilitas Distribusi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan 97
Tabel 3.37 Tindak Lanjut Rekomendasi Persentase Fasilitas Distribusi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan 98
Tabel 3.38 Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan 99

Tabel 3.39 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Tahun 2025 Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan 100
Tabel 3.40 Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Indikator Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan 102
Tabel 3.41 Tindak Lanjut Rekomendasi Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan 103
Tabel 3.42 Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan 107
Tabel 3.43 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Tahun 2025 Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan 107
Tabel 3.44 Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Indikator Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan 109
Tabel 3.45 Tindak Lanjut Rekomendasi Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan 110
Tabel 3.46 Nilai Pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium 112
Tabel 3.47 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Tahun 2025 Nilai Pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium 113
Tabel 3.48 Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Indikator Nilai Pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium 116
Tabel 3.49 Tindak Lanjut Rekomendasi Nilai Pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium 118
Tabel 3.50 Tingkat Efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan 121
Tabel 3.51 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Tahun 2025 Tingkat Efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan 121
Tabel 3.52 Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Indikator Tingkat Efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan 123

Tabel 3.53 Tindak Lanjut Rekomendasi Tingkat Efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan 125
Tabel 3.54 Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan 126
Tabel 3.55 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Tahun 2025 Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan 127
Tabel 3.56 Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Indikator Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan .. 128
Tabel 3.57 Tindak Lanjut Rekomendasi Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan 129
Tabel 3.58 Jumlah Desa Pangan Aman 130
Tabel 3.59 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Tahun 2025 Jumlah Desa Pangan Aman 131
Tabel 3.60 Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Indikator Jumlah Desa Pangan Aman 131
Tabel 3.61 Tindak Lanjut Rekomendasi Jumlah Desa Pangan Aman 133
Tabel 3.62 Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas 134
Tabel 3.63 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Tahun 2025 Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas 134
Tabel 3.64 Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Indikator Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas 135
Tabel 3.65 Tindak Lanjut Rekomendasi Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas 136
Tabel 3.66 Persentase UMKM yang Didampingi dan Memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan OBA, Kos yang Baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan 137
Tabel 3.67 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Tahun 2025 Persentase UMKM yang Didampingi dan Memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan OBA, Kos yang Baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan 138
Tabel 3.68 Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Indikator Persentase UMKM yang Didampingi dan Memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan OBA, Kos yang Baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan 140

Tabel 3.69 Tindak Lanjut Rekomendasi Persentase UMKM yang Didampingi dan Memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan OBA, Kos yang Baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan 142
Tabel 3.70 Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan 144
Tabel 3.71 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Tahun 2025 Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan 145
Tabel 3.72 Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Indikator Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan 147
Tabel 3.73 Tindak Lanjut Rekomendasi Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan 148
Tabel 3.74 Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diselesaikan Sesuai Standar 149
Tabel 3.75 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Tahun 2025 Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diselesaikan Sesuai Standar 150
Tabel 3.76 Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Indikator Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diselesaikan Sesuai Standar 152
Tabel 3.77 Tindak Lanjut Rekomendasi Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diselesaikan Sesuai Standar 153
Tabel 3.78 Indeks Pelayanan Publik 154
Tabel 3.79 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Tahun 2025 Indeks Pelayanan Publik 154
Tabel 3.80 Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Indikator Indeks Pelayanan Publik 156
Tabel 3.81 Tindak Lanjut Rekomendasi Indeks Pelayanan Publik 158
Tabel 3.82 Nilai Pembangunan ZI 159
Tabel 3.83 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Tahun 2025 Nilai Pembangunan ZI 160

Tabel 3.84 Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Indikator Nilai Pembangunan ZI 165
Tabel 3.85 Tindak Lanjut Rekomendasi Nilai Pembangunan ZI 168
Tabel 3.86 Nilai AKIP 170
Tabel 3.87 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Tahun 2025 Nilai AKIP 171
Tabel 3.88 Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Indikator Nilai AKIP 173
Tabel 3.89 Tindak Lanjut Rekomendasi Nilai AKIP 175
Tabel 3.90 Nilai Kinerja Anggaran 177
Tabel 3.91 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Tahun 2025 Nilai Kinerja Anggaran 177
Tabel 3.92 Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Indikator Nilai Kinerja Anggaran 179
Tabel 3.93 Tindak Lanjut Rekomendasi Nilai Kinerja Anggaran 182
Tabel 3.94 Indeks Manajemen Risiko 185
Tabel 3.95 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Tahun 2025 Indeks Manajemen Risiko 185
Tabel 3.96 Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Indikator Indeks Manajemen Risiko 187
Tabel 3.97 Tindak Lanjut Rekomendasi Indeks Manajemen Risiko 188
Tabel 3.98 Tindak Lanjut Triwulan I atas Evaluasi SAKIP Tahun 2024 190
Tabel 3.99 Realisasi Anggaran Tiap Sasaran Strategis 194
Tabel 3.100 Realisasi Anggaran Tiap Rincian Output 196
Tabel 3.101 Penyesuaian Anggaran dalam Mencapai Kinerja 198
Tabel 3.102 Tingkat Efisiensi Anggaran untuk Pencapaian Sasaran Strategis Triwulan I Tahun 2025 201
Tabel 3.103 Tingkat Efisiensi Anggaran untuk Pencapaian Kegiatan atau Rincian Output Triwulan I Tahun 2025 204

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Balai POM di Pangkal Pinang 5
Gambar 1.2 Penyebaran Pegawai di Balai POM di Pangkal Pinang 8
Gambar 1.3 Profil Pegawai Balai POM di Pangkal Pinang berdasarkan Golongan8
Gambar 1.4 Peta Provinsi Kep.Bangka Belitung 9

RINGKASAN EKSEKUTIF

Balai POM di Pangkal Pinang sebagai salah satu instansi pemerintah memiliki kewajiban menyusun laporan kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam mewujudkan visi misi melalui rencana strategis tahun 2025-2029.

Pada Rencana Strategis Balai POM di Pangkal Pinang telah ditetapkan 8 sasaran kegiatan diantaranya yaitu.

1. Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT;
2. Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT;
3. Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT;
4. Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu;
5. Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT;
6. Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT;
7. Layanan Publik UPT yang prima;
8. Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal.

Pencapaian 8 sasaran strategis tersebut diukur dengan 24 (dua puluh empat) indikator kinerja.

Dari **24 (dua puluh empat)** Indikator Kinerja Utama, hanya **14 (empat belas)** indikator yang dapat diukur capaiannya, **4 indikator** belum dapat diukur capaiannya karena tidak ada target di triwulan ini, dan **6 (enam)** indikator lainnya merupakan indikator tahunan yang penilaiannya dilakukan pada akhir tahun.

Dalam perhitungan Nilai Kinerja Organisasi BPOM di Pangkal Pinang Triwulan I Tahun 2025, terdapat 5 indikator kinerja yang capaiannya dinormalisasi menjadi 110% dan 3 indikator kinerja dikecualikan dari perhitungan sehingga hanya 11 indikator yang diperhitungkan dalam NKO. Nilai Kinerja Organisasi BPOM di Pangkal Pinang Triwulan I Tahun 2025 sebesar **96,95%** dengan predikat **Baik**.

Berdasarkan dengan Surat Dinas dari Direktur Pengawasan Peredaran Pangan Olahan Nomor T-PW.04.05.54.07.25.1368 tanggal 15 Juli 2025 Perihal Hasil Evaluasi Persentase Iklan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan, terdapat penyesuaian rumus perhitungan pada Form RHPK iklan pangan olahan yang dilakukan oleh Direktorat Pengawasan Pangan Olahan, khususnya komponen Kesesuaian Proporsi Media Iklan sehingga menyebabkan perubahan realisasi Triwulan I Tahun 2025 pada indikator Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan Balai POM di Pangkal Pinang. Realisasi semula sebesar 101,19 dengan capaian sebesar 118,49. Setelah dilakukan penyesuaian rumus perhitungan pada Form RHPK, realisasinya menjadi **100,69** dengan capaian sebesar **117,90**. Namun, perubahan realisasi pada indikator ini **tidak menyebabkan perubahan Nilai Kinerja Organisasi** BPOM di Pangkal Pinang Triwulan I Tahun 2025 karena capaian kinerja indikator ini >110 sehingga capaiannya sama, baik sebelum maupun setelah adanya penyesuaian rumus perhitungan yaitu 110.

Pada tahun 2025, Balai POM di Pangkal Pinang melaksanakan 22 (dua puluh dua) kegiatan utama atau Rincian Output (RO) untuk mendukung pencapaian 8 sasaran strategis. Dari 22 Rincian Output (RO), hanya 12 RO yang dapat dihitung tingkat efisiensinya, sedangkan 10 RO lainnya tidak dapat dihitung Tingkat Efisiensinya karena belum ada capaian input (anggaran) dan/atau capaian output (RO) di Triwulan I ini.

Dari 22 RO tersebut, 12 RO yang dapat dihitung tingkat efisiensinya masih belum efisien dengan capaian TE 75% (Tidak Efisien). Hal ini dikarenakan realisasi anggaran pada Triwulan I masih rendah dan adanya efisiensi anggaran pada Triwulan I. Untuk meningkatkan realisasi anggaran setiap output, Balai POM di Pangkal Pinang akan terus melakukan monitoring realisasi anggaran dan melakukan revisi kegiatan, serta melakukan optimalisasi anggaran. Selain itu, Balai POM di Pangkal Pinang juga akan

melakukan monitoring dan evaluasi capaian Rincian Output (RO) setiap bulannya pada rapat evaluasi bulanan untuk memantau progres capaian Rincian Output.

Dari 8 sasaran strategis, hanya 4 sasaran strategis yang bisa dihitung tingkat efisiensinya. Hasil pengukuran empat sasaran strategis tersebut yaitu 100% (Efisien) dengan rata-rata persentase capaian output sebesar 98,91% dan persentase capaian input sebesar 95,78%.

Sepanjang Triwulan I 2025, Balai POM di Pangkal Pinang tidak melakukan perubahan atau revisi pada target Rincian Output (RO).

Pada tahun 2025 Balai POM di Pangkal Pinang memperoleh anggaran sebesar **Rp 21.577.684.000**. Pada penyerahan DIPA 2025 bulan Desember 2024, sebesar Rp 1.082.877.000 atau 50% pagu perjalanan dinas dari total pagu Balai POM di Pangkal Pinang di blokir oleh Kementerian Keuangan. Pada bulan Februari 2025 dilaksanakan Efisiensi/Rekonstruksi anggaran berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sehingga total blokir Balai POM di Pangkal Pinang sebesar Rp **7.765.140.000.**

Pada Triwulan I 2025, total realisasi anggaran Balai POM di Pangkal Pinang yaitu sebesar **Rp 1.576.682.679** dari pagu yang bisa digunakan (diluar pagu blokir) sebesar **Rp 13.812.544.000** dengan capaian sebesar **11,41%** atau **7,31%** bila dibandingkan dengan Pagu Total (dengan pagu blokir). Penyebab masih belum maksimalnya penyerapan anggaran salah satunya pada Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium yang pada awalnya diarahkan untuk diblokir sehingga proses pengadaan yang sudah sempat dilakukan Kontrak terhambat dan ditahan terlebih dahulu yang kemudian akun Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium kembali dibuka.

Balai POM di Pangkal Pinang akan melakukan perbaikan kinerja untuk indikator yang belum memuaskan sehingga dapat terwujud manajemen kinerja yang lebih produktif, efektif, dan efisien.

HIGHLIGHT

BPOM di Pangkal Pinang berhasil mendapatkan predikat WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi) pada tahun 2024. Penghargaan ini diberikan bersamaan dengan diselenggarakannya Perayaan HUT BPOM pada tanggal 31 Januari 2025 bertempat di BPOM RI yang diberikan oleh Kepala Badan POM. Dengan adanya predikat ini semakin menguatkan komitmen Balai POM di Pangkal Pinang untuk menegakkan budaya anti korupsi, yang sejalan dengan cita-cita lembaga dalam mewujudkan WBK dan menjaga kepercayaan masyarakat.



Pada tahun 2025, BPOM di Pangkal Pinang memiliki tiga Inovasi baru untuk memenuhi kebutuhan Masyarakat terutama di Kepulauan Bangka Belitung. Tiga Inovasi itu adalah: 1. Inovasi Pulau Bangka, yaitu penggalangan lintas sektor untuk bersinergi melawan kejahatan obat dan makanan, 2. Inovasi Amoi Cakep, kepanjangan dari Aplikasi Monitoring CAPA Pelaku Usaha. Berupa pemanfaatan google spreadsheet untuk memantau ketepatan waktu pengiriman surat TL pemeriksaan sarana, balasan CAPA dari Pelaku Usaha, dan evaluasi CAPA. 3. Inovasi Lada Bangka-48, singkatan dari Layanan Handal Analisis Barang Bukti Narkotika 48 Jam. Merupakan percepatan waktu uji pengujian narkotika dari lima hari menjadi dua hari.



Melalui Inovasi Pulau Bangka, Tim Penindakan BPOM di Pangkal Pinang melakukan kegiatan penggalangan dalam bentuk koordinasi ke Ditreskrimsus Korwas PPNS POLDA Kep. Bangka Belitung dengan agenda memperkuat kerjasama dalam bantuan taktis dan teknis sebagai mendukung proses penegakan hukum. Kegiatan selanjutnya Tim Kerja Penindakan melaksanakan kegiatan diskusi dalam bentuk kolaborasi dan koordinasi bersama Balai Kekarantinaan Kesehatan Pangkal Pinang saling mendukung proses penegakan hukum dan pertukaran informasi terkait proses penyidikan untuk meminimalisasi kesalahan sehingga memperkecil adanya kemungkinan praperadilan dan mempercepat proses penegakan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna memberikan perlindungan kepada masyarakat Bangka Belitung.



Agen perubahan Balai POM di Pangkal Pinang meraih penghargaan sebagai **"Tim Agen Perubahan Reformasi Birokrasi Terbaik II Tahun 2024, Kategori Unit Pelaksana Teknis"**. Sosok Agen Perubahan berperan penting dalam membangun Zona Integritas dan menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, pelayanan publik prima, birokrasi yang akuntabel, serta SDM yang profesional. Penghargaan ini diberikan bersamaan dengan diselenggarakannya Perayaan HUT BPOM pada tanggal 31 Januari 2025 bertempat di BPOM RI.



Pada tanggal 31 Januari 2025 bertepatan dengan Perayaan HUT BPOM Ke-24, BPOM di Pangkal Pinang meraih Penghargaan **"Unit Kerja dengan Penilaian Kinerja Organisasi tertinggi Ke-1 Tahun 2024".** Dengan penghargaan ini menjadi bentuk komitmen Balai POM di Pangkal Pinang untuk terus mempertahankan dan meningkatkan terus kinerja dan pelayanan prima kepada Masyarakat.



Pada Bulan Ramadhan ini, Balai POM di Pangkal Pinang kembali melakukan pemeriksaan jajanan buka puasa. Kegiatan pemeriksaan jajanan buka puasa ini merupakan agenda rutin yang dilakukan setiap tahunnya oleh Balai POM Pangkal Pinang dalam rangka menjamin keamanan pangan yang akan dikonsumsi oleh masyarakat selama bulan Ramadhan. Pengujian yang dilakukan meliputi uji rhodamin B, metanil yellow, boraks dan formalin. Jumlah sampel yang diuji sebanyak 27 (Dua Puluh Tujuh) sampel dan hasil uji menunjukkan tidak ditemukannya bahan berbahaya pada sampel pangan yang diuji.



Pada tanggal 13 Februari 2025 Balai POM di Pangkal Pinang menjadi narasumber pada kegiatan Pelatihan Keamanan Pangan Siap Saji yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Kota Pangkal Pinang. Pelatihan ini berlangsung di Ruang Gedung Serbaguna Kodim 0413/Bangka dengan peserta Penanggung Jawab Tempat Pengelolaan Pangan dan Para Penjamah Pangan dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kota Pangkal Pinang. Adapun tujuan kegiatan ini supaya dapat meningkatkan pengetahuan Penjamah Makanan sebagai salah satu upaya BPOM dalam mendukung Tujuan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sehingga dapat berjalan dengan baik dan makanan yang dikonsumsi mengandung gizi serta aman. Keamanan Pangan dimaksudkan untuk mencegah cemaran baik cemaran Fisik, Biologis maupun Kimia yang dapat membahayakan kesehatan.



Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Kepulauan Bangka Belitung menggelar Rapat Kerja Daerah (RAKERDA) 2025 di Pangkal Pinang. Kegiatan ini bertujuan untuk menyusun program kerja tahun 2025 dan merancang proyeksi program tahun 2026 guna memperkuat pembinaan karakter pemuda melalui kegiatan kepramukaan. RAKERDA ini dihadiri oleh perwakilan Kwartir Cabang se-Kepulauan Bangka Belitung, Ketua Majelis Pembimbing Daerah yang diwakili oleh Kakak Widya Kemala Sari, serta para pimpinan satuan karya dan andalan daerah. Agus Riyanto, selaku Ketua MABI SAKA POM Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Kep. Bangka Belitung turut hadir pada kegiatan tersebut. Selama RAKERDA, peserta mengikuti dua sidang pleno, yang membahas berbagai agenda strategis, antara lain: Penggunaan Aplikasi Ayo Pramuka dan Pendataan KTA Nasional, Program Partisipasi Pramuka Berkebutuhan Khusus (PBK) di Jakarta. dll.



Balai Pengawas Obat dan Makanan (POM) di Pangkal Pinang mengadakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Internal dengan judul "Verifikasi Peralatan Laboratorium dan Evaluasi Sertifikat Kalibrasi". Kegiatan ini dilaksanakan selama dua hari di kantor Balai POM Pangkal Pinang, dengan mengundang narasumber dari Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan (P3OMN) Tashdiq Anwarulloh. Kegiatan ini dirancang untuk meningkatkan pengetahuan mengenai cara verifikasi peralatan laboratorium (pengecekan antara) dan evaluasi sertifikat hasil kalibrasi. Materi yang disampaikan oleh narasumber dalam Bimtek meliputi pengantar kalibrasi, verifikasi/pengecekan antara alat laboratorium, kalibrasi peralatan volumetrik dan interpretasi sertifikat kalibrasi.



BAB I

PENDAHULUAN





BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Tantangan pengawasan obat dan makanan semakin hari semakin besar. Kemajuan teknologi telah membawa perubahan-perubahan yang cepat dan signifikan pada industri obat dan makanan. Dengan dukungan kemajuan teknologi transportasi dan *entry barrier* yang makin tipis dalam perdagangan internasional, maka produk-produk tersebut dalam waktu yang amat singkat dapat menyebar ke berbagai negara dengan jaringan distribusi yang sangat luas dan mampu menjangkau seluruh strata masyarakat.

Konsumsi masyarakat cenderung terus meningkat, seiring dengan perubahan gaya hidup masyarakat termasuk pola konsumsinya. Sementara itu pengetahuan masyarakat masih belum memadai untuk dapat memilih dan menggunakan produk secara tepat, benar, dan aman. Di lain pihak, iklan dan promosi secara gencar mendorong konsumen untuk mengonsumsi secara berlebihan dan sering kali tidak rasional. Perubahan teknologi produksi, sistem perdagangan internasional dan gaya hidup konsumen tersebut pada realitanya meningkatkan risiko dengan implikasi yang luas pada kesehatan dan keselamatan konsumen. Untuk itu, Indonesia harus memiliki Sistem Pengawasan Obat dan Makanan (SisPOM) yang efektif dan efisien yang mampu mendeteksi, mencegah, dan mengawasi produk-produk termaksud untuk melindungi keamanan, keselamatan dan kesehatan konsumennya baik di dalam maupun di luar negeri.

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan upaya yang cukup strategis karena berdampak langsung pada perlindungan konsumen serta menjadi unsur penting dalam upaya meningkatkan daya saing produk di tingkat daerah dan nasional. Atas dasar tersebut, Balai POM di Pangkal Pinang sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan POM mempunyai peran strategis dalam pencapaian *outcome* tersebut, terlebih dalam melaksanakan pengawasan Obat dan Makanan di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Laporan Kinerja Balai POM di Pangkal Pinang Triwulan I Tahun 2025 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai unit pelaksana teknis pengawas obat dan makanan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

1.2 GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan maka Badan POM menerbitkan Peraturan Badan POM Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan serta berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Pengawas Obat Dan Makanan, ditetapkan Balai POM di Pangkal Pinang sebagai Unit Pelaksana Teknis Badan POM dengan wilayah kerja 5 Kabupaten Kota di Pulau Bangka.

Tugas Pokok dan Fungsi Balai POM Pangkal Pinang

Kegiatan pengawasan obat dan makanan tidak dapat dilakukan secara parsial hanya pada produk akhir yang beredar di masyarakat, akan tetapi harus dilakukan secara komprehensif dan sistematis, dari hulu sampai hilir.

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Pengawas Obat Dan Makanan, tugas pokok dan fungsi Balai POM di Pangkal Pinang sebagai UPT Badan POM adalah sebagai berikut:

1. Tugas Pokok

Melaksanakan kebijakan teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

2. Fungsi UPT

1. Dalam melaksanakan tugas pengawasan Obat dan Makanan, BPOM menyelenggarakan fungsi:
    a. Penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
    b. Pelaksanaan kebijakan nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan;

c. Penyusunan dan penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar;
d. Pelaksanaan Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar;
e. Koordinasi pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan instansi pemerintah pusat dan daerah;
f. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
g. Pelaksanaan penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
h. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM;
i. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggug jawab BPOM;
j. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BPOM; dan
k. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM.

2. Pengawasan Sebelum Beredar merupakan pengawasan Obat dan Makanan sebelum beredar sebagai tindakan pencegahan untuk menjamin Obat dan Makanan yang beredar memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk yang ditetapkan.
3. Selama Beredar adalah pengawasan Obat dan Makanan selama beredar untuk memastikan Obat dan Makanan yang beredar memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/ manfaat, dan mutu produk yang ditetapkan serta tindakan penegakan hukum.

4. Analisis Lingkungan Strategis

A. Internal

Balai POM di Pangkal Pinang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di bidang pengawasan obat dan makanan didukung oleh sumber daya baik segi Sumber Daya Manusia (SDM) maupun sarana dan prasarana.

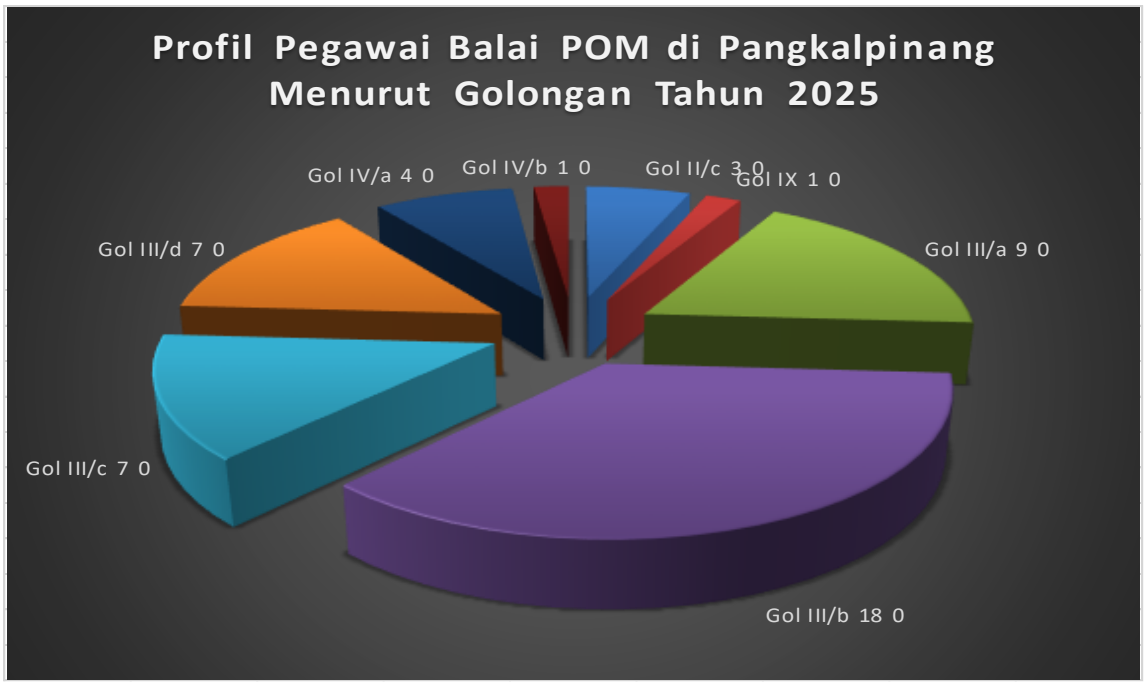
Sarana dan Prasarana

Tabel 1.2 Sarana dan Prasarana Balai POM di Pangkal Pinang

Luas Tanah & Bangunan	Rumah Dinas	Listrik	Sarana Komunikasi
L.Tanah 5526 m^2 **L.Bangunan** 2075 m^2 **Luas Kantor** 780 m^2 **Luas Laboratorium** 1295 m^2	Belum ada, Rumah dinas berupa rumah kontrak	207.000 watt - **kantor** : 33.000 watt - **Laboratorium**: 174.000 watt	- **Saluran telepon** (Ruang pimpinan, ULPK, dan Tata Usaha) - Internet jaringan Moratelindo - Tiap ruangan terhubung dengan telepon extension sebanyak 31 unit - Conference Video - Lan sever internal

Sumber Daya Manusia

Pada Triwulan I 2025, Balai POM di Pangkal Pinang memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) sebanyak 50 (Lima Puluh) orang yang terdiri dari 2 orang Struktural (1 orang Kepala Balai dan 1 orang Kepala Sub Bagian Tata Usaha), 12 orang staf tata usaha, 21 orang staf pengujian, 7 orang staf Pemeriksaan, 4 orang staf Penindakan, dan 4 orang staf Seksi Informasi dan Komunikasi. Selain PNS, terdapat 4 orang PPNPN di Balai POM di Pangkal Pinang dan 12 orang tenaga outsourcing.



Gambar 1.3. Profil Pegawai Balai POM di Pangkal Pinang berdasar Golongan Triwulan I 2025

B. Eksternal

Propinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan pemekaran dari Provinsi Sumatera Selatan yang terbentuk berdasarkan UU No. 27 Tahun 2000. Berdasarkan kondisi tersebut wilayah kerja Balai POM di Pangkal Pinang digambarkan sebagai berikut:

1. Data Umum Wilayah Kerja

a. Luas Wilayah Kerja

Total luas wilayah daratan dan laut Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencapai luas 81.725,06 km2, Luas daratan setidaknya mencapai 16.424,06 kilometer persegi, atau 20,10 persen dari total wilayah. Sementara luas laut kurang lebih 65.301 kilometer persegi, atau 79,90 persen dari total wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Perbatasan wilayah:

- di sebelah Utara : Laut Natuna
- di sebelah Selatan : Laut Jawa
- di sebelah Barat : Selat Bangka
- di sebelah Timur : Selat Karimata



Gambar 1.4 Peta Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

b. Jumlah Kabupaten/Kota

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan gugusan dua pulau yaitu Pulau Bangka dan Pulau Belitung serta terdapat pulau-pulau kecil disekitarnya. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki 6 kabupaten dan 1 kota, yaitu:

a. Kabupaten Bangka,
b. Kabupaten Bangka Tengah,
c. Kabupaten Bangka Barat,
d. Kabupaten Bangka Selatan,
e. Kabupaten Belitung,
f. Kabupaten Belitung Timur dan
g. Kota Pangkal Pinang.

c. Pola Transportasi Balai POM Pangkal Pinang di Wilayah Kerja

Pola transportasi Balai POM di Pangkal Pinang adalah menggunakan transportasi darat, transportasi laut dan transportasi udara.

d. Lama Waktu Perjalanan ke Wilayah Kerja

Untuk menjangkau wilayah Pulau Bangka perjalanan dapat ditempuh menggunakan transportasi darat dengan waktu 1-3 jam.

e. Waktu yang diperlukan di satu Wilayah Kerja

Waktu yang diperlukan petugas Balai POM Pangkal Pinang di satu wilayah kerja berkisar antara 2-3 hari.

1.3 STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi Balai POM di Pangkal Pinang seperti terlihat pada gambar 1.1 disusun berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Pengawas Obat Dan Makanan.



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Balai POM di Pangkal Pinang

1. Kepala UPT BPOM menyampaikan laporan kepada Kepala Badan mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengawasan Obat dan Makanan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
2. Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, teknologi informasi komunikasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, tata laksana, kearsipan, tata persuratan, kerumahtanggaan dan administrasi penjaminan mutu.
3. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama,

Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud, ditetapkan Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas masing-masing. Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan fungsional sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

1.4 ISU STRATEGIS

Dalam melaksanakan pengawasan obat dan makanan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung muncul isu-isu strategis yang harus diperhatikan, antara lain:

A. ISU INTERNAL

1. Pengujian rutin berpotensi melewati batas waktu (timeline) karena adanya perubahan kebijakan dari 30 hari kerja menjadi 15 hari kerja.
2. Relaksasi terhadap pemblokiran anggaran sampling dan pengujian menyebabkan target sampel dikembalikan ke target awal tahun, sedangkan waktu pelaksanaan tersisa hanya delapan bulan.
3. Keterbatasan anggaran perbaikan dan pemeliharaan alat laboratorium menyebabkan hanya alat prioritas yang dapat diperbaiki.
4. Penyesuaian kebijakan pengawasan dari pusat menuntut UPT untuk cepat beradaptasi dan meningkatkan efektivitas koordinasi operasional.
5. Data dukung untuk penilaian Indeks Pelayanan Publik, khususnya terkait layanan untuk kelompok rentan, belum sepenuhnya terpenuhi.
6. Pemblokiran anggaran di awal tahun yang baru direlaksasi pada triwulan II menyebabkan tertundanya kegiatan pengawasan sarana dan produk.
7. Ruang arsip (Record Center) belum memenuhi standar yang dipersyaratkan.
8. Aplikasi Dashboard Penindakan belum berjalan secara optimal.
9. Ruangan untuk pemeriksaan tersangka belum memadai sehingga belum mendukung kenyamanan pemeriksaan.
10. Alat pengolah data di bagian Penindakan belum sesuai standar spesifikasi dari Direktorat Siber.
11. Pengelolaan pengembangan kompetensi pegawai dari tahap perencanaan hingga evaluasi belum dimonitor secara optimal.

12. Masih ditemukan pencairan anggaran dengan dokumen pendukung yang belum lengkap.
13. Pengelolaan persediaan belum optimal, terdapat selisih antara data gudang dan aplikasi SAKTI.
14. Belum seluruh pegawai memiliki perangkat pengolah data yang sesuai standar, sehingga sebagian menggunakan perangkat pribadi.
15. Penerapan Sistem Manajemen Mutu Terintegrasi (ISO 9001:2015, ISO 17025:2017, dan ISO 37001:2016) masih dalam proses.
16. Ruang laboratorium untuk pengujian Obat, Obat Tradisional, dan Kosmetik masih terbatas, berpotensi menyebabkan ketidaknyamanan dan mengganggu keselamatan kerja.
17. Pengelolaan manajemen risiko belum sepenuhnya sesuai pedoman yang berlaku.
18. Pemahaman pegawai terhadap pengelolaan SAKIP masih belum optimal.
19. Kualitas pelaksanaan anggaran belum optimal dan masih menjadi temuan dalam audit Inspektorat.
20. Beberapa pengadaan barang/jasa melalui e-purchasing belum diselesaikan, yang mempengaruhi kualitas pengelolaan PBJ.
21. Sulitnya memantau ketepatan waktu balasan dan evaluasi CAPA dari pelaku usaha, serta status CAPA (open/closed) sarana, menghambat tindak lanjut pengawasan.
22. Perubahan tools penilaian SKL dengan komposisi baru (50% SRL, 20% Kompetensi Laboratorium, 20% Peralatan, 10% MA Terverifikasi) membutuhkan penyesuaian strategis.
23. Perubahan metode penilaian SRL dari "pernah dan mampu uji" menjadi "harus melalui verifikasi MA" menimbulkan kebutuhan pemisahan kegiatan peningkatan SRL dan MA Terverifikasi.
24. Penumpukan sampel dan pemangkasan timeline pengujian (30 menjadi 15 hari kerja) mengurangi waktu untuk verifikasi MA dan mempengaruhi pencapaian SKL.
25. Timeline pengujian 15 hari kerja berpotensi menimbulkan kelelahan (exhausted) bagi analis jika tidak diikuti penyesuaian beban kerja.
26. Penambahan peralatan utama laboratorium diperlukan untuk mendukung percepatan timeline pengujian.

B. ISU EKSTERNAL

1. Beredar isu atau hoaks mengenai Obat dan Makanan serta sentimen negatif terhadap BPOM.
2. Pengetahuan pelaku UMKM masih rendah terkait perizinan melalui OSS terbaru.
3. Kegiatan penggalangan pemangku kepentingan belum terlaksana secara optimal.
4. Keselamatan petugas terancam saat melakukan operasi penindakan atau penyidikan.
5. Peningkatan peredaran produk ilegal dan berbahaya melalui platform digital/online.
6. Terjadi penolakan dari sarana saat dilakukan pengawasan.
7. Komitmen pelaku UMKM untuk melanjutkan proses pendaftaran izin edar masih rendah.
8. PPK dan pejabat pengadaan mengalami kesulitan dalam membeli produk dengan nilai TKDN sesuai aturan.
9. Terdapat tumpang tindih program di desa dan sekolah dari kementerian/lembaga lain yang menggunakan metode serupa, sehingga menghambat kelanjutan program Keamanan Pangan Terpadu.
10. Ketidakpuasan masyarakat terhadap layanan publik disebabkan oleh ekspektasi yang tinggi terhadap BPOM.
11. Biaya PNBP menjadi kendala bagi pelaku usaha mikro (rumahan) dalam pendaftaran produk kosmetika.
12. Masyarakat membutuhkan akses informasi dan edukasi obat dan makanan yang lebih mudah dan berbasis digital.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA





BAB II PENGUKURAN KINERJA

2.1 URAIAN SINGKAT RENSTRA

Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja pengawasan obat dan makanan, maka disusun Rencana Strategis (Renstra) yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Dengan ditetapkannya RPJMN 2025-2029, maka Badan Pengawas Obat dan Makanan menyusun Renstra Tahun 2025-2029 yang menjadi dasar ditetapkannya Renstra Balai POM di Pangkal Pinang Tahun 2025-2029.

Rencana Strategis (Renstra) Balai POM di Pangkal Pinang 2025-2029 merupakan suatu dokumen perencanaan indikatif dan memuat program-program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Balai POM di Pangkal Pinang. Rencana Strategis Balai POM di Pangkal Pinang 2025-2029 akan menjadi acuan dalam penyusunan rencana kinerja tahunan dalam rangka pelaksanaan pembangunan di bidang pengawasan Obat dan Makanan dalam kurun waktu 2025-2029. Renstra ini dibuat sesuai dengan SOTK baru Badan POM berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Pengawas Obat Dan Makanan.

Secara ringkas, Visi, Misi, Budaya Organisasi dan Tujuan Balai POM di Pangkal Pinang sesuai dengan Badan POM adalah sebagai berikut:

I. Visi

Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045

II. Misi

Membangun SDM unggul terkait Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa

Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan

Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat.

Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

III. Budaya Organisasi

Profesional
Menegakkan profesionalisme dengan integritas, objektivitas, ketekunan dan komitmen yang tinggi

Integritas
Konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan

Kredibilitas
Dapat dipercaya dan diakui oleh masyarakat luas, nasional dan internasional

Kerjasama Tim
Mengutamakan keterbukaan, saling percaya dan komunikasi yang baik

Inovatif
Mampu melakukan pembaruan sesuai ilmu pengetahuan dan teknologi terkini

Responsif / Cepat Tanggap
Antisipatif dan responsive dalam mengatasi masalah

IV. TUJUAN

1) Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan.
2) Meningkatnya kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknolog informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.
3) Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM.
4) Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang aman dan bermutu.
5) Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan.
6) Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan.
7) Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dai akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima.

Sasaran Strategis

Sasaran strategis ini disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai Balai POM di Pangkal Pinang dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki Balai POM di Pangkal Pinang. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2025-2029) ke depan diharapkan Balai POM di Pangkal Pinang akan dapat mencapai sasaran

strategis. Sasaran strategis Balai POM di Pangkal Pinang selama lima tahun (2025–2029) disusun dengan mengacu pada Renstra Badan POM 2025–2029. Sasaran strategis POM di Pangkal Pinang tahun 2025 telah ditetapkan sebagai berikut:

1. Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT;
2. Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT;
3. Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT;
4. Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu;
5. Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT;
6. Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT;
7. Layanan Publik UPT yang prima;
8. Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal.

2.2 RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

Berikut tabel Rencana Kinerja Tahunan Balai POM di Pangkal Pinang Tahun 2025.

Tabel 2.1. Tabel Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2025

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target 2025
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26
		Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
		Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100
		Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
2	Meningkatnya tindaklanjut rekomendasi hasil pengawasan oleh lintas sektor	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang disampaikan ke stakeholder tepat waktu	100
3	Meningkatnya Efektivitas pemeriksaan sarana	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa	100

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target 2025
	produksi dan distribusi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	
		Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
		Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
		Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	100
5	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	69,4
6	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	91
		Jumlah sekolah pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	7
		Jumlah desa pangan aman	3
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target 2025
7	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	80
8	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	78
9	Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif	Jumlah Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan oleh UPT	14
10	Layanan Publik UPT yang prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	4,7
11	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Nilai Pembangunan ZI UPT	90,55
		Nilai AKIP UPT	82,36
		Nilai Kinerja Anggaran UPT	90,87
		Indeks Manajemen Risiko UPT	3,2

RKT ini menjadi dasar dalam penyusunan anggaran tahun 2025. Pada bulan September 2024 dilaksanakan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga yang mana BPOM di Pangkal Pinang mendapatkan pagu anggaran tahun 2025 sebesar Rp 21.577.684.000. Total Pagu tersebut dijabarkan kedalam setiap pagu untuk 22 Rincian Output

yang akan dilakukan reviu terakhir oleh Inspektorat yang kemudian ditetapkan DIPA nya pada bulan Desember 2024. Pada DIPA

2.3 PERJANJIAN KINERJA (PK)

Penetapan Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 disebut sebagai Perjanjian Kinerja

Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur, sebagai wujud komitmen dari penerima amanah dengan pemberi amanah, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, dan menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.

Kepala Balai POM di Pangkal Pinang menandatangani Perjanjian Kinerja memuat Sasaran Strategis yang seharusnya terwujud pada tahun 2025 dengan indikator kinerja utama yang relevan dengan sasaran atau kondisi yang diwujudkan serta target yang akan dicapai atau seharusnya dicapai oleh Balai POM di Pangkal Pinang serta didukung dengan alokasi anggaran pada tahun 2025 sebesar Rp 21.577.684.000

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Balai POM di Pangkal Pinang Tahun 2025

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target 2025
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85
		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target 2025
		Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80
		Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100
		Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	84
		Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
		Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80
		Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	94,75
		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80
		Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	85,40

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target 2025
2	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	73,7
3	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	85,99
		Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	7
		Jumlah desa pangan aman	3
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1
4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	80
5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	90
6	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan oleh UPT	90

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target 2025
7	Layanan Publik UPT yang prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	4,7
8	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Nilai Pembangunan ZI UPT	90,3
		Nilai AKIP UPT	81,7
		Nilai Kinerja Anggaran UPT	5
		Indeks Manajemen Risiko UPT	2,906

Sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 53 Tahun 2014, maka BPOM di Pangkal Pinang sebagai unit kerja eselon III wajib menyusun Perjanjian Kinerja sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah (Kepala BPOM di Pangkal Pinang) dengan pemberi amanah (Kepala Badan POM RI) untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparasi dan kinerja aparatur. Pengukuran akuntabilitas dengan melakukan klasifikasi *output* dan *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 ini terdapat perubahan/perbedaan jika dibandingkan dengan RKT Tahun 2025, yaitu:

1. Jumlah sasaran strategis mengalami pengurangan dari 11 menjadi 8. Terdapat 2 sasaran strategis yang digabung kedalam 1 sasaran strategis dan ada 1 sasaran strategis yang dihilangkan karena BPOM di Pangkalpinang tidak memiliki sarana pengawasan untuk pencapaian sasaran strategis dimaksud.
2. Jumlah IKU berkurang dari 25 menjadi 24, terdapat 1 IKU yang dihilangkan karena BPOM di Pangkalpinang tidak memiliki sarana pengawasan untuk mencapai IKU dimaksud.
3. Terdapat penyesuaian nomenklatur/penamaan pada 7 IKU, berdasarkan hasil diskusi dan kesepakatan antara Roren, Unit Pengampu dan UPT dalam rangka upaya pemenuhan IKU yang SMART.

4. Terdapat perubahan target pada 16 IKU, disebabkan adanya perubahan definisi operasional dan hasil perhitungan dengan mempertimbangkan realisasi tahun sebelumnya serta kondisi lain yang relevan.

Perubahan secara rinci antara RKT dan PK tahun 2025 sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut :

RKT Tahun 2025				Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025				Penyebab Perubahan Target
No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target 2025	No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target 2025	
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase Sediaan Farmasi yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100	1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	Perubahan Definisi Operasional
		Persentase sarana pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM	26			Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26	-
		Persentase pangan olahan dalam kemasan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100			Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	Perubahan Definisi Operasional
		Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100			Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	-
		Persentase PIRT yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100			Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	Perubahan Definisi Operasional

RKT Tahun 2025				Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025				Penyebab Perubahan Target
No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target 2025	No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target 2025	
2	Meningkatnya tindaklanjut rekomendasi hasil pengawasan oleh lintas sektor	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang disampaikan ke stakeholder tepat waktu	100			Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	84	Perubahan Definisi Operasional dan penyesuain target berdasarkan baseline capaian 2 tahun terakhir
3	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100			Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100	-
		Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100			Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	Perubahan Definisi Operasional dan penyesuain target berdasarkan baseline capaian 2 tahun terakhir
		Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100			Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	94,75	Perubahan Definisi Operasional sehingga menyebabkan perubahan dalam perhitungan capaian indikator
		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang	100			Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang	80	Perubahan Definisi Operasional sehingga menyebabkan perubahan

RKT Tahun 2025				Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025				Penyebab Perubahan Target
No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target 2025	No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target 2025	
		diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan				diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan		dalam perhitungan capaian indikator
		Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	100			Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	85,40	Perubahan Definisi Operasional sehingga menyebabkan perubahan dalam perhitungan capaian indikator
4	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	Persentase sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100					dihilangkan dari IKU karena tidak ada sarana produksi pangan fortifikasi di wilayah kerja pengawasan BPOM di Pangkalpinang
5	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	69,4	2	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	73,7	1. Adanya perubahan tools dari PPPOMN 2. hasil *exercise* dengan tools terbaru menggunakan data tahun 2024 diperoleh adanya kenaikan nilai yang dijadikan *baseline* penetapan target PK 2025

RKT Tahun 2025				Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025				Penyebab Perubahan Target
No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target 2025	No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target 2025	
6	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	91	3	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	85,99	Adanya perubahan tools penilaian survei tingkat efektifitas KIE
		Jumlah sekolah pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	7			Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	7	Terjadi perubahan pada Petunjuk Teknis sehingga berubah menjadi Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan
		Jumlah desa pangan aman	3			Jumlah desa pangan aman	3	-
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1			Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1	-
7	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	80	4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	80	-

RKT Tahun 2025				Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025				Penyebab Perubahan Target
No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target 2025	No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target 2025	
8	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	78	5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	90	Perubahan Definisi Operasional dan perubahan *tools* perhitungan Capaian Indikator
9	Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif	Jumlah Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan oleh UPT	14	6	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90	Perubahan Definisi Operasional
10	Layanan Publik UPT yang Prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	4,7	7	Layanan Publik UPT yang prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	4,7	-
11	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	90,55	8	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Nilai Pembangunan ZI UPT	90,3	Hasil *exercise* dengan mempertimbangkan realisasi tahun sebelumnya dan data lainnya yang relevan

RKT Tahun 2025				Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025				Penyebab Perubahan Target
No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target 2025	No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target 2025	
		Nilai AKIP UPT BPOM	82,36			Nilai AKIP UPT	81,7	1. Perubahan Definisi Operasional 2. Hasil *exercise* dengan mempertimbangkan realisasi tahun sebelumnya dan data lainnya yang relevan
		Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	90,87			Nilai Kinerja Anggaran UPT	5	Perubahan Definisi Operasional
		Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	3,2			Indeks Manajemen Risiko UPT	2,906	Hasil *exercise* dengan mempertimbangkan realisasi tahun sebelumnya

2.4 RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA (RAPK)

Berikut di bawah ini tabel Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) Tahun 2025 sesuai penyusunan Renstra Balai POM di Pangkal Pinang,

Tabel 2.3 Tabel Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Balai POM di Pangkal Pinang Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B010	B011	B012	
1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	351,455,000
2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO												26	4,500,000
3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	159,645,000
4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	8,601,600
5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjut		85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	9,830,400

No	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B010	B011	B012	
	i sesuai ketentuan													
6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	5,071,000
7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	29,815,000
8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	12,300,000
9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	94.75	94.75	94.75	94.75	94.75	94.75	94.75	94.75	94.75	94.75	94.75	94.75	361,229,000
10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	200,618,000

No	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B010	B011	B012	
	ditindaklanjuti sesuai ketentuan													
11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	85.4	85.4	85.4	85.4	85.4	85.4	85.4	85.4	85.4	85.4	85.4	85.4	15,611,000
12	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium			72.9	72.9	72.9	73.1	73.1	73.1	73.2	73.2	73.2	73.7	10,519,163,000
13	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT			85.99	85.99	85.99	85.99	85.99	85.99	85.99	85.99	85.99	85.99	227,401,000
14	Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan				20	40	60	60	60	60	75	95	7	335,485,000
15	Jumlah desa pangan aman				25	25	45	45	65	65	75	85	3	422,682,000
16	Jumlah pasar pangan aman				20	60	60	60	90	90	100	100	1	142,414,000

No	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B010	B011	B012	
	berbasis komunitas													
17	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan			5	10	20	25	30	40	50	60	70	80	28,433,000
18	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT				7.5	27.5	50	50	50	57.5	77.5	90	90	241,644,000
19	Jumlah Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan oleh UPT	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	99,292,000
20	Indeks Pelayanan Publik UPT												4,7	108,459,000
21	Nilai Pembangunan ZI UPT												90,3	7,371,807,000
22	Nilai AKIP UPT												81,7	22,200,000

No	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B010	B011	B012	
23	Nilai Kinerja Anggaran UPT												5	366,994,000
24	Indeks Manajemen Risiko UPT												2,906	413,034,000
TOTAL														21,577,684,000

Dalam pencapaian sasaran dan indikator kinerja dalam PK harus didukung oleh kegiatan dan anggaran, serta dipantau secara berkala. Untuk itu perlu disusun Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK). RAPK memuat target kinerja per bulan dan anggaran per indikator kinerja yang dilengkapi dengan detil aktivitas pendukung. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja merupakan dasar pemantauan tiap bulan digunakan untuk penilaian kinerja secara berkala. RAPK tahun 2025 Balai POM di Pangkal Pinang secara lengkap dapat dilihat pada Lampiran 4.

2.5 METODE PENGUKURAN

Pada Penetapan Kinerja Balai POM di Pangkal Pinang tahun 2025 terdapat 8 sasaran strategis dengan 24 indikator kinerja yang berkontribusi pada pencapaian sasaran.

Nilai Kinerja Organisasi (NKO) di lingkungan BPOM terdiri dari NKO Periodik dan NKO Tahunan. NKO Periodik NKO periodik merupakan nilai kinerja unit/satuan kerja secara triwulanan, sedangkan NKO Tahunan NKO tahunan merupakan nilai kinerja unit/satuan kerja pada akhir tahun anggaran. Untuk dapat mengukur kinerja, baik kinerja sasaran maupun kinerja kegiatan digunakan alat ukur berupa indikator yang telah ditetapkan. Rumus yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja adalah sebagai berikut:

1. Apabila semakin **tinggi** angka realisasi menunjukkan capaian yang semakin **baik**, maka digunakan rumus no. 1 sbb:

$$\% \text{ capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

a) Hasil NKO dikelompokan menjadi 5 (lima) predikat, yaitu 1) Sangat Kurang; 2) Kurang; 3) Butuh Perbaikan; 4) Baik; dan 5) Istimewa dengan rincian sesuai tabel berikut:

Tabel 2.5. Kriteria Predikat NKO

NILAI KINERJA ORGANISASI (NKO)	PREDIKAT PKO
X > 100%	ISTIMEWA
80% < X ≤ 100%	BAIK
60% < X ≤ 80%	BUTUH PERBAIKAN
20% < X ≤ 60%	KURANG
0% ≤ X ≤ 20%	SANGAT KURANG

Nilai Akhir: {(1)x[(100%-(2)]x100)

A. Normalisasi capaian perjanjian kinerja

Dengan memperhatikan prinsip PKO sebagaimana disebut di atas yaitu terkait dengan prinsip berorientasi hasil serta mempertimbangkan koreksi terhadap anomali capaian kinerja instansi dan unit/satuan kerja, maka dipandang perlu melakukan normalisasi capaian perjanjian kinerja sebagaimana ketentuan berikut:

i. Jika capaian kinerja setiap indikator >110% maka akan dinormalisasi menjadi 110%; dan
ii. Jika capaian kinerja setiap indikator ≤110% maka tidak dilakukan normalisasi.

B. Koreksi normalisasi capaian perjanjian kinerja berdasarkan predikat akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah

Setelah normalisasi capaian perjanjian kinerja dilakukan terhadap masingmasing indikator maka hasil normalisasi

tersebut dikoreksi dengan memperhatikan predikat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang bersumber dari hasil evaluasi sebagaimana gambar berikut.

b) Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun bersangkutan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen renstra. Capaian kinerja hasil perbandingan ini dinyatakan dalam kategori berikut:

Tabel 2.6 Kriteria Predikat realisasi kinerja sampai dengan tahun bersangkutan dengan target jangka menengah

Kategori	Penjelasan	Notifikasi Warna
Tercapai/Melampaui	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. tahun n dibandingkan dengan target jangka menengah (akhir periode Renstra) sebesar ≥ 100%.	▲
Akan Tercapai	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. tahun n dibandingkan dengan target jangka menengah (akhir periode Renstra) sebesar 70% - <100% (70 ≤ x < 100).	△
Perlu Upaya Keras	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. tahun n dibandingkan dengan target jangka menengah (akhir periode Renstra) sebesar <70% (x < 70).	▼

c) Capaian indikator kinerja dinyatakan dalam kategori sebagai berikut:

Tabel 2.7 Kriteria Predikat Indikator Kinerja

Kategori	Capaian IKU	Notifikasi Warna
Tidak Dapat Disimpulkan	>110%	●
Sangat Baik	100% < x ≤ 110%	●
Baik	90% < x ≤ 100%	●
Cukup	60% ≤ x ≤ 90%	●
Kurang	<60%	●

Mekanisme pelaksanaan pengukuran dan evaluasi kinerja BPOM di Pangkalpinang:

1. Kepala Balai menunjuk tim monev yang terdiri dr katim setiap fungsi yang disahkan dalam SK
2. Ketua tim menunjuk penanggung jawab data untuk di masing-masing fungsi
3. Penanggung jawab data akan menginput data pada media pengumpulan data internal (Madu Pelawan) dan diverifikasi oleh ketua tim. Apabila terjadi kesalahan data yang sudah diinput, dapat dilakukan perbaikan hanya pada bulan berjalan
4. Penanggung jawab data di Tata Usaha (sesuai SK Kepala BPOM) memeriksa Kelengkapan data kinerja yang diinput pada Madu Pelawan
5. Tim monev melaksanakan rapat evaluasi setiap bulannya untuk membahas data kinerja.
6. Penanggung jawab data di Tata Usaha (sesuai SK Kepala BPOM) melakukan penginputan dan pelaporan monev pada media yang telah ditetapkan Badan POM.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA





Made with PosterMyWall.com

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA

Pada subbab analisis capaian kinerja ini akan diuraikan pengukuran kinerja dengan cara membandingkan realisasi kinerja dengan target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Selain itu, dalam analisis perbandingan realisasi Triwulan I dengan target tahunannya. Setiap indikator akan dijelaskan penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan, program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja, efisiensi penggunaan sumber daya, informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja serta tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal).

Balai POM di Pangkal Pinang melakukan perhitungan Nilai Kinerja Organisasi dan menganalisis capaian setiap indikator kinerjanya. Analisis capaian kinerja tersebut tertuang pada bagian berikut ini.

ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Balai POM di Pangkal Pinang Tahun 2025, terdapat 8 sasaran strategis dan keberhasilan pencapaian sasaran strategis diukur dengan 24 Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu:

1. Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
2. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO
3. Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
4. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT
5. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
6. Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder
7. Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

8. Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
9. Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
10. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
11. Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan
12. Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium
13. Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT
14. Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan
15. Jumlah desa pangan aman
16. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas
17. Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan
18. Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT
19. Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar
20. Indeks Pelayanan Publik UPT
21. Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM
22. Nilai AKIP UPT BPOM
23. Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM
24. Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM

Tabel 3.1 Nilai Kinerja Organisasi Triwulan I Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	No	Indikator	Kinerja			Justifikasi	Nilai Akhir %Capaian
				Target	Realisasi	%Capaian		
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	94,31	110,95%	Normalisasi	110,00%
		2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	-	-	-		
		3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	98,33	122,91%	Normalisasi	110,00%
		4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100	0	0,00%	Dikecualikan	
		5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	96	112,94%	Normalisasi	110,00%
		6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	84	86,67	103,18%	-	103,18%
		7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100	0	0,00%	-	0,00%
		8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	100	125,00%	Dikecualikan	
		9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	94,75	100	105,54%	Dikecualikan	
		10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	100	125,00%	Normalisasi	110,00%
		11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	85,4	**100,69**	**117,90%**	Normalisasi	110,00%

No	Sasaran Strategis	No	Indikator	Kinerja			Justifikasi	Nilai Akhir %Capaian
				Target	Realisasi	%Capaian		
2	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	12	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	72,9	74,9	102,74%	-	102,74%
3	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	13	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	85,99	86,42	100,50%	-	100,50%
		14	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	-	-	-		
		15	Jumlah desa pangan aman	-	-	-		
		16	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	-	-	-		
4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	17	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	5	10	200,00%	Normalisasi	110,00%
5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	18	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	-	-	-		
6	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	19	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50	100,00%	-	100,00%
7	Layanan Publik UPT yang prima	20	Indeks Pelayanan Publik UPT	-	-	-		
8	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	21	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	-	-	-		
		22	Nilai AKIP UPT BPOM	-	-	-		
		23	kinerjja Anggaran UPT BPOM	-	-	-		
		24	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	-	-	-		
Total Capaian PK								1066,42%
Nilai Kinerja Organisasi (Rata-rata Capaian PK)								**96,95%**
Predikat NKO								**Baik**

Berdasarkan tabel di atas, dari **24 (dua puluh empat)** Indikator Kinerja Utama, hanya **14 (empat belas)** indikator yang dapat diukur capaiannya, **4 indikator** belum dapat diukur capaiannya karena tidak ada target di triwulan ini, dan **6 (enam)** indikator lainnya merupakan indikator tahunan yang penilaiannya dilakukan pada akhir tahun.

Berdasarkan Nota Dinas Nomor PR.04.02.21.04.25.124 Tentang Pemberitahuan Indikator yang Dikecualikan dari Perhitungan Nilai Kinerja Organisasi (NKO), Terdapat 3 (tiga) indikator kinerja UPT dengan manual IKU dan kertas kerja perhitungan capaian yang masih dalam proses pembahasan dengan unit pusat sampai dengan batas akhir pelaporan triwulan I pada tanggal 16 April 2025 yaitu:

a. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar.
b. Persentase Sarana Distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.
c. Persentase sarana produksi Pangan Olahan (termasuk IRTP) yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

Ketiga indikator tersebut belum dapat dilakukan pengukuran kinerja pada triwulan I dan selanjutnya akan dikecualikan dari perhitungan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) pada aplikasi SIMETRIS menu e-performance.

Nilai Kinerja Organisasi dihitung dari total capaian indikator perjanjian kinerja periodik tertentu yang telah dinormalisasi dibagi dengan jumlah indikator kinerja yang memiliki capaian kinerja pada periode tersebut. Berdasarkan Surat Edaran Nomor: PR.09.01.2.03.25.10 Tahun 2025 Tentang Pengukuran dan Pelaporan Kinerja Unit/Satuan Kerja di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan, dengan mempertimbangkan koreksi terhadap anomali capaian kinerja unit/satuan kerja, maka perlu melakukan normalisasi capaian perjanjian kinerja sebagaimana ketentuan berikut:

1) Jika capaian kinerja setiap indikator >110% maka akan dinormalisasi menjadi 110%; dan
2) Jika capaian kinerja setiap indikator =110% maka tidak dilakukan normalisasi.

Dalam perhitungan Nilai Kinerja Organisasi BPOM di Pangkal Pinang Triwulan I Tahun 2025, terdapat 5 indikator kinerja yang capaiannya dinormalisasi menjadi 110% dan 3 indikator kinerja dikecualikan dari perhitungan sehingga hanya 11 indikator yang

diperhitungkan dalam NKO. Nilai Kinerja Organisasi BPOM di Pangkal Pinang Triwulan I Tahun 2025 sebesar **96,95%** dengan predikat **Baik**.

Berdasarkan dengan Surat Dinas dari Direktur Pengawasan Peredaran Pangan Olahan Nomor T-PW.04.05.54.07.25.1368 tanggal 15 Juli 2025 Perihal Hasil Evaluasi Persentase Iklan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan, terdapat penyesuaian rumus perhitungan pada Form RHPK iklan pangan olahan yang dilakukan oleh Direktorat Pengawasan Pangan Olahan, khususnya komponen Kesesuaian Proporsi Media Iklan sehingga menyebabkan perubahan realisasi Triwulan I Tahun 2025 pada indikator Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan Balai POM di Pangkal Pinang. Realisasi semula sebesar 101,19 dengan capaian sebesar 118,49. Setelah dilakukan penyesuaian rumus perhitungan pada Form RHPK, realisasinya menjadi **100,69** dengan capaian sebesar **117,90**. Namun, perubahan realisasi pada indikator ini **tidak menyebabkan perubahan Nilai Kinerja Organisasi** BPOM di Pangkal Pinang Triwulan I Tahun 2025 karena capaian kinerja indikator ini >110 sehingga capaiannya sama, baik sebelum maupun setelah adanya penyesuaian rumus perhitungan yaitu 110.

SS 1 : Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja UPT

Capaian sasaran strategis **Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja UPT** diukur dengan 11 (Sebelas) indikator sebagai berikut:

1. **Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan**

   a. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Triwulan I Tahun 2025

Tabel 3.2 Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Indikator	Kinerja			Kategori & Notifikasi Warna
	Target	Realisasi	%Capaian	
Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	94,31	110,95%	Tidak Dapat Disimpulkan

Sediaan farmasi mencakup obat, obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, dan kosmetik. Sampel sediaan farmasi berisiko adalah sampel yang dipilih menggunakan metode targeted atau purposive sampling dan diklasifikasikan berdasarkan hasil analisis risiko sebagaimana diatur melalui pedoman sampling dan pengujian. Tindak lanjut pada sampel melibatkan beberapa tahap, dimulai dari pelaksanaan sampling, penanganan sampel, pengawasan penandaan/label, pelaksanaan pengujian, hingga pelaporan hasil. Unit Pelaksana Teknis (UPT) juga diwajibkan melaporkan tanggapan terhadap surat tindak lanjut yang dikirimkan oleh pusat, sesuai pedoman tindak lanjut yang berlaku. Sesuai ketentuan berarti mengikuti pedoman sampling, Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium, pedoman tindak lanjut, serta timeline yang telah ditetapkan dalam pedoman atau SOP terkait.

Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan = (A + B + C + D)/4, dimana A adalah Persentase Sampel Obat Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan, B adalah Persentase Sampel Obat Bahan Alam Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan, C adalah Persentase Sampel Suplemen Kesehatan Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan dan D adalah Persentase Sampel Kosmetik Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan. Target Indikator kinerja Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan tahun 2025 sebesar 85% dimana target flat setiap bulan sebesar 85% dihitung sejak bulan ke-2 (Februari).

Pada akhir Januari 2025 ada kebijakan efisiensi yang menyebabkan adanya efisiensi anggaran sampling dan anggaran pengujian. Akibatnya adanya pengurangan jumlah target sampel menyesuaikan dengan anggaran yang tersedia. Pada bulan Maret tahun 2025 tidak dilakukan sampling untuk sampel obat, obat bahan alam, suplemen kesehatan dan kosmetik, hal ini tentunya mempengaruhi realisasi indikator ini. Dari hasil perhitungan realisasi dari masing-masing komponen untuk menghasilkan realisasi indikator Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan sampai triwulan I 2025 diperoleh nilai A = 81,43%, B = 100%, C = 100% dan D = 95,81% sehingga diperoleh realisasi Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan dengan rumus (A + B + C + D)/ 4 sebesar 94,31%. Rendahnya realisasi pada komponen A (Persentase Sampel Obat Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan) dan D (Persentase Sampel Kosmetik Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan) disebabkan karena berdasarkan arahan dari unit pengampu target sampel yang digunakan sebagai pembagi pada komponen A (Obat) dan D (kosmetik) adalah target sampel awal tahun sedangkan untuk realisasinya (pembilangnya) berdasarkan target sampel setelah efisiensi anggaran. Sedangkan pada komponen B (Persentase Sampel Obat Bahan Alam Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan) dan C (Persentase Sampel Suplemen Kesehatan Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan), realisasi yang diperoleh 100% karena berdasarkan arahan dari unit pengampu, target yang digunakan sebagai pembagi adalah target setelah efisiensi anggaran. Realisasi Indikator Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan yang diperoleh (94,31%), jika dibandingkan dengan target triwulan I 2025 (85%) diperoleh capaian 110,95% dengan kategori **"Tidak Dapat Disimpulkan".**

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Tahun 2025

Tabel 3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Tahun 2025 Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Target Tahun 2025	Realisasi Triwulan I	% Capaian Terhadap Target Tahunan	Kategori
Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	94,31	110,95 ▲	Tercapai/ Melampaui

Target Indikator kinerja Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan tahun 2025 sebesar 85% dimana target flat setiap

bulan sebesar 85% dihitung sejak bulan ke-2 (Februari). Jika dibandingkan dengan target tahun 2025 (85%), realisasi kinerja triwulan I tahun 2025 (94,31%) diperoleh kategori tercapai / melampaui.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja

Adanya kebijakan efisiensi pada akhir Januari 2025 menyebabkan adanya efisiensi anggaran sampling dan anggaran pengujian. Akibatnya dilakukan pengurangan jumlah target sampel menyesuaikan dengan anggaran yang tersedia. Pada bulan Maret tahun 2025 tidak dilakukan sampling untuk sampel obat, obat bahan alam, suplemen kesehatan dan kosmetik karena menunggu kebijakan target sampel yang disetujui masing-masing kedeputian setelah adanya efisiensi anggaran ini dimana anggaran sampling dan pengujian berkurang menjadi sekitar 25%. Dengan kondisi sampling yang tidak dilakukan di bulan Maret 2025, realisasi indikator Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan pada triwulan I ini diperoleh sebesar 94,31%, masih memenuhi target yang ditetapkan (85%) dengan capaian 110,95%. Capaian yang diperoleh ditunjang oleh beberapa faktor di antaranya sebagai berikut :

1. Koordinasi yang baik antara petugas sampling, penerima sampel dan pengujian terkait pengaturan SLA baik SLA sampling, pengujian dan pelaporan di SIPT sesuai dengan kesepakatan yang sudah disepakati bersama pada bulan Januari 2025 untuk mengantisipasi perubahan timeline pengujian menjadi 15 HK untuk komoditi OBA, obat kuasi, suplemen kesehatan dan kosmetik.
2. Komitmen pelaksanaan sampling sesuai perencanaan yang telah ditetapkan dalam Rencana Pelaksanaan sampling di awal tahun.
3. Komitmen dalam memenuhi SLA baik pelaksanaan sampling, pelaksanaan pengujian hingga pelaporan hasil uji sebagaimana yang telah diatur dalam Pedoman Sampling Tahun 2025.
4. Responsif dalam memberikan tanggapan terhadap Surat Permohonan Tindak Tindak Lanjut dari masing-masing kedeputian.
5. Menyusun perencanaan kebutuhan dengan baik sehingga pengujian bias dilakukan sesuai parameter uji yang sudah ditetapkan dalam Pedoman Sampling.
6. Memastikan peralatan laboratorium beroperasi dengan baik yang menunjang terlaksananya pengujian sesuai SLA yang sudah ditetapkan.

7. Tetap memastikan jaminan mutu hasil pengujian sebagaimana yang diatur dalam ISO/IEC 17025:2017.

d. Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Kebijakan efisiensi pada akhir Januari 2025 tentunya menyebabkan penyesuaian target sampel dengan anggaran yang tersedia. Belum adanya keputusan terkait persetujuan target sampel Balai yang disetujui masing-masing kedeputian menyebabkan sampling tidak dilakukan di bulan Maret 2025. Namun, pada akhir Maret 2025 kemudian muncul kebijakan relaksasi anggaran dimana anggaran sampling dan pengujian dikembalikan seperti anggaran awal tahun. Hal ini menyebabkan target sampel dikembalikan seperti target awal tahun. Kekurangan jumlah sampel yang tidak disampling di bulan Maret tentunya akan menjadi tambahan beban sampling dan pengujian pada bulan berikutnya. Oleh karena itu perlu dilakukan beberapa upaya antisipatif agar target dapat tercapai diantaranya :

1. Melakukan perencanaan ulang terhadap Rencana Pelaksanaan Sampling dengan membagi sisa target sampel dalam bulan selanjutnya.
2. Melakukan percepatan penghitungan ulang kebutuhan laboratorium sesuai target awal tahun.
3. Melakukan percepatan proses pengadaan baik suku cadang, baku pembanding, reagensia, media mikro dan pendukung pengujian lainnya.
4. Melakukan koordinasi yang baik antara sampling dan pengujian sehingga SLA baik pelaksanaan sampling, pelaksanaan pengujian dan pelaporan hasil pengujian memenuhi timeline seperti yang ditetapkan dalam Pedoman Sampling.
5. Mengawal semua tahapan proses dari sampling sampai pelaporan yang mempengaruhi perhitungan indikator Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan.
6. Berkoordinasi dengan Biro Perencanaan dan masing-masing kedeputian terhadap perhitungan realisasi indikator Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan.

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Capaian indikator kinerja Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan pada triwulan I tahun 2025 mencapai target yang ditetapkan yaitu 94,31%. Hal ini tentunya ditunjang oleh beberapa program atau kegiatan diantaranya :

1. Adanya koordinasi antara Bidang Pemeriksaan dan Pengujian terkait perencanaan sampling dan pengujian yang dilaksanakan di awal tahun dan penyesuaian rencana sampling saat adanya efisiensi anggaran.
2. Peningkatan kompetensi personil pengujian yang dilakukan melalui bimbingan teknis pengujian baik internal maupun eksternal.
3. Peningkatan kompetensi petugas yang melakukan sampling sampel Sediaan Farmasi sesuai petunjuk teknis Pedoman sampling masing-masing komoditi.
4. Penyusunan kebutuhan pengujian baik reagensia, baku pembanding, suku cadang dan pendukung pengujian sehingga proses pengujian dapat berjalan dengan lancar.
5. Pengaturan jadwal penggunaan alat yang dipakai bersama seperti AAS dan GC MS untuk menghindari pengujian sampel yang melewati timeline pengujian.
6. Berkoordinasi dengan Balai Penguji yang lain di region Pekanbaru terkait parameter uji regionalisasi baik yang diuji di BPOM di Pangkal Pinang maupun di Balai yang lain.

f. Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

Tabel 3.4 Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Indikator Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Indikator	Output			Input (Anggaran)			IE	TE	Capaian
	T	R	%	Target (RPD TW I)	Realisasi	%			
Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	94,31	110,95	25.849.000	26.281.768	101,67	**1,09**	**0,09**	**100% (Efisien)**

1) Efisiensi penggunaan anggaran

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa tingkat efisiensi penggunaan anggaran pada indikator Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan ini sebesar 0,09 dengan capaian

TE 100% (Efisien). Indeks efisiensi (1,09) diperoleh dengan membandingkan % capaian output dengan % capaian input (anggaran). Karena % capaian output lebih besar dari % capaian anggaran diperoleh Tingkat efisiensi 0,09. Tingkat efisiensi 0 – 0,2, capaian tingkat efisiensi 100% maka dinilai efisien. Dengan penggunaan anggaran sebesar Rp 26.281.768 (101,67%) diperoleh capaian 110,95%. Anggaran yang digunakan untuk mendukung tercapainya indikator Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan berdasarkan panduan matrik kinerja dan pendanaan dari Biro Perencanaan adalah anggaran dengan MAK 3165.QIA.002.053.A dan 3165.QIA.002.055.A. Anggaran yang sudah direalisasikan sampai dengan triwulan I 2025 ini sebesar Rp 26.281.768 dari MAK 3165.QIA.002.053.A yang digunakan untuk pembelian sampel obat, obat bahan alam, suplemen kesehatan dan kosmetik untuk periode sampling pada triwulan I 2025. Sedangkan anggaran dari MAK 3165.QIA.002.053.A belum terealisasikan karena pengadaan reagensia dan media mikro untuk pengujian sampel sediaan farmasi ini belum dilakukan. Kebutuhan laboratorium masih dihitung ulang menyesuaikan anggaran setelah efisiensi.

Selain anggaran dari MAK 3165.QIA.002.053.A dan 3165.QIA.002.055.A, indikator Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan juga ditunjang oleh anggaran pengujian yaitu MAK 3165.PDD.001.052.A, 3165.PDD.001.052.B, 3165.PDD.001.052.C, 3165.PDD.001.052.D yang digunakan untuk pembelian suku cadang dan kolom, baku pembanding, reagensia dan media mikro, gas laboratorium dan pendukung pengujian serta MAK 3165.PDD.001.054.A, 3165.PDD.001.054.B dan 3165.PDD.001.054.F yang digunakan untuk kalibrasi peralatan laboratorium dan perbaikan alat laboratorium.

2) Upaya mencapai efisiensi penggunaan anggaran

Beberapa Upaya pencapaian target efisiensi ini antara lain :

a. Melakukan pengawalan dan evaluasi pencapaian output setiap bulannya untuk memastikan target tercapai minimal 100% dan mengupayakan pencapaian di atas target dengan anggaran yang ada.

b. Melakukan revisi anggaran sisa kegiatan yang sudah terlaksana untuk dioptimalisasaikan kepada kegiatan yang lain sesuai dengan kebutuhan laboratorium untuk mencapai target kinerja ini.

c. Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian target diantaranya :

- Penyusunan kebutuhan laboratorium seperti reagensia, baku pembanding, suku cadang dan pendukung pengujian pada awal tahun sehingga pengadaan kebutuhan tersebut dapat segera dilaksanakan
- Melaksanakan kalibrasi peralatan laboratorium sesuai dengan program kalibrasi yang sudah ditetapkan.
- Jika terjadi kerusakan alat laboratorium, segera dilaporkan pada aplikasi "Pucak Ok" dan berkoordinasi dengan bagian Tata usaha supaya proses perbaikan alat bisa dilaksanakan segera sebelum timeline pengujian sampel.

g. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Indikator Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan merupakan indikator yang baru ada di tahun 2025. Indikator ini meliputi beberapa tahap yaitu pelaksanaan sampling, penanganan sampel, pengawasan penandaan/label, pelaksanaan pengujian, pelaporan hasil dan tanggapan surat tindak lanjut dari masing-masing Kedeputian. Indikator tahun sebelumnya yang dapat menunjang tercapainya indikator Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan yaitu Indikator Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar. Indikator Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar pada tahun 2024 memperoleh realisasi sebesar 100% dengan target tahun 2024 sebesar 100% sehingga diperoleh capaian 100%. Upaya yang telah dilakukan tahun lalu agar tercapainya indikator Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar tentunya dapat dimanfaatkan untuk menetapkan strategi yang dapat dilakukan agar indikator Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan dari lingkup pelaksanaan pengujian dan pelaporan hasil sehingga mencapai target yang ditetapkan. Untuk tahap pelaksanaan sampling, pengawasan penandaan/label dan tanggapan surat tindak lanjut yang menjadi komponen dalam indikator Persentase Sampel Sediaan

Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan tentunya juga perlu diantisipasi sehingga target dari indikator ini dapat tercapai.

h. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya (Internal maupun Eksternal)

Tabel 3.5 Tindak Lanjut Rekomendasi Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Bulan	Kondisi Awal	Rekomendasi	*Timeline*	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
				Rencana Aksi yang Sudah Selesai	Belum		
					Rencana Aksi yang Belum Selesai	*Timeline*	
1	2	3	4	5	6	7	8
Januari	-	-	-	-	-	-	-
Februari	1.Terkait perhitungan capaian IKU, masih belum memahami perhitungan komponen tanggapan atas tindak lanjut, surat yang ditindaklanjuti oleh UPT apakah termasuk surat yang dikirim oleh kedeputian ke sarana dan ditembuskan ke UPT atau hanya surat yang ditujukan ke UPT saja 2.Merupakan indikator kinerja baru di tahun 2025. Perhitungan realisasi dimulai bulan Februari.	Berkoordinasi dengan kedeputian terkait perhitungan realisasi menggunakan tools pada kertas kerja di manual IKU terkait	Maret 2025	-	Berkoordinasi dengan kedeputian terkait perhitungan realisasi menggunakan tools pada kertas kerja di manual IKU terkait	Maret 2025	Untuk saat ini Perhitungan capaian masih menggunakan kertas kerja sesuai dengan pemahaman dan asumsi UPT sembari menunggu jawaban dari kedeputian terkait
Maret	1.Pelaksanaan sampling telah dilakukan tetapi dengan jumlah sampel yang terbatas dikarenakan belum finalnya target sampling dan ketegori sampelnya dari kedeputian terkait pasca efisiensi anggaran. 2.Terkait perhitungan capaian IKU, masih belum memahami perhitungan komponen	1.Melakukan koordinasi kepada kedeputian terkait untuk menentukan target final pasca efisiensi anggaran 2.Berkoordinasi dengan masing-masing kedeputian terkait perhitungan realisasi menggunakan tools perhitungan masing-masing kedeputian dan kebijakan target sampling yang digunakan dalam	Maret 2025	1.Telah dilakukan desk dengan kedeputian terkait untuk penyesuaian target pasca efisiensi dan telah ditentukan target tebaru 2.Telah dilaksanakan koordinasi ke kedeputian dan sudah mendapatkan solusi atas permasalah tersebu 3.Telah dilakukan penyesuaian target sampel yang diuji dan penyesuaian	Belum ada kebijakan terkait perhitungan RHPK, target sampling yang digunakan dalam perhitungan apakah target awal tahun atau target efisiensi setelah adanya relaksasi anggaran	April 2025	1.Telah dilakukan desk dengan kedeputian terkait untuk penyesuaian target pasca efisiensi dan telah ditentukan target tebaru. 2.Telah dilaksanakan koordinasi ke kedeputian dan sudah mendapatkan solusi atas permasalah tersebut 3.Target telah disesuaikan dan tools telah diisi sesuai pedoman manual IKU 4.Penyesuaian target

Bulan	Kondisi Awal	Rekomendasi	*Timeline*	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
				Rencana Aksi yang Sudah Selesai	Belum		
					Rencana Aksi yang Belum Selesai	*Timeline*	
	tanggapan atas tindak lanjut, surat yang ditindaklanjuti oleh UPT apakah termasuk surat yang dikirim oleh kedeputian ke sarana dan ditembuskan ke UPT atau hanya surat yang ditujukan ke UPT saja 3. Adanya efisiensi anggaran menyebabkan perlunya penyesuaian target yang berimbas terhadap penyesuaian kebutuhan dan kegiatan pengujian. 4. Belum adanya perhitungan RHPK dari Biro Perencanaan sehingga untuk pengukuran realisasi bulan Februari menggunakan tools perhitungan mandiri sesuai arahan dari masing-masing kedeputian. 5. Kebijakan terkait target sampel s.d Maret 2025 belum dikeluarkan oleh masing-masing unit pengampu, pada akhir Maret ada usulan relaksasi anggaran dimana ada wacana untuk target sampel akan dikembalikan ke target awal. Hal ini tentunya akan mempengaruhi perhitungan capaian IKU (RHPK)	perhitungan capaian IKU apakah target renlak awal tahun atau target setelah efisiensi. 3. Merencanakan penyesuaian target sampel yang diuji sesuai anggaran setelah efisiensi.		kebutuhan laboratorium sesuai anggaran setelah efisiensi. 4. Sudah berkoordinasi dengan masing-masing kedeputian terkait pengisian tools assesment perhitungan realisasi			sampel yang diuji dan penyesuaian kebutuhan laboratorium sesuai anggaran setelah efisiensi telah dilakukan 5. Sudah berkoordinasi dengan masing-masing kedeputian terkait pengisian tools assesment perhitungan realisasi

Bulan	Kondisi Awal	Rekomendasi	*Timeline*	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
				Rencana Aksi yang Sudah Selesai	Belum		
					Rencana Aksi yang Belum Selesai	*Timeline*	
	karena target yang digunakan dalam perhitungan adalah target awal tahun sebelum efisiensi.						

2. Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Telah Melaporkan KTD/ESO

a. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Triwulan I Tahun 2025

Pelaporan KTD (Kejadian Tidak Diinginkan) dan ESO (Efek Samping Obat) merupakan proses pelaporan kejadian medis yang tidak diharapkan atau efek samping yang tidak diinginkan akibat penggunaan obat. Dengan tujuannya untuk meningkatkan keamanan obat dan pemantauan keamanan obat di suatu negara. Pelaporan KTD/ESO merupakan indikator penting yang menunjukkan bagaimana pemantauan keamanan obat di suatu negara berjalan dengan baik.

Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Telah Melaporkan KTD/ESO menjadi indikator untuk mengukur sejauh mana keterlibatan stakeholder dalam melaporkan KTD/ESO yang terjadi di masyarakat. Pengukuran dilakukan dengan membandingkan antara jumlah sarana yang telah diberikan Bimbingan Teknis terkait farmakovigilans dengan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO di wilayahnya ke Balai POM Pangkal Pinang.

Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Telah Melaporkan KTD/ESO diperoleh dari hasil perbandingan dari jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM berdasarkan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans oleh UPT BPOM pada tahun berjalan dibagi dengan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans oleh Balai POM Pangkal Pinang.

Tabel 3.6 Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Telah Melaporkan KTD/ESO

Indikator	Kinerja			Kategori & Notifikasi Warna
	Target	Realisasi	%Capaian	
Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	-	-		

Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Telah Melaporkan KTD/ESO merupakan target tahunan yang capaiannya baru bisa diukur di akhir periode tahun 2025 sehingga belum bisa dievaluasi pencapaian targetnya pada Triwulan I.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Tahun 2025

Tabel 3.7 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Tahun 2025 Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Telah Melaporkan KTD/ESO

Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Target Tahun 2025	Realisasi Triwulan I	% Capaian Terhadap Target Tahunan	Kategori
Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26	-	-	

Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Telah Melaporkan KTD/ESO merupakan target tahunan yang capaiannya baru bisa diukur di akhir periode tahun 2025 sehingga belum bisa dievaluasi pencapaian targetnya pada Triwulan I.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja

Kegiatan yang telah dilakukan hingga Triwulan I Tahun 2025 dalam rangka mencapai target indikator Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Telah Melaporkan KTD/ESO diantaranya melalui pelaksanaan Bimbingan Teknis terkait farmakovigilans kepada 50 fasilitas pelayanan kesehatan. Kegiatan ini dilaksanakan secara daring sebagai strategi untuk menyiasati kebijakan efisiensi anggaran, tanpa mengurangi kualitas pembinaan. Pendekatan ini terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman dibuktikan dari hasil pre test dan post test yang mengalami peningkatan nilai dan komitmen tenaga kesehatan terhadap pentingnya pelaporan KTD/ESO, yang harapannya dapat berdampak langsung pada peningkatan capaian indikator.

d. Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Beberapa upaya yang dapat dilakukan dalam rangka mencapai target Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Telah Melaporkan KTD/ESO antara lain :

1. Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara periodik terhadap fasilitas yang telah menerima Bimbingan Teknis. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa fasilitas pelayanan kesehatan tersebut memahami kewajiban pelaporan

dan segera melakukan pelaporan apabila terjadi Kejadian Tidak Diinginkan (KTD) atau Efek Samping Obat (ESO).

2. Meningkatkan intensitas koordinasi, komunikasi dan pendampingan kepada tenaga kesehatan melalui media daring maupun luring guna memperkuat komitmen dan keterlibatan aktif dalam sistem pelaporan farmakovigilans.
3. Melakukan evaluasi dan umpan balik berkala kepada sarana terhadap laporan yang telah masuk, sebagai bagian dari pembinaan berkelanjutan dan peningkatan mutu pelaporan dari masing-masing fasilitas pelayanan kesehatan.

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Keberhasilan pencapaian target indikator pelaporan KTD/ESO hingga Triwulan I Tahun 2025 didukung oleh pelaksanaan sejumlah program strategis. Di antaranya adalah kegiatan Bimbingan Teknis farmakovigilans kepada fasilitas pelayanan kesehatan yang dilaksanakan secara daring, yang memungkinkan cakupan pembinaan yang luas dengan efisiensi anggaran. Selain itu, kegiatan monitoring dan evaluasi berkala terhadap sarana yang telah dibina turut memperkuat komitmen dan pemahaman petugas dalam pelaporan KTD/ESO. Dukungan sistem pelaporan elektronik seperti website e-meso.pom.go.id dan aplikasi E-Meso Mobile yang mudah diakses dan interaktif juga menjadi faktor penting yang memfasilitasi pelaporan secara tepat waktu dan sesuai ketentuan.

f. Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

Tabel 3.8 Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Indikator Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Telah Melaporkan KTD/ESO

Indikator	Output			Input (Anggaran)			IE	TE	Capaian
	T	R	%	Target (RPD TW I)	Realisasi	%			
Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	-	-	-	0	0	-	-	-	

1) Efisiensi penggunaan anggaran

Efisiensi anggaran pada triwulan I tahun 2025 belum dapat dihitung karena capaian indikator output belum tersedia.

2) Upaya mencapai efisiensi penggunaan anggaran

Melaksanakan kegiatan dalam rangka menunjang capaian indikator meskipun terdapat efisiensi anggaran pada indikator ini yang disiasati dengan melakukan bimbingan teknis secara daring sehingga lebih efektif dalam penggunaan anggaran.

g. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Indikator ini merupakan indikator yang baru ada di tahun 2025 sehingga tidak ada informasi kinerja periode sebelumnya yang dapat dimanfaatkan dalam upaya peningkatan kinerja.

h. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya (Internal maupun Eksternal)

Tabel 3.9 Tindak Lanjut Rekomendasi Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Telah Melaporkan KTD/ESO

Bulan	Kondisi Awal	Rekomendasi	*Timeline*	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
				Rencana Aksi yang Sudah Selesai	Belum		
					Rencana Aksi yang Belum Selesai	*Timeline*	
1	2	3	4	5	6	7	8
Januari	-	-	-	-	-	-	-
Februari	Untuk realisasai capaian indikator ini diukur pada akhir tahun 2025 akan tetapi terdapat kendala terkait ketiadaan anggaran untuk melakukan KIE sehingga berpotensi menghambat tercapainya indikator ini	Melaksanakan pemilihan target sarana yang akan diberikan KIE untuk mendukung tercapainya indikator ini	Februari	Pelaksanakan pemilihan target sarana yang akan diberikan KIE untuk mendukung tercapainya indikator ini telah selesai	-	-	Sarana yang menjadi target KIE telah dipilih dan ditentukan
Maret	Untuk realisasai capaian indikator ini diukur pada akhir tahun 2025 akan tetapi terdapat kendala terkait ketiadaan anggaran untuk melakukan KIE sehingga berpotensi menghambat tercapainya indikator ini	1. Mengusulkan kepada Direktorat KMEI untuk melakukan penyesuain target sarana yang diberikan sosialisasi (KIE) 2. Melakukan perubahan metode pelaksaan dari Luring menjadi daring untuk mensiasati ketiadaan anggaran	Maret	1. Mengusulkan kepada Direktorat KMEI untuk melakukan penyesuain target sarana yang diberikan sosialisasi (KIE) 2. Melakukan perubahan metode pelaksaan dari Luring menjadi daring untuk mensiasati ketiadaan anggaran	-	-	Sudah dilakukan koordinasi kepada Direktorat KMEI dan KIE telah terlaksana dengan metode daring

3. Persentase Sampel Pangan Olahan Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

a. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Triwulan I Tahun 2025

Tabel 3.10 Persentase Sampel Pangan Olahan Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Indikator	Kinerja			Kategori & Notifikasi Warna
	Target	Realisasi	%Capaian	
Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	98,33	122,91%	Tidak Dapat Disimpulkan

Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan, dikecualikan pangan industri rumah tangga. Sampel Pangan Olahan Berisiko adalah sampel yang dipilih berdasarkan evaluasi dan kajian risiko sesuai Pedoman Sampling. Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan adalah diperiksa dan diuji sesuai Pedoman Sampling serta tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnya. Diperiksa dan diuji sesuai Pedoman Sampling adalah pengambilan sampel dan pengujian dilakukan sesuai dengan pedoman sampling yang meliputi kesesuaian target sampel UPT, kesesuaian parameter uji, ketepatan pengambilan kesimpulan, ketepatan waktu pengambilan sampel dan ketepatan pelaporan sampling dan pengujian.

Tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut pengawasan atau ketentuan lainnya yang dapat dilakukan antara lain :

1. Tindak Lanjut terhadap produk TIE dan/atau Rusak dan/atau Kedaluwarsa dan TMS Pengujian
2. Pembinaan terhadap Sarana Distribusi dan/atau Sarana Produksi
3. Pemeriksaan Sarana Produksi dan/atau Sarana Distribusi terhadap implementasi CPPOB/ CPerPOB terkait dengan hasil sampling dan pengujian produk TMS
4. Koordinasi pusat dan lintas UPT terkait penyampaian hasil uji produk TMS

Tindak lanjut terhadap sampel TIE/ rusak/ kedaluwarsa termasuk dalam bentuk persuasi kepada pelaku usaha untuk melakukan pemusnahan secara sukarela terhadap produk, serta upaya lain untuk memastikan produk tidak beredar.

Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan=

$$20\%A + 20\%B + 20\%C + 10\%D + 10\%E + 20\%F$$

Keterangan:

A. Kesesuaian Target Sampel
B. Kesesuaian Parameter Uji
C. Ketepatan Pengambilan Kesimpulan
D. Ketepatan Waktu Pengambilan Sampel
E. Ketepatan Waktu Pelaporan Sampling dan Pengujian
F. Tindak Lanjut sesuai Pedoman Tindak Lanjut/ Ketentuan lainnya

Realisasi Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada Triwulan I adalah 98,33%. Realisasi ini diperoleh dari pemeriksaan dan pengujian terhadap 12 sampel pangan olahan berisiko. Target yang ditetapkan adalah 80%, sehingga capaian yang diperoleh adalah 122,91%. Nilai ini menunjukkan bahwa target yang ditetapkan mampu dicapai oleh BPOM di Pangkal Pinang dengan kategori "**Tidak Dapat Disimpulkan**".

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Tahun 2025

Tabel 3.11 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Tahun 2025 Persentase Sampel Pangan Olahan Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Target Tahun 2025	Realisasi Triwulan I	% Capaian Terhadap Target Tahunan	Kategori
Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80,00	98,33	122,91 ▲	Tercapai/ Melampaui

Target yang ditetapkan untuk Tahun 2025 adalah sama dengan target Triwulan I karena sifatnya flat yaitu 80%. Realisasi Triwulan I telah mencapai target yaitu 98,33% dengan kategori "Tercapai/Melampaui". Dari enam komponen penilaian yang ditetapkan, terdapat satu komponen penilaian yaitu Ketepatan Waktu Pelaporan Sampling dan Pengujian yang belum mencapai nilai maksimal. Hal ini karena ada 2 sampel yang diuji secara regional dilaporkan melebihi batas yaitu setelah tangga 15 bulan berikutnya.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja

Keberhasilan BPOM di Pangkal Pinang dalam mencapai target persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan didukung oleh adanya koordinasi yang baik antara fungsi pemeriksaan dan pengujian dalam melaksanakan sampling dan pengujian produk olahan pangan berisiko. Sampling dan pengujian dilaksanakan sesuai dengan rencana pelaksanaan yang

telah disusun bersama. Efisiensi anggaran pada Triwulan I cukup memberikan tantangan terhadap pelaksanaan sampling dan pengujian sehingga dilakukan penyesuaian dalam perencanaan tanpa mengubah persentase target yang telah ditetapkan.

d. Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

BPOM di Pangkal Pinang melaksanakan beberapa upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja terkait persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang telah dicapai. Beberapa upaya tersebut antara lain :

1. Meningkatkan koordinasi antara fungsi pemeriksaan dan pengujian dalam rangka pelaksanaan sampling dan pengujian produk pangan olahan berisiko yang menjadi target kinerja.
2. Meningkatkan koordinasi dengan balai di lingkup regional Pekanbaru untuk memastikan bahwa sampel regional yang dikirimkan dapat diuji dengan baik dan sesuai ketentuan.
3. Melakukan penyesuaian terhadap rencana pelaksanaan yang disusun pada awal tahun sesuai dengan kondisi dan perubahan pada Triwulan I.
4. Mengidentifikasi kebutuhan reagensia, media mikrobiologi, baku pembanding dan pendukung pengujian lainnya untuk memastikan bahwa pengujian sampel pangan olahan berisiko dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan.
5. Melakukan pemeliharaan, kalibrasi dan verifikasi peralatan laboratorium sesuai dengan ketentuan untuk menjaga kondisi peralatan yang dimiliki siap untuk melakukan pengujian.

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Capaian untuk persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada Triwulan I telah mencapai target yang ditetapkan. Beberapa hal yang menunjang pencapaian target antara lain :

1. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala setiap bulan terhadap realisasi dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan sampling dan

pengujian pangan olahan berisiko sehingga permasalahan yang ada dapat segera diidentifikasi dan dicari solusinya.

2. Telah dilakukan upaya pengisian data dan pelaporan yang *real time* melalui SIPT dan aplikasi Madu Pelawan sehingga data yang disampaikan masing-masing fungsi lebih valid dan akurat.
3. Pengawasan Sarana Produksi dan pembinaan terhadap pelaku usaha yang lebih intensif dalam penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB).
4. Peningkatan pengawasan dan pembinaan terhadap distributor dan penjual retail produk pangan mengenai Pangan yang memenuhi ketentuan melalui pengawasan rutin maupun kegiatan intensifikasi pengawasan.
5. Pemberian informasi kepada masyarakat melalui berbagai media tentang keamanan pangan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat akan pangan olahan yang aman dan bermutu.

f. Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

Tabel 3.12 Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Indikator Persentase Sampel Pangan Olahan Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Indikator	Output			Input (Anggaran)			IE	TE	Capaian
	T	R	%	Target (RPD TW I)	Realisasi	%			
Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	98,33	122,91	6.063.000	5.495.445	90,64	**1,36**	**0,36**	**95% (Efisien)**

1) Efisiensi penggunaan anggaran

Tingkat efisiensi penggunaan anggaran pada indikator persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti mendapatkan penilaian **efisien** karena realisasi penggunaan anggaran lebih kecil dibandingkan realisasi dari output kinerja. Anggaran yang direncanakan di Triwulan I telah direalisasikan dalam pengawasan makanan aman dan bermutu salah satunya terhadap sampel pangan olahan berisiko. Capaian efisiensi ini merupakan indikator yang tidak bisa dikendalikan secara internal sehingga besarnya anggaran yang digunakan hanya merupakan faktor pendukung, bukan penentu tercapai atau tidaknya target IKU. Adanya efisiensi anggaran pada Triwulan I juga mempengaruhi terhadap perencanaan dan realisasi pada Triwulan I sehingga

dilakukan beberapa penyesuaian. Rencana sampling san pengujian pangan olahan berisiko pada Triwulan I mengalami revisi karena adanya kebijakan efisiensi anggaran, sehingga sampling dan pengujian dilakukan sesuai kondisi tersebut.

2) Upaya mencapai efisiensi penggunaan anggaran

Penggunaan anggaran telah dikelola secara efisien untuk mendukung indikator persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti. Efisiensi dapat dicapai dengan melakukan perencanaan penggunaan anggaran secara akurat dan sesuai dengan pelaksanaan kegiatan sampling dan pengujian pangan olahan berisiko yang telah disusun. Monitoring dan evaluasi terhadap penggunaan anggaran telah dilakukan secara berkala setiap bulan sehingga apabila terdapat kendala dan perubahan dapat diidentifikasi dan dikelola lebih awal untuk menjaga efisiensi anggaran.

g. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Indikator persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti merupakan indikator yang baru ada di tahun 2025 sehingga tidak ada informasi kinerja periode sebelumnya yang dapat dimanfaatkan dalam upaya peningkatan kinerja.

h. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya (Internal maupun Eksternal)

Tabel 3.13 Tindak Lanjut Rekomendasi Persentase Sampel Pangan Olahan Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Bulan	Kondisi Awal	Rekomendasi	*Timeline*	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
				Rencana Aksi yang Sudah Selesai	Belum		
					Rencana Aksi yang Belum Selesai	*Timeline*	
1	2	3	4	5	6	7	8
Januari	-	-	-	-	-	-	-
Februari	Merupakan indikator kinerja baru dan berbeda dengan tahun 2024 Sampel pangan olahan berisiko telah dilakukan sampling pada bulan Januari Sampel masuk ke laboratorium	1. Koordinasi dengan kedeputian terkait perihal perhitungan realisasi IKU jika tidak ada sampel TMK yang perlu ditindaklanjuti. 2. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pengujian	Februari	Percepatan waktu pengujian dan pelaporan sampel Pengajuan usulan perubahan target jumlah sampel pangan olahan berisiko tahun 2025 Monitoring dan evaluasi pengujian pangan olahan berisiko	Berkoordinasi dengan kedeputian terkait perhitungan realisasi menggunakan tools pada kertas kerja di manual IKU terkait	Maret	Untuk saat ini Perhitungan capaian masih menggunakan kertas kerja sesuai dengan pemahaman dan asumsi UPT sembari menunggu jawaban dari kedeputian terkait Sampling dan pengujian sampel pangan olahan

Bulan	Kondisi Awal	Rekomendasi	*Timeline*	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
				Rencana Aksi yang Sudah Selesai	Belum		
					Rencana Aksi yang Belum Selesai	*Timeline*	
	sebanyak 4 sampel Ketersediaan reagen terbatas, menunggu proses pengadaan Sampling dan pengujian sampel pangan olahan berisiko dilaksanakan sesuai target awal Sampel masuk laboratorium sebanyak 8 sampel Sampel selesai uji sebanyak 4 sampel dan diuji lengkap serta tidak melebihi waktu pelaporan Timeline yang digunakan adalah 30 HK sesuai pedoman sampling Terdapat perubahan target karena efisiensi anggaran Terdapat ketentuan baru untuk timeline pengujian menjadi 15 HK sesuai SK regionalisasi	sampel yang masuk ke laboratorium Melakukan percepatan proses pengujian karena pelaporan hasil pengujian sampel terakhir adalah tanggal 15 bulan berikutnya 3. Menyusun kebutuhan pengujian dan perencanaan pengujian sesuai dengan target awal					berisiko telah dilaksanakan sesuai dengan target awal dan dilaporkan tepat waktu
Maret	1. Pelaksanaan sampling telah dilakukan tetapi dengan jumlah sampel yang terbatas dikarenakan belum finalnya target sampling dan ketegori sampelnya dari kedeputian terkait pasca efisiensi anggaran 2. Terkait perhitungan capaian IKU, masih belum memahami perhitungan komponen tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut bagaimana apabila pada bulan bersangkutan tidak	1. Melakukan koordinasi kepada kedeputian terkait untuk menentukan target final pasca efisiensi anggaran 2. Koordinasi dengan kedeputian terkait perihal perhitungan realisasi IKU jika tidak ada sampel TMK yang perlu ditindaklanjuti. 3. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pengujian sampel yang masuk ke laboratorium Melakukan percepatan proses pengujian karena pelaporan hasil	Maret	1. Melakukan koordinasi kepada kedeputian terkait untuk menentukan target final pasca efisiensi anggaran 2. Koordinasi dengan kedeputian terkait perihal perhitungan realisasi IKU jika tidak ada sampel TMK yang perlu ditindaklanjuti. 3. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pengujian sampel yang masuk ke laboratorium Melakukan percepatan proses pengujian karena pelaporan hasil pengujian sampel terakhir adalah tanggal 15 bulan berikutnya	-	-	1. Telah dilakukan desk dengan kedeputian III terkait untuk penyesuaian target pasca efisiensi dan telah ditentukan target terbaru 2. Telah dilaksanakan koordinasi ke kedeputian dan sudah mendapatkan solusi atas permasalahan tersebut 3. Sampling dan pengujian sampel pangan olahan berisiko telah dilaksanakan sesuai dengan target awal dan dilaporkan tepat waktu

Bulan	Kondisi Awal	Rekomendasi	*Timeline*	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
				Rencana Aksi yang Sudah Selesai	Belum		
					Rencana Aksi yang Belum Selesai	*Timeline*	
	terdapat sampel yang perlu ditindaklanjuti (tidak ada yang TMK). 3. Tidak ada sampel masuk ke laboratorium pada bulan Maret 2025 Sampel selesai uji sebanyak 8 sampel dengan parameter uji lengkap dan dilaporkan tepat waktu sebelum tanggal 15 Maret Timeline pengujian yang digunakan adalah 30 HK sesuai pedoman sampling 4. Terdapat perubahan timeline menjadi 15 HK untuk semua komoditi berdasarkan SK regionalisasi sehingga dilakukan upaya untuk melakukan percepatan proses pengujian dan mengatur waktu penerimaan sampel	pengujian sampel terakhir adalah tanggal 15 bulan berikutnya 4. Menyesuaikan kemampuan uji laboratorium dengan kondisi efisiensi anggaran 5. berkoordinasi dengan fungsi pemeriksaan untuk menetukan jumlah sampel yang dapat diuji dan mengusulkan kemampuan uji tersebut ke deputi 3		4. Menyesuaikan kemampuan uji laboratorium dengan kondisi efisiensi anggaran 5. berkoordinasi dengan fungsi pemeriksaan untuk menentukan jumlah sampel yang dapat diuji dan mengusulkan kemampuan uji tersebut ke deputi 3			

4. Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan yang Diuji Sesuai Standar

a. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Triwulan I Tahun 2025

Tabel 3.14 Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan yang Diuji Sesuai Standar

Indikator	Kinerja			Kategori & Notifikasi Warna
	Target	Realisasi	%Capaian	
Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100	0	0,00%	Kurang

Sampel KLB Keracunan Pangan adalah sampel pangan yang diduga sebagai penyebab KLB keracunan pangan berdasarkan hasil investigasi atau diduga

sebagai penyebab dua orang atau lebih menderita sakit dengan gejala yang sama atau hampir sama setelah mengonsumsi pangan dari lokasi yang sama, dan berdasarkan analisis epidemiologi, pangan tersebut diidentifikasi sebagai sumber keracunan. Sampel dapat berupa pangan olahan dalam kemasan atau pangan olahan siap saji yang diuji oleh laboratorium BPOM dengan sampel berasal dari internal BPOM dan/atau dari eksternal BPOM (Dinas dan K/L).

Sesuai standar adalah kesesuaian parameter pengujian sesuai dengan hasil penelusuran dugaan KLB KP berupa kesesuaian dengan gejala korban, masa inkubasi agen penyebab, kesesuaian antara pasangan bahaya dengan pangan, atau sesuai dengan parameter permintaan uji Dinas Kesehatan. Lebih lanjut untuk PODK juga memperhatikan kesesuaian dengan standar dalam regulasi terkait pangan dimaksud dan parameter dalam Pedoman Sampling dan Pengujian Pangan Olahan BPOM. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar dihitung dengan menggunakan rumus :

$$\frac{\text{Jumlah Sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar} \times 100\%}{\text{Total jumlah sampel KLB keracunan pangan dikirim atau diuji ke BPOM}}$$

Realisasi indikator persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar pada Triwulan I adalah 0% karena tidak ada sampel KLB atau sampel penyebab keracunan pangan yang dilaporkan dan diuji di BPOM di Pangkal Pinang. Target dari indikator ini adalah 100%, artinya apabila ada sampel keracunan pangan atau KLB yang masuk ke laboratorium maka harus diuji secara lengkap berdasarkan juknis keracunan pangan. Realisasi dan capaian sebesar 0% menyebabkan BPOM di Pangkal Pinang masuk dalam kategori "Kurang".

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Tahun 2025

Tabel 3.15 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Tahun 2025 Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan yang Diuji Sesuai Standar

Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Target Tahun 2025	Realisasi Triwulan I	% Capaian Terhadap Target Tahunan	Kategori
Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	0	0 ▼	Perlu Upaya Keras

Target yang ditetapkan untuk Tahun 2025 dengan Triwulan I adalah sama yaitu 100%. Realisasi saat ini pada Triwulan I adalah 0% sehingga masih sangat

jauh dari target akumulatif yang ditentukan. Hal ini menyebabkan BPOM di Pangkal Pinang masuk ke dalam kategori "Perlu Upaya Keras".

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja

Realisasi dari persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar belum sesuai dengan target dan masih jauh dari target. Penyebabnya adalah belum ada laporan dan sampel yang dilaporkan sebagai KLB atau penyebab keracunan pangan di Triwulan I untuk wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Penetapan KLB dinilai masih menjadi penilaian negatif bagi kinerja pemerintah daerah sehingga dalam penetapannya sangat dipertimbangkan. Indikator ini tidak dapat dikendalikan secara penuh oleh BPOM di Pangkal Pinang sehingga diperlukan koordinasi dengan dinas terkait.

d. Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Capaian terhadap target yang masih sangat rendah mengharuskan BPOM di Pangkal Pinang melakukan beberapa upaya perbaikan dan peningkatan. Upaya tersebut antara lain adalah dengan melakukan koordinasi dengan dinas terkait mengenai penanganan sampel KLB di Kepulauan Bangka Belitung. BPOM di Pangkal Pinang juga akan menyiapkan reagen, media mikrobiologi, baku pembanding dan kebutuhan pengujian lainnya untuk memastikan seluruh standar pengujian sampel KLB dapat dipenuhi. BPOM di Pangkal Pinang juga melaksanakan pemberian informasi kepada masyarakat melalui berbagai media tentang keamanan pangan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat akan pangan olahan yang aman dan bermutu.

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Kurangnya koordinasi dengan dinas terkait tentang penanganan KLB dimungkinkan menjadi salah satu penyebab belum tercapainya target untuk indikator ini. Penanganan sampel KLB menjadi tanggung jawab bersama sehingga BPOM di Pangkal Pinang tidak bisa sepenuhnya melakukan penanganan sampel KLB tanpa ada keterlibatan dari instansi lain yang bertanggung jawab.

f. Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

Tabel 3.16 Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Indikator Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan yang Diuji Sesuai Standar

Indikator	Output			Input (Anggaran)			IE	TE	Capaian
	T	R	%	Target (RPD TW I)	Realisasi	%			
Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	0	0,00	0	0	-	-	-	

1) Efisiensi penggunaan anggaran

Penggunaan anggaran untuk mencapai indikator persentase sampel KLB keracunan pangan triwulan I tidak dapat didefinisikan karena belum ada realisasi terhadap indikator ini, baik realisasi output maupun realisasi anggarannya. Indikator ini tidak dapat dikendalikan secara internal karena tidak dapat kita prediksi atau tentukan berapa jumlah kasus keracunan pangan atau KLB yang akan terjadi.

2) Upaya mencapai efisiensi penggunaan anggaran

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan efisiensi terhadap penggunaan anggaran dan sumber daya adalah dengan melakukan identifikasi terkait kasus KLB di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung agar laporan dapat diperoleh secara akurat. Selain itu dilakukan koordinasi yang berkesinambungan dengan dinas terkait untuk bisa mendeteksi secara cepat jika terdapat laporan keracunan pangan.

g. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Indikator persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar merupakan indikator yang baru ada di tahun 2025 sehingga tidak ada informasi kinerja periode sebelumnya yang dapat dimanfaatkan dalam upaya peningkatan kinerja.

h. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya (Internal maupun Eksternal)

Tabel 3.17 Tindak Lanjut Rekomendasi Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan yang Diuji Sesuai Standar

Bulan	Kondisi Awal	Rekomendasi	*Timeline*	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
				Rencana Aksi yang Sudah Selesai	Belum		
					Rencana Aksi yang Belum Selesai	*Timeline*	
1	2	3	4	5	6	7	8
Januari	Tidak ada sampel KLB keracunan pangan	-	-	-	-	-	-
Februari	Tidak ada sampel KLB keracunan pangan	1. Melaksanakan monev secara periodik agar jika terjadi KLB dapat di tindak lanjuti segera dan sesuai ketentuan 2. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pengujian laboratorium pangan 3. Menyusun kebutuhan media dan reagensia untuk sampel KLB yang mungkin masuk ke laboratorium	Februari	1. Monev telah dilaksanakan secara periodik 2. Menyusun rencana kebutuhan reagen dan media untuk pengujian sampel KLB keracunan pangan	-	-	KLB pangan termonitoring Telah tersedia rencana kebutuhan reagen dan media untuk pengujian sampel KLB keracunan pangan
Maret	Tidak ada sampel KLB keracunan pangan	1. Melaksanakan monev secara periodik agar jika terjadi KLB dapat di tindak lanjuti segera dan sesuai ketentuan 2. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pengujian laboratorium pangan 3. Melakukan penyeuaian kemampuan uji terhadap sampel KLB berdasarkan efisiensi anggaran	Maret	1. Melaksanakan monev secara periodik agar jika terjadi KLB dapat di tindak lanjuti segera dan sesuai ketentuan 2. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pengujian laboratorium pangan 3. Melakukan penyeuaian kemampuan uji terhadap sampel KLB berdasarkan efisiensi anggaran	-	-	1. KLB pangan termonitoring 2. Hasil monitoring dan evaluasi sampel KLB, tidak terdapat laporan kejadian dan sampel KLB

5. Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

a. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Triwulan I Tahun 2025

Tabel 3.18 Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Indikator	Kinerja			Kategori & Notifikasi Warna
	Target	Realisasi	%Capaian	
Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	96	112,94%	Tidak Dapat Disimpulkan

Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) adalah pangan olahan hasil produksi Industri Rumah Tangga Pangan. Sampel PIRT berisiko adalah sampel yang dipilih menggunakan metode targeted berbasis analisis risiko sesuai pedoman sampling. Ditindaklanjuti sesuai ketentuan meliputi diperiksa dan diuji sesuai pedoman sampling serta tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnya. Diperiksa dan diuji sesuai pedoman sampling adalah sampling dan pengujian dilakukan sesuai dengan pedoman sampling (kesesuaian target sampel UPT, kesesuaian parameter uji, ketepatan waktu pengambilan sampel dan ketepatan pelaporan). Tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnya adalah tahapan awal tindak lanjut oleh UPT terhadap sampel PIRT yang Tidak Memenuhi Syarat (TIE dan/atau Rusak dan/atau Kedaluwarsa dan/atau TMS hasil pengujian) sesuai dengan Pedoman Tindak Lanjut atau ketentuan lainnya kepada pelaku usaha (IRTP) maupun kepada lintas sektor seperti Dinas Kesehatan/ DPM-PTSP (OPD penerbit SPP-IRT) dll dan atau melaporkan ke Pusat jika kasus lintas wilayah.

Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan =
20%A + 20%B + 20%C + 10%D + 10%E + 20%F

Keterangan:

a. Kesesuaian Target Sampel
b. Kesesuaian Parameter Uji
c. Ketepatan Pengambilan Kesimpulan
d. Ketepatan Waktu Pengambilan Sampel
e. Ketepatan Waktu Pelaporan Sampling dan Pengujian
f. Tindak Lanjut sesuai Pedoman Tindak Lanjut/ Ketentuan lainnya

Realisasi indikator persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada Triwulan I adalah 96% dengan target 85%. Realisasi ini memberikan nilai capaian sebesar 112,94% dan masuk ke dalam kategori "**Tidak Dapat Disimpulkan**". Sampling dan pengujian sampel PIRT ditargetkan selesai pada Triwulan I tahun 2025 agar dapat segera ditindaklanjuti.

Jumlah target sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan untuk BPOM di Pangkal Pinang adalah 15 sampel. Seluruh sampel telah selesai diperiksa, diuji, dilaporkan dan ditindaklanjuti pada bulan Maret 2025. Terdapat 3 sampel yang tidak dapat diuji secara lengkap sesuai parameter uji yang telah ditetapkan. Sampel yang ditindaklanjuti karena Tidak Memenuhi Syarat berjumlah 3 sampel.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Tahun 2025

Tabel 3.19 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Tahun 2025 Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Target Tahun 2025	Realisasi Triwulan I	% Capaian Terhadap Target Tahunan	Kategori
Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	96	112,94 ▲	Tercapai/ Melampaui

Realisasi persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti adalah 96%, bila dibandingkan dengan target tahun 2025 maka capaiannya adalah 112,94% dengan kategori "Tercapai/Melampaui". Meskipun terdapat target triwulan dan tahunan, indikator ini hanya dilaksanakan pada Triwulan I sehingga sampai dengan akhir tahun target BPOM di Pangkal Pinang telah tercapai.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja

Capaian indikator persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan telah melebihi target atau dinyatakan telah tercapai. Keberhasilan ini didukung oleh beberapa hal antara lain adanya koordinasi yang baik antara fungsi pemeriksaan dan pengujian dalam melaksanakan sampling dan pengujian produk PIRT berisiko. Sampling dan pengujian dilaksanakan sesuai dengan rencana pelaksanaan yang telah disusun bersama. Efisiensi anggaran pada Triwulan I cukup memberikan tantangan terhadap pelaksanaan sampling dan pengujian sehingga dilakukan penyesuaian dalam perencanaan tanpa mengubah persentase target yang telah ditetapkan.

d. Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

BPOM di Pangkal Pinang tetap melaksanakan beberapa upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja terkait persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang telah dicapai. Beberapa upaya tersebut antara lain :

1. Meningkatkan koordinasi antara fungsi pemeriksaan dan pengujian dalam rangka pelaksanaan sampling dan pengujian produk PIRT berisiko yang ada di Kepulauan Bangka Belitung.
2. Melakukan penyesuaian terhadap rencana pelaksanaan yang disusun pada awal tahun sesuai dengan kondisi dan perubahan pada Triwulan I.
3. Mengidentifikasi kebutuhan reagensia, media mikrobiologi, baku pembanding dan pendukung pengujian lainnya untuk memastikan bahwa pengujian sampel PIRT berisiko dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan.
4. Melakukan pemeliharaan, kalibrasi dan verifikasi peralatan laboratorium sesuai dengan ketentuan untuk menjaga kondisi peralatan yang dimiliki siap untuk melakukan pengujian.

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Capaian untuk persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada Triwulan I telah mencapai target yang ditetapkan. Beberapa hal yang menunjang pencapaian target antara lain :

1. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala setiap bulan terhadap realisasi dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan sampling dan pengujian pangan olahan berisiko sehingga permasalahan yang ada dapat segera diidentifikasi dan dicari solusinya.
2. Telah dilakukan upaya pengisian data dan pelaporan yang real time melalui SIPT dan aplikasi Madu Pelawan sehingga data yang disampaikan masing-masing fungsi lebih valid dan akurat.
3. Pengawasan Sarana Produksi dan pembinaan terhadap pelaku usaha yang lebih intensif dalam penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB).

4. Peningkatan pengawasan dan pembinaan terhadap distributor dan penjual retail produk pangan mengenai Pangan yang memenuhi ketentuan melalui pengawasan rutin maupun kegiatan intensifikasi pengawasan.
5. Pemberian informasi kepada masyarakat melalui berbagai media tentang keamanan pangan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat akan pangan olahan yang aman dan bermutu.

f. Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

Tabel 3.20 Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Indikator Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Indikator	Output			Input (Anggaran)			IE	TE	Capaian
	T	R	%	Target (RPD TW I)	Realisasi	%			
Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	96	112,94	0	0	-	-	-	

1) Efisiensi penggunaan anggaran

Penggunaan anggaran untuk mencapai indikator persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada triwulan I **tidak dapat didefinisikan** karena sudah terdapat realisasi output tetapi belum ada realisasi anggaran pada Triwulan I. Hal ini karena pada Triwulan I terdapat kebijakan efisiensi anggaran yang menyebabkan anggaran tidak dapat digunakan akan tetapi tidak ada perubahan target. Sampel diperiksa dan diuji menggunakan alokasi anggaran pada indikator pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan dan menggunakan sumber daya yang dimiliki oleh BPOM di Pangkal Pinang.

2) Upaya mencapai efisiensi penggunaan anggaran

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan efisiensi terhadap penggunaan anggaran dan sumber daya adalah dengan melakukan perencanaan dan penyesuaian terhadap anggaran yang ada. Relaksasi anggaran diharapkan mampu memperbaiki efisiensi anggaran yang telah ada pada Triwulan I.

g. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Indikator persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar merupakan indikator yang baru ada di tahun 2025 sehingga tidak ada informasi kinerja periode sebelumnya yang dapat dimanfaatkan dalam upaya peningkatan kinerja.

h. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya (Internal maupun Eksternal)

Tabel 3.21 Tindak Lanjut Rekomendasi Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Bulan	Kondisi Awal	Rekomendasi	*Timeline*	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
				Rencana Aksi yang Sudah Selesai	Belum		
					Rencana Aksi yang Belum Selesai	*Timeline*	
1	2	3	4	5	6	7	8
Januari	Tidak ada pembelian sampel pirt bulan ini 1. Pada bulan Januari belum dilaksanakan sampling sampel PIRT sehingga belum ada sampel PIRT yang masuk laboratorium 2. Kendala yang dihadapi adalah target final untul sampel pangan belum ditetapkan sehingga belum dapat ditentukan jumlah sampel yang akan masuk ke laboratorium 3. Upaya yang dilakukan adalah dengan menyusun perencanaan pengujian sesuai dengan pedoman sampling	-	-	-	-	-	-
Februari	Pelaksanaan sampling PIRT telah dillakukan sesuai dengan pedoman sampling tahun 2025 dalam proses pengawasan ditemukan beberapa produk yang tidak	Melaksanakan sampling sesuai dengan timeline yang ditentukan oleh direktorat terkait 1. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pengujian	Februari	Sampel telah disampling sesuai dengan timeline yang telah ditetapkan direktorat terkait Pengujian sampel PIRT Monitoring dan evaluasi terhadap sampel PIRT	-	-	Sampel telah disampling sesuai dengan timeline yang telah ditetapkan direktorat terkait Sampel PIRT telah selesai uji Terdapat 3 sampel PIRT yang tidak diuji dengan parameter uji lengkap

Bulan	Kondisi Awal	Rekomendasi	*Timeline*	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
				Rencana Aksi yang Sudah Selesai	Belum		
					Rencana Aksi yang Belum Selesai	*Timeline*	
	jelas alamat produsenya sehingga hal ini dapat menghambat proses pembinaan kepada pelaku usaha jika nanti ditemukan ada sampel yang tidak memenuhi syarat Sampling dan pengujian sampel PIRT dilaksanakan pada bulan Februari sesuai dengan perencaan dan target awal yaitu 15 sampel PIRT Pengujian berdasarkan pedoman sampling, terdapat perubahan beberapa parameter uji yang sebelumnya tidak ada Laboratorium tidak memiliki reagen untuk pengujian tersebut Timeline yang digunakan adalah 30 HK, waktu pelaporan sebelum tanggal 15 bulan berikutnya Pada akhir Februari SK regionalisasi terbit dan mencantumkan bahwa timeline pengujian adalah 15 HK untuk seluruh komoditi Terjadi efisiensi anggaran yang membutuhkan perencanaan ulang untuk target sampel pangan secara keseluruhan	laboratorium pangan 2. Menyusun kebutuhan pengujian untuk sampel PIRT		Menyusun usulan penyesuaian target sampel pangan			Telah diusulkan rencana perubahan target sampel pangan
Maret	Pelaksanaan sampling PIRT telah dillakukan sesuai dengan pedoman	Melakukan koordinasi kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Kota	Maret	Melakukan koordinasi kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Kota untuk menelusuri	-	-	Koordinasi kepada Dinas terkait telah dilaksanakan dan produsen terkait telah

Bulan	Kondisi Awal	Rekomendasi	*Timeline*	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
				Rencana Aksi yang Sudah Selesai	Belum		
					Rencana Aksi yang Belum Selesai	*Timeline*	
	sampling tahun 2025 dalam proses pengawasan ditemukan beberapa produk yang tidak jelas alamat produsenya sehingga hal ini dapat menghambat proses pembinaan kepada pelaku usaha jika nanti ditemukan ada sampel yang tidak memenuhi syarat 1. 15 sampel PIRT telah selesai dilakukan pengujian Terdapat 3 sampel yang tidak diuji secara lengkap parameter ujinya sesuai pedoman sampling karena tidak tersedia reagen (Nitrofurazon dan Sildenafil) 3 sampel TMS dan telah dilakukan tindak lanjut Seluruh sampel dilaporkan tepat waktu sebelum tanggal 15 Maret Timeline pengujian yang digunakan adalah 30 HK sesuai pedoman sampling 2. Kendala yang dihadapi adalah keterbatasan reagen sehingga ada 3 sampel yang tidak diuji secara lengkap 3. Upaya yang dilakukan dengan memaksimalkan poin penilaian lainnya agar target tercapai	untuk menelusuri alamat tempat produksi dari pelaku usaha pangan 1. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pengujian sampel yang masuk ke laboratorium 2. Menyesuaikan kemampuan pengujian sampel PIRT		alamat tempat produksi dari pelaku usaha pangan 1. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pengujian sampel yang masuk ke laboratorium 2. Menyesuaikan kemampuan pengujian sampel PIRT			ditemukan Sampel PIRT telah selesai uji Terdapat 3 sampel PIRT yang tidak diuji dengan parameter uji lengkap Telah diusulkan rencana perubahan target sampel pangan

6. **Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti oleh Stakeholder**

a. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Triwulan I Tahun 2025

Tabel 3.22 Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti oleh Stakeholder

Indikator	Kinerja			Kategori & Notifikasi Warna
	Target	Realisasi	%Capaian	
Persentase keputusan/ rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	84	86,67	103,18%	Sangat Baik

Keputusan/Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh BPOM melalui UPT kepada stakeholder yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab terhadap sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan. Rekomendasi hasil inspeksi diberlakukan terhadap sarana produksi, distribusi, saryanfar baik yang Memenuhi Ketentuan maupun Tidak Memenuhi Ketentuan.

Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Tahun 2025

Tabel 3.23 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Tahun 2025 Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti oleh Stakeholder

Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Target Tahun 2025	Realisasi Triwulan I	% Capaian Terhadap Target Tahunan	Kategori
Persentase keputusan/ rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	84,00	86,67	103,18 ▲	Tercapai/ Melampaui

Dari tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Tahun 2025 Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti oleh Stakeholder yang Dilaksanakan sampai pada Triwulan I Tahun 2025 sebesar 103,18% dengan realisasi sebesar 86,67%. Apabila dibandingkan terhadap target tahun 2025 yaitu 84,00%, realisasi telah mencapai target dengan kategori tercapai/ melampaui.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja

Capaian pada indikator ini sudah melampaui target yang ditetapkan, dengan capaian sebesar 103,18%. Hal ini menunjukkan bahwa Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti oleh Stakeholder sudah semakin meningkat. Hal ini karena terjalinnya komunikasi yang efektif antara UPT dengan stakeholder terkait misalnya: dinas kesehatan provinsi/kabupaten setempat, apotek, PBF, ataupun stakeholder lainnya.

d. Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Untuk meningkatkan capaian pada indikator persentase keputusan atau rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder, beberapa upaya strategis perlu dilakukan. Pertama, dilakukan penguatan komunikasi dan koordinasi dengan stakeholder, baik pemerintah daerah, pelaku usaha, maupun instansi teknis, agar tindak lanjut hasil pengawasan dapat dilaksanakan secara cepat dan tepat.

Kedua, perlu adanya peningkatan kejelasan dan ketegasan dalam penyampaian rekomendasi, termasuk penetapan batas waktu tindak lanjut serta pemantauan sistematis terhadap progresnya. Ketiga, pengembangan mekanisme monitoring dan evaluasi terpadu, termasuk pelaporan digital yang terintegrasi, akan membantu memastikan bahwa setiap rekomendasi yang diberikan tercatat, terpantau, dan dievaluasi tindak lanjutnya secara berkala. Selain itu, peningkatan kapasitas dan pemahaman stakeholder terhadap urgensi dan dampak dari rekomendasi pengawasan juga menjadi kunci, agar terdapat komitmen bersama dalam mendukung keberhasilan pengawasan serta perlindungan masyarakat.

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Keberhasilan capaian realisasi indikator Persentase Keputusan/ Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti oleh Stakeholder yang dilaksanakan pada Triwulan I tahun 2025 didukung dengan adanya petugas yang responsive dan cepat tanggap dalam menindaklanjuti keputusan/rekomendasi yang ada. Setiap petugas inspeksi telah memahami dan menindaklanjuti hasil inspeksi sarana sesuai dengan pedoman tindak lanjut yang berlaku dan sesuai dengan SOP yang ada. Dalam mempertahankan keberhasilan capaian indikator ini perlu komitmen dari semua pihak terutama dari sarana agar senantiasa menindaklanjuti rekomendasi yang diterbitkan oleh Balai POM Pangkal Pinang dengan tepat waktu, perlu monitoring secara berkala menggunakan melalui tools monev inovasi AMOY CAKEP Balai POM Pangkal Pinang sehingga rekomendasi dapat selalu ditindaklanjuti tepat waktu dan sesuai dengan timeline.

f. Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

Tabel 3.24 Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Indikator Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti oleh Stakeholder

Indikator	Output			Input (Anggaran)			IE	TE	Capaian
	T	R	%	Target (RPD TW I)	Realisasi	%			
Persentase keputusan/ rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	84	86,67	103,18	0	0	-	-	-	

1) Efisiensi penggunaan anggaran

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa realisasi anggaran untuk indikator ini yaitu mencapai 0, sedangkan realisasi output sebesar 86,67%, target output sebesar 84,00% sehingga persentase capaian output adalah 103,18%. Sedangkan untuk penggunaan anggaran untuk mencapai target output pada indikator persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti oleh Stakeholder capaiannya sebesar 0 Rupiah sehingga Tingkat efisiensi tidak dapat didefinisikan. Hal ini disebabkan adanya blokir pada anggaran yang

mendukung indikator ini. Pencapaian ini akan dioptimalkan pada triwulan berikutnya agar capaian penyerapan anggaran masuk dalam kategori efisien.

2) Upaya mencapai efisiensi penggunaan anggaran

Dalam mendukung pencapaian indikator Persentase keputusan/ rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder, efisiensi penggunaan anggaran dilakukan dengan cara mengintegrasikan pelaksanaan pengawasan dan tindak lanjut lintas kegiatan contohnya bersamaan dengan kegiatan pengawasan. Hal ini mengurangi frekuensi perjalanan dinas yang terpisah dan menekan biaya operasional.

Pemanfaatan sistem informasi pelaporan dan monitoring secara digital juga mempermudah koordinasi serta pelacakan tindak lanjut rekomendasi oleh stakeholder tanpa perlu pertemuan tatap muka yang memerlukan anggaran tambahan. Selain itu, penerapan monev menggunakan tools AMOI CAKEP dalam menetapkan prioritas rekomendasi yang harus segera diingatkan kembali untuk segera merespon rekomendasi dari Balai POM Pangkal Pinang. serta dengan memperkuat kolaborasi bersama stakeholder dan mengedepankan komunikasi digital serta pemantauan terintegrasi, efisiensi anggaran dapat tercapai tanpa mengurangi kualitas dan kecepatan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pengawasan.

g. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Berdasarkan laporan kinerja tahun 2024, diketahui bahwa indikator kinerja Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan dan Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan telah mencapai target yang telah ditetapkan.

Berkaca pada capaian tersebut, untuk mendukung pencapaian target pada indikator Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti oleh Stakeholder, Balai POM di Pangkal Pinang telah menyusun beberapa strategi dan langkah upaya, antara lain:

1) Penyesuaian Aktivitas/Kegiatan untuk Mencapai Target Kinerja

- Meningkatkan koordinasi yang lebih efektif antara UPT dan pemangku kepentingan, sehingga keputusan/rekomendasi hasil inspeksi dapat segera ditindaklanjuti oleh pihak terkait lintas sektor.
- Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara rutin terhadap rekomendasi yang telah disampaikan kepada stakeholder serta menindaklanjuti progres pelaksanaannya.
- Monitoring evaluasi bisa difokuskan pada stakeholder yang tingkat tindak lanjutnya rendah untuk meningkatkan persentase capaian.

2) Penyesuaian Penggunaan Anggaran untuk Mencapai Target Kinerja

- Melakukan revisi dan penyesuaian anggaran perjalanan dinas, khususnya untuk mendukung kegiatan pencapaian pada indikator ini khususnya untuk menyiasati adanya efisiensi anggaran
- Melakukan revisi anggaran pelatihan guna meningkatkan kapasitas petugas Balai POM di Pangkal Pinang dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan.

3) Evaluasi Pencapaian Keberhasilan Kinerja yang Mencakup Tindak Lanjut atas Rekomendasi/Rencana Aksi Kinerja

- Melakukan evaluasi atas masalah atau kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja pada tahun sebelumnya, serta merumuskan langkah-langkah tindak lanjut yang diperlukan.
- Mengidentifikasi peluang untuk meningkatkan capaian indikator pada tahun 2025 dengan menganalisis capaian yang belum optimal berdasarkan hasil evaluasi tahun sebelumnya.
- Laporan kinerja tahun 2024 digunakan untuk mengkaji apakah bentuk rekomendasi yang diberikan sudah cukup jelas dan mudah bagi stakeholder dalam menindaklanjutinya.
- Melaksanakan evaluasi apakah stakeholder yang sebelumnya belum menindaklanjuti sudah diberikan rencana aksi, tindak lanjut atau surat pengingat, dan sejauh mana keberhasilannya.

4) Penyesuaian Perencanaan Kinerja untuk Periode Berikutnya

- Melakukan penyesuaian pada perencanaan kinerja, khususnya pada sub-indikator terkait rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh pemangku kepentingan

- Melakukan penyesuaian sistem monitoring dan follow-up yang lebih sistematis agar rekomendasi pengawasan tidak berhenti hanya di level surat atau rekomendasi saja sehingga dapat

h. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya (Internal maupun Eksternal)

Tabel 3.25 Tindak Lanjut Rekomendasi Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti oleh Stakeholder

Bulan	Kondisi Awal	Rekomendasi	*Timeline*	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
				Rencana Aksi yang Sudah Selesai	Belum		
					Rencana Aksi yang Belum Selesai	*Timeline*	
1	2	3	4	5	6	7	8
Januari	-	-	-	-	-	-	-
Februari	Belum terdapat realisasi pada bulan ferbruari akan tetapi terdapat upaya yang dapat dilakukan agar realisasi pada indikator ini tercapai sesuai target setiap bulanya dengan memastikan stake holder terkait merespon sesuai timeline yang ditetapkan	Melaksanakan monitoring evaluasi kepada sarana yang telah diberikan rekomendasi dan memberikan reminder sesuai timeline menggunakan tools monev (AMOI CAKEP)	Februari	-	Melaksanakan monitoring evaluasi kepada sarana yang telah diberikan rekomendasi dan memberikan reminder sesuai timeline menggunakan tools monev (AMOI CAKEP)	Maret	Monev belum dapat dilaksanakan karena belum terdapat realisasi
Maret	Belum terdapat realisasi pada bulan februari						

7. Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Indikator Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan merupakan nilai rata-rata dari persentase Sarana produksi Obat, persentase Sarana produksi Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan, persentase Sarana produksi Kosmetik yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

1) Sarana produksi (Sarprod) sediaan farmasi yaitu meliputi:
   - Sarana Produksi Obat, Bahan Baku Obat, Produk Biologi, dan Sarana Khusus (misal Unit Transfusi Darah, Fasilitas Radiofarmaka, Sel Punca, dan Rumah Sakit).
   - Sarana yang melakukan pembuatan ekstrak bahan alam, produk obat bahan alam dan/atau suplemen kesehatan untuk semua tahapan dan/atau sebagian

tahapan meliputi industri obat tradisional, Industri Ekstrak bahan alam, Usaha Kecil Obat Tradisional, Usaha mikro obat tradisional, industri suplemen kesehatan

- Fasilitas produksi kosmetik, yaitu industri kosmetik golongan A dan industri kosmetik golongan B.

2) Diperiksa dan ditindaklanjuti melibatkan beberapa tahap, dimulai dari perencanaan pengawasan, pelaksanaan inspeksi pengawasan sarana, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan
3) Diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan mengacu pada :regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut, serta timeline yang ditetapkan pada pedoman dan SOP terkait.

Dikarenakan pada wilayah pengawasan Balai POM di Pangkal Pinang untuk sarana produksi sediaan farmasi hanya terdapat sarana produksi Obat Bahan Alam (OBA) yaitu Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) dan Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) maka perhitungan persentase pada indikator ini hanya diambil dari persentase persentase Sarana produksi Obat Bahan Alam. Adapun untuk perhitungan capaian persentase pada indikator ini adalah sebagai berikut :

% Sarprod OBA = Rata-rata (A+B+C+D)

A. Kesesuaian pelaksanaan inspeksi

= (Jumlah realisasi pengawasan sarana / jumlah target pengawasan inspeksi sesuai Renlak) X 100%

B. Kelengkapan/kualitas pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat

= (Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan lengkap dan tepat waktu/ Jumlah seluruh sarana yang diperiksa) X100%

C. Akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi

= (Jumlah kesimpulan pengawasan sarana yang benar / jumlah sarana yang selesai diperiksa) × 100%

D. Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana

= (Jumlah tindak lanjut hasil pengawasan sarana yang sesuai dan tepat waktu/ jumlah seluruh tindak lanjut) x 100%

a. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Triwulan I Tahun 2025

Tabel 3.26 Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Indikator	Kinerja			Kategori & Notifikasi Warna
	Target	Realisasi	%Capaian	
Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100	0	0,00%	Kurang

Apabila dibandingkan antara realisasi triwulan I dan target pada triwulan I maka capaian persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan belum memenuhi target yang ditetapkan.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Tahun 2025

Tabel 3.27 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Tahun 2025 Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Target Tahun 2025	Realisasi Triwulan I	% Capaian Terhadap Target Tahunan	Kategori
Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100,00	0,00	0,00 ▼	Perlu Upaya Keras

Bila dibandingkan antara realisasi triwulan I dan target tahun 2025 maka capaian persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan belum memenuhi target yang ditetapkan.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja

Target persentase sarana produksi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan ditetapkan dengan pola distribusi flat setiap bulan sepanjang tahun 2025. Konsekuensinya, pelaksanaan kegiatan pengawasan diharapkan telah dimulai sejak awal tahun. Namun demikian, berdasarkan rencana kerja yang telah disusun, Balai POM Pangkal Pinang baru akan melaksanakan pengawasan terhadap 2 (dua) sarana produksi Obat Bahan Alam (OBA) pada triwulan II. Kondisi ini mengakibatkan belum terdapat realisasi kegiatan pada triwulan I, sehingga target pada indikator tersebut belum dapat dicapai.

d. Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Untuk mengatasi permasalahan belum tercapainya target pada indikator persentase sarana produksi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, sejumlah langkah dapat dilakukan untuk menghindari persoalan serupa kembali terjadi. Pertama, dilakukan penyesuaian terhadap perencanaan pelaksanaan pengawasan dengan mempertimbangkan pola distribusi target yang bersifat flat. Hal ini dapat dilakukan dengan mengakselerasi kegiatan pengawasan pada awal tahun di triwulan I, khususnya terhadap sarana produksi yang telah teridentifikasi dan siap diperiksa lebih awal.

Kedua dengan segera melakukan pemeriksaan sarana produksi OBA yang telah ditargetkan sehingga segera terdapat output realisasi pada indikator ini. Dengan pelaksanaan upaya-upaya tersebut, diharapkan realisasi indikator pada triwulan-triwulan berikutnya dapat mengejar ketertinggalan realisasi di awal tahun dan memastikan pencapaian target tahunan secara keseluruhan.

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Belum tercapainya target pada triwulan I tahun 2025 disebabkan oleh ketidaksesuaian antara waktu pelaksanaan kegiatan dengan pola distribusi target yang bersifat flat setiap bulan. Kegiatan pengawasan terhadap sarana produksi Obat Bahan Alam (OBA) yang menjadi bagian dari indikator ini, baru direncanakan pada triwulan II. Dengan demikian, tidak adanya realisasi kegiatan pada triwulan I bukan disebabkan oleh kendala operasional, melainkan oleh pola penjadwalan kegiatan yang belum selaras dengan sistem penetapan target indikator.

f. Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

Tabel 3.28 Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Indikator Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Indikator	Output			Input (Anggaran)			IE	TE	Capaian
	T	R	%	Target (RPD TW I)	Realisasi	%			
Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100	0	0,00	0	0	-	-	-	

1) Efisiensi penggunaan anggaran

Efisiensi anggaran pada triwulan I tahun 2025 belum dapat dihitung karena capaian indikator output belum tersedia.

2) Upaya mencapai efisiensi penggunaan anggaran

Untuk mencapai efisiensi penggunaan anggaran dalam kegiatan pengawasan sarana produksi Obat Bahan Alam (OBA), dilakukan optimalisasi perencanaan melalui pendekatan berbasis risiko, sehingga pengawasan difokuskan pada sarana dengan potensi ketidaksesuaian yang tinggi. Selain itu, penggabungan jadwal dengan kegiatan pengawasan lain di lokasi yang berdekatan sehingga perjalan petugas ke lokasi sarana lebih efektif dari sisi waktu dan biaya dan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaporan dan dokumentasi turut mendukung efisiensi penggunaan sumber daya pada indikator ini.

g. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Indikator ini merupakan indikator yang baru ada di tahun 2025 sehingga tidak ada informasi kinerja periode sebelumnya yang dapat dimanfaatkan dalam upaya peningkatan kinerja.

h. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya (Internal maupun Eksternal)

Tabel 3.29 Tindak Lanjut Rekomendasi Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Bulan	Kondisi Awal	Rekomendasi	*Timeline*	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
				Rencana Aksi yang Sudah Selesai	Belum		
					Rencana Aksi yang Belum Selesai	*Timeline*	
1	2	3	4	5	6	7	8
Januari	-	-	-	-	-	-	-
Februari	Adanya efisiensi anggaran mempengaruhi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi	Melakukan penyesuain target dan anggaran perjalanan untuk memastikan pengawasan tetap terlaksana sesuai dengan ketentuan termasuk pengawasan secara dekstop inspection jika diperlukan	Februari	Melakukan penyesuain target dan anggaran perjalanan untuk memastikan pengawasan tetap terlaksana sesuai dengan ketentuan termasuk pengawasan secara dekstop inspection jika diperlukan	-	-	Telah dilakukan penyesuain target dan anggaran perjalanan untuk memastikan pengawasan tetap terlaksana sesuai dengan ketentuan termasuk pengawasan secara dekstop inspection jika diperlukan

Bulan	Kondisi Awal	Rekomendasi	*Timeline*	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
				Rencana Aksi yang Sudah Selesai	Belum		
					Rencana Aksi yang Belum Selesai	*Timeline*	
Maret	Adanya efisiensi anggaran mempengaruhi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi	Melakukan penyesuaian target dan anggaran perjalanan untuk memastikan pengawasan tetap terlaksana sesuai dengan ketentuan termasuk pengawasan secara dekstop inspection jika diperlukan	Maret	Melakukan penyesuain target dan anggaran perjalanan untuk memastikan pengawasan tetap terlaksana sesuai dengan ketentuan termasuk pengawasan secara dekstop inspection jika diperlukan	-	-	Telah dilakukan penyesuain target dan anggaran perjalanan untuk memastikan pengawasan tetap terlaksana sesuai dengan ketentuan termasuk pengawasan secara dekstop inspection jika diperlukan

8. **Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan**

Indikator ini mengukur sejauh mana tindak lanjut yang dilakukan terhadap pemeriksaan sarana produksi pangan olahan termasuk IRTP yang dianggap berisiko, berdasarkan pedoman pemeriksaan atau ketentuan yang berlaku. termasuk pengelolaan data sarana produksi pangan olahan. Fasilitas produksi pangan olahan meliputi fasilitas produksi pangan olahan, baik yang memproduksi pangan olahan dengan izin edar MD, izin edar IRTP maupun pangan olahan untuk ekspor atau bahan baku produksi sarana lain.

Diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan oleh UPT, dilihat dari ketersediaan data sarana produksi pangan olahan yang dikelola, pemenuhan berdasarkan regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut hasil pengawasan, SOP terkait dan pedoman lainnya, meliputi:

1. Ketepatan waktu tindak lanjut
2. Kesesuaian tindak lanjut termasuk koordinasi dengan lintas sektor terkait hasil pengawasan

a. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Triwulan I Tahun 2025

Tabel 3.30 Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Indikator	Kinerja			Kategori & Notifikasi Warna
	Target	Realisasi	%Capaian	
Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	100	125,00%	Tidak Dapat Disimpulkan

Dari hasil perhitungan, persentase capaian indikator Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan pada Triwulan I Tahun 2025 sebesar 125 % dengan realisasi sebesar 100%. dengan target pada Triwulan I yaitu 80%. Sehingga untuk Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti oleh Stakeholder masuk dalam kategori Tidak Dapat Disimpulkan.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Tahun 2025

Tabel 3.31 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Tahun 2025 Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Target Tahun 2025	Realisasi Triwulan I	% Capaian Terhadap Target Tahunan	Kategori
Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80,00	100,00	125,00 ▲	Tercapai/ Melampaui

Dari tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Tahun 2025 Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan yang Dilaksanakan sampai pada Triwulan I Tahun 2025 sebesar 125,00% dengan realisasi sebesar 100,00%. Apabila dibandingkan terhadap target tahun 2025 yaitu 80,00%, realisasi telah mencapai target dengan kategori tercapai/ melampaui.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja

Keberhasilan capaian realisasi indikator Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti pada Triwulan I tahun 2025 merupakan hasil dari pelaksanaan pengawasan yang terencana dengan baik dan keterlibatan aktif seluruh tim. Capaian ini didukung oleh perencanaan yang matang, dimulai dari penetapan target sarana prioritas berdasarkan pemetaan

risiko, pelaksanaan inspeksi sesuai jadwal, hingga penerbitan tindak lanjut yang sistematis dan sesuai dengan regulasi.

Setiap tahapan pengawasan telah dilaksanakan dengan mengacu pada standar operasional prosedur (SOP), dan seluruh proses mulai dari pemeriksaan hingga tindak lanjut didokumentasikan secara terintegrasi melalui Sistem Informasi Pengawasan Terpadu (SIPT), yang mempermudah pelaporan dan monitoring capaian. Selain itu, keberhasilan ini juga ditunjang oleh kinerja petugas yang responsif dan sigap dalam menindaklanjuti hasil pengawasan. Petugas inspeksi telah memahami pedoman yang berlaku dan melaksanakan tugas sesuai ketentuan. Untuk menjaga konsistensi capaian, diperlukan komitmen berkelanjutan dari pelaku usaha agar menindaklanjuti setiap rekomendasi secara tepat waktu. Monitoring berkala melalui tools monev juga perlu terus dioptimalkan agar setiap rekomendasi dapat ditindaklanjuti sesuai timeline yang telah ditetapkan.

d. Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian indikator pemeriksaan dan tindak lanjut sarana produksi Pangan Olahan, beberapa langkah perbaikan perlu dilakukan. Pertama, dilakukan peningkatan kualitas perencanaan pengawasan berbasis data risiko yang lebih komprehensif, guna memastikan sasaran pengawasan lebih tepat dan berdampak signifikan terhadap keamanan produk yang telah diproduksi oleh sarana tersebut.

Kedua, diperlukan penguatan kapasitas SDM, baik dalam aspek teknis pemeriksaan maupun kemampuan komunikasi dengan pelaku usaha, agar proses pengawasan berjalan efektif dan tindak lanjut dapat dilakukan lebih cepat. Ketiga, perlu optimalisasi pemanfaatan sistem informasi pengawasan, untuk mempercepat pelaporan, monitoring, serta evaluasi hasil pengawasan dan tindak lanjutnya. Selain itu, peningkatan koordinasi lintas sektor dan pembinaan terhadap pelaku usaha secara berkelanjutan akan memperkuat pemahaman terhadap regulasi serta mendorong kepatuhan yang lebih tinggi, sehingga proses tindak lanjut dapat berjalan lancar.

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program yang berkontribusi besar terhadap keberhasilan ini antara lain adalah Program Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan, yang mencakup kegiatan inspeksi rutin sarana produksi, pembinaan kepada pelaku usaha, serta tindak lanjut hasil pemeriksaan. Kegiatan ini didukung dengan perencanaan berbasis risiko dan monitoring evaluasi menggunakan tool monev RHPK inovasi dari Balai POM Pangkal Pinang (AMOI CAKEP). Selain itu, ketersediaan SDM yang kompeten, pelaksanaan pengawasan sesuai SOP, serta pemanfaatan sistem informasi seperti SIPT (Sistem Informasi Pengawasan Terpadu) juga menjadi faktor pendorong utama. SIPT memungkinkan proses pelaporan dan tindak lanjut dilakukan secara sistematis dan terekam dengan baik, sehingga memperkuat akuntabilitas dan transparansi kinerja. Keberhasilan pencapaian kinerja juga sangat bergantung pada sinergi antara perencanaan program yang baik, pelaksanaan kegiatan yang efisien, dukungan teknologi informasi, serta keterlibatan aktif seluruh petugas pengawas.

f. Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

Tabel 3.32 Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Indikator Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Indikator	Output			Input (Anggaran)			IE	TE	Capaian
	T	R	%	Target (RPD TW I)	Realisasi	%			
Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	100	125,00	0	0	-	-	-	

1) Efisiensi penggunaan anggaran

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa realisasi anggaran untuk indikator ini yaitu mencapai 0, sedangkan realisasi output sebesar 100%, target output sebesar 80,00% sehingga persentase capaian output adalah 125,00%. Sedangkan penggunaan anggaran untuk mencapai target output pada indikator Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan capaiannya sebesar 0 sehingga Tingkat efisiensi masuk dalam kategori tidak dapat didefinisikan. Penyebab tidak dapat didefinisikan tingkat

efisiensi ini pada indikator ini disebabkan belum adanya serapan pada komponen anggaran KRO QIC.001 yang dimapping sehingga anggaran tidak terserap tepat waktu pada triwulan I untuk kedepannya perlu diperhatikan lebih seksama terkait mapping anggaran ini agar terjadi keselarasan antaran capain output dan realisasi anggaran.

2) Upaya mencapai efisiensi penggunaan anggaran

Untuk mencapai efisiensi penggunaan anggaran dalam kegiatan pengawasan sarana produksi pangan olahan, perlu dilakukan optimalisasi perencanaan sehingga proses pengawasan hingga pertanggungjawaban anggaran dapat terlaksana tepat waktu. Selain itu, penggabungan jadwal dengan kegiatan pengawasan lain di lokasi yang berdekatan sehingga perjalan petugas ke lokasi sarana lebih efektif dari sisi waktu dan biaya dan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaporan dan dokumentasi turut mendukung efisiensi penggunaan sumber daya pada indikator ini.

g. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Indikator ini merupakan indikator yang baru ada di tahun 2025 sehingga tidak ada informasi kinerja periode sebelumnya yang dapat dimanfaatkan dalam upaya peningkatan kinerja.

h. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya (Internal maupun Eksternal)

Tabel 3.33 Tindak Lanjut Rekomendasi Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Bulan	Kondisi Awal	Rekomendasi	*Timeline*	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
				Rencana Aksi yang Sudah Selesai	Belum		
					Rencana Aksi yang Belum Selesai	*Timeline*	
1	2	3	4	5	6	7	8
Januari	-	-	-	-	-	-	-
Februari	Adanya efisiensi anggaran mempengaruhi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi	Melakukan penyesuain target dan anggaran perjalanan untuk memastikan pengawasan tetap terlaksana sesuai dengan ketentuan termasuk pengawasan secara dekstop inspection jika diperlukan	Februari	Melakukan penyesuain target dan anggaran perjalanan untuk memastikan pengawasan tetap terlaksana sesuai dengan ketentuan termasuk pengawasan secara dekstop inspection jika diperlukan	-	-	Telah dilakukan penyesuain target dan anggaran perjalanan untuk memastikan pengawasan tetap terlaksana sesuai dengan ketentuan termasuk pengawasan secara dekstop inspection jika diperlukan

Bulan	Kondisi Awal	Rekomendasi	*Timeline*	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
				Rencana Aksi yang Sudah Selesai	Belum		
					Rencana Aksi yang Belum Selesai	*Timeline*	
Maret	Adanya efisiensi anggaran mempengaruhi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi	Melakukan penyesuain target dan anggaran perjalanan untuk memastikan pengawasan tetap terlaksana sesuai dengan ketentuan termasuk pengawasan secara dekstop inspection jika diperlukan	Maret	Melakukan penyesuain target dan anggaran perjalanan untuk memastikan pengawasan tetap terlaksana sesuai dengan ketentuan termasuk pengawasan secara dekstop inspection jika diperlukan	-	-	Telah dilakukan penyesuain target dan anggaran perjalanan untuk memastikan pengawasan tetap terlaksana sesuai dengan ketentuan termasuk pengawasan secara dekstop inspection jika diperlukan

9. **Persentase Fasilitas Distribusi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan**

Sarana distribusi sediaan farmasi adalah sarana/fasilitas yang memiliki kewenangan dan melakukan distribusi sediaan farmasi, yang meliputi:

- Fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi obat dan bahan obat meliputi Pedagang Besar Farmasi dan Fasilitasi Pengelolaan Kefarmasian;
- Fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat meliputi Rumah Sakit, Klinik, Puskesmas, Apotek, Toko Obat dan fasilitas lain sesuai ketentuan peratuaran perundang-undangan;
- Sarana yang melakukan distribusi obat bahan alam dan suplemen kesehatan yang terdiri dari usaha perorangan, badan usaha di bidang pemasaran suplemen kesehatan, distributor, agen, swalayan, apotik, toko obat, depot jamu, stokis MLM, dan pengecer;
- Fasilitas distribusi sediaan farmasi meliputi fasilitas distribusi kosmetik, yaitu fasilitas distribusi pemilik notifikasi dan fasilitas distribusi bukan pemilik notifikasi.

Diperiksa dan ditindaklanjuti melibatkan beberapa tahap, dimulai dari perencanaan pengawasan, pelaksanaan pengawasan sarana, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan. Sedangkan sesuai ketentuan mengacu pada: regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut, serta timeline yang ditetapkan pada pedoman dan SOP terkait.

a. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Triwulan I Tahun 2025

Tabel 3.34 Persentase Fasilitas Distribusi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Indikator	Kinerja			Kategori & Notifikasi Warna
	Target	Realisasi	%Capaian	
Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	94,75	100	105,54%	Sangat Baik

Dari hasil perhitungan, persentase capaian indikator Fasilitas Distribusi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan pada Triwulan I Tahun 2025 sebesar 105,54% dengan realisasi sebesar 100%. dengan target pada Triwulan I yaitu 94,75%. Sehingga untuk Persentase Fasilitas Distribusi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan masuk dalam kategori capaian sangat baik dengan persentase normalisasi capaian yakni 105,54%.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Tahun 2025

Tabel 3.35 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Tahun 2025 Persentase Fasilitas Distribusi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Target Tahun 2025	Realisasi Triwulan I	% Capaian Terhadap Target Tahunan	Kategori
Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	94,75	100,00	105,54 ▲	Tercapai/ Melampaui

Dari tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Tahun 2025 Persentase Fasilitas Distribusi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan yang Dilaksanakan sampai pada Triwulan I Tahun 2025 sebesar 105,54% dengan realisasi sebesar 100,00%. Apabila dibandingkan terhadap target tahun 2025 yaitu 94,75%, realisasi telah mencapai target dengan kategori tercapai/melampaui.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja

Capaian pada indikator ini sudah melampaui target yang ditetapkan, dengan capaian sebesar 105,54%. Hal ini menunjukkan bahwa Persentase Fasilitas Distribusi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan sudah semakin meningkat.

Keberhasilan pencapaian indikator ini mencerminkan adanya keterpaduan dan kesinambungan dalam seluruh tahapan pengawasan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Beberapa faktor utama yang mendukung capaian tersebut antara lain:

1. Perencanaan yang Tepat Sasaran

   Proses perencanaan dilakukan dengan mengacu pada data analisis risiko dan hasil pemetaan tahunan menggunakan history hasil pengawasan fasilitas distribusi sediaan farmasi. Penetapan prioritas sasaran pemeriksaan berbasis risiko memungkinkan kegiatan pengawasan difokuskan pada fasilitas yang memiliki potensi ketidaksesuaian tertinggi, sehingga penggunaan sumber daya menjadi lebih efektif dan tepat guna.

2. Pelaksanaan yang Efisien dan Sesuai SOP

   Pemeriksaan dilakukan oleh petugas yang kompeten dan terlatih, dengan mengacu pada standar operasional prosedur (SOP) dan ketentuan yang berlaku. Kesiapan tim pengawas, dukungan sarana prasarana, serta koordinasi internal yang solid berkontribusi besar dalam memastikan bahwa pemeriksaan berjalan sesuai ketentuan, baik dari sisi teknis maupun administratif.

3. Pelaporan yang Tepat Waktu dan Terintegrasi

   Hasil pemeriksaan dilaporkan secara sistematis melalui Sistem Informasi Pengawasan Terpadu (SIPT), yang mendukung efisiensi dalam dokumentasi serta mempercepat proses penilaian dan tindak lanjut. Pemanfaatan SIPT juga mempermudah pelacakan status rekomendasi dan meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan pengawasan.

4. Evaluasi dan Tindak Lanjut yang Konsisten

   Tindak lanjut hasil pemeriksaan dilaksanakan secara cepat dan terarah, baik melalui pembinaan langsung kepada fasilitas distribusi maupun penerbitan sanksi administratif apabila diperlukan. Evaluasi berkala dilakukan untuk memastikan setiap rekomendasi ditindaklanjuti tepat waktu. Koordinasi dan komunikasi yang baik dengan pelaku usaha turut mendorong tingginya tingkat kepatuhan.

Secara keseluruhan, keberhasilan ini merupakan hasil sinergi antara perencanaan strategis, pelaksanaan teknis yang disiplin, pelaporan yang tertata, serta tindak lanjut dan evaluasi yang konsisten. Capaian ini juga mencerminkan komitmen Balai POM Pangkal Pinang dalam memastikan bahwa produk farmasi yang beredar di masyarakat melalui jalur distribusi berada dalam pengawasan yang ketat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

d. Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Untuk menjaga keberlanjutan capaian dan meningkatkan kualitas pengawasan fasilitas distribusi sediaan farmasi, berikut adalah beberapa rekomendasi perbaikan kinerja yang dapat dilakukan:

1. Penguatan Perencanaan Berbasis Risiko

Perlu dilakukan penyempurnaan dalam pemetaan dan analisis risiko fasilitas distribusi, agar perencanaan pengawasan lebih tepat sasaran dan berbasis data terkini. Ini dapat dilakukan melalui integrasi data pengawasan tahun sebelumnya dengan hasil evaluasi risiko terbaru.

2. Peningkatan Kapasitas SDM Pengawas

Peningkatan kompetensi teknis dan administratif petugas pengawas perlu terus dilakukan secara berkelanjutan, melalui pelatihan, workshop, atau bimbingan teknis, guna memastikan pemeriksaan dilakukan sesuai standar dan mendalam.

3. Optimalisasi Penggunaan SIPT dan Sistem Pelaporan Digital

Diperlukan penguatan dalam pemanfaatan Sistem Informasi Pengawasan Terpadu (SIPT) agar seluruh tahapan – dari pemeriksaan hingga tindak lanjut – dapat terdokumentasi dengan baik, serta memudahkan monitoring dan pelaporan kinerja.

4. Percepatan Tindak Lanjut dan Peningkatan Pembinaan:

Mendorong pelaku usaha untuk segera menindaklanjuti hasil pemeriksaan melalui peningkatan intensitas pembinaan, pendekatan persuasif, serta pemberian peringatan atau sanksi secara terstruktur bagi yang tidak patuh.

5. Monitoring dan Evaluasi Berkala

Melakukan evaluasi rutin atas tindak lanjut yang telah dilakukan dan kendala yang dihadapi, untuk dijadikan bahan perbaikan strategi pengawasan ke depan. Tools

monev (AMOI CAKEP) berbasis digital juga dapat dimanfaatkan untuk efisiensi proses ini.

6. Penguatan Sinergi Antar Stakeholder

Meningkatkan koordinasi lintas sektor, termasuk dengan dinas kesehatan, asosiasi pelaku usaha, dan instansi terkait, guna memperluas jangkauan pembinaan dan mempercepat respons terhadap temuan lapangan.

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Keberhasilan pencapaian indikator Persentase Fasilitas Distribusi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan yang dilaksanakan pada Triwulan I tahun 2025 didukung oleh pelaksanaan program pengawasan yang terencana dan terfokus. Penggunaan Sistem Informasi Pengawasan Terpadu (SIPT) membantu proses pelaporan dan tindak lanjut secara cepat dan akurat. Selain itu, kegiatan pembinaan kepada pelaku usaha serta koordinasi yang baik dengan lintas sektor memperkuat efektivitas pengawasan. Monitoring dan evaluasi berkala menggunakan inovasi dari Balai POM di Pangkal Pinang yaitu AMOI CAKEP juga dioptimalkan untuk memastikan tindak lanjut berjalan sesuai ketentuan dan timeline yang telah ditetapkan, sehingga kinerja dapat dipertahankan dan ditingkatkan.

f. Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

Tabel 3.36 Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Indikator Persentase Fasilitas Distribusi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Indikator	Output			Input (Anggaran)			IE	TE	Capaian
	T	R	%	Target (RPD TW I)	Realisasi	%			
Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	94,8	100	105,54	15.320.000	10.000.000	65,27	**1,62**	**0,62**	**90% (Efisien)**

1) Efisiensi penggunaan anggaran

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa realisasi anggaran untuk indikator ini yaitu mencapai 10.000.000 atau mencapai 65,27% realisasi anggaran terhadap target RPD TW I yakni 15.320.000 sedangkan realisasi output sebesar

100%, target output sebesar 94,8% sehingga persentase capaian output adalah 105,54% dengan tingkat efisiensi 0,62. Dengan kata lain penggunaan anggaran untuk mencapai target output pada indikator Persentase Fasilitas Distribusi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan capaiannya sebesar 90% dengan capaian Efisien hal ini didukung oleh perencanaan kegiatan berbasis risiko yang tepat sasaran, pemanfaatan SIPT untuk pelaporan digital, serta pelaksanaan pengawasan yang terintegrasi dan optimalisasi dalam penggunaan anggaran. Pencapaian ini akan terus dioptimalkan pada triwulan berikutnya.

2) Upaya mencapai efisiensi penggunaan anggaran

Untuk mencapai efisiensi penggunaan anggaran dalam kegiatan pengawasan sarana distribusi sediaan farmasi, perlu dilakukan optimalisasi perencanaan sehingga proses pengawasan hingga pertanggungjawaban anggaran dapat terlaksana tepat waktu. Selain itu, penggabungan jadwal dengan kegiatan pengawasan lain di lokasi yang berdekatan sehingga perjalan petugas ke lokasi sarana lebih efektif dari sisi waktu dan biaya dan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaporan dan dokumentasi turut mendukung efisiensi penggunaan sumber daya pada indikator ini.

g. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Indikator ini merupakan indikator yang baru ada di tahun 2025 sehingga tidak ada informasi kinerja periode sebelumnya yang dapat dimanfaatkan dalam upaya peningkatan kinerja.

h. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya (Internal maupun Eksternal)

Tabel 3.37 Tindak Lanjut Rekomendasi Persentase Fasilitas Distribusi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Bulan	Kondisi Awal	Rekomendasi	*Timeline*	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
				Rencana Aksi yang Sudah Selesai	Belum		
					Rencana Aksi yang Belum Selesai	*Timeline*	
1	2	3	4	5	6	7	8
Januari	-	-	-	-	-	-	-
Februari	1. Adanya efisiensi anggaran mempengaruhi terhadap	1. Melakukan penyesuain target dan anggaran perjalanan untuk	Februari	Melakukan penyesuain target dan anggaran perjalanan untuk	Melakukan monitoring terhadap perencanaan dan	Maret	Telah dilakukan penyesuaian target dan anggaran perjalanan untuk memastikan

Bulan	Kondisi Awal	Rekomendasi	*Timeline*	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
				Rencana Aksi yang Sudah Selesai	Belum		
					Rencana Aksi yang Belum Selesai	*Timeline*	
	perencanaan dan pelaksanaan pemeriksaan sarana distirbusi 2. Realisasi telah melebihi target yang ditetapkan menurunnya jumlah target output meningkat kualitas pengawasan yang dilakukan oleh petugas sehingga pengawasan dapat dilaksanakan dengan lebih optimal	memastikan pengawasan tetap terlaksana sesuai dengan ketentuan termasuk pengawasan secara dekstop inspection jika diperlukan 2. Melakukan monitoring terhadap perencanaan dan pelaksanaan pengawasan sarana untuk memastikan kesesuain dengan ketentuan		memastikan pengawasan tetap terlaksana sesuai dengan ketentuan termasuk pengawasan secara dekstop inspection jika diperlukan	pelaksanaan pengawasan sarana untuk memastikan kesesuain dengan ketentuan dalam proses penyusunan tools		pengawasan tetap terlaksana sesuai dengan ketentuan termasuk pengawasan secara dekstop inspection jika diperlukan
Maret	1. Adanya efisiensi anggaran mempengaruhi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pemeriksaan sarana distirbusi 2. Realisasi telah melebihi target yang ditetapkan menurunnya jumlah target output meningkat kualitas pengawasan yang dilakukan oleh petugas sehingga pengawasan dapat dilaksanakan dengan lebih optimal	Melakukan monitoring terhadap perencanaan dan pelaksanaan pengawasan sarana untuk memastikan kesesuaian dengan ketentuan	Maret	Melakukan monitoring terhadap perencanaan dan pelaksanaan pengawasan sarana untuk memastikan kesesuaian dengan ketentuan		Maret	Telah dilakukan Monitoring dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksaan pengawasan sarana

10. Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

a. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Triwulan I Tahun 2025

Sarana distribusi pangan olahan adalah tempat melakukan kegiatan penerimaan, penyimpanan, pemajangan, distribusi, pengangkutan, dan/atau penyaluran Pangan Olahan. Sedangkan pengertian diperiksa sesuai ketentuan berarti mengikuti pedoman pemeriksaan sarana peredaran, pedoman tindak lanjut, serta SOP terkait, meliputi:

1. Pemenuhan target sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa
2. Ketepatan waktu pelaporan
3. Kesesuaian tindak lanjut (TL pemeriksaan dihitung terhadap TL pertama yang diberikan setelah pemeriksaan sarana.

Tabel 3.38 Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Indikator	Kinerja			Kategori & Notifikasi Warna
	Target	Realisasi	%Capaian	
Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	100	125,00%	Tidak Dapat Disimpulkan

Dari hasil perhitungan, persentase capaian indikator Sarana Distribusi Pangan Olahan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan pada Triwulan I Tahun 2025 sebesar 125,00% dengan realisasi sebesar 100% dan target sebesar 80%. Sehingga untuk Persentase Fasilitas Distribusi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan masuk dalam kategori capaian Tidak Dapat Disimpulkan dengan persentase capaian yakni 125%.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Tahun 2025

Tabel 3.39 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Tahun 2025 Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Target Tahun 2025	Realisasi Triwulan I	% Capaian Terhadap Target Tahunan	Kategori
Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	100	125 ▲	Tercapai/ Melampaui

Dari tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Tahun 2025 Persentase Fasilitas Distribusi Pangan Olahan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan yang Dilaksanakan sampai pada Triwulan I Tahun 2025 sebesar 125% dengan realisasi sebesar 100,00%. Apabila dibandingkan terhadap target tahun 2025 yaitu 80%, realisasi telah mencapai target dengan kategori tercapai/melampaui.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja

Capaian pada indikator ini sudah melampaui target yang ditetapkan, dengan capaian sebesar 125%. Hal ini menunjukkan bahwa Persentase Fasilitas Distribusi Pangan Olahan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan sudah semakin meningkat. Keberhasilan capaian indikator ini merupakan hasil dari implementasi pengawasan yang terstruktur dan terintegrasi dengan baik, mencakup seluruh tahapan mulai dari perencanaan hingga evaluasi.

1. Tahapan perencanaan telah dilakukan secara sistematis dan berbasis data risiko, sehingga pemilihan sarana distribusi pangan olahan yang menjadi prioritas pengawasan lebih tepat sasaran. Pelaksanaan pengawasan berjalan efektif dengan keterlibatan petugas yang kompeten, yang bekerja berdasarkan standar operasional prosedur (SOP) dan pedoman teknis yang berlaku.
2. Setiap hasil pengawasan ditindaklanjuti secara cepat dan tepat oleh petugas, serta didukung oleh pelaku usaha yang kooperatif. Pelaporan hasil pengawasan melalui Sistem Informasi Pengawasan Terpadu (SIPT) dilakukan secara tertib dan tepat waktu, sehingga memudahkan pelacakan tindak lanjut dan pelaporan capaian.
3. Proses monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa seluruh rekomendasi ditindaklanjuti sesuai ketentuan dan dalam rentang waktu yang telah ditetapkan. Koordinasi internal dan komunikasi lintas sektor juga turut memperkuat keberhasilan pencapaian indikator ini.
4. Dengan sinergi seluruh tahapan tersebut, Balai POM Pangkal Pinang berhasil mempertahankan kualitas pengawasan terhadap sarana distribusi pangan olahan, sekaligus menjaga efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan.

d. Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Untuk menjaga konsistensi dan meningkatkan kualitas capaian indikator ke depannya, beberapa langkah perbaikan yang dapat dilakukan antara lain :

1. Penguatan Perencanaan Berbasis Risiko

   Menyesuaikan kembali prioritas pengawasan berdasarkan evaluasi risiko terbaru agar intervensi lebih tepat sasaran dan efisien.

2. Peningkatan Kompetensi SDM

   Melaksanakan pelatihan berkala bagi petugas pengawasan untuk memperkuat pemahaman terhadap regulasi terkini dan teknik pemeriksaan.

3. Optimalisasi Pemanfaatan SIPT

   Meningkatkan kedisiplinan penggunaan SIPT dalam seluruh tahapan pengawasan, termasuk pelaporan dan tindak lanjut, untuk mempercepat proses dan menjamin akurasi data.

4. Peningkatan Koordinasi dan Pembinaan

   Memperkuat komunikasi dengan pelaku usaha melalui kegiatan pembinaan dan sosialisasi, serta memastikan rekomendasi pengawasan ditindaklanjuti tepat waktu.

5. Monitoring dan Evaluasi Berkelanjutan

   Melakukan monev rutin untuk menilai efektivitas tindak lanjut, sekaligus sebagai dasar perbaikan perencanaan dan pelaksanaan ke depan.

Dengan penerapan strategi tersebut secara konsisten, diharapkan kinerja pengawasan terhadap sarana distribusi pangan olahan dapat terus ditingkatkan dan berkontribusi pada perlindungan kesehatan masyarakat.

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Keberhasilan pencapaian indikator Persentase Fasilitas Distribusi Pangan Olahan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan yang dilaksanakan pada Triwulan I tahun 2025 didukung oleh pelaksanaan program pengawasan yang terencana dan terfokus. Penggunaan Sistem Informasi Pengawasan Terpadu (SIPT) membantu proses pelaporan dan tindak lanjut secara cepat dan akurat.

Selain itu, kegiatan pembinaan kepada pelaku usaha serta koordinasi yang baik dengan lintas sektor memperkuat efektivitas pengawasan. Monitoring dan evaluasi berkala menggunakan inovasi dari Balai POM di Pangkal Pinang yaitu AMOI CAKEP juga dioptimalkan untuk memastikan tindak lanjut berjalan sesuai ketentuan dan timeline yang telah ditetapkan, sehingga kinerja dapat dipertahankan dan ditingkatkan.

f. Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

Tabel 3.40 Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Indikator Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Indikator	Output			Input (Anggaran)			IE	TE	Capaian
	T	R	%	Target (RPD TW I)	Realisasi	%			
Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	100	125,00	0	0	-	-	-	

1) Efisiensi penggunaan anggaran

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa realisasi anggaran untuk indikator ini yaitu mencapai 0 , sedangkan realisasi output sebesar 125%, target output sebesar 80% sehingga persentase capaian output adalah 125,00%. Dengan kata lain penggunaan anggaran untuk mencapai target output pada indikator Persentase Fasilitas Distribusi Pangan Olahan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan capaiannya tidak dapat didefinisikan disebabkan terdapat output akan tetapi belum terdapat serapan anggaran. Hal ini terjadi disebabkan oleh adanya kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pada Triwulan I, yang mengakibatkan sebagian anggaran terblokir dan tidak dapat digunakan sesuai rencana. Kondisi ini menyebabkan penyerapan anggaran tidak optimal pada periode tersebut.

2) Upaya mencapai efisiensi penggunaan anggaran

Untuk mengatasi tingkat efisiensi anggaran yang nilainya tidak dapat didefinisikan akibat penggunaan anggaran yang belum optimal pada indikator maka ke depannya diperlukan penyesuaian terhadap perencanaan penggunaan

anggaran agar lebih adaptif terhadap kebijakan dan dapat mengoptimalkan efisiensi anggaran.

g. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Indikator ini merupakan indikator yang baru ada di tahun 2025 sehingga tidak ada informasi kinerja periode sebelumnya yang dapat dimanfaatkan dalam upaya peningkatan kinerja

h. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya (Internal maupun Eksternal)

Tabel 3.41 Tindak Lanjut Rekomendasi Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Bulan	Kondisi Awal	Rekomendasi	*Timeline*	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
				Rencana Aksi yang Sudah Selesai	Belum		
					Rencana Aksi yang Belum Selesai	*Timeline*	
1	2	3	4	5	6	7	8
Januari	-	-	-	-	-	-	-
Februari	1. Adanya efisiensi anggaran mempengaruhi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pemeriksaan sarana distirbusi 2. Realisasi telah melebihi target yang ditetapkan menurunnya jumlah target output meningkat kualitas pengawasan yang dilakukan oleh petugas sehingga pengawasan dapat dilaksanakan dengan lebih optimal	Melakukan penyesuaian target dan anggaran perjalanan untuk memastikan pengawasan tetap terlaksana sesuai dengan ketentuan termasuk pengawasan secara dekstop inspection jika diperlukan	Februari	Melakukan penyesuain target dan anggaran perjalanan untuk memastikan pengawasan tetap terlaksana sesuai dengan ketentuan termasuk pengawasan secara dekstop inspection jika diperlukan	-	-	Telah dilakukan penyesuain target dan anggaran perjalanan untuk memastikan pengawasan tetap terlaksana sesuai dengan ketentuan termasuk pengawasan secara dekstop inspection jika diperlukan
Maret	1. Adanya efisiensi anggaran mempengaruhi terhadap perencanaan dan	Melakukan monitoring terhadap perencanaan dan pelaksanaan pengawasan sarana	Maret	Melakukan monitoring terhadap perencanaan dan pelaksanaan pengawasan sarana	-	Maret	Telah dilakukan penyesuain target dan anggaran perjalanan untuk memastikan pengawasan tetap

Bulan	Kondisi Awal	Rekomendasi	*Timeline*	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
				Rencana Aksi yang Sudah Selesai	Belum		
					Rencana Aksi yang Belum Selesai	*Timeline*	
	pelaksanaan pemeriksaan sarana distirbusi 2. Realisasi telah melebihi target yang ditetapkan menurunnya jumlah target output meningkat kualitas pengawasan yang dilakukan oleh petugas sehingga pengawasan dapat dilaksanakan dengan lebih optimal	untuk memastikan kesesuaian dengan ketentuan		untuk memastikan kesesuaian dengan ketentuan			terlaksana sesuai dengan ketentuan termasuk pengawasan secara dekstop inspection jika diperlukan

11. Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan

a. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Triwulan I Tahun 2025

Indikator Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur efektivitas pengawasan iklan sediaan farmasi dan pangan olahan di wilayah kerja Balai POM di Pangkal Pinang. Yang dimaksud Iklan sediaan farmasi disini mencakup Iklan Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi.

Sedangkan yang dimaksud dari Iklan sendiri adalah setiap keterangan atau pernyataan mengenai Obat, Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan/atau merek Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan Pangan Olahan dalam bentuk visual, audio, audiovisual, untuk pemasaran dan/atau perdagangan Obat, Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan/atau merek Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan Pangan Olahan. Kemudian yang dimaksud diawasi sesuai ketentuan berarti pemeriksaan/evaluasi dilakukan berdasarkan regulasi perundang-undangan; pedoman pengawasan periklanan obat, obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan

olahan; pedoman tindak lanjut; serta timeline yang ditetapkan pada pedoman dan SOP terkait.

Adapun untuk perhitungan persentase capaian pada indikator ini dengan cara menghitung rata-rata capaian persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan.

I. Persentase Iklan obat yang diawasi sesuai ketentuan $= \frac{a+b}{2}$

a. Pemenuhan jumlah target pengawasan

$= \frac{Jumlah\ iklan\ yang\ selesai\ diawasi}{Jumlah\ target\ iklan\ yang\ diawasi\ sesuai\ renlak}$ x 100%

b. Ketepatan waktu pelaporan

$= \frac{Jumlah\ iklan\ yang\ dilaporkan\ tepat\ waktu}{Jumlah\ target\ iklan\ yang\ diawasi}$ x 100%

II. Persentase iklan Obat Bahan Alam yang diawasi sesuai ketentuan = rata-rata (a+b+c)

a. Pemenuhan target pengawasan = (Jumlah iklan yang selesai diawasi/ jumlah target iklan pengawasan sesuai Renlak) X100%
b. Ketepatan waktu pelaporan = (Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu/ jumlah iklan yang selesai diawasi) X 100%
c. Akurasi pengambilan keputusan = (Jumlah keputusan hasil pengawasan iklan yang sesuai/ jumlah seluruh keputusan hasil pengawasan) X 100%

III. Persentase iklan Suplemen Kesehatan yang diawasi sesuai ketentuan = rata-rata (a+b+c)

a. Pemenuhan target pengawasan = (Jumlah iklan yang selesai diawasi/ jumlah target iklan pengawasan sesuai Renlak) X100%
b. Ketepatan waktu pelaporan = (Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu/ jumlah iklan yang selesai diawasi) X 100%
c. Akurasi pengambilan keputusan = (Jumlah keputusan hasil pengawasan iklan yang sesuai/ jumlah seluruh keputusan hasil pengawasan) X 100%

IV. Persentase iklan kosmetik yang diawasi sesuai ketentuan = (a+b) / 2

a. Rerata persentase capaian pengawasan iklan yang diawasi pada media sesuai target = Jumlah persentase capaian pengawasan iklan yang diawasi pada media sesuai target / jumlah media (4)
   - Persentase capaian pengawasan iklan yang diawasi pada media sesuai target = (capaian jumlah iklan per media / jumlah target per media) x 100%

   Keterangan : capaian per media tidak lebih dari sama dengan 100%

b. Rerata persentase iklan yang dilaporkan tepat waktu = (Persentase rerata capaian evaluasi dan verifikasi oleh Operator UPT + Persentase rerata capaian pelaporan ke Operator Pusat) / 2
   - Persentase rerata capaian evaluasi dan verifikasi oleh Operator UPT = (Jumlah iklan yang evaluasi dan verifikasi oleh Operator UPT yang tepat waktu / jumlah iklan yang dievaluasi) x 100%
   - Persentase rerata capaian pelaporan ke Operator Pusat = (Jumlah iklan yang dilaporkan ke Operator Pusat yang tepat waktu / jumlah iklan yang dievaluasi) x 100%

V. Persentase iklan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan = (a+b+c)
   a. Pemenuhan target pengawasan = (Jumlah iklan yang diawasi/ jumlah target iklan sesuai renlak) X 40%
   b. Kesesuaian proporsi media iklan yang disampling = Rata-rata dari perhitungan ((jumlah iklan yang diawasi per media iklan/jumlah iklan yang diawasi) / proporsi target media)X 20%
   c. Ketepatan waktu pelaporan = (Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu/ jumlah iklan yang diawasi) X 40%

Catatan: poin a dan b, jika realisasi di atas target maka realisasi maksimal dihitung 100%.

Tabel 3.42 Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan

Indikator	Kinerja			Kategori & Notifikasi Warna
	Target	Realisasi	%Capaian	
Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	85,4	100,69	117,90%	Tidak Dapat Disimpulkan

Pada Triwulan I, realisasi persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan oleh Balai POM di Pangkal Pinang mencapai 101,19%. Persentase tersebut telah melampaui target triwulanan, dengan capaian terhadap target triwulan I tahun 2025 sebesar 118,49%, yang dikategorikan Tidak Dapat Disimpulkan.

Dalam perjalanannya, terdapat penyesuaian tools perhitungan capaian IKU persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan, khususnya terkait iklan pangan oleh Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan. Penyesuaian tersebut berdampak pada perubahan realisasi dari 101,19% menjadi 100,69%, sehingga capaian juga mengalami penurunan dari 118,49% menjadi 117,90%. Persentase tersebut, apabila dibandingkan dengan target triwulanan, telah melampaui target dan kategorinya tetap berada pada status 'Tidak Dapat Disimpulkan.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Tahun 2025

Tabel 3.43 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Tahun 2025
Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan

Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Target Tahun 2025	Realisasi Triwulan I	% Capaian Terhadap Target Tahunan	Kategori
Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	85,40	100,69	117,90 ▲	Tercapai/ Melampaui

Pada Triwulan I, realisasi persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan oleh Balai POM di Pangkal Pinang mencapai 100,69%. Persentase tersebut telah melampaui target, dengan capaian terhadap target tahunan tahun 2025 sebesar 117,90%.

Dalam perjalanannya, terdapat penyesuaian tools perhitungan capaian IKU persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan, khususnya terkait iklan pangan oleh Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan. Penyesuaian tersebut berdampak pada perubahan realisasi dari 101,19% menjadi 100,69%, sehingga capaian juga mengalami penurunan dari 118,49% menjadi 117,90%. Persentase tersebut, apabila dibandingkan dengan target tahunan, telah melampaui target dan kategorinya tetap berada pada status Tercapai/Melampaui.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja

Keberhasilan capaian indikator persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan pada Triwulan I tahun 2025 oleh Balai POM di Pangkal Pinang, yang telah melampaui target dengan capaian sebesar 117,90% terhadap target, merupakan hasil dari beberapa faktor pendukung diantaranya.

Pertama, peningkatan intensitas pemantauan media oleh petugas, baik media cetak, elektronik, maupun digital, memungkinkan identifikasi lebih cepat terhadap iklan yang tidak sesuai ketentuan. Kedua, adanya koordinasi yang efektif dengan instansi terkait, termasuk Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID), Dinas Kesehatan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan turut mempercepat proses penanganan dan tindak lanjut. Selain itu, penerapan sistem pelaporan internal melalui SIPT secara realtime dan responsif dan penggunaan sistem informasi pengawasan iklan dari direktorat terkait secara optimal juga mempermudah pengumpulan data, analisa dan pelaporan hasil pengawasan iklan.

d. Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Untuk menjaga dan meningkatkan capaian kinerja pengawasan iklan sediaan farmasi dan pangan olahan ke depannya, diperlukan beberapa langkah perbaikan dan penyempurnaan. Pertama, perlu dilakukan peningkatan kapasitas SDM petugas pengawas melalui pelatihan, khususnya dalam aspek analisis konten iklan digital yang semakin kompleks dan dinamis. Pelatihan teknis yang berkelanjutan akan memperkuat kemampuan petugas dalam mendeteksi pelanggaran secara cepat dan tepat. Kedua, penguatan sistem pemantauan berbasis teknologi informasi dengan memanfaatkan subsite dari direktorat terkait dalam melakukan analisa dan evaluasi iklan yang diawasi, guna meningkatkan akurasi dan efisiensi hasil pemantauan iklan secara real time. Ketiga, meningkatkan sistem pengawasan iklan dengan melibatkan pelaporan dari masyarakat sehingga dapat memperluas jangkauan deteksi dini terhadap iklan yang tidak sesuai ketentuan.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan kinerja pengawasan iklan tidak hanya konsisten dalam pencapaian target, tetapi juga semakin berkualitas dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat dari informasi iklan yang menyesatkan atau tidak sesuai ketentuan.

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Keberhasilan capaian pada Triwulan I tahun 2025, yang telah melampaui target menunjukkan bahwa program Pemantauan dan Evaluasi Iklan Produk Obat dan Makanan telah berjalan secara optimal. Beberapa kegiatan yang berkontribusi terhadap keberhasilan ini antara lain: intensifikasi pemantauan media, optimalisasi penggunaan sistem informasi pengawasan iklan dan peningkatan koordinasi dengan instansi terkait. Selain itu, kecepatan respons petugas dalam menindaklanjuti temuan iklan tidak sesuai ketentuan serta konsistensi dalam pelaporan juga menjadi faktor penting yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator ini.

f. Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

Tabel 3.44 Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Indikator Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan

Indikator	Output			Input (Anggaran)			IE	TE	Capaian
	T	R	%	Target (RPD TW I)	Realisasi	%			
Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	85,4	100,69	117,90	810.000	808.250	99,78	**1,18**	**0,18**	**100% (Efisien)**

1) Efisiensi penggunaan anggaran

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa realisasi anggaran yang dialokasikan untuk mencapai target pada indikator Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan sebesar 100,69%. Jika capaian realisasi anggaran dibandingkan dengan capaian kinerja diperoleh tingkat efisiensi sebesar 0,18 dengan capaian tingkat efisiensi 100% yang menunjukkan bahwa penggunaan sumber daya/anggaran telah efisien.

2) Upaya mencapai efisiensi penggunaan anggaran

Efisiensi anggaran diupayakan melalui optimalisasi perencanaan kegiatan, khususnya dengan mengintegrasikan jadwal pengawasan lintas program untuk menekan biaya operasional contohnya melakukan pengawasan iklan bersamaan dengan saat pemeriksaan sarana maupun saat sampling produk obat dan makanan. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaporan dan

dokumentasi turut mengurangi penggunaan sumber daya manual. Selain itu, pendekatan pengawasan berbasis risiko memungkinkan fokus pada sasaran prioritas dan sinergi lintas sektor membantu memperluas cakupan tanpa menambah beban anggaran.

g. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Indikator ini merupakan indikator yang baru ada di tahun 2025 sehingga tidak ada informasi kinerja periode sebelumnya yang dapat dimanfaatkan dalam upaya peningkatan kinerja.

h. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya (Internal maupun Eksternal)

Tabel 3.45 Tindak Lanjut Rekomendasi Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan

Bulan	Kondisi Awal	Rekomendasi	*Timeline*	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
				Rencana Aksi yang Sudah Selesai	Belum		
					Rencana Aksi yang Belum Selesai	*Timeline*	
1	2	3	4	5	6	7	8
Januari	-	-	-		-	-	-
Februari	Kendala: 1. Keterbatasan iklan di media yang ditentukan misalnya pada media luar ruang sehingga berpotensi target tidak tercapai 2. Beberapa iklan dengan kategori tertentu yang secara ketentuan tidak boleh di iklankan secara bebas sulit temukan khususnya iklan Minuman Beralkohol	1. Mengusulkan kepada direktorat terkait untuk menyesuaikan proporsi iklan khususnya yang sulit ditemukan dilapangan sehingga realisasi tetap tercapai sesuai target 2. Berkoordinasi dengan lintas sektor terkait untuk memetakan lokasi dimana iklan tersebut tersedia	Februari	1. Mengusulkan kepada direktorat terkait untuk menyesuaikan proporsi iklan khususnya yang sulit ditemukan dilapangan sehingga realisasi tetap tercapai sesuai target 2. Berkoordinasi dengan lintas sektor terkait untuk memetakan lokasi dimana iklan tersebut tersedia	-	-	Telah disusun target pengawasan iklan dengan menyesuaikan media ditetapkan
Maret	Kendala: 1. Keterbatasan iklan di media yang ditentukan misalnya pada media luar ruang sehingga berpotensi target tidak tercapai 2. Beberapa iklan dengan kategori	1. Mengusulkan kepada direktorat terkait untuk menyesuaikan proporsi iklan khususnya yang sulit ditemukan dilapangan sehingga realisasi tetap tercapai sesuai target	Maret	1. Mengusulkan kepada direktorat terkait untuk menyesuaikan proporsi iklan khususnya yang sulit ditemukan dilapangan sehingga realisasi tetap tercapai sesuai	-	-	1. Telah dilakukan penyesuaian media iklan oleh direktorat terkait 2. Telah dilakukan koordinasi dengan lintas sektor terkait

Bulan	Kondisi Awal	Rekomendasi	*Timeline*	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
				Rencana Aksi yang Sudah Selesai	Belum		
					Rencana Aksi yang Belum Selesai	*Timeline*	
	tertentu yang secara ketentuan tidak boleh di iklankan secara bebas sulit temukan khususnya iklan Minuman Beralkohol	2. Berkoordinasi dengan lintas sektor terkait untuk memetakan lokasi dimana iklan tersebut tersedia		target 2. Berkoordinasi dengan lintas sektor terkait untuk memetakan lokasi dimana iklan tersebut tersedia			

SS 2 : Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU) sebagai berikut:

1. Nilai Pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium

Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) adalah standar yang ditetapkan BPOM berdasar rencana peningkatan kemampuan laboratorium BPOM. Rencana ini merupakan agregasi Standar Kemampuan Laboratorium tingkat 4, tingkat 3 tingkat 2 dan tingkat 1. BPOM di Pangkal Pinang termasuk ke dalam laboratorium tingkat 3 (tier 3), yaitu laboratorium yang melakukan pengujian dasar kimia dan mikrobiologi dan parameter lain selain parameter unggul, serta melakukan pengujian konfirmasi dari tier di bawahnya.

Nilai pemenuhan laboratorium pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan oleh laboratorium tingkat 3 didasarkan pada penilaian terhadap empat komponen yang menggambarkan kemampuan dan kesiapan laboratorium dalam menjalankan fungsinya. Penilaian ini merupakan instrumen strategis untuk memastikan bahwa laboratorium memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan guna mendukung perlindungan masyarakat terhadap produk farmasi dan pangan olahan.

Keempat komponen SKL dan cara perhitungannya untuk laboratorium tingkat 3 :

1. Standar Ruang Lingkup (SRL)

a = (rata-rata nilai pemenuhan SRL kimia + nilai pemenuhan SRL biologi)/2

2. Standar peralatan

   b = (nilai pemenuhan standar Peralatan kimia + nilai pemenuhan standar biologi)/2

3. Standar kompetensi laboratorium

   c = (nilai pemenuhan standar kompetensi laboratorium kimia + nilai pemenuhan standar kompetensi laboratorium biologi)/2

4. Standar metode analisis (MA) terverifikasi

   d = (nilai pemenuhan standar MA terverifikasi kimia + nilai pemenuhan standar MA biologi)/2

Nilai akhir pemenuhan SKL dihitung dengan rumus :

$$(50\ \% \times a) + (20\% \times b) + (20\% \times c) + (10\% \times d)$$

a. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Triwulan I Tahun 2025

Tabel 3.46 Nilai Pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium

Indikator	Kinerja			Kategori & Notifikasi Warna
	Target	Realisasi	%Capaian	
Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	72,9	74,9	102,74%	Sangat Baik

Tabel di atas menampilkan capaian indikator kinerja sasaran strategis (IKSS) pada triwulan I terkait nilai pemenuhan laboratorium pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan oleh BPOM di Pangkal Pinang sesuai dengan standar kemampuan laboratorium. Indikator ini menjadi salah satu tolak ukur penting dalam memastikan mutu layanan laboratorium terhadap pengujian produk farmasi dan pangan olahan.

Pada periode pelaporan ini, target yang ditetapkan adalah sebesar 72,9, sedangkan realisasi capaian hingga akhir triwulan I tercatat sebesar 74,9. Hal ini menunjukkan adanya kelebihan capaian sebesar 2 poin, atau setara dengan 102,74% dari target yang telah ditentukan.

Dengan capaian di atas 100% dari target, indikator ini dikategorikan dalam klasifikasi "Sangat Baik". Hasil ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pengujian laboratorium di BPOM di Pangkal Pinang tidak hanya memenuhi standar kemampuan laboratorium, tetapi juga menunjukkan peningkatan kualitas layanan

dan efektivitas pelaksanaan standar mutu di lapangan. Capaian ini diharapkan dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan pada triwulan-triwulan berikutnya.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Tahun 2025

Tabel 3.47 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Tahun 2025 Nilai Pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium

Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Target Tahun 2025	Realisasi Triwulan I	% Capaian Terhadap Target Tahunan	Kategori
Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	73,70	74,90	101,63 ▲	Tercapai/ Melampaui

Tabel di atas menyajikan perbandingan antara realisasi kinerja triwulan I dengan target tahunan tahun 2025 indikator nilai pemenuhan laboratorium pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan oleh BPOM di Pangkal Pinang yang disesuaikan dengan standar kemampuan laboratorium. Indikator ini merupakan bagian dari pemantauan berkelanjutan terhadap kualitas layanan laboratorium dalam rangka menjamin mutu pengujian produk farmasi dan pangan olahan.

Target kinerja tahunan yang telah ditetapkan untuk tahun 2025 adalah sebesar 73,7. Hingga triwulan I, realisasi capaian telah mencapai 74,9 yang menunjukkan bahwa nilai capaian pada awal tahun sudah melampaui target tahunan, dengan persentase capaian sebesar 101,63%. Pencapaian ini tidak hanya menunjukkan progres yang positif, tetapi juga mencerminkan efektivitas implementasi standar kemampuan laboratorium di lapangan.

Dengan capaian di atas 100% terhadap target tahunan, indikator ini dikategorikan sebagai "Tercapai/Melampaui". Hasil ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan program pengujian oleh BPOM di Pangkal Pinang berada pada jalur yang tepat dan menunjukkan kinerja yang sangat baik sejak awal tahun. Keberhasilan ini menjadi pondasi yang kuat bagi pencapaian target-target kinerja selanjutnya, serta menunjukkan komitmen BPOM di Pangkal Pinang dalam menjaga dan meningkatkan standar mutu layanan laboratorium secara berkelanjutan.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja

Pemenuhan target Triwulan I direncanakan melalui :

1. Penambahan Peralatan Mikrobiologi.
2. Penambahan MA Terverifikasi di Laboratorium Obat, Laboratorium Kosmetik dan Laboratorium OBASKOK.

Sebagian pemenuhan ini berasal dari kegiatan di tahun 2024 yang belum masuk ke dalam penilaian SKL sehingga belum menjadi baseline nilai.

Kegiatan-kegiatan tersebut menaikkan nilai pemenuhan SKL sebesar ± 0,1 dari baseline nilai 72,8. Namun saat penilaian tools pemenuhan SKL di bulan Maret 2025, terjadi perubahan rincian tools di sejumlah laboratorium sebagai berikut :

1. Perubahan standar dan baseline SRL di Laboratorium Obat dan Laboratorium Mikrobiologi.
2. Perubahan standar dan baseline MA Terverifikasi di Laboratorium Obat, Laboratorium OBASKOK dan Laboratorium Pangan.

Perubahan-perubahan ini secara keseluruhan menyebabkan baseline nilai turun menjadi 72,4.

Untuk memastikan pemenuhan target Triwulan I, kegiatan yang pada awalnya direncanakan untuk penilaian di Triwulan III diajukan untuk menjadi baseline. Kegiatan tersebut yaitu pengujian Solvent Red 1 di Laboratorium Kosmetik sehingga Aspek 1 Kompetensi Laboratorium Kosmetik terpenuhi dan menaikkan baseline nilai cukup signifikan yaitu sebesar 2 angka. Penambahan nilai lainnya didapatkan dari percepatan realisasi pengadaan 2 unit peralatan Mikrobiologi dan penambahan 1 (satu) MA Terverifikasi Laboratorium Obat.

d. Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Kegiatan-kegiatan yang mendukung pemenuhan SKL telah dituangkan ke dalam rencana aksi SKP tahunan setiap anggota tim. Pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut akan dievaluasi pada awal bulan ke tiga setiap Triwulan untuk memastikan semua kegiatan dan data dukung telah atau akan selesai pada saat penilaian SKL oleh PPPOMN yaitu setiap tanggal 20 pada bulan ke tiga setiap Triwulan.

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Sebagian kegiatan pemenuhan target Triwulan I berasal dari kegiatan tahun 2024 yang belum dinilai, yaitu :

1. Penambahan 1 peralatan *Anaerobic jar* di Laboratorium Mikrobiologi.
2. Penambahan 1 MA Terverifikasi di Laboratorium Obat dan Laboratorium Kosmetik, dan 2 MA Terverifikasi di Laboratorium OBASKOK.

Kegiatan yang merupakan rencana Triwulan I dan terealisasi sesuai rencana yaitu penambahan peralatan Mikrobiologi berupa 1 *Anaerobic jar*. Peningkatan nilai juga didapatkan dari percepatan pengadaan dua peralatan Mikrobiologi lainnya yaitu 1 *AW Meter* dan 1 *Refrigerator* yang segera dilaksanakan ketika blokir efisiensi anggaran untuk pembelian peralatan laboratorium dibuka kembali. Kegiatan lainnya yang terealisasi di luar perencanaan yaitu penambahan 1 MA Terverifikasi Laboratorium Obat yang dapat dilaksanakan karena adanya sampel rutin yang masuk ke laboratorium dengan zat aktif dan parameter uji sesuai standar verifikasi MA, yaitu pemerian, identifikasi, penetapan pH dan penetapan kadar Timolol maleat pada sediaan tetes mata.

Kemungkinan tidak tercapainya target Triwulan I berasal dari penurun baseline nilai karena perubahan rincian tools yang dilakukan PPPOMN pada saat pengisian tools pemenuhan SKL di bulan Maret 2025. Perubahan-perubahan tersebut yaitu :

1. Standar SRL Laboratorium Obat naik dari 85% menjadi 87% dari standar yang ada di Pedoman Sampling sehingga menurunkan baseline dari 62,4 menjadi 61,4.
2. Sembilan parameter uji Mikrobiologi pada Obat Kuasi yang sudah diuji di tahun-tahun sebelumnya dan menjadi baseline SRL di Laboratorium Mikrobiologi saat penetapan Target 2025, dikeluarkan dari baseline karena ditetapkan sebagai standar SRL baru sehingga harus diverifikasi terlebih dahulu. Hal ini menyebabkan penurunan baseline dari 91,6 menjadi 87,6.

Perubahan standar juga terjadi pada MA Terverifikasi yang menaikkan baseline dari 21,3 menjadi 28,2. Kenaikan baseline MA terverifikasi lebih besar

daripada penurunan baseline SRL. Namun karena proporsi nilai SRL lebih besar daripada MA terverifikasi yaitu sebesar 50% dibandingkan MA terverifikasi yang hanya 10%, perubahan-perubahan ini secara keseluruhan menurunkan baseline nilai SKL

f. Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

Tabel 3.48 Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Indikator Nilai Pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium

Indikator	Output			Input (Anggaran)			IE	TE	Capaian
	T	R	%	Target (RPD TW I)	Realisasi	%			
Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	72,9	74,9	102,74	67.980.000	60.438.839	88,91	**1,16**	**0,16**	**100% (Efisien)**

1) Efisiensi penggunaan anggaran

Berdasarkan ketentuan matriks kinerja dan pendanaan BPOM tahun 2025-2009, Indikator ini mempunyai mapping/tagging anggaran dari RO Alat laboratorium untuk pengujian obat dan makanan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium (RAB) dan RO Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium (PDD). Untuk RO PDD tidak seluruhnya secara langsung berpengaruh dalam pencapaian target output indikator ini. RPD untuk anggaran yang telah dipetakan pada indikator ini dapat tercapai sebesar 88,91%, dengan capaian output 102,74% sehingga efisiensi penggunaan sumber daya dapat dikategorikan efisien.

Sebagian dari kegiatan yang berkontribusi terhadap pencapaian SKL pada tahun 2025 telah dilaksanakan pada tahun anggaran 2024. Kegiatan-kegiatan ini memberikan dampak langsung terhadap indikator capaian SKL, meskipun tidak menggunakan anggaran tahun berjalan. Hal ini menunjukkan adanya kesinambungan program yang telah dirancang sebelumnya, di mana output yang dihasilkan tetap relevan dan mendukung target 2025, meskipun berasal dari pembiayaan tahun sebelumnya.

Selain itu, pada Triwulan I tahun 2025, terdapat sejumlah peralatan laboratorium yang telah diterima dan secara fungsional bisa dihitung sebagai kontribusi terhadap capaian SKL. Namun, peralatan tersebut belum sepenuhnya

diselesaikan pembayarannya karena mekanisme administrasi, dan karenanya tidak tercatat dalam Rencana Penarikan Dana (RPD) Triwulan I. Situasi ini menciptakan ketidaksesuaian antara realisasi output (barang telah tersedia dan dapat digunakan) dengan input anggaran (belum terjadi pembayaran).

Kondisi tersebut mengakibatkan capaian output tidak sepenuhnya sejalan dengan realisasi input keuangan pada periode pelaporan. Oleh karena itu, perlu kehati-hatian dalam menafsirkan hubungan antara capaian fisik dan anggaran, terutama pada triwulan awal tahun berjalan. Pengelolaan pelaporan harus mencerminkan dinamika ini agar tidak terjadi ketimpangan penilaian kinerja, serta tetap menjamin akuntabilitas dalam proses perencanaan dan evaluasi anggaran.

2) Upaya mencapai efisiensi penggunaan anggaran

Kegiatan-kegiatan yang mendukung capaian SKL dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Setiap langkah pelaksanaan dirancang untuk memastikan ketercapaian target strategis, baik dari sisi substansi kegiatan maupun efisiensi pelaksanaannya. Hal ini menunjukkan bahwa proses perencanaan berjalan secara sistematis dan telah mempertimbangkan kesinambungan antarperiode anggaran.

Meskipun terdapat beberapa kegiatan yang pada saat ini belum menghasilkan keluaran keuangan secara langsung, namun substansi kegiatannya sudah dapat dinilai sebagai kontribusi terhadap pencapaian target. Untuk itu, kegiatan-kegiatan tersebut diajukan untuk dinilai lebih lanjut dengan menyertakan dokumen pendukung yang dibutuhkan, seperti berita acara , laporan teknis, atau bukti kedatangan barang (foto). Langkah ini merupakan bentuk akuntabilitas yang memungkinkan pengakuan capaian tetap dapat dilakukan secara proporsional meski pembayaran belum terealisasi.

Dengan pendekatan ini, diharapkan keseimbangan antara capaian fisik kegiatan dan realisasi anggaran dapat terus dijaga. Efisiensi menjadi perhatian utama, tanpa mengorbankan validitas capaian program. Selain meningkatkan kualitas pelaporan, mekanisme ini juga mendukung transparansi dan efektivitas penggunaan anggaran, sehingga memberikan gambaran yang lebih utuh terhadap kinerja lembaga dalam memenuhi target SKL.

g. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Indikator ini dihitung menggunakan tools baru yang berbeda dari tahun 2024 sehingga tidak ada informasi kinerja periode sebelumnya yang dapat dimanfaatkan dalam upaya peningkatan kinerja.

h. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya (Internal maupun Eksternal)

Tabel 3.49 Tindak Lanjut Rekomendasi Nilai Pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium

Bulan	Kondisi Awal	Rekomendasi	*Timeline*	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
				Rencana Aksi yang Sudah Selesai	Belum		
					Rencana Aksi yang Belum Selesai	*Timeline*	
1	2	3	4	5	6	7	8
Januari	-	-	-	-	-	-	-
Februari	1. PPPOMN melakukan perubahan standar MA Terverifikasi Lab Mikrobiologi dari 111 menjadi 101 sehingga baseline naik dari 15,3 menjadi 16,8. 2. Pasca efisiensi anggaran, terdapat 2 verifikasi MA yang tidak jadi dilaksanakan karena (a) harga sampel (Lab Obat) dan (b) kolom HPLC tidak jadi dibeli (Lab OBAOKSK). 3. Penambahan pengadaan instrumen ICP-MS yang sebelumnya tidak masuk ke perencanaan menaikkan capaian Pemenuhan Peralatan Kimia dari 87,6 menjadi 91,6. 4. Tidak ada perubahan target per triwulan tahun 2025 pasca efisiensi anggaran. 5. Sudah disusun penyesuaian rencana pencapaian target sesuai dengan perubahan-perubahan pada poin	Menyusun rencana pencapaian target renstra sesuai target yang ditetapkan PPPOMN.	Februari 2025	Penyusunan rencana pencapaian target renstra sesuai target yang ditetapkan PPPOMN.	-	-	Telah disusun rencana pencapaian target renstra sesuai target yang ditetapkan PPPOMN.

Bulan	Kondisi Awal	Rekomendasi	*Timeline*	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
				Rencana Aksi yang Sudah Selesai	Belum		
					Rencana Aksi yang Belum Selesai	*Timeline*	
	1-3.						
Maret	1. Dilakukan pengisian tools SKL TW1 dengan deadline 20 Maret 2025. 2. PPPOMN melakukan perubahan standar pada tools SKL sehingga mempengaruhi baseline : (a) SRL dari 84,2 menjadi 82,0 (b) MA terverifikasi dari 21,3 menjadi 28,2 3. Perubahan standar pada poin 1a menurunkan baseline secara keseluruhan dari 72,9 menjadi 72,4 (nilai SRL adalah 50% dari nilai total pemenuhan). 4. Agar target TW 1 tercapai, pemenuhan aspek 1 Kompetensi Lab Kosmetik yang direncanakan pada TW3 diklaim di TW1 dengan data LCP dari tahun 2021 sehingga pemenuhan kompetensi naik dari 60 menjadi 70. Hal ini mengakibatkan capaian SKL TW1 melebihi target TW1 dan tahunan.	Menyusun rencana aksi pemenuhan SKL (SKP).	Maret 2025	Penyusunan rencana aksi pemenuhan SKL (SKP).	-	-	Telah disusun rencana aksi pemenuhan SKL (SKP).

SS 3 : Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT

Capaian sasaran strategis **Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT** diukur dengan 4 indikator kinerja utama (IKU) sebagai berikut.

1. Tingkat Efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Tingkat Efektivitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja UPT adalah ukuran efektivitas pelaksanaan kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi yang dilakukan Balai POM di Pangkal Pinang berdasarkan penerimaan audiens KIE terutama pada aspek sumber/narasumber, konten/informasi, pemahaman dan manfaat KIE.

Jenis ragam KIE meliputi KIE langsung kepada masyarakat maupun melalui media diantaranya media sosial, media cetak, media elektronik, media digital dan media luar ruang. Indeks Efektivitas KIE terdiri atas 4 Indikator/ Kriteria yaitu:

1) Sumber atau Narasumber KIE
2) Konten atau Informasi KIE
3) Pemahaman Audiens KIE
4) Manfaat KIE bagi Audiens KIE

Adapun Kategori Hasil Penilaian sebagai berikut:

Skor Indeks 100	Interpretasi efektivitas
< 65,00	Kurang Efektif
65,01 - 75,00	Cukup Efektif
75,01 - 85,00	Efektif
85,01 - 95,00	Sangat Efektif
95,01 - 100	Sangat Efektif Sekali

Responden Audiens KIE adalah responden yang sebelumnya pernah menerima atau terlibat sebagai peserta dalam kegiatan KIE BPOM di Pangkal Pinang atau responden yang pernah mengakses kanal-kanal media KIE BPOM atau menerima produk informasi BPOM dalam 3 bulan terakhir.

Dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman, Balai POM di Pangkal Pinang telah melaksanakan edukasi kepada masyarakat melalui berbagai kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE). Untuk mengevaluasi sejauh mana kegiatan KIE yang telah dilaksanakan sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai maka diperlukan pengukuran Tingkat Efektivitas KIE

Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Strategis Balai POM di Pangkal Pinang tahun 2025-2029.

a. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Triwulan I Tahun 2025

Tabel 3.50 Tingkat Efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Indikator	Kinerja			Kategori & Notifikasi Warna
	Target	Realisasi	%Capaian	
Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	85,99	86,42	100,50%	Sangat Baik

Pada Triwulan I telah dilakukan survei kepada peserta yang telah mengikuti Kegiatan KIE Langsung maupun KIE melalui Media oleh Balai POM di Pangkal Pinang pada bulan Januari – Maret 2025. Target Tingkat Efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Triwulan I sebesar 85,99 dan realisasi efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Balai POM di Pangkal Pinang Triwulan I sebesar 86,42. Realisasi telah melampaui target dan diperoleh capaian sebesar 100,50% dengan kategori Sangat Baik.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Tahun 2025

Tabel 3.51 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Tahun 2025 Tingkat Efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Target Tahun 2025	Realisasi Triwulan I	% Capaian Terhadap Target Tahunan	Kategori
Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	85,99	86,42	100,50 ▲	Tercapai/ Melampaui

Target Tingkat Efektifitas KIE pada Triwulan I sebesar 85,99 dengan realisasi sebesar 86,42 sehingga didapatkan capaian tingkat efektifitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan pada Triwulan I di wilayah Balai POM di Pangkal Pinang adalah sebesar 100.50%. Capaian Tingkat Efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan pada Triwulan I melebihi target tahunan dengan kategori tercapai/ melampaui.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja

Pada Triwulan I Tahun 2025 Tingkat Efektifitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan diatas target yang ditetapkan yaitu sebesar 86,42 (Sangat Efektif)

dari Target 85,99 dengan capaian 100,50 % (Sangat Baik). Hasil Penilaian ini terdiri dari KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan secara langsung dengan hasil sebesar 86,60 dan KIE melalui Media (Media Sosial, Media Cetak, Media Elektronik, Media Digital dan Media Luar Ruang) dengan hasil sebesar 86,24. Secara keseluruhan Capaian Tingkat Efektifitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melebihi target dengan kategori Tercapai/ Melampaui. Upaya yang dilakukan untuk mencapai target tersebut dengan melakukan kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi dibuat dengan menarik dan materi disesuaikan dengan audience. Selain itu juga ada kuis dan hadiah yang menarik.

d. Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Upaya-upaya perbaikan/ rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/ mempertahankan capaian efektifitas KIE adalah:

- Pembuatan materi disesuaikan dengan peserta/ audience yang akan mengikuti kegiatan, sehingga diharapkan akan lebih mudah menerima materi yang disampaikan.
- Penganekaragaman konten materi, terutama materi yang ditayangkan di media sosial, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang datang dari berbagai macam strata.
- Memperluas jangkauan KIE melalui radio, televisi, media cetak/koran yang sampai saat ini masih diakses oleh generasi non milenial.

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Beberapa kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator nilai Indeks efektifitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan adalah Balai POM di Pangkal Pinang melakukan KIE dengan tema "Cegah Stunting dan Konsumsi Obat Yang Aman" di Madrasah Aliyah Swasta Terpadu Bina Insan Cendikia Mentok Kabupaten Bangka Barat. Selain itu, Balai POM di Pangkal Pinang juga aktif melakukan KIE melalui media sosial Instagram, Facebook dan X, pemutaran video pada saat KIE serta melalui Leaflet dan Banner.

f. Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

Tabel 3.52 Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Indikator Tingkat Efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Indikator	Output			Input (Anggaran)			IE	TE	Capaian
	T	R	%	Target (RPD TW I)	Realisasi	%			
Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	86	86,42	100,50	9.250.000	12.993.000	140,46	**0,72**	**-0,28**	**Tidak Efisien**

1) Efisiensi penggunaan anggaran

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa capaian tingkat efisiensi penggunaan anggaran pada indikator KIE Sedian Farmasi dan Pangan Olahan sebesar –0,28 (Tidak Efisien). Perhitungan Tingkat efisiensi ini diperoleh dengan membandingkan persentase Capaian Output dengan persentase Capaian Input (anggaran). Dengan capaian penggunaan anggaran sebesar 140,46% dan capaian output 100,50 %. Hal ini disebabkan karena adanya penggunaan anggaran untuk koordinasi ke Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Selatan yang belum direncanakan pada rencana penarikan dana yang disusun sehingga melebihi Rencana Penarikan Anggaran Triwulan I.

2) Upaya mencapai efisiensi penggunaan anggaran

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran tidak efisien karena capaian indikator lebih rendah daripada persentase realisasi anggaran. Untuk itu selanjutnya akan dilakukan penyesuaian target output dikarenakan adanya efisiensi anggaran sehingga capaian realisasi output dapat lenih tinggi daripada capaian realisasi anggaran pada triwulan selanjutnya sehingga dapat lebih efektif dan optimal.

g. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Berdasarkan informasi kinerja pada laporan kinerja tahun 2024, Balai POM di Pangkal Pinang melakukan berbagai upaya dalam rangka pencapaian target kinerja tahun 2025, diantaranya :

1. Penyesuaian aktivitas/kegiatan untuk mencapai target kinerja

Penyesuaian kegiatan dalam mencapai target kinerja yang dilakukan pada triwulan I tahun 2025 berdasarkan Laporan Kinerja 2024 diantaranya :

a. Melaksanakan Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Siswa/Siswi SMA/Sederajat, Organisasi Masyarakat, Masyarakat tingkat Kecamatan dan masyarakat tingkat Desa
b. Melibatkan Narasumber dari Instansi lain baik dari Dinas maupun Puskesmas
c. Materi Komunikasi, Informasi dan Edukasi dibuat dengan lebih menarik dan pada saat kegiatan dilakukan ice breaking serta dibuat kuis sehingga meningkatkan pemahaman serta minat peserta

2. Penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai target kinerja;

   Dalam mencapai target kinerja Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik telah dilakukan penyesuaian penggunaan anggaran melalui revisi anggaran terkait efisiensi anggaran sehingga lebih optimal dalam penggunaan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan KIE

3. Evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja yang mencakup tindak lanjut atas rekomendasi/rencana aksi kinerja

   Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Triwulan I Tahun 2025 sebesar 86,42 merupakan gabungan dari Pelaksanaan KIE secara langsung dan KIE menggunakan berbagai media. Kegiatan KIE yang memberikan nilai indeks tertinggi pada triwulan I Tahun 2025 adalah KIE secara Langsung. Kegiatan KIE secara langsung merupakan kegiatan KIE yang berdampak paling besar pada pencapaian pemberdayaan dan peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat. Hal ini disebabkan antara lain karena sebagian besar masyarakat Kepulauan Bangka Belitung tinggal di pedesaan dan kegiatan KIE secara langsung ini merupakan daya tarik tersendiri bagi masyarakat.

   Berdasarkan Rekomendasi Perbaikan Kinerja Tahun 2024, hal-hal yang dapat dilakukan untuk pencapaian target :

   - Pembuatan materi telah disesuaikan dengan peserta/ audience yang akan mengikuti kegiatan, pada Triwulan I sudah disesuaikan materi yang disampaikan kepada anak SMA
   - Membuat konten yang menarik terutama materi yang ditayangkan di media sosial

4. Penyesuaian perencanaan kinerja untuk periode berikutnya

   Penyesuaian yang dapat dilakukan untuk periode berikutnya antara lain :

a. Pembuatan materi disesuaikan dengan peserta/ audience yang akan mengikuti kegiatan, sehingga diharapkan dapat meningkatkan minat masyarakat mengikuti kegiatan yang dilaksanakan BPOM
b. Penganekaragaman konten materi, terutama materi yang ditayangkan di media sosial, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang datang dari berbagai macam strata.
c. Pembuatan materi Iklan Radio untuk ditayangkan pada Triwulan II
d. Penyederhanaan tools survei dengan digabungkan antara survei tingkat efektifitas KIE dengan survei pelaksanaan kegiatan.

h. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya (Internal maupun Eksternal)

Tabel 3.53 Tindak Lanjut Rekomendasi Tingkat Efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Bulan	Kondisi Awal	Rekomendasi	*Timeline*	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
				Rencana Aksi yang Sudah Selesai	Belum		
					Rencana Aksi yang Belum Selesai	*Timeline*	
1	2	3	4	5	6	7	8
Januari	-	-	-	-	-	-	-
Februari	Kegiatan KIE belum terlaksana dikarenakan masih ada penyesuaian target akibat efisiensi anggaran	Melaksanakan Kegiatan KIE	Februari	Telah dilakukan KIE kepada 50 Orang di kabupaten Bangka Barat	-	-	Telah dilakukan KIE kepada 50 Orang di kabupaten Bangka Barat
Maret	Sudah dilaksanakan KIE di Kabupaten Bangka Barat	Menunggu Realisasi Hasil Survei Tingkat Efektifitas KIE	Maret	NIlai Tingkat Efektifitas KIE Bulan Maret sudah ada	-	-	Nilai Tingkat Efektifitas KIE bulan Maret adalah 86.42

2. Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan

Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan merupakan kegiatan yang didalamnya ada intervensi dan pemberdayaan keamanan pangan dan gizi kepada komunitas sekolah.

a) Satuan Pendidikan yang dilakukan intervensi dalam rangka pemberdayaan keamanan pangan terdiri dari SD/MI/SLB, SMP/MTS dan SMA/SMK/MA.
b) Intervensi dalam rangka pembudayaan keamanan pangan adalah semua tahapan sesuai petunjuk teknis yang ditetapkan meliputi tahapan advokasi lintas sektor, Sosialisasi Keamanan Pangan, Bimtek Kader Keamanan Pangan Sekolah, Monitoring dan Sertifikasi Sekolah, dan Pengawalan sekolah yang sudah diintervensi.
c) Kriteria Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan adalah:

1. Memiliki SK Tim dan Kader Keamanan Pangan Sekolah aktif
2. Melakukan intervensi keamanan pangan kepada komunitas sekolah
3. Mempunyai dokumen rencana aksi program keamanan pangan

Tujuan intervensi dalam rangka pembudayaan keamanan pangan yaitu memastikan anak usia sekolah khususnya, dan komunitas sekolah umumnya, memiliki pengetahuan dan perilaku keamanan pangan yang baik sehingga dapat melindungi dirinya dari pangan yang tidak aman yang membahayakan kesehatan.

Adapun Tahapan Kegiatan Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan adalah:

a. Sekolah Full Intervensi:
   1. Advokasi lintas sektor program sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan
   2. Sosialisasi Keamanan pangan sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan
   3. Bimtek Keamanan Pangan untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah
   4. Monitoring dan sertifikasi sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan
   5. Pengawalan sekolah yang sudah di intervensi Keamanan pangan.

b. Sekolah Perluasan: Sosialisasi Keamanan Pangan

a. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Triwulan I Tahun 2025

Tabel 3.54 Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan

Indikator	Kinerja			Kategori & Notifikasi Warna
	Target	Realisasi	%Capaian	
Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	-	-		

Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan di wilayah kerja Balai POM di Pangkal Pinang pada tahun 2025 menetapkan target sebanyak 34 Sekolah terdiri dari 7 Sekolah Full Intervensi dan 25 Sekolah Perluasan, namun untuk pelaksanaan kegiatan dibagi menjadi 2 (dua) Batch yaitu Batch I sebanyak 3 (tiga) Sekolah dan Batch 2 sebanyak 4 (empat) Sekolah dikarenakan adanya efisiensi anggaran. Adapun target di Triwulan I sebesar 0% merupakan persentase tahapan Rangkaian kegiatan Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Tahun 2025

Tabel 3.55 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Tahun 2025 Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan

Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Target Tahun 2025	Realisasi Triwulan I	% Capaian Terhadap Target Tahunan	Kategori
Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	100	-	-	

Capaian Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan pada Triwulan I di wilayah Balai POM di Pangkal Pinang sudah sesuai dengan target walaupun realisasi masih 0%. Hal ini masih sesuai dengan target tahapan perencanaan dari kegiatan tersebut.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja

Kegiatan dapat berjalan sesuai target dengan koordinasi yang baik dengan lintas sektor terkait.

d. Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Balai POM di Pangkal Pinang akan melakukan koordinasi dengan Dinas terkait di Kabupaten Bangka Selatan untuk penjadwalan Pelaksanaan Kegiatan Rapat Advokasi. Rapat advokasi akan dilaksanakan setelah disepakati waktu dengan OPD dan BPOM di Pangkal Pinang. Untuk selanjutnya melaksanakan kegiatan sesuai tahapan sesuai dengan perencanaan.

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Kegiatan yang menunjang keberhasilan program ini yaitu koordinasi yang baik dengan Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan dan Sekolah yang akan diintervensi Program Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan.

f. Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

Tabel 3.56 Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Indikator Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan

Indikator	Output			Input (Anggaran)			IE	TE	Capaian
	T	R	%	Target (RPD TW I)	Realisasi	%			
Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	-	-	-	484.000	484.000	100,00	-	-	

1) Efisiensi penggunaan anggaran

Pada Triwulan I belum ada target output yang direncanakan sehingga belum ada hasil efisiensi atas penggunaan sumber daya.

2) Upaya mencapai efisiensi penggunaan anggaran

Untuk kedepannya akan dilakukan kegiatan untuk mencapai output yang ditetapkan dan penggunaan anggaran yang optimal disesuaikan dengan adanya efisiensi anggaran sehingga penggunaan anggaran efisien

g. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Berdasarkan informasi kinerja pada laporan kinerja tahun 2024, Balai POM di Pangkal Pinang melakukan berbagai upaya dalam rangka pencapaian target kinerja tahun 2025, diantaranya

1. Penyesuaian aktivitas/kegiatan untuk mencapai target kinerja

Penyesuaian kegiatan dalam mencapai target kinerja yang dilakukan pada Triwulan I Tahun 2025 yaitu :

- Melaksanakan Koordinasi kepada Lintas Sektor terkait seperti Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DKPPKB) Kabupaten Bangka Selatan, Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan (DKUKMINDAG) Kabupaten Bangka Selatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten (DPMD) Kabupaten Bangka Selatan, Dinas Pertanian, Pangan, Perikanan (DPPP) Kabupaten Bangka Selatan, Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga (DPKO) Kabupaten Bangka Selatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bangka Selatan, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Selatan, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bangka

Selatan, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangka Selatan, Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III (Kabupaten Bangka Selatan)

- Melakukan penyesuain tahapan kegiatan berdasarkan Petunjuk Teknis dari Unit Pengampu

2. Penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai target kinerja

   Dalam mencapai target telah dilakukan penyesuaian perencanaan Anggaran POK berdasarkan tahun 2024 seperti Pemberian Produk Informasi Keamanan Pangan pada Sekolah saat sertifikasi sekolah

3. Evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja yang mencakup tindak lanjut atas rekomendasi/rencana aksi kinerja

   Pada Tahun 2024 pelaksanaan kegiatan Sekolah sudah mencapai target untuk keberlangsungan program maka dilakukan Upaya pengawalan diantaranya melalui WhatsApp group sehingga Sekolah tetap menjalankan keberlangsungan program ini.

4. Penyesuaian perencanaan kinerja untuk periode berikutnya

   Melakukan penyesuaian kegiatan tahapan Program Sekolah yang melaksanakan Pembudayakan Keamanan Pangan dan revisi anggaran pelaksanaan kegiatan dikarenakan adanya efisiensi anggaran.

h. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya (Internal maupun Eksternal)

Tabel 3.57 Tindak Lanjut Rekomendasi Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan

Bulan	Kondisi Awal	Rekomendasi	*Timeline*	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
				Rencana Aksi yang Sudah Selesai	Belum		
					Rencana Aksi yang Belum Selesai	*Timeline*	
1	2	3	4	5	6	7	8
Januari	-	-	-	-	-	-	-
Februari	Target, presentase progres dan tahapan Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan dilakukan penyesuaian akibat efisiensi anggaran	Segera melakukan revisi target setelah revisi juknis keluar	Maret	-	Revisi target sekolah belum dibuat menunggu juknis dari Badan POM	Maret	Penyesuaian target akibat efisiensi belum dilakukan karena menunggu juknis dari Badan POM
Maret	Sudah dilaksanakan revisi target	1. Melakukan Koordinasi ke Pemerintah Daerah	Maret	1. Sudah dilaksanakan koordinasi ke Dinas	-	-	1. Koordinasi telah dilaksanakan 2. Revisi target sudah

Bulan	Kondisi Awal	Rekomendasi	*Timeline*	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
				Rencana Aksi yang Sudah Selesai	Belum		
					Rencana Aksi yang Belum Selesai	*Timeline*	
		terkait Program Sekolah 2. Revisi target sekolah belum dibuat menunggu juknis dari Badan POM		terkait dan Sekolah 2. Revisi target sudah dibuat disesuaikan dengan juknis dan anggaran efisiensi			dibuat

3. Jumlah Desa Pangan Aman

Desa pangan aman adalah desa yang memiliki :

1) Kader keamanan pangan desa yang aktif
2) Melakukan intervensi keamanan pangan pada komunitas desa
3) Mempunyai dokumen perencanaan program keamanan pangan yang mandiri (dengan dana desa, dana mandiri atau integrasi dengan program lain)

Melalui intervensi keamanan pangan yang dilakukan pada Program Desa Pangan Aman ini diharapkan semakin banyak desa yang mandiri dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan terkait keamanan pangan yang dimasukkan dan diintegrasikan dalam program desa sehingga semakin banyak pula masyarakat yang terlindungi dari pangan yang tidak aman dan tidak bermutu.

a. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Triwulan I Tahun 2025

Tabel 3.58 Jumlah Desa Pangan Aman

Indikator	Kinerja			Kategori & Notifikasi Warna
	Target	Realisasi	%Capaian	
Jumlah desa pangan aman	-	-		

Jumlah desa pangan aman di wilayah kerja Balai POM di Pangkal Pinang pada tahun 2025 menetapkan target sebanyak 3 desa, namun untuk pelaksanaan kegiatan dibagi menjadi 2 (dua) batch yaitu Batch I sebanyak 2 (dua) Desa dan Batch 2 sebanyak 1 (satu) Desa dikarenakan adanya efisiensi anggaran. Adapun target di Triwulan I sebesar 0% merupakan persentase tahapan Rangkaian kegiatan Desa Pangan Aman.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Tahun 2025

Tabel 3.59 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Tahun 2025 Jumlah Desa Pangan Aman

Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Target Tahun 2025	Realisasi Triwulan I	% Capaian Terhadap Target Tahunan	Kategori
Jumlah desa pangan aman	100	-	-	

Target Triwulan I Program Desa Pangan Aman adalah 0%, namun hal ini masih sesuai dengan target perencanaan yang akan dimulai pada bulan April 2025.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja

Program Desa Pangan Aman dapat berjalan dengan baik jika ada dukungan dari pemerintah daerah maka dilakukan koordinasi dengan beberapa SKPD terkait.

d. Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Balai POM di Pangkal Pinang akan melakukan koordinasi dengan Dinas terkait di Kabupaten Bangka Selatan untuk penjadwalan Pelaksanaan Kegiatan Rapat Advokasi. Rapat advokasi akan dilaksanakan setelah disepakati waktu dengan OPD dan BPOM di Pangkal Pinang. Untuk selanjutnya melaksanakan kegiatan sesuai tahapan sesuai dengan perencanaan.

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Kegiatan yang menunjang keberhasilan program ini yaitu koordinasi yang baik antara Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan dan Pemerintah Desa yang akan diintervensi Program Desa Pangan Aman.

f. Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

Tabel 3.60 Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Indikator Jumlah Desa Pangan Aman

Indikator	Output			Input (Anggaran)			IE	TE	Capaian
	T	R	%	Target (RPD TW I)	Realisasi	%			
Jumlah desa pangan aman	-	-	-	0	3.770.000	-	-	-	

1) Efisiensi penggunaan anggaran

Pada Triwulan I belum ada target output yang direncanakan sehingga belum ada hasil efisiensi atas penggunaan sumber daya.

2) Upaya mencapai efisiensi penggunaan anggaran

Untuk kedepannya akan dilakukan kegiatan untuk mencapai output yang ditetapkan dan penggunaan anggaran yang optimal sehingga penggunaan anggaran efisien.

g. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Berdasarkan informasi kinerja pada laporan kinerja tahun 2024, Balai POM di Pangkal Pinang melakukan berbagai upaya dalam rangka pencapaian target kinerja tahun 2025, diantaranya:

1. Penyesuaian aktivitas/kegiatan untuk mencapai target kinerja

Penyesuaian kegiatan dalam mencapai target kinerja yang dilakukan pada Triwulan I Tahun 2025 yaitu :

- Melaksanakan Koordinasi kepada Lintas Sektor terkait seperti Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DKPPKB) Kabupaten Bangka Selatan, Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan (DKUKMINDAG) Kabupaten Bangka Selatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten (DPMD) Kabupaten Bangka Selatan, Dinas Pertanian, Pangan, Perikanan (DPPP) Kabupaten Bangka Selatan, Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga (DPKO) Kabupaten Bangka Selatan, serta Desa yang menjadi target Intervensi Program Desa Pangan Aman.
- Melakukan penyesuain tahapan kegiatan berdasarkan Petunjuk Teknis dari Unit Pengampu.

2. Penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai target kinerja

Dalam mencapai target telah dilakukan penyesuaian perencanaan Anggaran POK berdasarkan tahun 2024 seperti Pembelian Produk Informasi Keamanan Pangan untuk kegiatan Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa dan Bimbingan Teknis Untuk Bimtek Komunitas.

3. Evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja yang mencakup tindak lanjut atas rekomendasi/rencana aksi kinerja

Melakukan Pendampingan program keamanan pangan ini dilakukan sampai masyarakat dapat menyusun dan mengembangkan program keamanan pangan secara mandiri menggunakan APBD atau APBDes. Harapannya adalah Pemerintah Daerah berkomitmen untuk mereplikasi Program Keamanan Pangan Terpadu ini ke Desa yang lain.

4. Penyesuaian perencanaan kinerja untuk periode berikutnya

Dilakukan Tahapan Kegiatan sesuai dengan Petunjuk Teknis terbaru yang disesuaikan dengan adanya Efisiensi Anggaran dengan melaksanakan Rapat Advokasi dan Bimtek Kader Keamanan Pangan Desa.

h. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya (Internal maupun Eksternal)

Tabel 3.61 Tindak Lanjut Rekomendasi Jumlah Desa Pangan Aman

Bulan	Kondisi Awal	Rekomendasi	*Timeline*	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
				Rencana Aksi yang Sudah Selesai	Belum		
					Rencana Aksi yang Belum Selesai	*Timeline*	
1	2	3	4	5	6	7	8
Januari	-	-	-	-	-	-	-
Februari	Target, presentase progres dan tahapan Desa Pangan Aman dilakukan penyesuaian akibat efisiensi anggaran	Segera melakukan revisi target setelah revisi juknis keluar	Maret	-	Revisi target sekolah belum dibuat menunggu juknis dari Badan POM	Maret	Penyesuaian target akibat efisiensi belum dilakukan karena menunggu juknis dari Badan POM
Maret	Sudah dilaksanakan revisi target	1. Melakukan Koordinasi ke Pemerintah Daerah terkait Program Desa Pangan Aman 2. Revisi target sekolah belum dibuat menunggu juknis dari Badan POM	Maret	1. Sudah dilaksanakan koordinasi ke Dinas terkait dan Desa yang akan diintervensi 2. Revisi target sudah dibuat disesuaikan dengan juknis dan anggaran efisiensi	-	-	1. Koordinasi telah dilaksanakan 2. Revisi target sudah dibuat

4. Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas

Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas adalah pasar yang didalamnya terdapat komitmen dan dukungan penuh dari komunitas pasar dan pemangku kepentingan dan pemberdayaan komunitas pasar dari sisi Supply (Pengelola Pasar, Pedagang Pasar, Asosiasi Pasar, Pemasok) dan dari sisi Demand (Pengunjung Pasar).

a. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Triwulan I Tahun 2025

Tabel 3.62 Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas

Indikator	Kinerja			Kategori & Notifikasi Warna
	Target	Realisasi	%Capaian	
Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	-	-		

Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas (PPABK) di wilayah kerja Balai POM di Pangkal Pinang pada tahun 2025 menetapkan target sebanyak 1 Pasar. Adapun target di Triwulan I sebesar 0% merupakan persentase tahapan Rangkaian kegiatan Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas (PPABK).

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Tahun 2025

Tabel 3.63 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Tahun 2025 Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas

Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Target Tahun 2025	Realisasi Triwulan I	% Capaian Terhadap Target Tahunan	Kategori
Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	100	-	-	

Target Triwulan I Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas (PPABK) adalah 0%, namun hal ini masih sesuai dengan target perencanaan yang akan dimulai pada bulan April 2025.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja

Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas (PPABK) dapat berjalan dengan baik jika ada dukungan dari pemerintah daerah maka dilakukan koordinasi dengan beberapa SKPD terkait, pengelola, pemasok, pedagang, asosiasi pasar dan komunitas pasar lainnya

d. Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Balai POM di Pangkal Pinang akan melakukan koordinasi dengan Dinas terkait di Kabupaten Bangka Selatan untuk penjadwalan Pelaksanaan Kegiatan Rapat Advokasi. Rapat advokasi akan dilaksanakan setelah disepakati waktu dengan OPD dan BPOM di Pangkal Pinang. Untuk selanjutnya melaksanakan kegiatan sesuai tahapan sesuai dengan perencanaan.

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Kegiatan yang menunjang keberhasilan program ini yaitu koordinasi yang baik antara Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan dan Pengelola/asosiasi Pasar serta komunitas pasar yang akan diintervensi Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas (PPABK).

f. Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

Tabel 3.64 Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Indikator Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas

Indikator	Output			Input (Anggaran)			IE	TE	Capaian
	T	R	%	Target (RPD TW I)	Realisasi	%			
Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	-	-	-	0	150.000	-	-	-	

1) Efisiensi penggunaan anggaran

Pada Triwulan I belum ada target output yang direncanakan sehingga belum ada hasil efisiensi atas penggunaan sumber daya.

2) Upaya mencapai efisiensi penggunaan anggaran

Upaya yang akan dilakukan kegiatan untuk mencapai output yang ditetapkan dan penggunaan anggaran yang optimal sehingga penggunaan anggaran efisien.

g. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Berdasarkan informasi kinerja pada laporan kinerja tahun 2024, Balai POM di Pangkal Pinang melakukan berbagai upaya dalam rangka pencapaian target kinerja tahun 2025, diantaranya:

1. Penyesuaian aktivitas/kegiatan untuk mencapai target kinerja

Penyesuaian kegiatan dalam mencapai target kinerja yang dilakukan pada Triwulan I Tahun 2025 yaitu :

- Melaksanakan Koordinasi kepada Lintas Sektor terkait seperti Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DKPPKB) Kabupaten Bangka Selatan, Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan (DKUKMINDAG) Kabupaten Bangka Selatan, Dinas Pertanian,

Pangan, Perikanan (DPPP) Kabupaten Bangka Selatan, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Selatan

- Melakukan penyesuaian tahapan kegiatan berdasarkan Petunjuk Teknis dari Unit Pengampu.

2. Penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai target kinerja

   Dalam mencapai target kinerja ini telah dilakaukan penyesuaian penggunaan anggaran melalui perencanaan POK Tahun 2025 diantaranya anggaran pencetakan produk informasi sehingga masyarakat yang datang ke pasar bisa memperoleh informasi terkait pangan yang aman.

3. Evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja yang mencakup tindak lanjut atas rekomendasi/rencana aksi kinerja

   Balai POM di Pangkal Pinang telah berupaya semaksimal mungkin agar komunitas pasar yang telah diintervensi tetap konsisten melaksanakan program Pasar Aman Berbasis Komunitas. Upaya yang dilakukan dengan pengawalan pasar serta koordinasi dengan petugas pasar serta dinas terkait.

4. Penyesuaian perencanaan kinerja untuk periode berikutnya

   Melakukan penyesuaian tahapan kegiatan sesuai Petunjuk Teknis Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas (PPABK) dan melakukan revisi anggaran pelaksanaan kegiatan dikarenakan adanya efisiensi anggaran.

h. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya (Internal maupun Eksternal)

Tabel 3.65 Tindak Lanjut Rekomendasi Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas

Bulan	Kondisi Awal	Rekomendasi	*Timeline*	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
				Rencana Aksi yang Sudah Selesai	Belum		
					Rencana Aksi yang Belum Selesai	*Timeline*	
1	2	3	4	5	6	7	8
Januari	-	-	-	-	-	-	-
Februari	Persentase progres dan tahapan Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas dilakukan penyesuaian akibat efisiensi anggaran	Segera melakukan revisi target setelah revisi juknis keluar	Maret	-	Revisi target sekolah belum dibuat menunggu juknis dari Badan POM	Maret	Penyesuaian target akibat efisiensi belum dilakukan karena menunggu juknis dari Badan POM
Maret	Sudah dilaksanakan revisi target	1. Melakukan Koordinasi ke Pemerintah Daerah terkait Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	Maret	1. Sudah dilaksanakan koordinasi ke Dinas terkait 2. Revisi target sudah dibuat	-	Maret	1. Koordinasi telah dilaksanakan 2. Revisi target sudah dibuat

Bulan	Kondisi Awal	Rekomendasi	*Timeline*	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
				Rencana Aksi yang Sudah Selesai	Belum		
					Rencana Aksi yang Belum Selesai	*Timeline*	
		2. Revisi target sekolah belum dibuat menunggu juknis dari Badan POM		disesuaikan dengan juknis dan anggaran efisiensi			

SS 4 : Meningkatnya Pendampingan UMKM dalam Pemenuhan Standar Keamanan dan Mutu

Sasaran strategis **Meningkatnya Pendampingan UMKM dalam Pemenuhan Standar Keamanan dan Mutu** diukur dengan indikator kinerja utama sebagai berikut:

1. **Persentase UMKM yang Didampingi dan Memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan OBA, Kos yang Baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan**

   UMK yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi adalah UMK Pangan Olahan yang mampu menerapkan prinsip CPPOB ditandai dengan diterbitkannya IP CPPOB skala UMK. Sedangkan untuk UMKM OBA (Obat Bahan Alam) yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan Obat Bahan Alam yang baik ditandai dengan diterbitkannya Rekomendasi Sertifikat CPOTB secara Bertahap (tahap 1 atau tahap 1 ke tahap 2 atau tahap 2 ke tahap 3). Sedangkan untuk UMKM Kosmetik yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan kosmetik yang baik ditandai dengan diterbitkannya Rekomendasi Sertifikat Pemenuhan Aspek (SPA) CPKB.

   a. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Triwulan I Tahun 2025

Tabel 3.66 Persentase UMKM yang Didampingi dan Memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan OBA, Kos yang Baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan

Indikator	Kinerja			Kategori & Notifikasi Warna
	Target	Realisasi	%Capaian	
Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	5	10	200,00%	Tidak Dapat Disimpulkan

Dari hasil perhitungan, persentase capaian indikator Persentase UMKM yang Didampingi dan Memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan OBA, Kos yang Baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan pada Triwulan I Tahun 2025 sebesar 200,00% % dengan realisasi sebesar 10%. dengan target pada Triwulan I yaitu 5%. Sehingga untuk Persentase Fasilitas Distribusi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan masuk dalam kategori capaian Tidak dapat disimpulkan karena melebihi 110%, hal ini disebabkan pada triwulan I terjadi efisiensi anggaran sehingga terjadi perubahan target.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Tahun 2025

Tabel 3.67 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Tahun 2025 Persentase UMKM yang Didampingi dan Memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan OBA, Kos yang Baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan

Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Target Tahun 2025	Realisasi Triwulan I	% Capaian Terhadap Target Tahunan	Kategori
Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	80,00	10,00	12,50 ▼	Perlu Upaya Keras

Dari tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Tahun 2025 Persentase UMKM yang Didampingi dan Memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan OBA, Kos yang Baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan yang Dilaksanakan sampai pada Triwulan I Tahun 2025 sebesar 12,5% dengan realisasi sebesar 10,00%. Apabila dibandingkan terhadap target tahun 2025 yaitu 80%, realisasi tw 1 masih belum dapat mencapai target dengan kategori perlu upaya keras. Indikator ini akan ditingkatkan pada triwulan berikutnya selain itu pula melakukan pengoptimalan inovasi khususnya program inovasi UMKM PACAK sebagai daya dukung untuk menumbuhkan semangat pendampingan UMKM di wilayah Provinsi Bangka Belitung.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja

Capaian pada indikator ini sudah melampaui target yang ditetapkan, dengan capaian sebesar 200 %. Capaian ini lebih besar dari target yang telah ditetapkan, disebabkan karena adanya penyesuaian untuk target yang didampingi untuk tahun

2025 adalah UMKM Pangan Olahan. Adanya efisiensi anggaran pada triwulan I menyebabkan adanya penyesuaian terhadap target dari UMKM yang akan didampingi dari semula 8 target sarana UMKM menjadi 2 target UMKM. Target UMKM yang akan didampingi pada tahun 2025 merupakan UMKM Pangan Olahan. Sesuai dengan petunjuk pelaksanaan pendampingan, tahapan untuk pendampingan UMKM pangan olahan yang telah dilaksanakan yaitu penetapan target sarana dengan bobot tahapan sebesar 10%, sehingga jika dibandingkan dengan target pada triwulan I realisasi tahapan ini lebih besar dikarenakan yang dihitung hanya pendampingan pada UMKM Pangan Olahan. Optimalisasi terhadap proses pendampingan sarana akan terus dilaksanakan hingga tahapan lainnya sesuai dengan petunjuk pelaksanaan pendampingan UMKM yang telah ditetapkan.

d. Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Dengan adanya efisiensi anggaran pada tahun 2025 mempengaruhi target dalam pendampingan UMKM sehingga dengan adanya penyesuaian sarana yang akan dilakukan pendampingan pada tahun 2025. Tahapan yang telah dilakukan yaitu penetapan target sarana. Penetapan target sarana ini dilakukan setelah pendataan UMKM melalui Link yang disampaikan kepada pelaku usaha untuk mendaftarkan produknya melalui Media Sosial BPOM Pangkal Pinang. Tahapan awal dalam pendampingan seharusnya adalah Sosialisasi Keamanan Pangan bagi calon pelaku usaha yang akan dilakukan pendampingan, namun dengan adanya perubahan tahapan pada petunjuk teknis pelaksanaan pendampingan UMKM dari unit pengampu tahapan ini akan dilaksanakan pada triwulan berikutnya. Tahapan-tahapan selanjutnya akan dilakukan melalui kolaborasi bersama Pemerintah Daerah maupun lintas sektor terkait lainnya dalam rangka pembinaan dan pendampingan UMKM di wilayah kerja BPOM di Pangkal Pinang.

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Capaian realisasi indikator Persentase UMKM yang Didampingi dan Memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan OBA, Kosmetik yang Baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan triwulan I tahun 2025 lebih dipengaruhi oleh

adanya efisiensi anggaran. Adanya efisiensi anggaran menyebabkan penyesuaian target pendampingan UMKM dari 8 sarana yang didampingi menjadi 2 sarana . Tahapan untuk pendampingan UMKM pangan olahan yang telah dilaksanakan yaitu penetapan target sarana dengan bobot tahapan sebesar 10%, sehingga jika dibandingkan dengan target pada triwulan I realisasi tahapan ini lebih besar dikarenakan yang dihitung hanya pendampingan pada UMKM Pangan Olahan. Tahapan pendampingan UMKM ini akan terus dilaksanakan pada triwulan selanjutnya yaitu Sosialisasi Keamanan Pangan dan Bimtek Izin Penerbitan CPPOB. Selain itu sebagai daya dukung untuk menumbuhkan semangat pendampingan UMKM di wilayah kerja BPOM di Pangkal Pinang akan dilakukan optimalisasi pelaksanaan inovasi UMKM PACAK serta berkolaborasi dengan lintas sektor terkait untuk mendukung pelaksanaan inovasi tersebut.

f. Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

Tabel 3.68 Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Indikator Persentase UMKM yang Didampingi dan Memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan OBA, Kos yang Baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan

Indikator	Output			Input (Anggaran)			IE	TE	Capaian
	T	R	%	Target (RPD TW I)	Realisasi	%			
Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	5	10	200,00	510.000	0	0,00	-	-	

1) Efisiensi penggunaan anggaran

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi anggaran untuk indikator ini yaitu mencapai 0 atau mencapai 0% realisasi anggaran terhadap target RPD TW I yakni 510.000 sedangkan realisasi output sebesar 10%, target output sebesar 5% sehingga persentase capaian output adalah 200%. Dengan kata lain penggunaan anggaran untuk mencapai target output pada indikator Persentase UMKM yang Didampingi dan Memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan OBA, Kos yang Baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan yang capaiannya tidak dapat didefinisikan hal ini sebabkan karena dari segi anggaran kegiatan pendampingan untuk sarana UMKM belum dilaksanakan

akibat adanya efisiensi anggaran serta adanya penyesuaian target untuk tahun 2025. Berdasarkan petunjuk pelaksanaan pendampingan terhadap UMKM yang telah dilaksanakan yaitu melakukan penetapan target sarana yang akan dilakukan pendampingan. Tahapan-tahapan terhadap proses pendampingan ini akan terus dilaksanakan sesuai dengan perencanaan pada triwulan berikutnya.

2) Upaya mencapai efisiensi penggunaan anggaran

Untuk mencapai efisiensi penggunaan anggaran dalam kegiatan pendampingan UMKM perlu dilakukan optimalisasi perencanaan sehingga proses pelaksanaan kegiatan hingga pertanggungjawaban anggaran dapat terlaksana tepat waktu. Selain itu, perlunya mekanisme yang lebih jelas dan detail terkait dengan pelaksanaan kegiatan Inovasi UMKM PACAK sehingga selain memberikan dampak langsung terhadap UMKM juga memberikan dampak langsung pula terhadap ketercapaian indikator ini.

g. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Indikator ini merupakan indikator yang pada periode laporan kinerja 2024 yaitu Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik dengan capaian sesuai dengan target yaitu 100 %. Berdasarkan hal ini, masih diperlukan upaya-upaya untuk peningkatan kinerja tahun 2025 diantaranya :

1) Penyesuaian aktivitas/kegiatan untuk mencapai target kinerja

Dengan adanya efisiensi anggaran pada triwulan I, dilakukan penyesuaian target untuk pendampingan sarana UMKM dari sebelumnya 6 sarana menjadi 2 sarana. Sarana yang akan dilakukan pendampingan merupakan UMKM Pangan Olahan. Selain itu kegiatan pendampingan akan dialihkan untuk dilaksanakan secara daring agar seluruh tahapan kegiatan tetap terlaksana sesuai dengan perencanaan dan petunjuk pelaksanaan yang telah ditetapkan.

2) Penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai target kinerja;

Penggunaan anggaran yang tersedia untuk pencapaian kinerja ini terbatas hanya pada saat proses pendampingan ke sarana sehingga pada proses tahapan selanjutnya akan dilaksanakan secara daring dengan tidak mengurangi proses tahapan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan.

3) Evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja yang mencakup tindak lanjut atas rekomendasi/rencana aksi kinerja;

   Berdasarkan informasi kinerja tahun sebelumnya, terdapat beberapa hal yang dapat terus dilakukan dan ditingkatkan pada tahun 2025 dalam pencapaian realisasi kinerja terhadap capaian indikator ini. BPOM Pangkal Pinang akan meningkatkan kolaborasi dengan pemerintah daerah dan lintas sektor lainnya dalam hal pembinaan dan pendampingan UMKM dalam pemenuhan Izin penerapan CPPOB serta peningkatan kompetensi petugas Balai POM di Pangkal Pinang dalam melakukan kegiatan pendampingan kepada pelaku usaha sehingga capaian indikator ini dapat tercapai di akhir tahun anggaran.

4) Penyesuaian perencanaan kinerja untuk periode berikutnya.

   Dalam rangka upaya perencanaan kinerja BPOM Pangkal Pinang akan konsisten melakukan setiap tahapan pendampingan bagi pelaku usaha maupun penanggung jawab sarana serta berkolaborasi bersama lintas sektor terkait dalam rangka pembinaan UMKM yang ada di wilayah kerja BPOM di Pangkal Pinang sehingga pemenuhan terhadap target terhadap indikator ini dapat tercapai.

h. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya (Internal maupun Eksternal)

Tabel 3.69 Tindak Lanjut Rekomendasi Persentase UMKM yang Didampingi dan Memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan OBA, Kos yang Baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan

Bulan	Kondisi Awal	Rekomendasi	*Timeline*	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
				Rencana Aksi yang Sudah Selesai	Belum		
					Rencana Aksi yang Belum Selesai	*Timeline*	
1	2	3	4	5	6	7	8
Januari	-	-	-	-	-	-	-
Februari	Target dan tahapan proses pendampingan dilakukan penyesuaian karena adanya efisiensi anggaran	Pendataan UMKM yang telah mendaftar melalui Link UMKM Pacak	Februari	Pendataan UMKM yang telah mendaftar melalui Link UMKM Pacak	-	-	Telah dilaksanakan pendataan UMKM yang telah mendaftar melalui Link UMKM Pacak sebanyak 5 UMKM Pangan
Maret	Masih menunggu juknis pendampingan dan penyesuaian target	Menyusun perencanaan penetapan target UMKM yang akan	Maret	Telah dilakukan penetapan target UMK yang akan dilakukan	-	-	Telah ditetapkan target UMK sebanyak 2 sarana yaitu minuman kemasan Monci dan CV Bintang

Bulan	Kondisi Awal	Rekomendasi	*Timeline*	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
				Rencana Aksi yang Sudah Selesai	Belum		
					Rencana Aksi yang Belum Selesai	*Timeline*	
	akibat efisiensi anggaran	dilakukan pendampingan		pendampingan untuk tahun 2025 sebanyak 2 Sarana			Graha Ponix

SS 5 : Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Efektif di Wilayah Kerja UPT

Berdasarkan Peraturan BPOM No. 26 tahun 2017, Deputi Bidang Penindakan bertugas menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Penindakan di Bidang Obat dan Makanan merupakan upaya terakhir yang ditempuh dalam menjaga keamanan obat dan makanan yang beredar di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Upaya pencegahan, pelaksanaan inspeksi rutin dan Komunikasi, Edukasi dan Informasi (KIE) diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan para pelaku usaha dan mencerdaskan masyarakat dalam rangkaian proses produksi, distribusi dan penggunaan produk obat dan makanan.

Penilaian Persentase keberhasilan penindakan dilakukan dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara, yaitu dengan pembagian bobot berturut-turut:

a) SPDP sebesar 15% -- nilai A [(a+b+c+d) / jumlah perkara]

b) Tahap I sebesar 40% -- nilai B [(b+c+d) / jumlah perkara]

c) P21 sebesar 30%, dan -- nilai C [(c+d) / jumlah perkara]

d) Tahap 2 sebesar 15% -- nilai D (d / jumlah perkara)

Nilai Tingkat Keberhasilan =

{(15% x A) + (40% x B) + (30% x C) + (15% x D)} x (Jumlah capaian / target perkara)

Perhitungan capaian berdasarkan template perkara terlampir. Perhitungan realisasi perkara meliputi perkara tahun n dan perkara *carry over*.

1. **Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan**

a. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Triwulan I Tahun 2025

Tabel 3.70 Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Indikator	Kinerja			Kategori & Notifikasi Warna
	Target	Realisasi	%Capaian	
Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	-	-		

1. Penindakan adalah serangkaian kegiatan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan per-UU di bidang Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh penyidik menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
2. Kegiatan penindakan merupakan seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh UPT seluruh Indonesia dalam rangka untuk mencapai penyelesaian berkas perkara di wilayah UPT.

   Tahapan Penindakan antara lain:

   a) SPDP (Surat Pemberitahuan Dim'ulainya Penyidikan)

   b) Tahap I (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU))

   c) P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum)

   d)Tahap 2 (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum)
3. Nilai pembobotan tersebut sudah termasuk juga di dalamnya tahapan SP3, apabila perkara yang sedang ditangani diterbitkan SP3 maka nilai bobot perkara tersebut sama dengan jumlah nilai bobot sampai dengan tahapan terakhir yang dicapai.

   Belum ada perkara tindak pidana sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditangani oleh Tim Kerja Kegiatan Penindakan Balai POM di Pangkal Pinang pada Triwulan I, sehingga belum ada realisasi indikator kinerja persentase keberhasilan penindakan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan Balai POM di Pangkal Pinang pada Triwulan I tahun 2025.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Tahun 2025

Tabel 3.71 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Tahun 2025 Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Target Tahun 2025	Realisasi Triwulan I	% Capaian Terhadap Target Tahunan	Kategori
Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	90,00	-	-	

Realisasi kinerja Triwulan I sebesar 0% yang apabila dibandingkan dengan target tahun 2025 sebesar 90% menghasilkan persentase capaian sebesar 0%. Target realisasi akan dilaksanakan pada Triwulan 2.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja

1. Belum ada realisasi perkara yang dilakukan penyidikan oleh Tim Kerja Penindakan Balai POM di Pangkal Pinang.
2. Target realisasi akan dilaksanakan pada Triwulan 2 dengan melaksanakan kegiatan intelijen yang berfokus pada target potensial untuk dinaikkan ke proses penyidikan.
3. Meningkatkan koordinasi antar PPNS Badan POM RI, untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan masing-masing Unit Pelaksana Teknis sebagai bahan pembanding pada kegiatan intelijen dan operasi penindakan maupun dalam proses penyidikan.

d. Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

1. Melaksanakan kegiatan intelijen yang berfokus pada target potensial untuk dinaikkan ke proses penyidikan.
2. Meningkatkan koordinasi dengan Criminal Justice System dalam hal penyelidikan, penyidikan hingga ke pemberkasan.
3. Mengikuti pelatihan dan peningkatan kompetensi yang diselenggarakan oleh Badan POM, Polri, maupun Balai lainnya di lingkungan Badan POM.
4. Memperkuat jejaring intelijen dan pertukaran informasi terkait adanya pelanggaran maupun tindak pidana di bidang Obat dan Makanan dengan lintas sektor terkait seperti BNN, Bea Cukai dan Asperindo.

5. Selalu berkonsultasi dengan Korwas PPNS dan JPU peneliti berkas dalam proses tahapan penyidikan hingga penyelesaian berkas perkara, agar dapat terlaksana secara efektif, efisien dan tidak menyalahi aturan.

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Kegiatan atau program kerja tim kerja penindakan di tahun 2025 dilaksanakan untuk mendukung keberhasilan capaian kinerja. Pelaksanaan kegiatan intelijen dilakukan secara tersistem dari pengumpulan bahan awal, pendalaman informasi dan kegiatan intelijen berdasarkan pemetaan kerawanan kejahatan dari tahun sebelumnya. Penelusuran secara terselubung dari sarana eceran atau toko kelontong memberikan informasi penting mengenai sumber pasokan obat-obatan yang dijual tanpa kewenangan.

Informasi atau data potensi kerawanan kejahatan yang diperoleh melalui rekomendasi fungsi pemeriksaan, hasil profiling atau patroli siber menjadi titik awal pelaksanaan kegiatan penindakan dalam mengupayakan penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan sediaan farmasi dan pengan olahan di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Untuk itu komunikasi dan kerja sama antara fungsi penindakan dan pemeriksaan juga memiliki peran yang tidak kalah penting untuk mendukung pencapaian kinerja yang lebih baik. Kegiatan rutin operasi intelijen dan verifikasi data patrol siber dilaksanakan secara sinergis menghasilkan data atau informasi yang dapat menjadi acuan bagi Tim Kerja Pemeriksaan maupun Tim Kerja Penindakan.

Dalam penyelesaian target perkara, fungsi penindakan aktif melakukan koordinasi dan menjalin hubungan lintas sektor dalam hal ini CJS (Criminal Justice System) dengan Kejaksaan Tinggi dan Koordinator Pengawas Pegawai Negeri Sipil (Korwas PPNS) POLDA Kepulauan Bangka Belitung. Selain itu, capaian target perkara tahun 2025 juga didukung oleh kerja sama lintas sektor dengan Bea Cukai Pangkal Pinang yang berperan aktif memberikan informasi terkait adanya paket diduga Obat-Obat Tertentu yang dikirim ke wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

f. Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

Tabel 3.72 Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Indikator Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Indikator	Output			Input (Anggaran)			IE	TE	Capaian
	T	R	%	Target (RPD TW I)	Realisasi	%			
Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	-	-	-	15.115.997	13.213.000	87,41	-	-	

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui presentase penggunaan sumber daya/anggaran pada Triwulan I sebesar 87,41% dari target target RPD Triwulan I Rp 15.115 997. Realisasi anggaran Rp 13.213.000 digunakan untuk berbagai rangkaian kegiatan Penindakan dalam mendukung upaya penegakan hukum kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan antara lain kegiatan pengumpulan informasi dan kegiatan intelijen.

Upaya yang akan dilakukan dalam rangka pencapaian efisiensi pada TW II yaitu dilakukannya proses penyidikan sesuai yang telah direncanakan. Anggaran yang dipergunakan untuk berbagai rangkaiankegiatan Penindakan dalam upaya penegakan hukum antara lain kegiatan pengumpulan informasi dari kegiatan patroli siber dan verifikasi hasil patroli siber, kegiatan pengawasan pengamatan penelitian dan pemeriksaan, kegiatan dan operasi intelijen serta kegiatan penyidikan dimulai dari proses pemberkasan hingga keluarnya putusan hakim dari pengadilan.

g. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Pemanfaatan informasi dalam laporan kinerja akan menjadi katalisator yang memberikan dampak signifikan dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya, terutama dalam Iindikator kinerja utama persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang obat dan makanan. Berdasarkan Laporan Interim Triwulanan dan Laporan Kinerja Tahun 2024 maka dilakukan beberapa langkah berikut:

a. Penyesuaian aktivitas/kegiatan untuk mencapai target kinerja

i. Proses pengumpulan bahan keterangan dan informasi yang lebih baik dan komprehensif, sehingga dapat menemukan adanya kejadian tindak pidana bidang Obat dan Makanan lebih akurat dan tepat sasaran

ii. Memaksimalkan Koordinasi dengan Criminal Justice System guna mendapatkan informasi adanya Tindak Pidana di wilayah Bangka Belitung

b. Penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai target kinerja

Sehubungan diterbitkannya Inpres 1 no 2025 terkait Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sehingga diperlukan penyesuaian anggaran untuk beberapa kegiatan seperti Kegiatan Intelijen hanya berfokus pada target yang telah diduga terjadi Tindak Pidana saja. Sehingga dengan begitu Anggaran terpakai secara efektif untuk mencapai target kinerja.

c. Evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja yang mencakup tindak lanjut atas rekomendasi/rencana aksi kinerja

i. Melaksanakan monitoring evaluasi secara periodik untuk memastikan realisasi tercapai sesuai dengan target

ii. Melakukan evaluasi masalah/kendala yang dihadapi dalam pencapaian target selama tahun sebelumnya dan menentukan langka-langkah tindak lanjut yang dapat dilakukan

iii. Secara terus menerus melakukan Koordinasi dan Kerja sama dengan Criminal Justice System untuk mensuppot capaian target 2025.

d. Penyesuaian perencanaan kinerja untuk periode berikutnya

i. Realisasi Target Perkara yang secara dominan dengan Komoditi Obat selanjutnya bisa dilakukan antisipasi adanya komoditi-komoditi lain.

ii. Perencanaan anggaran diarahkan kepada kegiatan-kegiatan yang belum dapat terlaksana di tahun 2025.

h. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya (Internal maupun Eksternal)

Tabel 3.73 Tindak Lanjut Rekomendasi Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Bulan	Kondisi Awal	Rekomendasi	*Timeline*	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
				Rencana Aksi yang Sudah Selesai	Belum		
					Rencana Aksi yang Belum Selesai	*Timeline*	
1	2	3	4	5	6	7	8
Januari	-	-	-	-			-
Februari	Target Penyidikan dilaksanakan pada TW II Upaya pencapaian target yaitu dengan melakukan Kegiatan	Memanfaatkan Anggaran yang tersedia untuk melakukan Kegiatan Intelijen yang berfokus pada target	April		Memanfaatkan Anggaran yang tersedia untuk melakukan Kegiatan Intelijen yang berfokus	April	Target Penyidikan dilaksanakan pada TW II Upaya pencapaian target yaitu dengan melakukan Kegiatan Intelijen terhadap target

Bulan	Kondisi Awal	Rekomendasi	*Timeline*	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
				Rencana Aksi yang Sudah Selesai	Belum		
					Rencana Aksi yang Belum Selesai	*Timeline*	
	Intelijen terhadap target yang sudah ada	sasaran yang akan dilakukan penyidikan di TW II			pada target sasaran yang akan dilakukan penyidikan di TW II		yang sudah ada
Maret	Belum ada realisasi perkara yang dilakukan penyidikan oleh Tim Kerja Penindakan Balai POM di Pangkal Pinang	Target Penyidikan dilaksanakan pada TW II Upaya pencapaian target yaitu dengan melakukan Kegiatan Intelijen terhadap target yang sudah ada	April		Memanfaatkan Anggaran yang tersedia untuk melakukan Kegiatan Intelijen yang berfokus pada target sasaran yang akan dilakukan penyidikan di TW II	April	Target Penyidikan dilaksanakan pada TW II Upaya pencapaian target yaitu dengan melakukan Kegiatan Intelijen terhadap target yang sudah ada

SS 6 : Terlaksananya Kegiatan Deteksi Kejahatan di Bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Efektif di Wilayah Kerja UPT

Kegiatan deteksi dini kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan merupakan usaha, kegiatan atau tindakan mengetahui, merumuskan, dan mengidentifikasi masalah dugaan dan potensi kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan sehingga dapat mengantisipasi berbagai perkembangan situasi dan dapat ditangani secara profesional dan proporsional sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Deteksi dini dilakukan dengan menyusun laporan Analisis Penelusuran Siber adalah Hasil Kegiatan Patroli Siber dan Penjejakan Digital (Profiling Siber) dan Analisis hasil pelaksanaan fungsi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan di UPT.

1. **Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diselesaikan Sesuai Standar**

   a. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Triwulan I Tahun 2025

Tabel 3.74 Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diselesaikan Sesuai Standar

Indikator	Kinerja			Kategori & Notifikasi Warna
	Target	Realisasi	%Capaian	
Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50	100,00%	Baik

Analisis Kejahatan Obat dan Makanan terbagi menjadi 2 (dua), yaitu:

1. Analisis Penelusuran Siber adalah Hasil Kegiatan Patroli Siber dan Penjejakan Digital (Profiling Siber) yang dilakukan berdasarkan identifikasi pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diperjual-belikan atau didistribusikan secara daring di lingkup wilayah kerja UPT BPOM yang dilaporkan setiap bulan kepada Direktur Siber Obat dan Makanan sesuai dengan Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.02.02.1.2.02.22.97 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Siber Obat dan Makanan dan Surat Direktur Siber Obat dan Makanan Nomor T-PD.04.01.63.01.24.16 tanggal 15 Januari 2024 perihal Pelaporan Laporan Siber (Patroli Siber dan Profiling).
2. Analisis hasil pelaksanaan fungsi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan di UPT sesuai dengan Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.02.02.1.2.01.22.12 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan yang terdiri dari:
    a. Laporan hasil tindak lanjut rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan **(1 laporan dilaporkan tiap tahun)**.
    b. Laporan analisis kerawanan kejahatan berbasis kewilayahan **(1 laporan dilaporkan tiap tahun)**.

Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diselesaikan Sesuai Standar di Balai POM di Pangkal Pinang memiliki target pada Triwulan I tahun 2025 sebesar 5% dengan realisasi sampai dengan Triwulan I tahun 2025 sebesar 5%. Capaian terhadap target sebesar 100% dengan kategori "Baik".

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Tahun 2025

Tabel 3.75 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Tahun 2025 Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diselesaikan Sesuai Standar

Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Target Tahun 2025	Realisasi Triwulan I	% Capaian Terhadap Target Tahunan	Kategori
Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90	50,00	55,56 ▼	Perlu Upaya Keras

Realisasi kinerja Triwulan I sebesar 50% yang apabila dibandingkan dengan target tahun 2025 sebesar 90% menghasilkan persentase capaian sebesar 55,56% dengan kategori "Perlu Upaya Keras".

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja

Telah dilakukan pemenuhan laporan Analisis Penelusuran Siber adalah Hasil Kegiatan Patroli Siber dan Penjejakan Digital (Profiling Siber) secara tepat waktu dan sesuai pedoman yang ditetapkan.

d. Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

1. Mengikuti pelatihan dan peningkatan kompetensi yang diselenggarakan oleh Badan POM, Polri, maupun UPT lainnya di lingkungan Badan POM.
2. Memperkuat jejaring intelijen dan pertukaran informasi terkait adanya pelanggaran maupun tindak pidana kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan dengan lintas sektor terkait seperti BNN, Bea Cukai dan Asperindo.

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Kegiatan atau program kerja tim kerja penindakan di tahun 2025 dilaksanakan untuk mendukung keberhasilan capaian kinerja. Secara rutin telah dilakukan pemenuhan laporan Analisis Penelusuran Siber adalah Hasil Kegiatan Patroli Siber dan Penjejakan Digital (Profiling Siber) secara tepat waktu dan sesuai pedoman yang ditetapkan. Kegiatan penelusuran siber yang dilaksanakan mengacu pada data pemetaan kerawanan kejahatan dari tahun sebelumnya dan hasil kegiatan intelijen menggunakan berbagai platform media sosial, platform e-commerce dan hasil penelusuran pada open source lainnya. Selanjutnya dalam melakukan kegiatan deteksi dini dibutuhkan jejaring intelijen dan pertukaran informasi utuk mengidentifikasi masalah dugaan, potensi kejahatan dan tindak pidana kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan di wilayah kerja Balai POM di Pangkal Pinang dengan lintas sektor terkait melalui kegiatan penggalangan

lintas sektor seperti BINDA, BNN, Bea Cukai, Polri, Asperindo serta lintas sektor lainnya dengan "Inovasi Pulau Bangka".

f. Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

Tabel 3.76 Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Indikator Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diselesaikan Sesuai Standar

Indikator	Output			Input (Anggaran)			IE	TE	Capaian
	T	R	%	Target (RPD TW I)	Realisasi	%			
Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50,00	100,00	724.000	724.000	100,00	**1,00**	**0,00**	**100% (Efisien)**

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran telah efisien dengan capaian sebesar 100%. Anggaran digunakan untuk kegiatan Verifikasi Hasil Patroli siber dan pengumpulan data analisis kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan.

Adanya Efisiensi Anggaran sehingga adanya penyesuaian anggaran dan kegiatan di dalam Indikator Kinerja ini. Anggaran yang tersisa adalah anggaran Verifikasi Hasil Patroli Siber dengan total 3 kegiatan dalam tahun 2025. Pada TW I tahun 2025 ini telah menghasilkan Output 1 Kegiatan dalam bentuk Laporan Profiling sehingga dalam penggunaan Anggaran secara Efektif. Pada TW berikutnya akan dilaksanakan Verifikasi Hasil Patroli Siber sesuai perencanaan sehingga penggunaan anggaran akan dilaksanakan secara efektif.

g. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Kegiatan ini merupakan indikator yang baru ada di tahun 2025 sehingga tidak ada informasi kinerja periode sebelumnya yang dapat dimanfaatkan dalam upaya peningkatan kinerja.

h. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya (Internal maupun Eksternal)

Tabel 3.77 Tindak Lanjut Rekomendasi Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diselesaikan Sesuai Standar

Bulan	Kondisi Awal	Rekomendasi	*Timeline*	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
				Rencana Aksi yang Sudah Selesai	Belum		
					Rencana Aksi yang Belum Selesai	*Timeline*	
1	2	3	4	5	6	7	8
Januari	-	-	-	-	-	-	-
Februari	-	-	-	-	-	-	-
Maret	-	-	-	-	-	-	-

SS 7 : Layanan Publik UPT yang prima

Capaian sasaran strategis **Layanan Publik Balai POM di Pangkal Pinang yang Prima** diukur dengan indikator kinerja utama (IKU) berikut:

1. Indeks Pelayanan Publik

Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan K/L/D berdasarkan 6 (enam) aspek meliputi:

a. Kebijakan Pelayanan (bobot 24%);
b. Profesionalitas SDM (25%);
c. Sarana Prasarana (18%);
d. Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (11%);
e. Konsultasi dan Pengaduan (10%);
f. Inovasi (12%).

Penilaian kinerja UPP mengacu Peraturan Menteri PANRB Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

a. Dilakukan penilaian oleh Tim Penilai UPP BPOM
b. Kategori nilai:

Range Nilai	Kategori	Makna
0 – 1,00	F	Gagal
1,01 – 1,50	E	Sangat Buruk
1,51 – 2,00	D	Buruk
2,01 – 2,50	C-	Cukup *(Dengan Catatan)*
2,51 – 3,00	C	Cukup
3,01 – 3,50	B-	Baik *(Dengan Catatan)*
3,51 – 4,00	B	Baik
4,01 – 4,50	A-	Sangat Baik
4,51 – 5,00	A	Pelayanan Prima

a. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Triwulan I Tahun 2025

Tabel 3.78 Indeks Pelayanan Publik

Indikator	Kinerja			Kategori & Notifikasi Warna
	Target	Realisasi	%Capaian	
Indeks Pelayanan Publik UPT	-	-		

Merupakan Target Tahunan dan Hasil penilaian Indeks Pelayanan Publik diberikan oleh Tim Penilai Unit Pelayanan Publik (Tim UPP) BPOM setelah Desk Penilaian Pelayanan Publik pada tahun 2025.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Tahun 2025

Tabel 3.79 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Tahun 2025 Indeks Pelayanan Publik

Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Target Tahun 2025	Realisasi Triwulan I	% Capaian Terhadap Target Tahunan	Kategori
Indeks Pelayanan Publik UPT	4,7	-	-	

Target Indeks Pelayanan Publik (IPP) Balai POM di Pangkal Pinang Tahun 2025 sebesar 4,7. Hasil pengukuran Indeks Pelayanan Publik merupakan target tahunan sehingga perbandingannya akan dilakukan pada Lapkin Tahunan.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja

Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh BPOM di Pangkal Pinang untuk meningkatkan pelayanan publik yang diberikan Badan POM. Standar Pelayanan Publik yang ditetapkan Badan POM untuk memberikan kepastian bagi pemberi

layanan dan penerima layanan berusaha dipenuhi oleh BPOM di Pangkal Pinang, bahkan beberapa hal dapat dipenuhi dengan sangat baik oleh BPOM di Pangkal Pinang misalnya timeline untuk pengujian sampel pihak ketiga Narkotika, Psikotropika dan Prekusor. Sedangkan untuk meningkatkan profesionalisme SDM pemberi layanan dilakukan peningkatan kompetensi SDM secara terencana dan terstruktur.

d. Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BPOM di Pangkal Pinang melakukan berbagai upaya sesuai aspek penilaian indeks pelayanan publik terutama yang masih belum optimal, antara lain sebagai berikut :

a) Melakukan penyusunan Standar Pelayanan Publik melalui kegiatan Forum Konsultasi Publik yang melibatkan beberapa unsur (Masyarakat Pengguna Layanan, Ahli/ Praktisi/ Akademisi, Organisasi Masyarakat Sipil, Instansi Terkait dan Media).
b) Melakukan berbagai inovasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.
c) Meningkatkan kapasitas dan profesionalisme petugas pemberi layanan publik melalui Pendidikan dan Pelatihan, termasuk peningkatan soft skill pelayan publik.
d) Melakukan Survei Kepuasan Masyarakat mandiri secara periodik untuk melihat respon pelanggan terhadap pelayanan publik yang diberikan.
e) Meningkatkan fasilitas pelayanan publik sehingga pelanggan merasa nyaman dan mendapatkan semua yang dibutuhkan.
f) Melakukan pemutakhiran sistem informasi pelayanan publik secara terus menerus.
g) Memperbaiki dokumentasi proses penanganan pengaduan sehingga tertib dan mudah diakses sehingga dapat digunakan sebagai bahan evaluasi penanganan pengaduan yang lebih baik.

h) Menerapkan kode etik pelaksana layanan meliputi hak, kewajiban, larangan KKN dan larangan diskriminasi.

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Kebutuhan SDM secara kuantitas sebagian dapat digantikan dengan pemanfaatan Sistem Informasi yang dapat mempercepat layanan, memberikan layanan yang konsisten, transparan dan akuntabel. Sistem informasi yang dikembangkan BPOM di Pangkal Pinang ditujukan untuk memberikan kemudahan dan transparansi serta kepastian kepada pelanggan. Telah dikembangkan tracking system untuk layanan pengujian pihak ketiga sehingga konsumen mengetahui dengan pasti status progress sample yang sedang diuji di laboratorium dan Layanan informasi dan Pengaduan online 24 Jam.

f. Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

Tabel 3.80 Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Indikator Indeks Pelayanan Publik

Indikator	Output			Input (Anggaran)			IE	TE	Capaian
	T	R	%	Target (RPD TW I)	Realisasi	%			
Indeks Pelayanan Publik UPT	-	-	-	2.153.000	1.020.000	47,38	-	-	

1) Efisiensi penggunaan anggaran

Merupakan target tahunan sehingga pada Triwulan I belum ada target output yang direncanakan sehingga belum ada hasil efisiensi atas penggunaan sumber daya.

2) Upaya mencapai efisiensi penggunaan anggaran

Upaya yang akan dilakukan kegiatan untuk mencapai output yang ditetapkan dan penggunaan anggaran yang optimal sehingga penggunaan anggaran efisien

g. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Berdasarkan informasi kinerja pada laporan kinerja tahun 2024, Balai POM di Pangkal Pinang melakukan berbagai upaya dalam rangka pencapaian target kinerja tahun 2025, diantaranya:

1. Penyesuaian aktivitas/kegiatan untuk mencapai target kinerja

Penyesuaian kegiatan dalam mencapai target kinerja yang dilakukan pada tahun 2024 diantaranya :

- Melakukan reviu secara berkala Standar Pelayanan Publik BPOM di Pangkal Pinang yang memuat unsur-unsur pelayanan publik, yang mana dalam penyusunannya dilakukan melalui tahapan Forum Konsultasi Publik untuk mendapatkan masukan/saran dari pengguna layanan dan melakukan penambahan Standar Pelayanan dari sebelumnya 5 (Lima) Standar Pelayanan menjadi 9 (Sembilan) Standar Pelayanan.

2. Penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai target kinerja

   Dalam mencapai target kinerja ini telah dilakukan perencanaan anggaran POK Tahun 2025 dengan pengantian Komputer Aplikasi Buku Tamu (AKU KAMU) menjadi touchscreen sehingga lebih memudahkan pelanggan yang datang ke kantor untuk melakukan pencatatan Selain itu Pelatihan Petugas Pelayanan Publik untuk mendukung Sumber Daya Manusia khususnya petugas pelayanan publik agar senantiasa melakukan pelayanan prima kepada pelanggan sehingga BPOM di Pangkal Pinang dengan mendatangkan narasumber yang kompeten.

3. Evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja yang mencakup tindak lanjut atas rekomendasi/rencana aksi kinerja

   Berdasarkan capaian tahun sebelumnya dilakukan tindak lanjut terhadap kekurangan dari tools penilaian sehingga diharapkan dapat meningkatkan realisasi di tahun 2025.

4. Penyesuaian perencanaan kinerja untuk periode berikutnya

   Melakukan pemeliharaan Sarana Prasarana khusunya terkait Pelayanan Publik sehingga masih tetap terjaga dan dapat digunakan oleh pelanggan sehingga mampu meningkatkan kualitas pelayanan public serta ikut serta dalan lomba KIPP baik Tingkat Daerah maupun Nasional

h. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya (Internal maupun Eksternal)

Tabel 3.81 Tindak Lanjut Rekomendasi Indeks Pelayanan Publik

Bulan	Kondisi Awal	Rekomendasi	*Timeline*	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
				Rencana Aksi yang Sudah Selesai	Belum		
					Rencana Aksi yang Belum Selesai	*Timeline*	
1	2	3	4	5	6	7	8
Januari	-	-	-	-	-	-	
Februari	Target Indeks Pelayanan Publik Tahun 2025 sebesar 4,7	Menunggu pelaksanaan dimulainya pengukuran Indeks Pelayanan Publik dan melakukan pemeliharaan Sarana Prasarana Pelayanan Publik	Juni	Pemeliharaan Sarana Prasarana Layanan Publik	Menunggu pelaksanaan dimulainya pengukuran Indeks Pelayanan Publik	Juni	Sarana Prasarana Pelayanan Publik dapat diakses oleh pelanggan baik offline maupun online
Maret	Target Indeks Pelayanan Publik Tahun 2025 sebesar 4,7	Menunggu pelaksanaan dimulainya pengukuran Indeks Pelayanan Publik	Juni	-	Menunggu pelaksanaan dimulainya pengukuran Indeks Pelayanan Publik	Juni	Sarana Prasarana Pelayanan Publik dapat diakses oleh pelanggan baik offline maupun online sambil menunggu dimulainya pelaksanaan pengukuran IPP

SS 8 : Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal

Capaian sasaran strategis **Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi Yang Optimal** diukur dengan 4 (tiga) indikator berikut:

1. **Nilai Pembangunan ZI**

   Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Instansi Pemerintah dan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2024, Inspektorat Utama selaku Tim Penilai Internal (TPI) yang akan melakukan penilaian pembangunan ZI menuju WBK/WBBM pada Unit Kerja dan BB/BPOM.

   1. Zona Integritas yang selanjutnya disingkat ZI adalah instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya telah berkomitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari

Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima.

2. Wilayah Bebas dari Korupsi yang selanjutnya disingkat WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/satuan kerja yang telah berhasil melaksanakan reformasi birokrasi dengan baik, yang telah memenuhi Sebagian besar kriteria proses perbaikan pada komponen pengungkit serta mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima.
3. Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang selanjutnya disingkat WBBM adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/satuan kerja yang telah berhasil melaksanakan reformasi birokrasi dengan sangat baik, dengan telah memenuhi sebagian besar kriteria proses perbaikan pada komponen pengungkit untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima.

Rincian bobot komponen pengungkit:

1) Manajemen Perubahan: bobot 8%
2) Penataan Tatalaksana: bobot 7%
3) Penataan Sistem Manajemen SDM: bobot 10%
4) Penguatan Akuntabilitas Kinerja: bobot 10%
5) Penguatan Pengawasan: bobot 15%
6) Penguatan Kualitas Pelayanan Publik: bobot 10%

Rincian bobot komponen penilaian hasil

1) Nilai Survey Persepsi Korupsi (Survei Eksternal): 17,5%
2) Capaian Kinerja Lebih Baik dari pada Capaian Kinerja Sebelumnya: 5%
3) Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei Eksternal): 15%

a. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Triwulan I Tahun 2025

Tabel 3.82 Nilai Pembangunan ZI

Indikator	Kinerja			Kategori & Notifikasi Warna
	Target	Realisasi	%Capaian	
Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	-	-		

Nilai Indeks RB diperoleh dari hasil penilaian TPI atas implementasi Pembangunan ZI melalui pemenuhan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Penilaian Mandiri Pelaksanaan Zona Integritas (PMPZI). Hasil penilaian TPI akan dituangkan

dalam Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Pembangunan ZI dan disampaikan kepada UPT. Penilaian indeks RB Balai POM di Pangkal Pinang dilakukan oleh Inspektorat Utama pada Triwulan IV tahun 2025 sehingga belum bisa dievaluasi pencapaian targetnya pada Triwulan I.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Tahun 2025

Tabel 3.83 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Tahun 2025 Nilai Pembangunan ZI

Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Target Tahun 2025	Realisasi Triwulan I	% Capaian Terhadap Target Tahunan	Kategori
Nilai Pembangunan ZI UPT	90,3	-	-	

Target Indeks RB Balai POM di Pangkal Pinang Tahun 2025 sebesar 90,3. Hasil nilai Indeks RB Balai POM di Pangkal Pinang pada Triwulan I belum ada karena penilaian Indeks RB dilakukan oleh TPI (inspektorat) dan hasilnya dilaporkan pada triwulan 4 tahun 2025.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja

Beberapa upaya yang telah dilakukan sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 dalam upaya mencapai target indeks RB Balai POM di Pangkal Pinang Tahun 2025 sebesar 90,3 antara lain:

1. Telah dilakukan penunjukan Ketua Tim Kerja Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2025 yang tercantum dalam Keputusan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkal Pinang Nomor HK.02.02.8B.01.25.04 Tahun 2025 Tentang Penetapan Ketua Tim Kerja Tahun 2025 Pada Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkal Pinang.
2. Telah dilakukan pembentukan Tim RB Tahun 2025 yang tercantum dalam Keputusan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkal Pinang Nomor HK.02.02.8B.02.25.44 Tahun 2025 Tentang Pembentukan Tim RB dalam Rangka Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di Lingkungan Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkal Pinang Tahun 2025.
3. Telah menyusun Rencana Kerja Pembangunan ZI dan menetapkan Program Prioritas Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM di Lingkungan Balai POM di Pangkal Pinang yang tercantum dalam Surat Keputusan Kepala Balai Pengawas

Obat dan Makanan di Pangkal Pinang Nomor HK.02.02.8B.02.25.80 Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkal Pinang Tahun 2025.

4. Telah menetapkan Tim Agent of Change tahun 2025 yang tercantum dalam Surat Keputusan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkal Pinang Nomor HK.02.02.8B.01.25.41 Tahun 2025 Tentang Penetapan Pemimpin Perubahan dan Agen Perubahan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkal Pinang tahun 2025.
5. Telah dilakukan penyusunan Project Action Plan Agent of Change tahun 2025.
6. Telah dilaksanakan sosialisasi terkait rencana kerja Tim RB kepada seluruh pegawai pada tanggal 21 Maret 2025.
7. Telah dilaksanakan rapat monitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan rencana kerja Tim RB tahun 2025.
8. Telah mengisi Lembar Kinerja Evaluasi (LKE) Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas (PMPZI) dan melengkapi data dukung ZI oleh masing-masing pokja, serta melaksanakan program dan kegiatan masing-masing pokja secara kontinu.
9. Telah dilaksanakan reviu Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas (PMPZI) Unit Kerja Balai POM di Pangkal Pinang oleh Tim Auditor Internal dengan nilai sebesar 93,61 pada tanggal 15 April 2025. Capaian nilai hasil reviu Tim Auditor Internal mengalami penurunan jika dibandingkan dengan hasil reviu tahun 2024 sebesar 96,17. Salah satu faktor penyebabnya yaitu adanya penurunan nilai pada capaian kinerja. Hal ini disebabkan dari 34 IKU Balai POM di Pangkal Pinang sebanyak 30 IKU mencapai target 100% atau lebih sedangkan 4 IKU lainnya belum tercapai. Capaian IKU tahun 2024 jika dibandingkan dengan capaian tahun 2023, dari 29 IKU yang dapat dibandingkan, sebanyak 12 IKU yang mendapat capaian lebih baik, sedangkan capaian 17 IKU lainnya tidak lebih baik dari tahun 2023.

Diharapkan dengan pelaksanaan yg konsisten dan berkelanjutan pencapaian target nilai indeks RB tahun 2025 dapat terpenuhi.

d. Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

1. Menyampaikan hasil reviu auditor Internal atas kelengkapan LKE dan data dukung PM-PZI pada media yang disediakan TPI tepat waktu.
2. Melaksanakan rencana kerja pembangunan ZI sesuai dengan perencanaan dan mengunggah data dukung secara rutin setiap bulannya.
3. Melaksanakan kegiatan yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat
4. Meningkatkan kerja sama, koordinasi dan kolaborasi dengan lintas sektor.
5. Meningkatkan publikasi kinerja kepada masyarakat.
6. Menerapkan inovasi yang berdampak langsung kepada masyarakat sehingga akan meningkatkan kepuasaan masyarakat.
7. Meningkatkan kebersamaan antar pegawai melalui berbagai kegiatan yang melibatkan seluruh personil sehingga dapat bekerjasama dengan lebih baik.

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Untuk menunjang keberhasilan Balai POM di Pangkal Pinang dalam meningkatkan nilai indeks RB, Agent of Change memiliki beberapa program dan inovasi yang akan dijalankan di tahun 2025. Program dan inovasi Agent of Change tahun 2025 antara lain:

1. ALONG SADAR (Ayo Laporkan Pelanggaran secara Daring) merupakan sebuah sistem pelaporan online yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk melaporkan segala hal berkaitan dengan kepuasan pelayanan yang diberikan petugas, adanya indikasi penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang seperti korupsi, suap serta benturan kepentingan yang dilakukan oleh pegawai Balai POM di Pangkal Pinang.
2. SAPA BANG ROBEE (Sosialisasi oleh Bang Robee) merupakan kegiatan sosialisasi tentang reformasi birokrasi, core values ASN BerAKHLAK, budaya organisasi Badan POM PIKKIR dan informasi terkait lainnya kepada seluruh pegawai dalam rangka membangun zona integritas menuju
3. PODCAST GETAS (Bincang Enak Tanpa batAS) merupakan media yang digunakan untuk melakukan sosialisasi dan penyebaran informasi terkait

implementasi Reformasi Birokrasi, Budaya Kerja BPOM (PIKKIR), Budaya Kerja ASN (BerAKHLAK) dan informasi menarik lainnya. Selain itu secara eksternal Podcast juga bisa alternatif untuk Balai POM di Pangkal Pinang melakukan penyebaran informasi dan edukasi kepada masyarakat terkait informasi Obat dan Makanan khususnya di wilayah Kep. Bangka Belitung dengan narasumber internal Balai POM di Pangkal Pinang dan mengundang narasumber dari lintas sektor (stakeholder).

4. SIKOK GEROBOK X SI ADO merupakan pengembangan dari inovasi Sikok Gerobok yang awalnya berupa subsite menjadi bentuk aplikasi dengan mengadopsi inovasi Si Ado BBPOM Bandung. Inovasi ini berupa tempat penyimpanan dokumen mutu ISO 9001:2015 dan ISO/IEC 17025:2017 secara digital berupa aplikasi yang terhubung dengan website Balai POM di Pangkal Pinang.
5. TRI BAKTI OBAT DAN MAKANAN merupakan kegiatan pemberdayaan Masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung guna menambah pengetahuan terkait obat dan makanan sehingga dapat terhindar dari produk obat dan makanan yang membahayakan Kesehatan bagi masyarakat Kepulauan Bangka Belitung.
6. UMKM PACAK merupakan inovasi Balai POM di Pangkal Pinang sebagai upaya proaktif dan masif dalam meningkatkan motivasi bagi pelaku usaha dalam mendaftarkan produknya untuk memperolah izin edar Badan POM dengan cara melakukan kegiatan sebagai upaya jemput bola kepada pelaku usaha dengan berkolaborasi dengan dinas terkait di pemerintah daerah.
7. ASIKKEKKU (Aplikasi Sistem Informasi Elektronik Kartu Kendali Kuitansi) merupakan sebuah aplikasi untuk pegawai internal Balai POM di Pangkal Pinang dan Pihak Ketiga (Penyedia) Balai POM di Pangkal Pinang untuk memonitoring pencairan perjalanan dinas bagi pegawai internal dan pencairan kontrak untuk pihak ketiga.
8. PULAU BANGKA Inovasi PULAU BANGKA memiliki kepanjangan Penggalangan Lintas sektor untuk bersinergi melawan kejahatan obat dan makanan. Kegiatan penggalangan yang dilakukan guna meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan dalam upaya perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh masyarakat serta

menciptakan lintas sektor yang bersinergi dengan secara bersama menekan angka kejahatan obat dan makanan di wilayah Pulau Bangka. Hal tersebut dilakukan dengan menjalin komunikasi serta koordinasi yang baik secara berkala serta kegiatan bersama. Lintas sektor bidang obat dan makanan antara lain POLRI, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri, Kantor Bea Cukai, Badan Narkotika Nasional, Badan Intelijen Negara, Perusahaan Jasa Ekspedisi, Dinas kesehatan, organisasi profesi (seperti IAI dan IDI) dan lintas sector lainnya yang terkait obat dan makanan.

9. TERASI BANGKA (Literasi Asik Bareng Kami) adalah inovasi untuk menyebarluaskan informasi seputar obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan yang berupa materi, leaflet, brosur dll. Adanya inovasi ini untuk memberikan akses informasi obat dan makanan yang terjangkau, mudah dan bisa diakses secara mandiri oleh masyarakat luas sebagai upaya yang efektif dan efisien dalam mendorong meningkatnya pengetahuan masyarakat terkait obat dan makanan.
10. SEPERADIK Seperadik (Sistem Penataan Manajemen SDM secara Periodik) berupa kegiatan sistem berbasis teknologi informasi (web) yang mengakomodir kegiatan manajemen SDM di lingkungan Balai POM di Pangkal Pinang. SEPERADIK berisi data dan informasi yang diantaranya adalah perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan Kebutuhan Organisasi, Pola Mutasi Internal, Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi, Penetapan Kinerja Individu, Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai dan Sistem Informasi Kepegawaian bertujuan untuk mewujudkan system penataan manajemen SDM berbasis teknologi informasi di lingkungan Balai POM di Pangkal Pinang.
11. AMOI CAKEP (Aplikasi Monitoring CAPA Pelaku Usaha) merupakan pemanfaatan tools google spreadsheets secara maksimal untuk memantau ketepatan waktu pengiriman surat tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana, balasan CAPA dari pelaku usaha, evaluasi CAPA oleh petugas dan status CAPA sarana (open / closed). Inovasi AMOI CAKEP menjadi jawaban terhadap kendala petugas pemeriksaan dalam memenuhi kriteria monitoring hasil pengawasan sarana yang ditetapkan pada peraturan Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor 295 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan

Pengawasan Obat dan Bahan Obat di Fasilitas Distribusi, Fasilitas Pelayanan Kefarmasian dan Fasilitas Khusus Lainnya

12. LADA BANGKA-48 (Layanan Handal Analisis Barang Bukti Narkotika 48 jam). Inovasi percepatan waktu uji pengujian narkotika dari 5 (lima) hari kerja menjadi 48 (empat puluh delapan) Jam, inovasi ini dibuat untuk mengakomodir permintaan dari stakeholder untuk mempercepat waktu pengujian. Inovasi ini melibatkan fungsi pengujian dan tata usaha. Dengan adanya inovasi ini diharapkan dapat meningkatkan hasil survey kepuasan Masyarakat dan jumlah sampel yang diujikan di Balai POM di Pangkal Pinang bertambah.

f. Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

Tabel 3.84 Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Indikator Nilai Pembangunan ZI

Indikator	Output			Input (Anggaran)			IE	TE	Capaian
	T	R	%	Target (RPD TW I)	Realisasi	%			
Nilai Pembangunan ZI UPT	-	-	-	1.381.533.817	1.414.501.921	102,39	-	-	

1) Efisiensi penggunaan anggaran

Berdasarkan tabel di atas, anggaran yang dialokasikan untuk mencapai target Indeks RB sebesar Rp 1.381.533.817. Realisasi anggaran sampai dengan Triwulan I yang digunakan untuk mendukung indikator indeks RB sebesar Rp 1.414.501.921 sehingga diperoleh capaian anggaran sebesar 102,39%. Anggaran tersebut digunakan untuk pelaksanaan kegiatan operasional dan pemeliharaan kantor, pembayaran gaji dan tunjangan, kegiatan untuk Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM, kegiatan terpadu, dan perjalanan koordinasi. Namun efisiensi penggunaan anggaran untuk mencapai target indikator Indeks RB ini belum bisa dihitung karena belum ada capaian indikator Indeks RB pada Triwulan I.

2) Upaya mencapai efisiensi penggunaan anggaran

Beberapa upaya untuk mencapai efisiensi penggunaan anggaran pada indikator ini antara lain:

- Melakukan pengawalan pencapaian output dengan melakukan monitoring dan evaluasi rencana kerja pembangunanan ZI dan kelengkapan data

dukungnya secara rutin setiap bulan. Selain itu, juga melakukan pembagian tugas anggota tim Pembangunan ZI untuk mencapai indeks RB sesuai target.

- Melakukan revisi anggaran dari kegiatan yang tidak jadi dilaksanakan secara luring untuk kegiatan urgensi lainnya dalam rangka mengoptimalkan penyerapan anggaran.
- Melakukan optimalisasi anggaran dalam pelaksanaan operasional dan kegiatan lainnya yang mendukung indikator indeks RB.

g. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Berdasarkan informasi Laporan Kinerja tahun 2024, terdapat beberapa hal yang yang dimanfaatkan dalam upaya pencapaian target pada tahun 2025 yaitu :

1) Penyesuaian aktivitas/kegiatan untuk mencapai target kinerja

Pada Triwulan 1 telah dilakukan beberapa penyesuaian aktivitas/kegiatan dalam rangka tindak lanjut rekomendasi pada tahun sebelumnya diantaranya :

- Melakukan integrasi seluruh program/inovasi dengan manajemen risiko
- Melakukan monitoring dan evaluasi pemanfaatan teknologi informasi terhadap seluruh aplikasi yang digunakan.
- Menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai dengan mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai

Hal yang masih perlu untuk diperbaiki pelaksanaannya diantaranya

- Perlu dilakukan kegiatan internalisasi tentang Reformasi Birokrasi untuk meningkatkan pemahaman pegawai
- Perlu dilaksanakan kegiatan yang dapat meningkatkan kerjasama dan keharmonisan seluruh pegawai
- Peningkatan kegiatan kerjasama, kolaborasi, koordinasi, publikasi dengan stakeholder pada kegiatan pengawasan obat dan makanan untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik

2) Penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai target kinerja

Dalam mencapai target kinerja indeks RB BPOM di Pangkal Pinang telah dilakukan penyesuaian anggaran terhadap kegiatan-kegiatan yang mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada BPOM di Pangkal Pinang. Pada triwulan I telah dilakukan penyesuaian anggaran untuk pelaksanaan pengembangan

kompetensi petugas pengelola arsip yang diharapkan dapat mendukung pelaksanaan program tatalaksana papa BPOM di Pangkal Pinang.

3) Evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja yang mencakup tindak lanjut atas rekomendasi/rencana aksi kinerja

Beberapa hal yang telah dilakukan di TW 1 sebagai upaya tindak lanjut atas rekomendasi inspektorat tahun 2024, diantaranya :

- Seluruh program/inovasi dipastikan telah terintegrasi dengan manajemen risiko baik sebagai pengendalian eksisting maupun sebagai atribut pengendalian.
- Seluruh program/inovasi dilengkapi dengan analisis dampak (before-after) atas implementasinya.
- Melakukan monitoring dan evaluasi pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM dan pemberian layanan kepada publik terhadap seluruh aplikasi yang digunakan.
- Menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai dengan mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai
- Memanfaatkan hasil assessment sebagai dasar mutasi internal dan pengembangan kompetensi pegawai.

4) Penyesuaian perencanaan kinerja untuk periode berikutnya

- Melakukan monitoring dan evaluasi renja secara berkesinambungan dan menyajikan kendala dan hambatan serta tindak lanjutnya secara konsisten.
- Menginformasikan dan mengkomunikasikan SPI yang diterapkan di lingkungan unit kerja kepada seluruh pihak terkait.
- Memanfaatkan masukan hasil SKM dan pengaduan masyarakat dalam reviu dan perbaikan atas standar pelayanan.
- Melakukan pemetaan anggaran dengan lebih akurat untuk mencapai target kinerja

h. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya (Internal maupun Eksternal)

Tabel 3.85 Tindak Lanjut Rekomendasi Nilai Pembangunan ZI

Bulan	Kondisi Awal	Rekomendasi	*Timeline*	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
				Rencana Aksi yang Sudah Selesai	Belum		
					Rencana Aksi yang Belum Selesai	*Timeline*	
1	2	3	4	5	6	7	8
Januari	-	-	-	-	-	-	-
Februari	-	-	-	-	-	-	-
Maret	Pada komponen nilai capaian kinerja lebih baik dari pada capaian kinerja sebelumnya mengalami penurunan nilai. dari tahun 2024 sebesar 3,75 menjadi 1,25 sehingga diperlukan peningkatan nilai di bagian lain agar indeks RB dapat tercapai sesuai target	Melakukan perhitungan ulang target per POKJA untuk pencapaian target nilai	Maret 2025	Melakukan perhitungan ulang target per POKJA untuk pencapaian nilai indeks RB sesuai target.	-	-	Telah melakukan perhitungan ulang target per POKJA sehingga diharapkan nilai indeks RB sesuai target.

2. Nilai AKIP

a. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Triwulan I Tahun 2025

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri PAN&RB No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasiikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat evaluasi AKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis pemberian nilai, atribut,

apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan akuntabilitas dan kinerja Satuan Kerja dan/atau Unit Kerja.

Nilai AKIP adalah nilai hasil evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama atas implementasi SAKIP Satuan Kerja Eselon I dan Eselon II Mandiri Pusat, Balai Besar POM, Balai POM dan Loka POM di lingkungan\ BPOM.

Bobot 5 (lima) komponen penilaian AKIP, sebagai berikut:

No	Komponen	Bobot
1	Perencanaan Kinerja	24
2	Pengukuran Kinerja	24
3	Pelaporan Kinerja	12
4	Evaluasi Kinerja Internal	20
5	Capaian Kinerja	20
	Nilai Evaluasi	**100**

Predikat nilai AKIP terdiri dari:

No	Predikat	Nilai	Interpretasi
1	AA	>90-100	Sangat Memuaskan. Telah terwujud *good governance*. Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh level. Telah terbentuk pemerintahan yang dinamis, adaptif dan efisiensi (*Reform*).
2	A	>80-90	Memuaskan. Terdapat gambaran bahwa Satuan Kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil.
3	BB	>70-80	Sangat Baik. Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan

No	Predikat	Nilai	Interpretasi
			berbasis teknologi informasi.
4	B	>60-70	Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada Satuan Kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja.
5	CC	>50-60	Cukup (memadai). Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada Satuan Kerja.
6	C	>30-50	Kurang. Sistem dan tatatan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar.
7	D	0-30	Sangat Kurang. Sistem dan tatatan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar khususnya dalam implementasi SAKIP.

Berikut nilai AKIP Balai POM di Pangkal Pinang pada Triwulan I Tahun 2025.

Tabel 3.86 Nilai AKIP

Indikator	Kinerja			Kategori & Notifikasi Warna
	Target	Realisasi	%Capaian	
Nilai AKIP UPT BPOM	-	-		

Penilaian indikator nilai AKIP Balai POM di Pangkal Pinang dilakukan oleh Inspektorat Utama pada Triwulan IV Tahun 2025, sehingga tidak ada capaian pada triwulan I.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Tahun 2025

Tabel 3.87 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Tahun 2025 Nilai AKIP

Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Target Tahun 2025	Realisasi Triwulan I	% Capaian Terhadap Target Tahunan	Kategori
Nilai AKIP UPT	81,70	-	-	

Target Nilai AKIP BPOM di Pangkal Pinang Tahun 2025 sebesar 81,70. Nilai AKIP Balai POM di Pangkal Pinang pada Triwulan I belum ada karena penilaian AKIP dilakukan pada Triwulan IV.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja

Target Nilai AKIP Balai POM di Pangkal Pinang Tahun 2025 sebesar 81,70. Untuk memenuhi target tersebut, upaya yang telah dilakukan sampai dengan Triwulan I Tahun 2024 antara lain:

1. Melakukan evaluasi pelaksanaan pengelolaan AKIP tahun 2024
2. Menyusun Rencana Aksi Tindak Lanjut hasil evaluasi AKIP tahun 2024
3. Menyusun dan menyampaikan laporan evaluasi internal Triwulan IV tahun 2024 secara tepat waktu
4. Menyusun PK dan RAPK tahun 2025 dengan dilengkapi kertas kerja penetapan target
5. Penetapan tim SAKIP tahun 2025 (penunjukan ketua tim kerja, tim monitoring dan evaluasi, tim laporan kinerja)
6. Melakukan penyusunan lapkin tahun 2024 dengan memperhatikan rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun 2024 dan berpedoman pada Keputusan Kepala Bagan POM tentang Pedoman Penyelenggaraan SAKIP
7. Membuat Renja/program peningkatan kompetensi/pemahaman pengelola AKIP dalam penyelenggaran SAKIP
8. Melakukan revisi anggaran sehubungan dengan instruksi presiden terkait efisiensi belanja tahun 2025
9. Dua orang pengelola SAKIP mengikuti Bimtek SAKIP dan Penyusunan Laporan Kinerja tahun 2024
10. Melaksanakan pengembangan kompetensi pengelola AKIP sesuai rencana pokja Akuntabilitas

11. Melakukan sosialisasi PK/RAPK Tahun 2025
12. Memberikan reward punishment kinerja sampai dengan Triwulan 4 tahun 2024
13. Melaksanakan rapat evaluasi Desember 2024 yang dilaksanakan di Bulan Januari 2025, rapat evaluasi Januari 2025 yang dilaksanakan di Bulan Februari 2025 dan rapat evaluasi Februari 2025 yang dilaksanakan di Bulan Maret 2025.

d. Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Pelaksanaan penyelengaraan SAKIP perlu terus dilakukan secara berkesinambungan sesuai pedoman penyelenggaraan SAKIP di lingkungan Badan POM. Beberapa upaya yang akan terus dilakukan untuk mencapai target nilai AKIP di akhir tahun 2025:

1. Melaksanakan tindak lanjut atas hasil evaluasi SAKIP Tahun 2024
2. Melakukan pengumpulan data kinerja setiap bulannya dan melaporkan pada website dan link yang tersedia secara tepat waktu
3. Melaksanakan rapat evaluasi bulanan untuk mengevaluasi capaian kinerja dan anggaran setiap bulannya
4. Menyusun Laporan evaluasi internal, laporan kinerja interim dan tahunan sesuai dengan pedoman SAKIP, serta melaporkan pada link yang tersedia secara tepat waktu

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program/kegiatan yang dapat menunjang keberhasilan pencapaian target tahun 2025 diantaranya :

1. Pemanfaatan website madu pelawan untuk pengumpulan data kinerja BPOM di Pangkal Pinang (madupelawan.bpompp.info)
2. Melaksanakan pengumpulan data kinerja menggunakan teknologi informasi melalui monev online (aplikasi simetris, e-monev bappenas dan sakti kemenkeu) baik untuk internal maupun eksternal
3. Program peningkatan pemahaman personil SAKIP dalam pengelolaan SAKIP di lingkungan BPOM di Pangkal Pinang.

f. Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

Tabel 3.88 Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Indikator Nilai AKIP

Indikator	Output			Input (Anggaran)			IE	TE	Capaian
	T	R	%	Target (RPD TW I)	Realisasi	%			
Nilai AKIP UPT	-	-	-	0	0	-	-	-	

Berdasarkan tabel di atas, tidak ada realisasi anggaran dan rencana penarikan dana (target anggaran) pada Triwulan I yang dialokasikan untuk mendukung kegiatan pada indikator Nilai AKIP Balai POM di Pangkal Pinang. Maka dari itu, tingkat efisiensi penggunaan sumber daya pada indikator ini belum bisa dihitung.

Anggaran yang dialokasikan untuk menunjang pencapaian nilai AKIP BPOM di Pangkal Pinang selama setahun pada dokumen Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) yaitu sebesar Rp 22.200.000. Anggaran ini akan digunakan untuk kegiatan Bimtek SAKIP dan Penyusunan Laporan Kinerja, Bimbingan Teknis Penyusunan Renstra, Rapat Evaluasi Nasional, dan Rapat Kerja Nasional.

Pada triwulan I telah dilakukan revisi anggaran sehingga anggaran yang dialokasikan untuk indikator ini menjadi Rp 24.215.000. Namun, semua anggaran tersebut diblokir karena adanya efisiensi anggaran.

Untuk mencapai efisiensi penggunaan anggaran pada indikator Nilai AKIP BPOM di Pangkal Pinang akan melakukan upaya sebagai berikut:

- Melakukan revisi anggaran dan mereviu kembali mapping anggaran yang mendukung indikator Nilai AKIP BPOM di Pangkal Pinang.
- Melaksanakan perbaikan dan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun 2024.
- Melakukan pengawalan dalam implementasi AKIP Balai POM di Pangkal Pinang untuk mencapai target nilai AKIP tahun 2025.

g. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Berdasarkan informasi kinerja yang tertuang dalam laporan kinerja tahun 2024, terdapat hal-hal yang perlu dilakukan pada tahun 2025, sehingga target kinerja dapat tercapai. Adapun pemanfaatan informasi yang telah dilakukan pada tahun triwulan I adalah :

1) Penyesuaian aktivitas/kegiatan untuk mencapai target kinerja

Dari rekomendasi evaluasi SAKIP tahun 2024 yang tertuang dalam lapkin tahun 2024, dilakukan penyesuaian kegiatan sebagai berikut :

- Melakukan penyesuaian format laporan evaluasi internal dan monitoring evaluasi bulanan dengan melakukan identifikasi poin-poin yang ada pada pedoman SAKIP 2025 dan menyesuaikan dengan hasil evaluasi SAKIP tahun 2024
- Melakukan penyesuaian dan penyempurnaan kertas kerja penetapan target kinerja sesuai dengan rekomendasi tindak lanjut hasil evaluasi SAKIP tahun 2024
- Melakukan penyesuaian pada laporan kinerja sesuai hasil evaluasi SAKIP tahun 2024

2) Penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai target kinerja
   - Melakukan mapping anggaran yang menunjang pencapaian target indikator kinerja nilai AKIP
   - Penyesuaian anggaran dalam mengikuti kegiatan bimtek SAKIP dan Penyusunan Laporan Kinerja. Namun pada triwulan berjalan, dilakukan blokir dalam rangka efisiensi anggaran sehingga kegiatan dilakukan secara daring.

3) Evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja yang mencakup tindak lanjut atas rekomendasi/rencana aksi kinerja

   Dari laporan kinerja Tahun 2024, diperoleh informasi bahwa target indikator Nilai SAKIP BPOM di Pangkal Pinang tahun 2024 belum tercapai, hal ini disebabkan karena penetapan target yang terlalu tinggi pada tahun 2024 serta pelaksanaan pengelolaan AKIP yang belum optimal. Berdasarkan hal tersebut pada triwulan I telah dilakukan :
   - Pengusulan target AKIP periode renstra 2025-2029 yang dilengkapi dengan kertas kerja penetapan target.
   - BPOM di Pangkal Pinang telah menyusun rencana tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun 2024 dan melakukan tindak lanjut atas rekomendasi tersebut khususnya TL pada triwulan I dalam rangka perbaikan implementasi AKIP di tahun 2025.

4) Penyesuaian perencanaan kinerja untuk periode berikutnya

   Penyesuaian yang dapat dilakukan untuk triwulan berikutnya antara lain :

- Merencanakan Kegiatan Pendampingan Pelaksanaan AKIP oleh Inspektorat Utama Badan POM secara daring untuk menyamakan persepsi dalam rangka tindak lanjut hasil evaluasi AKIP.

h. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya (Internal maupun Eksternal)

Tabel 3.89 Tindak Lanjut Rekomendasi Nilai AKIP

Bulan	Kondisi Awal	Rekomendasi	*Timeline*	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
				Rencana Aksi yang Sudah Selesai	Belum		
					Rencana Aksi yang Belum Selesai	*Timeline*	
1	2	3	4	5	6	7	8
Januari	Capaian indikator nilai AKIP tahun 2024 sebesar 98,09%, tidak mencapai target yang ditetapkan. Terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki berdasarkan hasil evaluasi AKIP oleh Inspektorat.	Menyusun rencana aksi tindak lanjut hasil rekomendasi AKIP tahun 2024	Januari 2025	Menyusun rencana aksi tindak lanjut hasil rekomendasi AKIP tahun 2024	-	-	Telah disusun Rencana Aksi Tindak lanjut hasil evaluasi AKIP oleh inspektorat untuk dilaksanakan selama tahun 2025, dalam rangka pencapaian target tahun 2025
Februari	Terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki pada tahun 2025 berdasarkan hasil evaluasi AKIP tahun 2024 oleh Inspektorat, sehingga disusunlah rencana aksi tindak lanjut (RATL) dan langkah-langkah dalam upaya pencapaian target tahun 2025 yang perlu dilaksanakan	1. Melaksanakan RATL hasil evaluasi AKIP khususnya terkait penyusunan Lapkin tahun 2024 2. Menyusun rencana peningkatan kompetensi/ pemahaman terkait pengelolaan AKIP melalui program pada pokja area perubahan Akuntabilitas	Februari 2025	1. Melakukan TL dari RATL hasil evaluasi AKIP pada Lapkin tahun 2024 2. Menyusun Renja terkait peningkatan kompetensi pengelolaan AKIP oleh pokja Akuntabilitas	-	-	1. Telah dilakukan TL dari RATL hasil evaluasi AKIP pada Lapkin tahun 2024 2. Telah disusun Renja terkait peningkatan kompetensi pengelolaan AKIP oleh pokja Akuntabilitas
Maret	Terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki pada tahun 2025 berdasarkan hasil evaluasi AKIP tahun 2024 oleh Inspektorat, sehingga disusunlah rencana aksi tindak lanjut (RATL) dan langkah-langkah dalam upaya pencapaian target tahun 2025 yang perlu dilaksanakan	1. Melaksanakan rencana kerja pokja Akuntabilitas terkait peningkatan kompetensi pengelola AKIP 2. Melakukan Sosialisasi Perjanjian Kinerja dan RAPK tahun 2025 3. Memberikan reward dan punishment terkait capaian kinerja tahun 2024	Maret 2025	1. Melaksanakan peningkatan kompetensi pengelola AKIP sesuai rencana bulan Maret 2. Melakukan Sosialisasi Perjanjian Kinerja dan RAPK tahun 2025 3. Memberikan reward dan punishment terkait capaian kinerja tahun 2024	-	-	1. Telah melaksanakan peningkatan kompetensi pengelola AKIP sesuai rencana bulan Maret sebanyak 6 orang 2. telah melakukan Sosialisasi Perjanjian Kinerja dan RAPK tahun 2025 3. Telah memberikan reward dan punishment terkait capaian kinerja tahun 2024 berupa sertifikat dan Memo teguran.

3. Nilai Kinerja Anggaran

Nilai Kinerja Anggaran adalah penilaian terhadap kinerja anggaran UPT BPOM yang diperoleh dari Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA).

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 8 indikator dan mencerminkan aspek kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran.

8 (Delapan) indikator pembentuk nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), antara lain:

1. Revisi DIPA (bobot 10%)
2. Deviasi Halaman III DIPA (bobot 15%)
3. Penyerapan Anggaran (bobot 20%)
4. Belanja Kontraktual (bobot 10%)
5. Penyelesaian Tagihan (bobot 10%)
6. Pengelolaan UP dan TUP (bobot 10%)
7. Capaian Output (bobot 25%)
8. Dispensasi SPM (Pengurang nilai IKPA)

Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) merupakan penilaian kinerja perencanaan anggaran yang dilakukan dengan mengukur efektifitas penggunaan anggaran dan efisiensi penggunaan anggaran. Indikator pembentuk Nilai EKA adalah:

1. Variabel efektivitas: Capaian RO (bobot 75%)
2. Variabel efisiensi: Penggunaan SBK (bobot 10%) dan Efisiensi SBK (bobot 15%)

Cara Perhitungan dan Formula:

Nilai Kinerja Anggaran = (Nilai EKA x 50%) + (Nilai IKPA x 50%)

a. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Triwulan I Tahun 2025

Tabel 3.90 Nilai Kinerja Anggaran

Indikator	Kinerja			Kategori & Notifikasi Warna
	Target	Realisasi	%Capaian	
Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	-	-		

Pengukuran Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Balai POM di Pangkal Pinang berdasarkan nilai EKA dan nilai IKPA yang didapatkan pada Triwulan IV Tahun 2025, sehingga tidak ada target dan realisasi yang dapat dibandingkan pada triwulan I tahun 2025.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Tahun 2025

Tabel 3.91 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Tahun 2025 Nilai Kinerja Anggaran

Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Target Tahun 2025	Realisasi Triwulan I	% Capaian Terhadap Target Tahunan	Kategori
Nilai Kinerja Anggaran UPT	5,00	-	-	

Target Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Pangkal Pinang Tahun 2025 sebesar 5,00. Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Pangkal Pinang pada Triwulan I belum ada karena penilaian Kinerja Anggaran didapat pada triwulan 4 tahun 2025.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja

Nilai kinerja anggaran baru akan didapat pada akhir tahun, sehingga belum dapat dilakukan analisis penyebab keberhasilan ataupun kegagalan kinerja, namun pada triwulan I terdapat beberapa hal yang dilakukan dalam upaya pencapaian Nilai Kinerja Anggaran tahun 2025 yaitu :

a. Melakukan desk dengan Biro Perencanaan dan Keuangan Badan POM terkait penetapan target NKA tahun 2025
b. Penetapan Tim Pengelola Keuangan tahun 2025
c. Pengajuan Permohonan UP tahun 2025
d. Pelaksanaan kontrak PraDIPA
e. Menyusun kerta kerja monitoring anggaran dan RPD
f. Melakukan revisi DJA Relaksasi Anggaran
g. Mengajukan penurunan besaran UP ke KPPN

d. Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Adapun upaya untuk pencapaian target kinerja kedepannya :

1. Melakukan revisi DIPA hanya satu kali dalam satu triwulan, sesuai ketentuan penilaian IKPA untuk bisa mendapatkan nilai komponen revisi anggaran pada IKPA secara optimal.
2. Penyelesaian tagihan belanja tepat waktu
3. Pertanggungjawaban uang persedian (UP) secara tepat waktu dan optimalisasi penggunaannya sesuai target minimal *revolving*.
4. Pencapaian target RPD (rencana penarikan dana) per jenis belanja dengan deviasi tidak lebih dari 5%.
5. Optimalisasi penggunaan Kartu Kredit Pemerintah
6. Pencapaian target output sesuai dengan target yang telah diinput pada aplikasi sakti.
7. Efisiensi anggaran melalui pemblokiran anggaran.

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program/kegiatan yang dapat menunjang keberhasilan pencapaian kinerja yaitu :

1. Menyusun POA Fisik dan POA Anggaran.
2. Menyusun kertas kerja untuk monitoring dan evaluasi terhadap komponen-komponen yang menjadi penilaian kinerja anggaran pada nilai IKPA Balai secara rutin.
3. Melakukan rapat evaluasi secara rutin untuk membahas pelaksanaan kinerja anggaran.
4. Reminder berkala setiap minggunya untuk mengingatkan masing-masing ketua tim kerja agar melakukan pelaksanaan kegiatan dan pencairan anggaran sesuai dengan ketentuan IKPA.
5. Penggunaan aplikasi ASIKKEKKU versi 2 dalam proses pencairan tagihan.

f. Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

Tabel 3.92 Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Indikator Nilai Kinerja Anggaran

Indikator	Output			Input (Anggaran)			IE	TE	Capaian
	T	R	%	Target (RPD TW I)	Realisasi	%			
Nilai Kinerja Anggaran UPT	-	-	-	9.714.400	9.714.400	100,00	-	-	

1) Efisiensi penggunaan anggaran

Nilai Kinerja Anggaran belum dapat diukur tingkat efisiensinya karena indikator ini memiliki target 0 di Triwulan I Tahun 2025.

2) Upaya mencapai efisiensi penggunaan anggaran

Indikator Nilai Kinerja Anggaran sudah memiliki realisasi anggaran yang berasal dari honorarium Pengelola Sistem Pengelola Akuntansi dan Jasa Perencanaan Renovasi Gedung. Sebagian besar kegiatan pada indikator Nilai Kinerja Anggaran pagu anggarannya diblokir pada revisi efisiensi anggaran bulan Februari 2025. Upaya yang bisa dilakukan adalah melakukan pencairan anggaran yang tepat sesuai dengan rencana penarikan dana yang sudah di susun disetiap awal triwulan dan selalu menjaga nilai indikator-indikator nilai yan mempengaruhi nilai IKPA dan EKA agar tercapainya target Output Nilai Kinerja Anggaran.

Adapun upaya untuk peningkatan kinerja kedepannya :

1. Mengupayakan pelaksanaan belanja kontraktual pada awal tahun berjalan
2. Melakukan pengawalan pelaksanaan evaluasi kinerja anggaran sesuai dengan ketentuan penilaian EKA terbaru, khususnya pada komponen efisiensi SBKK dan SBKU.
3. Memastikan pelaksanaan kinerja anggaran sesuai dengan ketentuan Reformulasi IKPA, melalui monitoring dan evaluasi secara berkala dan berkesimbungan.
4. Peningkatan kompetensi SDM Pengelola Akuntabilitas Kinerja.
5. Mempertahankan nilai komponen IKPA yang telah optimal pada tahun berikutnya.

g. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Berdasarkan informasi laporan kinerja tahun 2024, Nilai kinerja anggaran Balai POM di Pangkal Pinang sudah mencapai target dengan capaian 104,07%, dalam pencapaian target tersebut terdapat beberapa upaya dan rekomendasi dalam pencapaian target. Oleh karena itu, informasi ini dimanfaatkan untuk penentuan strategi dalam mengambil langkah-langkah upaya yang dilakukan untuk mencapai target kinerja pada tahun 2025 diantaranya :

a) Penyesuaian aktivitas/kegiatan untuk mencapai target kinerja

- Menyesuaikan nominal pengajuan Uang Persediaan (UP) tahun 2025 dengan kemampuan revolving setiap bulannya. Hal ini dengan mempertimbangkan kegiatan-kegiatan yang membutuhkan UP dan riwayat penggunaan tahun 2025 yang di tahun ini telah dilakukan efisiensi anggaran sehingga kegiatan yang dilaksanakan tidak sebanyak tahun sebelumnya.
- Melakukan revolving UP setiap 2 minggu, untuk menunjang pencapaian RPD yang telah ditetapkan, sehingga deviasi maksimal 5% masih dapat terpenuhi.
- Mempertahankan penggunaan inovasi ASIKKEKKU V.2 untuk menunjang percepatan pencairan tagihan sehingga menunjang pencapaian RPD dan serapan anggaran.

b) Penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai target kinerja

Dalam upaya pencapaian target kinerja indikator NKA, pada triwulan I tahun 2025 telah dilakukan beberapa penyesuaian penggunaan anggaran melalui revisi anggaran sebanyak 3 kali revisi DJA dan 3 kali revisi POK yang bertujuan untuk :

- Penyesuaian kegiatan yang tidak dapat terlaksana sehingga RPD masih dapat terpenuhi.
- Penambahan kegiatan yang dapat mendukung pencapaian target output dan RPD.
- Penyesuaian anggaran kegiatan terpadu yang tidak jadi dilaksanakan dan dialihkan ke kegiatan lain yang berkontribusi dalam pencapaian output dan serapan anggaran.
- Optimalisasi anggaran untuk pengadaan barang/peralatan yang dibutuhkan dalam pencapaian output.

c) Evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja yang mencakup tindak lanjut atas rekomendasi/rencana aksi kinerja

Dari informasi kinerja tahun 2024, terdapat beberapa program/kegiatan yang berhasil menunjang pencapaian target tahun 2024 dan akan terus dilakukan pada tahun 2025 yaitu :

- Melakukan penyusunan perencanaan (PoA fisik dan Anggaran)
- Menyusun kertas kerja untuk monitoring dan evaluasi terhadap komponen-komponen yang menjadi penilaian kinerja anggaran pada nilai IKPA Balai secara rutin.
- Melakukan rapat evaluasi secara rutin untuk membahas pelaksanaan kinerja dan anggaran, mengidentifikasi masalah dan mengambil tindak lanjut perbaikan.
- *Reminder* berkala setiap minggunya untuk mengingatkan masing-masing ketua tim kerja agar melakukan pelaksanaan kegiatan dan pencairan anggaran sesuai dengan ketentuan IKPA.
- Penggunaan aplikasi ASIKKEKKU versi2 dalam proses pencairan tagihan.

Pada tahun 2025 telah dilakukan tindak lanjut atas rekomendasi tahun 2024 berupa :

-Penyusunan rencana/strategi pencapaian NKA sesuai dengan peraturan/ketentuan terupdate pada tahun 2025.

-Melakukan kontrak di awal tahun untuk pengadaan alat laboratorium dengan pagu besar agar nilai belanja kontraktual tetap terjaga.

-Serta telah dilakukan pula tindaklanjut atas rekomendasi yang ada setiap bulannya.

d) Penyesuaian perencanaan kinerja untuk periode berikutnya

Dengan adanya Instruksi Presiden No 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 perlu dilakukan penyesuaian perencanaan kinerja untuk periode berikutnya baik dari segi target Output maupun Anggaran yang tersedia dikarenakan adanya pagu yang di blokir sehingga harus memprrioritaskan kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan timelinenya dan Rencana Penarikan Dana yang sudah disusun

dengan melakukan exercise penetapan target berdasarkan kondisi terupdate dan mempertimbangkan baseline tahun 2025.

h. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya (Internal maupun Eksternal)

Tabel 3.93 Tindak Lanjut Rekomendasi Nilai Kinerja Anggaran

Bulan	Kondisi Awal	Rekomendasi	*Timeline*	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
				Rencana Aksi yang Sudah Selesai	Belum		
					Rencana Aksi yang Belum Selesai	*Timeline*	
1	2	3	4	5	6	7	8
Januari	Capaian indikator NKA tahun 2024 sebesar 104,07%, telah mencapai target namun masih terdapat beberapa hal yang dapat diperbaiki/ditingkatkan dalam pencapaian NKA tahun 2025 yaitu : 1. Belanja Kontraktual 2. Penyerapan Anggaran 3. Efisiensi	Pengawalan pelaksanaan anggaran sesuai ketentuan IKPA dan EKA dengan optimalisasi pada nilai belanja kontraktual, penyerapan anggaran dan efisiensi.	Tahun 2025	1. Pelaksanaan kontrak praDIPA 2. Pelaksanaan efisiensi anggaran melalui pemblokiran kegiatan perjalanan dinas sebesar 50%	Menyusun kertas kerja monitoring anggaran dan RPD tahun 2025 dalam rangka pengawalan IKPA dan EKA	Februari 2025	telah dilaksanakan : 1. kontrak pra dipa 2. efisiensi anggaran melalui pembatasan kegiatan perjadin
Februari	dalam upaya pencapaian target tahun 2025, pada bulan februari perlu dilakukan : 1. revisi hal 3 DIPA triwulan 1 tahun 2025 2. Menyusun kertas kerja monitoring anggaran dan RPD tahun 2025	1. Melakukan revisi hal 3 DIPA triwulan 1 tahun 2025 2. Menyusun kertas kerja monitoring anggaran dan RPD tahun 2025	Februari 2025	1. Melakukan revisi hal 3 DIPA triwulan 1 tahun 2025 2. Menyusun kertas kerja monitoring anggaran dan RPD tahun 2025	-	-	1. Telah dilakukan revisi hal 3 DIPA triwulan 1 tahun 2025 2. telah disusun kertas kerja monitoring anggaran dan RPD tahun 2025
Maret	UP tunai tahun 2025 senilai Rp.120.000.000 tidak dapat mencapai nominal revolving sesuai ketentuan IKPA, disebabkan adanya kebijakan efisiensi anggaran yang berpengaruh pada pelaksanaan kegiatan setiap bulannya.	Mengajukan penurunan besaran nilai UP tunai Balai POM di Pangkal Pinang ke KPPN dari semula Rp. 120.000.000 menjadi Rp.70.000.000	Maret 2025	Mengajukan penurunan besaran nilai UP tunai Balai POM di Pangkal Pinang ke KPPN dari semula Rp. 120.000.000 menjadi Rp.70.000.000	-	-	Telah diajukan penurunan besaran nilai UP tunai Balai POM di Pangkal Pinang ke KPPN dari semula Rp. 120.000.000 menjadi Rp.70.000.000 dan telah disetujui KPPN

4. Indeks Manajemen Risiko

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP, bahwa pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan penilaian risiko. Manajemen Risiko merupakan pendekatan sistematis yang meliputi budaya, proses, dan struktur untuk menentukan tindakan terbaik terkait risiko yang dihadapi dalam pencapaian tujuan /sasaran organisasi.

Tingkat Maturitas adalah suatu kondisi penerapan manajemen risiko yang terbagi dalam 5 (lima) kategori. tingkat maturitas penerapan manajemen risiko menunjukkan tingkat kematangan implementasi manajemen risiko dalam suatu organisasi.

Kategori Tingkat Maturitas	Karakteristik
Risk Naive	Manajemen risiko tergantung pada individu perorangan
Risk Aware	Risiko didefinisikan dengan cara yang berbeda dan kedisiplinan dalam proses tidak ketat
Risk Defined	Kerangka penilaian/tanggapan umum terhadap risiko mulai teratur. Pemimpin eksekutif memberi pandangan terhadap risiko yang dihadapi organisasi secara keseluruhan. Pelaksanaan rencana diimplementasikan dengan memprioritaskan risiko yang tinggi.
Risk Managed	Aktivitas manajemen risiko organisasi terkoordinasi di sluruh area bisnis. Mengunakan perangkat manajemen risiko dan proses yang umum apabila diperlukan, dengan pemantauan risiko keseluruhan organisasi, pengukuran dan pelaporan
Risk Enabled	Mendiskusikan risiko bersama dengan perencaan strategis, alokasi modal, dan dalam pengambilan keputusan sehari hari. Sistem peringatan dini untuk memberitahukan dewan dan manejemen apabila risiko berada diatas batas yang ditetapkan

Penilaian tingkat maturitas manajemen risiko bertujuan untuk:

- Mengetahui kecukupan rancangan dan efektivitas pelaksanaan proses manajemen risiko sebagai salah satu alat manajemen dalam memberikan

keyakinan kepada stakeholder bahwa tujuan dan sasaran tercapai sebagaimana diharapkan
- Memberikan umpan balik untuk peningkatan pencapaian tujuan dan manfaat penerapan manajemen risiko
- Menjaga pemenuhan prinsip penerapan manajemen risiko

Nilai maturitas manajemen risiko diperoleh dari hasil penilaian yang dilakukan oleh Inspektorat Utama yang menggunakan kertas kerja evaluasi maturitas manejemen risiko yang nilainya terbagi dalam kategori sebagai berikut:

Menuju Tingkat Maturitas	Skor Total	Nilai Maturitas	Tingkat Maturitas
Risk Naive	0-16	1	-
Risk Aware	17-32	2	Peningkatan *Risk Naive* menuju *Risk Aware*
Risk Defined	33-48	3	Peningkatan *Risk Aware* menuju *Risk Defined*
Risk Managed	49-64	4	Peningkatan *Risk Defined* menuju *Risk Managed*
Risk Enabled	65-80	5	Peningkatan *Risk Managed* menuju *Risk Enabled*

Cara perhitungan level maturitas

Skor Maturitas = Skor Total16

Keterangan:
- Skor maturitas merupakan nilai yang menjadi indeks maturitas manajemen risiko
- Skor Total merupakan nilai akhir dari pengisian kertas kerja evaluasi berdasarkan penilaian oleh Inspektorat Utama

a. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Triwulan I Tahun 2025

Tabel 3.94 Indeks Manajemen Risiko

Indikator	Kinerja			Kategori & Notifikasi Warna
	Target	Realisasi	%Capaian	
Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	-	-		

Penilaian indikator Indeks Manajemen Risiko dilakukan oleh Inspektorat Utama dan nilai indeks akan diperoleh pada Triwulan IV Tahun 2025, sehingga pada Triwulan I tahun 2025 belum terdapat target dan realisasi yang dapat dilakukan.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Tahun 2025

Tabel 3.95 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Tahun 2025 Indeks Manajemen Risiko

Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Target Tahun 2025	Realisasi Triwulan I	% Capaian Terhadap Target Tahunan	Kategori
Indeks Manajemen Risiko UPT	2,91	-	-	

Target Indeks Manajemen Risiko Tahun 2025 sebesar 2,91. Nilai Indeks Manajemen Risiko Tahun diukur pada akhir tahun sehingga tidak bisa dilakukan perbandingan realisasi Triwulan I dengan target tahunan.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja

Indeks Manajemen Risiko baru akan didapat pada akhir tahun, sehingga belum dapat dilakukan analisis penyebab keberhasilan ataupun kegagalan kinerja, namun pada triwulan I terdapat beberapa hal yang dilakukan dalam upaya pencapaian indeks manajemen risiko tahun 2025 yaitu :

1. Melakukan desk penetapan target indeks manajemen risiko tahun 2025 dengan Inspektorat
2. Menerbitkan SK Kepala Balai POM di Pangkal Pinang tentang kriteria level kemungkinan dan dampak risiko.
2. Mengusulkan tim SPI BPOM di Pangkal Pinang ke Badan POM untuk diterbitkan Surat Keputusan terpusat.
3. Menyusun Rencana Aksi Penyelenggaran Manajemen Risiko Tahun 2025
4. Melakukan reviu atas daftar risiko Semester 2 tahun 2024

5. Melakukan dan melaporkan identifikasi risiko dan rencana tindak pengendalian Semester 1 tahun 2025
6. Melakukan sosialisasi tujuan (PK/RAPK) tahun 2025
7. Melakukan sosialisasi daftar risiko tahun 2025 kepada seluruh pegawai
8. Peningkatan kompetensi pegawai terkait Manajemen risiko melalui IDEAS, dimana telah diiikuti oleh seluruh pegawai.

d. Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Adapun upaya untuk pencapaian target kinerja kedepannya :

1. Peningkatan pemahaman pengelolaan manajemen risiko melalui sharing dengan UPT Badan POM lainnya
2. Pengawalan pelaksanaan rencana aksi manajemen risiko tahun 2025
3. Penyusunan penilaian mandiri maturitas risiko Balai POM di Pangkal Pinang

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program/kegiatan yang dapat menunjang keberhasilan pencapaian kinerja yaitu :

1. Peningkatan kompetensi pegawai terkait Manajemen risiko melalui IDEAS, dimana telah diiikuti oleh seluruh pegawai.
2. Peningkatan pemahaman dan awareness pegawai terkait manajemen risiko dengan sosialisasi berkala melalui infografis dan informasi lainnya di media sosial dan wag Balai yang dilaksanakan oleh Pokja Akuntabilitas Pembangunan ZI.
3. Monitoring dan evaluasi berkala pelaksanaan manajemen risiko

f. Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

Tabel 3.96 Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Indikator Indeks Manajemen Risiko

Indikator	Output			Input (Anggaran)			IE	TE	Capaian
	T	R	%	Target (RPD TW I)	Realisasi	%			
Indeks Manajemen Risiko UPT	-	-	-	17.088.056	17.088.056	100,00	-	-	

Berdasarkan tabel di atas, anggaran yang dialokasikan pada Triwulan I untuk indikator Indeks Manajemen Risiko sebesar Rp 17.088.056 dan realisasi anggarannya sebesar Rp 17.088.056 sehingga persentase capaian realisasi anggaran untuk

indikator ini sebesar 100%. Namun pada Triwulan I ini belum ada target dan realisasi output karena indikator ini merupakan indikator yang nilainya diperoleh pada akhir tahun. Maka dari itu, tingkat efisiensi penggunaan sumber daya pada indikator ini belum bisa dihitung.

g. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Indikator indeks manajemen risiko merupakan indikator yang baru ada di tahun 2025 sehingga tidak ada informasi kinerja periode sebelumnya yang tertuang dalam laporan kinerja tahunan tahun 2024. Namun pelaksanaan manajemen risiko telah dilaksanakan sejak beberpa tahun yang lalu dan telah dilakukan penilaian maturitas risiko pada Balai POM di Pangkal Pinang oleh Inspektorat Badan POM. Pada tahun 2024, dari hasil penilaian oleh Inspektorat, Balai POM di Pangkal Pinang mendapatkan nilai maturitas risiko sebesar **2,844** dengan tingkat maturitas **Risk Aware,** dimana terdapat beberapa rekomendasi terhadap kelemahan penyelenggaraaan manajemen risiko tahun 2024.

Hasil penilaian tingkat maturtas risiko tahun 2024 tersebut dapat dimanfaatkan dalam upatya pencapaian target indeks manajemen risiko tahun 2025 diantaranya:

1) Penyesuaian aktivitas/kegiatan untuk mencapai target kinerja
   - Melakukan reviu risiko tahun 2024 dan identifikasi risiko tahun 2025 dengan memperhatikan catatan kelemahan hasil evaluasi penilaian tingkat maturitas risiko
   - Menyusun perencanaan peningkatan kompetensi seluruh pegawai Balai POM di Pangkal Pinang
   - Melaksanakan sosialisasi Tujuan Organisasi (PK/RAPK) dan sosialisasi daftar risiko kepada seluruh pegawai

2) Penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai target kinerja

   Pada triwulan I telah dilakukan penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai target kinerja indeks manajemen risiko diantaranya penyediakan anggaran untuk pelaksanaan pelatihan dan sertifikasi QRMA/QRMO. Namun terdapat efisiensi anggaran sesuai instruksi presiden, sehingga anggaran tersebut diblokir dan belum dapat digunakan.

3) Evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja yang mencakup tindak lanjut atas rekomendasi/rencana aksi kinerja

Dari hasil evaluasi penilaian maturitas risiko tahun 2024 yang dilakukan inspektorat terdapat beberapa hal yang telah ditindaklanjuti pada triwulan I tahun 2025 diantaranya :

- Menyusun perencanaan pelatihan terkait manajemen risiko
- Menetapkan SK sebagai panduan dalam penentuan penilaian risiko pada Balai POM di Pangkal Pinang
- Melakukan identifikasi risiko dengan kodefikasi yang berbeda, memastikan ketepatan unit terkait untuk risiko eksternal serta mencantumkan akar masalah untuk penyebab risiko.

4) Penyesuaian perencanaan kinerja untuk periode berikutnya.

Kedepannya hal-hal yang dapat dilakukan penyesuaian diantaranya :

- Melakukan penyampaian kertas kerja self assessment penilaian maturitas risko secara tepat waktu
- Melakukan tindak lanjut hasil reviu auditor internal (jika ada)

h. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya (Internal maupun Eksternal)

Tabel 3.97 Tindak Lanjut Rekomendasi Indeks Manajemen Risiko

Bulan	Kondisi Awal	Rekomendasi	*Timeline*	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
				Rencana Aksi yang Sudah Selesai	Belum		
					Rencana Aksi yang Belum Selesai	*Timeline*	
1	2	3	4	5	6	7	8
Januari	-	-	-	-	-	-	
Februari	Merupakan indikator kinerja baru pada tahun 2025, sehingga diperlukan penyusunan rencana aksi dalam upaya pencapaian target tahun 2025.	menyusun rencana aksi penyelenggaran manajemen risiko tahun 2025	Februari 2025	menyusun rencana aksi penyelenggaran manajemen risiko tahun 2025	-	-	Telah disusun rencana aksi penyelenggaran Manajemen Risiko Tahun 2025
Maret	Dengan telah disusunnya rencana aksi penyelenggaraan manajemen risiko tahun 2025, maka perlu untuk dilakukan pelaksanaan rencana aksi	Melaksanakan Rencana Aksi berupa : 1. Melakukan sosialisasi tujuan (PK/RAPK) kepada pegawai 2. Peningkatan kompetensi pegawai terkait Manrisk	Maret 2025	1. Melakukan sosialisasi tujuan (PK/RAPK) kepada pegawai 2. Peningkatan kompetensi pegawai terkait Manrisk dengan mengikuti pelatihan pada IDEAS	-	-	1. Telah melakukan sosialisasi tujuan (PK/RAPK) kepada pegawai 2. Telah dilaksanakan peningkatan kompetensi pegawai terkait Manrisk dengan mengikuti pelatihan pada IDEAS, dimana seluruh pegawai

Bulan	Kondisi Awal	Rekomendasi	*Timeline*	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
				Rencana Aksi yang Sudah Selesai	Belum		
					Rencana Aksi yang Belum Selesai	*Timeline*	
	tersebut sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.	dengan mengikuti pelatihan pada IDEAS					telah mengikuti 100%

3.2 TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI SAKIP TAHUN 2024

Inspektorat Utama telah melakukan Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Balai POM di Pangkal Pinang Tahun 2024. Dari hasil evaluasi tersebut, Inspektorat Utama memberikan beberapa rekomendasi untuk melakukan perbaikan kedepannya terkait implementasi SAKIP Balai POM di Pangkal Pinang. Berikut tindak lanjut Triwulan I Tahun 2025 atas rekomendasi SAKIP Balai POM di Pangkal Pinang Tahun 2024.

Tabel 3.98 Tindak Lanjut Triwulan I atas Evaluasi SAKIP Tahun 2024

No	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
				Rencana Aksi yang Sudah Selesai	Belum		
					Rencana Aksi yang Belum Selesai	Timeline	
A	PERENCANAAN KINERJA						
1	Belum disusun kertas kerja penetapan target tahun 2025	Menetapkan target kinerja dengan baik dan berdasarkan basis data yang memadai, tidak sebatas mempertimbangkan hasil capaian kinerja tahun-tahun sebelumnya, namun juga memanfaatkan hasil kajian/data lain yang relevan sebagai data dukung penetapan target kinerja;	TW I	Menyusun kertas kerja penetapan target tahun 2025 dengan mempertimbangkan hasil capaian kinerja tahun-tahun sebelumnya dan hasil evaluasi data lain yang relevan	Melakuka revisi kertas kerja penetapan target tahun 2025 dengan menyesuaikan manual IKU yang ter-*update*	TW II	Telah disusun kertas kerja penetapan target tahun 2025
2	Belum disusun kertas kerja penetapan target tahun 2025	Melengkapi kertas kerja penetapan target yang telah disusun dengan argumentasi dan perhitungan yang logis, hasil analisa atas capaian kinerja tahun-tahun sebelumnya sehingga layak dijadikan dasar penetapan target, maupun dokumentasi hasil pembahasan penetapan target dengan pimpinan;	TW I	Menyusun kertas kerja penetapan target tahun 2025 dengan mempertimbangkan hasil capaian kinerja tahun-tahun sebelumnya dan hasil evaluasi data lain yang relevan	Melakuka revisi kertas kerja penetapan target tahun 2025 dengan menyesuaikan manual IKU yang ter-*update*	TW II	Telah disusun kertas kerja penetapan target tahun 2026
	Belum dilakukan pembahasan penetapan target dan POA untuk tahun 2025 dengan pimpinan.			Melakukan pembahasan penetapan target dan POA untuk tahun 2025 dengan pimpinan.			Telah dilakukan pembahasan penetapan target dan POA untuk tahun 2025 dengan pimpinan.

No	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
				Rencana Aksi yang Sudah Selesai	Belum		
					Rencana Aksi yang Belum Selesai	Timeline	
3	Belum dilakukan: 1. Penetapan SK Ketua Tim, Tim Monev, Tim Renstra dan Tim Lapkin 2. Peningkatan kompetensi Tim SAKIP s.d Triwulan I (Pegawai SK Ketua Tim, Tim Monev, Tim Renstra dan Tim Lapkin) 3. Rapat evaluasi bulanan s.d Triwulan I Pimpinan dan Tim Monev Kinerja untuk mengevaluasi progres capaian kinerja dan output 4. Melibatkan ketua tim penanggung jawab IKU dalam penyusunan kertas kerja penetapan target tahun 2025	Mengoptimalkan peran Tim SAKIP untuk mendukung implementasi SAKIP Satker;	TW I-IV	1.Menetapkan SK Ketua Tim, Tim Monev, Tim Renstra dan Tim Lapkin 2. Meningkatkan kompetensi Tim SAKIP s.d Triwulan I (Pegawai SK Ketua Tim, Tim Monev, Tim Renstra dan Tim Lapkin) 3. Melaksanakan rapat evaluasi bulanan s.d Triwulan I Pimpinan dan Tim Monev Kinerja untuk mengevaluasi progres capaian kinerja dan output 4. Melibatkan ketua tim penanggung jawab IKU dalam penyusunan kertas kerja penetapan target tahun 2025	1. Meningkatkan kompetensi Tim SAKIP s.d Triwulan II-IV (Pegawai SK Ketua Tim, Tim Monev, Tim Renstra dan Tim Lapkin) 2. Melaksanakan rapat evaluasi bulanan Triwulan II-IV Pimpinan dan Tim Monev Kinerja untuk mengevaluasi progres capaian kinerja dan output	TW II-IV	Telah dilakukan: 1. Penetapan SK Ketua Tim, Tim Monev, Tim Renstra dan Tim Lapkin 2. Peningkatan kompetensi Tim SAKIP s.d Triwulan I (Pegawai SK Ketua Tim, Tim Monev, Tim Renstra dan Tim Lapkin) 3. Rapat evaluasi bulanan s.d Triwulan I Pimpinan dan Tim Monev Kinerja untuk mengevaluasi progres capaian kinerja dan output 4. Melibatkan ketua tim penanggung jawab IKU dalam penyusunan kertas kerja penetapan target tahun 2025
4		Melaksanakan reviu/kajian kesesuaian dan keselarasan antar dokumen perencanaan kinerja dalam rapat perencanaan atau evaluasi kinerja internal triwulanan.	TW II		Menyusun matriks riwayat penetapan target kinerja	TW II	
B	PENGUKURAN KINERJA						
1		Menyempurnakan SOP pengumpulan data kinerja sehingga memenuhi seluruh kriteria tahapan pengumpulan data kinerja yang baik, termasuk kriteria terkait mekanisme jika terjadi kesalahan/ perubahan data antara lain: a. tahap usulan perubahan data ke Biro Perencanaan dan Keuangan; b. tahap persetujuan data dari Biro Perencanaan dan Keuangan; c. tahap perbaikan pelaporan data.	TW II		Menyempurnakan SOP pengumpulan data kinerja dan monev	TW II	
C	PELAPORAN KINERJA						

No	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
				Rencana Aksi yang Sudah Selesai	Belum		
					Rencana Aksi yang Belum Selesai	Timeline	
1		Menyajikan informasi penyebab dilaksanakan revisi pada dokumen Laporan Kinerja;	TW I - TW IV		Menyajikan informasi penyebab dilaksanakan revisi pada dokumen Laporan Kinerja (jika ada revisi). Namun belum ada revisi laporan kinerja di tahun 2025.	TW II - TW IV	
2	Belum melengkapi laporan kinerja dengan penjelasan informasi terkait efisiensi/inefisiensi dan penyesuaian aktivitas/anggaran/ perencanaan kinerja	Melengkapi laporan kinerja dengan penjelasan informasi antara lain: 1) Upaya yang telah dilakukan dalam rangka efisiensi maupun penyebab adanya inefisiensi penggunaan sumber daya dalam proses mencapai target kinerja di setiap level sasaran dan atau IKU. Hasil analisis tersebut diharapkan dapat menggambarkan upaya pengendalian kinerja yang telah dilaksanakan untuk mengupayakan efisiensi anggaran/SDM dll secara lebih optimal; 2) Dasar/latar belakang apabila terdapat penyesuaian aktivitas/anggaran/ perencanaan kinerja sebagai strategi pencapaian kinerja dan penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya;	TW I- IV	Telah Melengkapi laporan kinerja tahun 2024 dengan penjelasan informasi antara lain: 1) Upaya yang telah dilakukan dalam rangka efisiensi maupun penyebab adanya inefisiensi penggunaan sumber daya dalam proses mencapai target kinerja di setiap level sasaran dan atau IKU 2) Dasar/ latar belakang apabila terdapat penyesuaian aktivitas/anggaran/ perencanaan kinerja sebagai strategi pencapaian kinerja dan penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya	Melengkapi laporan kinerja interim Triwulan II-IV dengan penjelasan informasi antara lain: 1) Upaya yang telah dilakukan dalam rangka efisiensi maupun penyebab adanya inefisiensi penggunaan sumber daya dalam proses mencapai target kinerja di setiap level sasaran dan atau IKU 2) Dasar/ latar belakang apabila terdapat penyesuaian aktivitas/anggaran/ perencanaan kinerja sebagai strategi pencapaian kinerja dan penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya	TW II- IV	Telah melengkapi laporan kinerja interim Triwulan I dengan penjelasan informasi terkait efisiensi/inefisiensi dan penyesuaian aktivitas/anggaran/ perencanaan kinerja
3		Memanfaatkan dan menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi kinerja secara berkesinambungan untuk perbaikan kinerja pada periode berikutnya.	TW II-IV		Menyempurnakan informasi yang dituangkan pada laporan kinerja interim di poin Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya	TW II-IV	
D	EVALUASI INTERNAL						

No	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
				Rencana Aksi yang Sudah Selesai	Belum		
					Rencana Aksi yang Belum Selesai	Timeline	
1		Memanfaatkan tahapan evaluasi kinerja internal yang telah dilaksanakan secara berkala untuk mendukung upaya perbaikan implementasi SAKIP mulai dari tahap perencanaan sampai dengan monitoring capaian kinerja;	TW II-IV		Menyempurkan informasi pada Laporan Evaluasi Internal	TW II-IV	
2		Memanfaatkan hasil evaluasi kinerja internal untuk mendukung analisa kegagalan pencapaian target kinerja terutama untuk pengajuan tambahan sumber daya, seperti sarana prasarana, sumber daya manusia maupun anggaran;	TW II-IV		Menyempurnakan informasi pada Laporan Evaluasi Internal	TW II-IV	
3		Melaksanakan monitoring dan evaluasi rekomendasi perbaikan kinerja secara berkala dan berkesinambungan untuk dapat memastikan bahwa evaluasi kinerja merupakan satu kesatuan siklus manajemen kinerja dan bukan merupakan evaluasi yang dikerjakan pada waktu tertentu.	TW II-IV		Melakukan monitoring dan evaluasi rekomendasi perbaikan kinerja pada Laporan Evaluasi Internal	TW II-IV	

3.3 REALISASI ANGGARAN

Pada tahun 2025 Balai POM di Pangkal Pinang memperoleh anggaran sebesar **Rp 21.577.684.000**. Pada penyerahan DIPA 2025 bulan Desember 2024, sebesar Rp 1.082.877.000 atau 50% pagu perjalanan dinas dari total pagu Balai POM di Pangkal Pinang di blokir oleh Kementerian Keuangan. Pada bulan Februari 2025 dilaksanakan Efisiensi/Rekonstruksi anggaran berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sehingga total blokir Balai POM di Pangkal Pinang sebesar Rp **7.765.140.000.**

Pelaksanaan dan pengelolaan anggaran telah diupayakan sesuai dengan prinsip-prinsip laporan yang lazim dan pertanggungjawabannya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, hemat, efisien dan efektif dengan menghindarkan penyalahgunaan.

Apabila dilihat dari sasaran strategis, realisasi anggaran Balai POM di Pangkal Pinang adalah sebagai berikut :

Tabel 3.99 Realisasi Anggaran Tiap Sasaran Strategis

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	351.455.000	26.281.768	7,48%
		2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	44.500.000	0	0,00%
		3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	159.645.000	5.495.445	3,44%
		4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	8.601.600	0	0,00%
		5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	9.830.400	0	0,00%
		6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	85.071.000	0	0,00%

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
		7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	29.815.000	0	0,00%
		8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	12.300.000	0	0,00%
		9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	361.229.000	10.000.000	2,77%
		10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	200.618.000	0	0,00%
		11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	15.611.000	808.250	5,18%
2	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	12	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	10.519.163.000	60.438.839	0,57%
3	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	13	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	227.401.000	12.993.000	5,71%
		14	Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	335.485.000	484.000	0,14%
		15	Jumlah desa pangan aman	422.682.000	0	0,89%
		16	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	142.414.000	150.000	0,11%
4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	17	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	28.433.000	0	0,00%
5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	18	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	241.644.000	13.213.000	5,47%

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
6	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	19	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	99.292.000	724.000	0,73%
7	Layanan Publik UPT yang prima	20	Indeks Pelayanan Publik UPT	108.459.000	1.020.000	0,94%
8	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	21	Nilai Pembangunan ZI UPT	7.371.807.000	1.414.501.921	19,19%
		22	Nilai AKIP UPT	22.200.000	0	0,00%
		23	Nilai Kinerja Anggaran UPT	366.994.000	9.714.400	2,65%
		24	Indeks Manajemen Risiko UPT	413.034.000	17.088.056	4,14%
Total				21.577.684.000	1.576.682.679	7,31 %

Apabila dilihat dari Rincian Output (RO), realisasi anggaran Balai POM di Pangkal Pinang adalah sebagai berikut :

Tabel 3.100 Realisasi Anggaran Tiap Rincian Output

No	Program/Kegiatan/Output	Pagu 2025	Realisasi Triwulan I	Capaian
1	Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	99.292.000	724.000	0,73%
2	Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	108.459.000	1.020.000	0,94%
3	Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	127.800.000	12.243.000	9,58%
4	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	297.000.000	12.597.041	4,24%
5	Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT	99.601.000	750.000	0,75%
6	Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	50.000.000	-	0,00%
7	Perangkat pengolah data dan komunikasi	80.000.000	-	0,00%
8	Prasarana Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia	619.968.000	15.628.800	2,52%
9	Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	1.812.363.000	17.085.639	0,94%
10	PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BPOM PANGKAL PINANG	241.644.000	13.213.000	5,47%
11	Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	335.485.000	484.000	0,14%
12	Desa Pangan Aman	422.682.000	3.770.000	0,89%

No	Program/Kegiatan/Output	Pagu 2025	Realisasi Triwulan I	Capaian
13	Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	142.414.000	150.000	0,11%
14	Sarana Pelayanan Kesehatan (RS/PKM/Klinik) yang diberikan KIE Farmakovigilans	44.500.000	-	0,00%
15	UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	28.433.000	-	0,00%
16	Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	178.077.000	5.495.445	3,09%
17	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	351.455.000	26.281.768	7,48%
18	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	42.115.000	-	0,00%
19	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	662.529.000	10.808.250	1,63%
20	Alat laboratorium untuk pengujian obat dan makanan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	8.706.800.000	42.893.200	0,49%
21	Layanan BMN	8.000.000	-	0,00%
22	Layanan Perkantoran	7.119.067.000	1.413.538.536	19,86%
Total		**21.577.684.000**	**1.576.682.679**	**7,31%**

Pada Triwulan I 2025, total realisasi anggaran Balai POM di Pangkal Pinang yaitu sebesar **Rp 1.576.682.679** dari pagu yang bisa digunakan (diluar pagu blokir) sebesar **Rp 13.812.544.000** dengan capaian sebesar **11,41%** atau **7,31%** bila dibandingkan dengan Pagu Total (dengan pagu blokir). Penyebab masih belum maksimalnya penyerapan anggaran salah satunya pada Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium yang pada awalnya diarahkan untuk diblokir sehingga proses pengadaan yang sudah sempat dilakukan Kontrak terhambat dan ditahan terlebih dahulu yang kemudian akun Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium kembali dibuka.

Upaya yang dilakukan Balai POM di Pangkal Pinang dalam pengelolaan anggaran antara lain:

1. Melakukan monitoring dan evaluasi serapan anggaran dan rencana penarikan dana secara berkala
2. Melakukan revisi anggaran terhadap kegiatan-kegiatan yang tidak terlaksana untuk optimalisasi penyerapan anggaran.

3. Melakukan revisi Halaman III DIPA untuk menyesuaikan rencana penarikan dana setiap triwulan.
4. Melakukan percepatan pengadaan barang dan jasa.

Tabel 3.101 Penyesuaian Anggaran dalam Mencapai Kinerja

No	Jenis Revisi Anggaran	Dasar/Latar Belakang	Perubahan yang dilakukan
1	Revisi POK (Kewenangan KPA)	• Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya. Mengikuti Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024. • Kebutuhan pembelian sampel kosmetik pada kegiatan Verifikasi Data Patroli Siber dan Profiling Kejahatan Obat dan Makanan dalam rangka Penyusunan Laporan Patroli Siber yang harganya lebih tinggi dari perencaaan yang berkenaan dengan IKU Jumlah Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan oleh UPT • Adanya pelaksanaan Kegiatan Terpadu Workshop Kerja Sama Dalam Negeri yang mempengaruhi nilai Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	• Revisi pemisahan anggaran perjalanan dinas yang di blokir sebesar 50% dari pagu total dengan pagu yang bisa digunakan. • Penambahan anggaran pembelian sampel pada kegiatan Verifikasi Data Patroli Siber dan Profiling Kejahatan Obat dan Makanan dalam rangka Penyusunan Laporan Patroli Siber • Penambahan anggaran pada KRO KIE Obat dan Makanan Aman
2	Revisi POK (Kewenangan KPA)	Revisi dilakukan karea adanya kebutuhan anggaran kegiatan workshop yang mempengaruhi pada IKU Nilai Pembangunan ZI	Penyesuaian anggaran pada sub komponen Workshop Penyelenggaraan Kearsipan
3	Revisi DJA	Menindaklanjuti Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025 tentang Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga dalam	Rekontsruksi anggaran belanja pelaksanaan APBN Tahun 2025 pemblokiran secara mandiri dan mencantumkan dalam

No	Jenis Revisi Anggaran	Dasar/Latar Belakang	Perubahan yang dilakukan
		Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025.	halaman IV DIPA sesuai dengan besaran yang telah ditetapkan untuk masing-masing unit kerja.
4	Revisi DJA	Menindaklanjuti surat Sekretaris Utama Nomor B-PR.05.03.2.01.25.07 Tanggal 3 Januari 2025 Hal Penyampaian Mekanisme Izin Pemanfaatan Optimalisasi Sisa Anggaran TA 2025	Penyesuaian anggaran revisi optimalisasi anggaran Belanja Modal (khusus yang bersumber dari RM) untuk pemenuhan kebutuhan anggaran PPNPN selama tahun 2025. Besaran optimalisasi anggaran yang telah ditetapkan untuk masing masing unit kerja
5	Revisi POK (Kewenangan KPA)	• Kebutuhan anggaran perjalanan dinas pelaksanaan kegiatan Fasilitas Penerapan Keamanan Pangan Oleh Kader Keamanan Pangan Desa yang mempengaruhi IKU Jumlah desa pangan aman • Adanya kesalahan penggunaan akun honor pejabat pengadaan barang dan jasa yang berkenaan dengan Nilai Pembangunan ZI	• Penambahan anggaran perjadin RO QDB.002 Desa Pangan Aman • Penggantian akun honor pejabatan pengadaan barang dan jasa dari akun 521213 (Belanja Honor Output Kegiatan) ke akun 521115 (Belanja Honor Output Satuan Kerja)
6	Revisi DJA	Menindaklanjuti surat Sekretaris Utama Nomor B-PR.05.03.2.03.25.171 tanggal 21 Maret 2025 Hal Revisi Relaksasi Pemanfaatan Blokir Anggaran TA 2025	Pemanfaatan kembali blokir anggaran sesuai dengan besaran yang telah ditetapkan pada masing masing Rincian Output (RO) tanpa mengubah peruntukan anggaran yang sudah tertera di DIPA. KRO yang dibuka blokir adalah KRO PDD, QCD, QIA, dan QIC.

3.4 ANALISIS EFISIENSI KEGIATAN

Pengukuran efisiensi dari kinerja diukur dengan menghitung kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit, namun menghasilkan output yang sama atau lebih besar atau dengan kata lain bahwa persentase capaian output sama atau lebih tinggi dari capaian input. Efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian output terhadap % capaian input, sesuai rumus berikut :

$$IE = \frac{\%\ \text{Capaian Output}}{\%\ \text{Capaian Input}}$$

Sedangkan standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1, yang dapat diperoleh dengan menggunakan rumus :

$$SE = \frac{\%\ \text{Rencana Capaian Output}}{\%\ \text{Rencana Capaian Input}} = \frac{100\%}{100\%} = 1$$

Selanjutnya, efisiensi suatu kegiatan ditentukan dengam membandingkan IE terhadap SE, mengikuti formula logika berikut :

Jika IE ≥ SE, maka kegiatan dianggap efisien
Jika IE < SE, maka kegiatan dianggap tidak efisien

Kemudian, terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien tersebut diukur tingkat efisiensi (TE), yang menggambarkan seberapa besar efisiensi/ketidakefisienan yang terjadi pada masing-masing kegiatan, dengan menggunakan rumus berikut :

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Capaian Indikator Tingkat Efisiensi dihitung dengan range sebagai berikut:

No	Tingkat Efisiensi	Capaian
1	<0	Tidak Efisien
2	0 – 0,2	100% (efisien)
3	0,21 – 0,4	95% (efisien)
4	0,41 – 0,6	92% (efisien)
5	0,61 – 0,8	90% (efisien)
6	0,81 – 1,0	88% (efisien)
7	1,01 – 1,2	86% (tidak efisien)
8	1,21 – 1,4	84% (tidak efisien)
9	1,41 – 1,6	80% (tidak efisien)
10	1,61 – 1,8	78% (tidak efisien)
11	>1,81	75% (tidak efisien)

Berikut tingkat efisiensi kegiatan Balai POM di Pangkal Pinang pada Triwulan I Tahun 2025.

Tabel 3.102 Tingkat Efisiensi Anggaran untuk Pencapaian Sasaran Strategis Triwulan I Tahun 2025

No	Sasaran Sasaran	Output	Input (Anggaran)			IE	TE	Capaian	Keterangan
		%	Target (RPD TW I)	Realisasi	%				
1	Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja UPT	92,34	48.042.000	42.585.463	88,64	**1,04**	**0,04**	**100% (Efisien)**	
2	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	102,74	67.980.000	60.438.839	88,91	**1,16**	**0,16**	**100% (Efisien)**	
3	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	100,50	9.734.000	17.397.000	178,72	**0,56**	**-0,44**	**Tidak Efisien**	
4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	200,00	510.000	0	0,00	-	-		Tidak Dapat Dihitung Efiensinya
5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	-	15.115.997	13.213.000	87,41	-	-		Tidak Dapat Dihitung Efiensinya
6	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	100,00	724.000	724.000	100,00	**1,00**	**0,00**	**100% (Efisien)**	

No	Sasaran Sasaran	Output	Input (Anggaran)			IE	TE	Capaian	Keterangan
		%	Target (RPD TW I)	Realisasi	%				
7	Layanan Publik UPT yang prima	-	2.153.000	1.020.000	47,38	-	-		Tidak Dapat Dihitung Efiensinya
8	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	-	1.408.336.273	1.441.304.377	102,34	-	-		Tidak Dapat Dihitung Efiensinya
	TOTAL	98,91	126.480.000	121.145.302	95,78	1,03	0,033	100% (Efisien)	

Dari 8 sasaran strategis, hanya 4 sasaran strategis yang bisa dihitung tingkat efisiensinya. Hasil pengukuran empat sasaran strategis tersebut yaitu 100% (Efisien) dengan rata-rata persentase capaian output sebesar 98,91% dan persentase capaian input sebesar 95,78%. Berikut analisis untuk tingkat efisiensi anggaran per sasaran strategis:

1) Pada Sasaran Strategis 1 **Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja UPT,** anggaran yang direalisasikan sebesar Rp42.585.463 atau 88,64% dari Rencana Penarikan Dana (RPD) Triwulan I sasaran strategis ini yaitu Rp48.042.000. Anggaran ini digunakan untuk kegiatan sampling dan pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan beserta sarana penunjangnya, edukasi pelaporan ESO ke sarana pelayanan Kesehatan, pemeriksaan sarana dan pengawasan iklan. Capaian sasaran strategis (output) ini sebesar 92,34% sehingga diperoleh nilai Tingkat Efisiensi (TE) 0,04 dengan capaian TE 100% (Efisien). Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, maka penggunaan anggaran untuk mencapai sasaran strategis pertama adalah efisien karena capaian output yang lebih tinggi dari capaian input.

2) Pada Sasaran Strategis 2 **Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT**, anggaran yang direalisasikan sebesar Rp60.438.839 atau 88,91% dari Rencana Penarikan Dana (RPD) Triwulan I sasaran strategis ini yaitu Rp67.980.000. Anggaran ini digunakan untuk pengadaan alat laboratorium dan sarana prasarana penunjang pengujian. Capaian sasaran strategis (output) ini sebesar 102,74% sehingga diperoleh nilai Tingkat Efisiensi (TE) 0,16 dengan capaian TE 100% (Efisien). Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, maka penggunaan anggaran untuk mencapai sasaran strategis kedua adalah efisien karena capaian output yang lebih tinggi dari capaian input.

3) Pada Sasaran Strategis 3 **Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT**, anggaran yang direalisasikan sebesar Rp17.397.000 atau 178,72% dari Rencana Penarikan Dana (RPD) Triwulan I sasaran strategis ini yaitu Rp9.734.000. Anggaran ini digunakan untuk pelaksanaan kegiatan KIE kepada masyarakat dan program Keamanan Pangan Terpadu yaitu Desa Pangan Aman, pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas, Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS). Kegiatan-kegiatan tersebut akan berdampak terhadap peningkatan efektivitas KIE yang menunjang pencapaian 4 indikator dalam sasaran strategis ini. Sedangkan capaian sasaran strategis (output) sebesar 100,50% sehingga diperoleh nilai Tingkat Efisiensi (TE) -0,44. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, maka penggunaan anggaran untuk mencapai sasaran strategis ini belum efisien karena capaian input yang lebih tinggi dari capaian output. Hal ini disebabkan realisasi anggaran yang dialokasikan pada sasaran strategis ini lebih besar dari RPD yang dialokasikan untuk sasaran strategis ini pada triwulan I.

4) Pada Sasaran Strategis 4 **Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu,** anggaran yang direalisasikan sebesar Rp0 dengan Rencana Penarikan Dana (RPD) Triwulan I sasaran strategis ini yaitu Rp510.000. Anggaran ini digunakan untuk pelaksanaan kegiatan pendampingan UMKM. Capaian sasaran strategis ini sebesar 200%. Namun, sasaran strategis ini tidak bisa dihitung tingkat efisiensinya karena tidak ada realisasi anggaran pada triwulan I. Hal ini disebabkan kegiatan pendampingan untuk sarana UMKM belum dilaksanakan pada Triwulan I akibat adanya efisiensi anggaran serta adanya penyesuaian target untuk tahun 2025.

5) Pada Sasaran Strategis 5 **Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT,** anggaran yang direalisasikan sebesar Rp13.213.000 atau 87,41% dari Rencana Penarikan Dana (RPD) Triwulan I sasaran strategis ini yaitu Rp15.115.997. Anggaran ini digunakan untuk berbagai rangkaian kegiatan penindakan dalam upaya penegakan hukum. Namun, belum ada capaian sasaran strategis ini pada Triwulan I karena target indikator yang mendukung sasaran strategis ini baru ada di Triwulan II sehingga sasaran strategis ini tidak bisa dihitung tingkat efisiensinya.

6) Pada Sasaran Strategis 6 **Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT,** anggaran yang direalisasikan sebesar Rp724.000 atau 100% dari Rencana Penarikan Dana (RPD) Triwulan I sasaran strategis ini yaitu Rp724.000. Anggaran ini digunakan untuk kegiatan Verifikasi Hasil Patroli siber dan pengumpulan data analisis kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan. Capaian sasaran strategis (output) ini sebesar 100% sehingga diperoleh nilai Tingkat Efisiensi (TE) 0,00 dengan capaian TE 100% (Efisien).

7) Pada Sasaran Strategis 7 **Layanan Publik UPT yang Prima,** anggaran yang direalisasikan sebesar Rp1.020.000 atau 47,38% dari Rencana Penarikan Dana (RPD) Triwulan I sasaran strategis ini yaitu Rp2.153.000. Anggaran ini digunakan untuk kegiatan pelayanan publik. Capaian sasaran strategis (output) ini diperoleh pada akhir tahun sehingga belum bisa diukur tingkat efisiensinya.

8) Pada Sasaran Strategis 8 **Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal,** anggaran yang direalisasikan sebesar Rp1.441.304.377 atau 102,34% dari Rencana Penarikan Dana (RPD) Triwulan I sasaran strategis ini yaitu Rp1.408.336.273. Anggaran ini digunakan untuk kegiatan pelayanan publik. Capaian sasaran strategis (output) ini diperoleh pada akhir tahun sehingga belum bisa diukur tingkat efisiensinya.

Tabel 3.103 Tingkat Efisiensi Anggaran untuk Pencapaian Kegiatan atau Rincian Output Triwulan I Tahun 2025

No	Kegiatan	Output	Input	IE	TE	Capaian TE	Keterangan
		%	%				
1	Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	100,00	0,73	**137,14**	**136,14**	**75% (Tidak Efisien)**	
2	Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	100,00	0,94	**106,33**	**105,33**	**75% (Tidak Efisien)**	
3	Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	100,00	9,58	**10,44**	**9,44**	**75% (Tidak Efisien)**	
4	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	100,00	4,24	**23,58**	**22,58**	**75% (Tidak Efisien)**	
5	Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT	100,00	0,75	**132,80**	**131,80**	**75% (Tidak Efisien)**	

No	Kegiatan	Output	Input	IE	TE	Capaian TE	Keterangan
		%	%				
6	Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	-	0,00	-	-		Tidak dapat dihitung TE nya
7	Perangkat pengolah data dan komunikasi	-	0,00	-	-		Tidak dapat dihitung TE nya
8	Prasarana Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia	100,00	2,52	39,67	38,67	75% (Tidak Efisien)	
9	Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	100,00	0,94	106,08	105,08	75% (Tidak Efisien)	
10	PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BPOM PANGKAL PINANG	-	5,47	-	-		Tidak dapat dihitung TE nya
11	Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	-	0,14	-	-		Tidak dapat dihitung TE nya
12	Desa Pangan Aman	-	0,89	-	-		Tidak dapat dihitung TE nya
13	Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	-	0,11	-	-		Tidak dapat dihitung TE nya
14	Sarana Pelayanan Kesehatan (RS/PKM/Klinik) yang diberikan KIE Farmakovigilans	100,00	0,00	-	-		Tidak dapat dihitung TE nya
15	UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	-	0,00	-	-		Tidak dapat dihitung TE nya
16	Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	100,00	3,09	32,40	31,40	75% (Tidak Efisien)	
17	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	100,00	7,48	13,37	12,37	75% (Tidak Efisien)	
18	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	100,00	0,00	-	-		Tidak dapat dihitung TE nya
19	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	100,00	1,63	61,30	60,30	75% (Tidak Efisien)	
20	Alat laboratorium untuk pengujian obat dan makanan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	100,00	0,49	202,99	201,99	75% (Tidak Efisien)	
21	Layanan BMN	100,00	0,00	-	-		Tidak dapat dihitung TE nya

No	Kegiatan	Output	Input	IE	TE	Capaian TE	Keterangan
		%	%				
22	Layanan Perkantoran	100,00	19,86	5,04	4,04	75% (Tidak Efisien)	
	TOTAL	100,00	7,72	12,95	11,95	75% (Tidak Efisien)	

Pada tahun 2025, Balai POM di Pangkal Pinang melaksanakan 22 (dua puluh dua) kegiatan utama atau Rincian Output (RO) untuk mendukung pencapaian 8 sasaran strategis. Dari 22 Rincian Output (RO), hanya 12 RO yang dapat dihitung tingkat efisiensinya, sedangkan 10 RO lainnya tidak dapat dihitung Tingkat Efisiensinya karena belum ada capaian input (anggaran) dan/atau capaian output (RO) di Triwulan I ini.

Dilihat dari data tabel di atas, 12 RO yang dapat dihitung tingkat efisiensinya masih belum efisien dengan capaian TE 75% (Tidak Efisien). Hal ini dikarenakan realisasi anggaran pada Triwulan I masih rendah dan adanya efisiensi anggaran pada Triwulan I. Untuk meningkatkan realisasi anggaran setiap output, Balai POM di Pangkal Pinang akan terus melakukan monitoring realisasi anggaran dan melakukan revisi kegiatan, serta melakukan optimalisasi anggaran. Selain itu, Balai POM di Pangkal Pinang juga akan melakukan monitoring dan evaluasi capaian Rincian Output (RO) setiap bulannya pada rapat evaluasi bulanan untuk memantau progres capaian Rincian Output. Pengukuran Efisiensi Anggaran untuk Pencapaian Kegiatan atau Rincian Output Triwulan I Tahun 2025 secara lengkap dapat dilihat pada **Lampiran 7**.

BAB IV

PENUTUP





BAB IV PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Secara garis besar, dalam perhitungan NPSS Balai POM di Pangkal Pinang dinilai dari 8 sasaran strategis dan 24 Indikator kinerja yang ditetapkan. Berikut hasil pengukuran NPSS pada Triwulan I Tahun 2025:

1. **4 (empat) indikator yang capaiannya Sangat Baik**, yaitu: 1. Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder, 2. Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, 3. Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium, dan 4. Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT.
2. **1 (satu) indikator yang capaiannya Baik,** yaitu: 1. Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar.
3. **2 (dua) indikator dengan kategori Kurang**, yaitu: 1. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT, dan 2. Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.
4. **7 (tujuh) indikator dengan kategori Tidak Dapat Disimpulkan,** yaitu: 1. Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan, 2. Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan, 3. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan, 4. Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, 5. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, 6. Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan, dan 7. Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan.

Dari **24 (dua puluh empat)** Indikator Kinerja Utama, hanya **14 (empat belas)** indikator yang dapat diukur capaiannya, **4 indikator** belum dapat diukur capaiannya karena tidak ada target di triwulan ini, dan **6 (enam)** indikator lainnya merupakan indikator tahunan yang penilaiannya dilakukan pada akhir tahun.

Dalam perhitungan Nilai Kinerja Organisasi BPOM di Pangkalpinang Triwulan I Tahun 2025, terdapat 5 indikator kinerja yang capaiannya dinormalisasi menjadi 110% dan 3 indikator kinerja dikecualikan dari perhitungan sehingga hanya 11 indikator yang diperhitungkan dalam NKO. Nilai Kinerja Organisasi BPOM di Pangkalpinang Triwulan I Tahun 2025 sebesar **96,95%** dengan predikat **Baik**.

Berdasarkan dengan Surat Dinas dari Direktur Pengawasan Peredaran Pangan Olahan Nomor T-PW.04.05.54.07.25.1368 tanggal 15 Juli 2025 Perihal Hasil Evaluasi Persentase Iklan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan, terdapat penyesuaian rumus perhitungan pada Form RHPK iklan pangan olahan yang dilakukan oleh Direktorat Pengawasan Pangan Olahan, khususnya komponen Kesesuaian Proporsi Media Iklan sehingga menyebabkan perubahan realisasi Triwulan I Tahun 2025 pada indikator Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan Balai POM di Pangkal Pinang. Realisasi semula sebesar 101,19 dengan capaian sebesar 118,49. Setelah dilakukan penyesuaian rumus perhitungan pada Form RHPK, realisasinya menjadi **100,69** dengan capaian sebesar **117,90**. Namun, perubahan realisasi pada indikator ini **tidak menyebabkan perubahan Nilai Kinerja Organisasi** BPOM di Pangkal Pinang Triwulan I Tahun 2025 karena capaian kinerja indikator ini >110 sehingga capaiannya sama, baik sebelum maupun setelah adanya penyesuaian rumus perhitungan yaitu 110.

Dalam pelaksanaan kegiatannya, masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi Balai POM di Pangkal Pinang, seperti kendala yang dihadapi Lelompok Substansi Pengujian yaitu adanya efisiensi anggaran menyebabkan perlunya penyesuaian target yang berimbas terhadap penyesuaian kebutuhan dan kegiatan pengujian. Kemudian belum adanya perhitungan RHPK dari Biro Perencanaan sehingga untuk pengukuran realisasi bulan Februari menggunakan tools perhitungan mandiri sesuai arahan dari masing-masing kedeputian. Untuk

itu BPOM di Pangkal Pinang melakukan upaya-upaya seperti merencanakan penyesuaian target sampel yang diuji sesuai anggaran setelah efisiensi dan berkoordinasi dengan masing-masing kedeputian terkait perhitungan realisasi menggunakan tools perhitungan masing-masing kedeputian.

Selain itu kendala yang dihadapi Kelompok Substansi Pemeriksaan salah satunya adalah terkait perhitungan capaian IKU, masih belum memahami perhitungan komponen tanggapan atas tindak lanjut, surat yang ditindaklanjuti oleh UPT apakah termasuk surat yang dikirim oleh kedeputian ke sarana dan ditembuskan ke UPT atau hanya surat yang ditujukan ke UPT saja. Kemudian keterbatasan iklan di media yang ditentukan misalnya pada media luar ruang sehingga berpotensi target tidak tercapai. Beberapa iklan dengan kategori tertentu yang secara ketentuan tidak boleh di iklankan secara bebas sulit temukan khususnya iklan Minuman Beralkohol. Untuk itu UPT berkoordinasi dengan kedeputian terkait perhitungan realisasi menggunakan tools pada kertas kerja di manual IKU terkait. Selain itu mengusulkan kepada direktorat terkait untuk menyesuaikan proporsi iklan khususnya yang sulit ditemukan dilapangan sehingga realisasi tetap tercapai sesuai target dan berkoordinasi dengan lintas sektor terkait untuk memetakan lokasi dimana iklan tersebut tersedia.

Pada Sub. Bagian Tata Usaha memiliki kendala terkait adanya efisiensi anggaran yang diarahkan diawal tahun. UP tunai tahun 2025 senilai Rp.120.000.000 tidak dapat mencapai nominal revolving sesuai ketentuan IKPA, disebabkan adanya kebijakan efisiensi anggaran yang berpengaruh pada pelaksanaan kegiatan setiap bulannya. Untuk itu UPT mengajukan penurunan besaran nilai UP tunai Balai POM di Pangkalpinang ke KPPN dari semula Rp. 120.000.000 menjadi Rp.70.000.000.

4.2 SARAN

Dengan pencapaian kinerja tersebut, Balai POM di Pangkal Pinang telah melakukan upaya-upaya perbaikan secara berkesinambungan guna meningkatkan kinerja pada masa mendatang. Beberapa rekomendasi untuk peningkatan kinerja Balai POM di Pangkal Pinang.

1. Melakukan koordinasi kepada kedeputian terkait untuk menentukan target final pasca efisiensi anggaran;
2. Berkoordinasi dengan masing-masing kedeputian terkait perhitungan realisasi menggunakan tools perhitungan masing-masing kedeputian dan kebijakan target sampling yang digunakan dalam perhitungan capaian IKU apakah target renlak awal tahun atau target setelah efisiensi;
3. Merencanakan penyesuaian target sampel yang diuji sesuai anggaran setelah efisiensi;
4. Mengusulkan kepada Direktorat KMEI untuk melakukan penyesuain target sarana yang diberikan sosialisasi (KIE);
5. Melakukan perubahan metode pelaksaan dari Luring menjadi daring untuk mensiasati ketiadaan anggaran;
6. Melaksanakan monev secara periodik agar jika terjadi KLB dapat di tindak lanjuti segera dan sesuai ketentuan;
7. Melakukan koordinasi kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Kota untuk menelusuri alamat tempat produksi dari pelaku usaha pangan;
8. Melaksanakan monitoring evaluasi kepada sarana yang telah diberikan rekomendasi dan memberikan reminder sesuai timeline menggunakan tools monev (AMOI CAKEP);
9. Menyusun rencana aksi pemenuhan SKL (SKP);
10. Melakukan Koordinasi ke Pemerintah Daerah terkait Program Sekolah, Desa Pangan Aman, dan Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas;
11. Menyusun perencanaan penetapan target UMKM yang akan dilakukan pendampingan;

12. Menunggu pelaksanaan dimulainya pengukuran Indeks Pelayanan Publik;
13. Melakukan perhitungan ulang target per POKJA untuk pencapaian target nilai;
14. Melaksanakan rencana kerja pokja Akuntabilitas terkait peningkatan kompetensi pengelola AKIP;
15. Melakukan Sosialisasi Perjanjian Kinerja dan RAPK tahun 2025;
16. Memberikan reward dan punishment terkait capaian kinerja tahun 2024;
17. Mengajukan penurunan besaran nilai UP tunai Balai POM di Pangkalpinang ke KPPN dari semula Rp. 120.000.000 menjadi Rp.70.000.000;
18. Melakukan sosialisasi tujuan (PK/RAPK) kepada pegawai;
19. Peningkatan kompetensi pegawai terkait Manrisk dengan mengikuti pelatihan pada IDEAS.

LAMPIRAN





Lampiran 1

Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Kegiatan (RHPK)

1. Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Bulan	Target Sampel Sediaan Farmasi	Target Indikator (%)	% Sampel Obat Berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	% Sampel Obat Bahan Alam Berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan (Bobot 60%)	% Sampel Suplemen Kesehatan Berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	% Sampel Kosmetik Berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Realisasi (%)
Januari			0,00	0,00	'-	0,00	0,00
Februari		85,00	97,58	100,00	100,00	100,00	99,40
Maret		85,00	81,43	100,00	100,00	95,81	94,31

Obat

Bulan	Jumlah sampel yang disampling	jumlah target sampel sampai dengan periode yang dimaksud	A1
Januari			
Februari	22,00	23,00	95,65
Maret	22,00	35,00	62,86

Bulan	Jumlah sampel yang sesuai Renlak per Kategori Sampel	jumlah target sampel sampai dengan periode yang dimaksud	A2
Januari			
Februari	22,00	23,00	95,65
Maret	22,00	35,00	62,86

Bulan	Jumlah sampel yang sesuai Renlak per Kelas Terapi	jumlah target sampel sampai dengan periode yang dimaksud	A3
Januari			
Februari	22,00	23,00	95,65
Maret	22,00	35,00	62,86

Bulan	A Kesesuaian Perencanaan Sampling (Bobot: 30%)	Jumlah sampel yang sesuai Renlak w aktu	jumlah target sampel sampai dengan periode yang dimaksud	B1
Januari				
Februari	28,70	22,00	23,00	95,65
Maret	18,86	22,00	35,00	62,86

Bulan	Jumlah sampel yang dilakukan evaluasi penandaan sesuai ketentuan	jumlah target sampel untuk dievaluasi penandaan sampai dengan periode yang dimaksud	B2
Januari			
Februari	22,00	23,00	95,65
Maret	22,00	35,00	62,86

Bulan	B Kesesuaian Pelaksanaan Sampling (Bobot: 20 %)	Jumlah sampel yang diuji dengan parameter sesuai ketentuan	jumlah sampel yang diuji sampai dengan periode yang dimaksud	C1
Januari				
Februari	19,13	13,00	13,00	100,00
Maret	12,57	21,00	21,00	100,00

Bulan	C Kesesuaian Pelaksanaan Pengujian (Bobot: 20%)	Jumlah sampel dengan kesimpulan sesuai ketentuan pedoman sampling	jumlah sampel yang dilaporkan sampai dengan periode yang dimaksud	D1
Januari				
Februari	20,00	13,00	13,00	100,00
Maret	20,00	22,00	22,00	100,00

Bulan	Jumlah sampel yang dilaporkan tepat w aktu sesuai pedoman sampling	jumlah sampel yang dilaporkan sampai dengan periode yang dimaksud	D2
Januari			
Februari	13,00	13,00	100,00
Maret	22,00	22,00	100,00

Bulan	D Kesesuaian Pelaporan Hasil Sampling dan Pengujian (Bobot: 20 %)	jumlah laporan monitoring penarikan yang dilaporkan sesuai ketentuan sampai dengan pedoman sampling	jumlah laporan yang harus dilaporkan sampai dengan periode yang dimaksud	E1	E Kesesuaian Pelaporan Montoring Penarikan (Bobot:10%)	% Sampel Obat Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan
Januari						
Februari	20,00	4,00	4,00	100,00	10,00	97,58
Maret	20,00	11,00	11,00	100,00	10,00	81,43

Obat Bahan Alam

Bulan	Jumlah sampel yang diperiksa sesuai dengan Pedoman Sampling	Target sampel UPT sesuai Pedoman Sampling dan renlak UPT	A1	Bulan	Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan Pedoman Sampling	Jumlah sampel yang masuk laboratorium sesuai tingkatannya	A2
Januari				Januari			
Februari	13,00	13,00	100,00	Februari	16,00	16,00	100,00
Maret	13,00	13,00	100,00	Maret	16,00	16,00	100,00

Bulan	% Pemenuhan Target Pengawasan	Jumlah sampel yang disampling, diuji dan dilaporkan tepat waktu	Jumlah seluruh sampel yang diperiksa/disampling dan diuji	Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan	Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan parameter uji	Jumlah seluruh sampel yang diuji	Kesesuaian parameter uji
Januari							
Februari	100,00	13,00	13,00	100,00	13,00	13,00	100,00
Maret	100,00	13,00	13,00	100,00	13,00	13,00	100,00

Bulan	Jumlah kesimpulan sampel yang diperiksa dan diuji sesuai	Target sampel yang diperiksa dan diuji	Akurasi dalam penentuan kesimpulan	Jumlah surat yang ditindaklanjuti oleh UPT	Jumlah surat yang dikirimkan oleh Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan	Tanggapan atas surat tindak lanjut	% Sampel Obat Bahan Alam Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan
Januari							
Februari	13,00	13,00	100,00	8,00	8,00	100,00	100,00
Maret	13,00	13,00	100,00	9,00	9,00	100,00	100,00

Suplemen Kesehatan

Bulan	Jumlah sampel yang diperiksa sesuai dengan Pedoman Sampling	Target sampel UPT sesuai Pedoman Sampling dan renlak UPT	A1	Bulan	Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan Pedoman Sampling	Jumlah sampel yang masuk laboratorium sesuai tingkatannya	A2
Januari		-		Januari		'-	
Februari	3,00	3,00	100,00	Februari	4,00	4,00	100,00
Maret	4,00	4,00	100,00	Maret	4,00	4,00	100,00

Bulan	% Pemenuhan Target Pengawasan	Jumlah sampel yang disampling, diuji dan dilaporkan tepat waktu	Jumlah seluruh sampel yang diperiksa/disampling dan diuji	Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan	Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan parameter uji	Jumlah seluruh sampel yang diuji	Kesesuaian parameter uji
Januari	-			-		-	
Februari	100,00	3,00	3,00	100,00	3,00	3,00	100,00
Maret	100,00	4,00	4,00	100,00	4,00	4,00	100,00

Bulan	Jumlah kesimpulan sampel yang diperiksa dan diuji sesuai	Target sampel yang diperiksa dan diuji	Akurasi dalam penentuan kesimpulan	Jumlah surat yang ditindaklanjuti oleh UPT	Jumlah surat yang dikirimkan oleh Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	Tanggapan atas surat tindak lanjut	% Sampel Obat Bahan Alam Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan
Januari		-			-	-	
Februari	3,00	3,00	100,00	0,00	0,00	#DIV/0!	100,00
Maret	4,00	4,00	100,00	1,00	1,00	100,00	100,00

Kosmetik

Bulan	Jumlah sampel yang diperiksa sesuai dengan Pedoman Sampling	Target sampel UPT sesuai Pedoman Sampling dan renlak UPT	A1
Januari			
Februari	25,00	25,00	100,00
Maret	25,00	43,00	58,14

Bulan	Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan Pedoman Sampling	Jumlah sampel yang masuk laboratorium sesuai tingkatannya	A2
Januari			
Februari	29,00	29,00	100,00
Maret	29,00	29,00	100,00

Bulan	% Pemenuhan Target Pengawasan	Jumlah sampel dengan pelaksanaan sampling sesuai ketentuan	jumlah sampel yang diperiksa pada periode yang dimaksud	Kesesuaian pelaksanaan sampling	Jumlah sampel yang disampling, diuji dan dilaporkan lengkap dan tepat waktu	Jumlah seluruh sampel yang diperiksa, diuji, dan dilaporkan	Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian
Januari							
Februari	100,00	25,00	25,00	100,00	25,00	25,00	100,00
Maret	79,07	25,00	25,00	100,00	25,00	25,00	100,00

Bulan	Jumlah kesimpulan sampel yang diperiksa, diuji, dan dilaporkan sesuai	Jumlah sampel yang diperiksa, diuji, dan dilaporkan	Ketepatan dalam penentuan kesimpulan	Jumlah surat yang ditindaklanjuti oleh UPT	Jumlah surat yang dikirimkan oleh Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional	Tanggapan atas surat tindak lanjut	% Sampel Kosmetik Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan
Januari							
Februari	25,00	25,00	100,00	7,00	7,00	100,00	100,00
Maret	25,00	25,00	100,00	11,00	11,00	100,00	95,81

2. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD_ESO

Bulan	Target Indikator (%)	jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM berdasarkan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans oleh UPT BPOM pada tahun berjalan	jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans oleh UPT BPOM	Realisasi (%)
Januari	26,00	0,00	45,00	0,00
Februari	26,00	0,00	45,00	0,00
Maret	26,00	0,00	45,00	0,00

3. Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Bulan	Target Sampel Pangan Olahan	Target Indikator (%)	Kesesuaian Target Sampel (Bobot 20%)	Kesesuaian Parameter Uji (Bobot 20%)	Ketepatan Pengambilan Kesimpulan (Bobot 20%)	Ketepatan Waktu Pengambilan Sampel (Bobot 10%)	Ketepatan Waktu Pelaporan Sampling dan Pengujian (Bobot 10%)	Tindak Lanjut sesuai Pedoman Tindak Lanjut/ Ketentuan lainnya (Bobot 20%)	Realisasi (%)
Januari			50,00	100,00	100,00	100,00	50,00	100,00	85,00
Februari			70,00	100,00	100,00	100,00	50,00	100,00	89,00
Maret			100,00	100,00	100,00	100,00	83,33	100,00	98,33

3A. Kesesuaian Target Sampel

Bulan	Jumlah sampel yang diperiksa sesuai dengan Pedoman Sampling	target sampel UPT sesuai Pedoman Sampling dan renlak	A1 (%)	Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan Pedoman Sampling	jumlah sampel yang masuk laboratorium sesuai tingkatannya	A2 (%)	Kesesuaian Target Sampel (%)
Januari	4,00	4,00	100,00	0,00	6,00	0,00	50,00
Februari	12,00	12,00	100,00	6,00	15,00	40,00	70,00
Maret	12,00	12,00	100,00	15,00	15,00	100,00	100,00

3B. Kesesuaian Parameter Uji

Bulan	Jumlah sampel yang diuji dengan parameter sesuai pedoman sampling	jumlah sampel yang diuji	Kesesuaian Parameter Uji (%)
Januari	4,00	4,00	100,00
Februari	4,00	4,00	100,00
Maret	12,00	12,00	100,00

3C. Ketepatan Pengam. Keputusan

Bulan	Jumlah sampel yang diambil kesimpulan sesuai pedoman sampling	jumlah sampel yang diperiksa dan diuji	Ketepatan Pengambilan Kesimpulan (%)
Januari	4,00	4,00	100,00
Februari	4,00	4,00	100,00
Maret	12,00	12,00	100,00

3D. Ketepatan Waktu Pengambilan

Bulan	Jumlah sampel yang diperiksa tepat waktu sesuai renlak	jumlah sampel yang diperiksa	Ketepatan Waktu Pengambilan Sampel (%)
Januari	4,00	4,00	100,00
Februari	12,00	12,00	100,00
Maret	12,00	12,00	100,00

3E. Ketepatan Waktu Pelaporan

Bulan	Jumlah sampel yang diperiksa dan diuji yang dilaporkan tepat waktu sesuai pedoman sampling	jumlah sampel yang diperiksa dan diuji	Ketepatan Waktu Pelaporan Sampling dan Pengujian (%)
Januari	2,00	4,00	50,00
Februari	2,00	4,00	50,00
Maret	10,00	12,00	83,33

3F. Tindak Lanjut sesuai Pedoma

Bulan	Jumlah sampel yang ditindaklanjuti	total jumlah sampel yang Tidak Memenuhi Syarat (TIE atau Rusak atau Kedaluwarsa atau TMS Pengujian)	Tindak Lanjut sesuai Pedoman Tindak Lanjut/ Ketentuan lainnya (%)
Januari	0,00	0,00	100,00
Februari	0,00	0,00	100,00
Maret	16,00	16,00	100,00

4. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar

Bulan	Target Indikator (%)	Jumlah Sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	Total jumlah sampel KLB keracunan pangan dikirim atau diuji ke BPOM	Realisasi (%)
Januari				0,00
Februari				0,00
Maret				0,00

5. Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Bulan	Target Indikator (%)	% Pemenuhan Target Sampel PIRT (Bobot 20%)	% Kesesuaian Parameter Uji (Bobot 20%)	% Ketepatan pengambilan kesimpulan (Bobot 20%)	% Ketepatan waktu pengambilan sampel (Bobot 10%)	% Ketepatan waktu pelaporan (Bobot 10%)	% Tindak lanjut sampel PIRT (Bobot 20%)	Realisasi (%)
Januari		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Februari		100,00	80,00	100,00	100,00	100,00	100,00	96,00
Maret		100,00	80,00	100,00	100,00	100,00	100,00	96,00

5A. Target Sampel

Bulan	Jumlah sampel yang diperiksa sesuai dengan Pedoman Sampling* *Termasuk sampel TIE, rusak dan kedaluw arsa yang tidak dilakukan pengujian	Target sampel UPT sesuai Pedoman Sampling dan Renlak UPT	Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan Pedoman Sampling** **Pengujian dilakukan sesuai dengan tingkatan UPT (termasuk pengujian menggunakan test kit), untuk Loka/ Balai POM baru yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri maka kinerja pengujian diklaim oleh Balai Penguji	Jumlah sampel yang masuk laboratorium sesuai tingkatannya	% Pemenuhan Target Sampel PIRT
Januari	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
Februari	15,00	15,00	19,00	19,00	100,00
Maret	15,00	15,00	19,00	19,00	100,00

5B. Parameter Uji

Bulan	Jumlah sampel sesuai	Total Sampel PIRT	% Kesesuaian Parameter Uji
Januari	0,00	15,00	0,00
Februari	12,00	15,00	80,00
Maret	12,00	15,00	80,00

5C. Ketepatan Pengambilan Kesimpulan

Bulan	Jumlah sampel yang diambil kesimpulan sesuai pedoman sampling	Jumlah sampel yang diperiksa dan diuji	% Ketepatan pengambilan kesimpulan
Januari	0,00	0,00	0,00
Februari	15,00	15,00	100,00
Maret	15,00	15,00	100,00

5D. Ketepatan Waktu Sampling

Bulan	Jumlah sampel diambil	Total Sampel PIRT	% Ketepatan waktu pengambilan sampel
Januari	0,00	15,00	0,00
Februari	15,00	15,00	100,00
Maret	15,00	15,00	100,00

5E. Ketepatan Waktu Pelaporan

Bulan	Jumlah sampel tepat waktu	Total Sampel PIRT	% Ketepatan waktu pelaporan
Januari	0,00	15,00	0,00
Februari	15,00	15,00	100,00
Maret	15,00	15,00	100,00

5F. Tindak Lanjut

Bulan	Jumlah Sampel PIRT yang ditindaklanjuti	Total jumlah sampel yang TMS	% Tindak lanjut sampel PIRT
Januari	0,00	0,00	0,00
Februari	3,00	3,00	100,00
Maret	3,00	3,00	100,00

6. Persentase Keputusan_Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti Stakeholder

Bulan	Target Indikator (%)	% Rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha	% Rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	Realisasi (%)
Januari		0,00	0,00	0,00
Februari		0,00	0,00	0,00
Maret		73,33	100,00	86,67

6A. Pelaku Usaha

Bulan	Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha	Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada pelaku usaha	% Rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha
Januari	0,00	0,00	0,00
Februari	0,00	4,00	0,00
Maret	11,00	15,00	73,33

6B. Lintas Sektor

Bulan	Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada lintas sektor	% Rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor
Januari	0,00	0,00	0,00
Februari	0,00	0,00	0,00
Maret	4,00	4,00	100,00

7. Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Bulan	Target	% Sarprod Obat	% Sarprod OBA & SK	% Sarprod Kosmetik	% Sarprod SF
Januari		0,00	0,00	0,00	0,00
Februari		0,00	0,00	0,00	0,00
Maret		0,00	0,00	0,00	0,00

8. Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan (termasuk IRTP) yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Bulan	Target Sarana	Hasil pemeriksaan yang dilaporkan melalui SIPT	Hasil pemeriksaan yang dilaporkan melalui SIPT sesuai ketentuan (paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya)	% Ketepatan waktu	Jumlah Sarana yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Jumlah Seluruh Sarana yang Diperiksa	% Sarana Diperiksa & Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan
Januari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Februari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maret	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	100,00	100,00

9. Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Bulan	Target	% Sardis Obat	% Sardis OBA & SK	% Sardis Kosmetik	% Sardis
Januari					
Februari		100,00	0,00	100,00	0,00
Maret		100,00	0,00	100,00	0,00

9A. % Sardis Obat

Bulan	Target	Jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi yang diperiksa dan fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat yang diperiksa	Jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi yang diperiksa dan fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat yang ditargetkan diperiksa	% pemenuhan target pemeriksaan	Jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi yang diperiksa dan fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat yang diperiksa dan ditindaklanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi yang diperiksa dan fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat yang diperiksa	% kesesuaian tindaklanjut	% Sardis Obat
Januari		0	0		0	0		
Februari		5	5	100,00	5	5	100,00	100,00
Maret		8	8	100,00	8	8	100,00	100,00

9B. % Sardis OBA

Bulan	Target	Jumlah realisasi pengawasan sarana	Jumlah target pengawasan inspeksi sesuai renlak	% Kesesuaian Pelaksanaan inspeksi	Jumlah sarana yang diperiksa, dilaporkan lengkap dan tepat waktu	Jumlah sarana yang diperiksa	% Kelengkapan,kualitas pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat
Januari	0,00	0	0	0	0	0	0
Februari	0,00	0	0	0	0	0	0
Maret	0,00	0	0	0	0	0	0

Bulan	Jumlah kesimpulan pengawasan sarana yang benar	Jumlah sarana yang selesai diperiksa	% Akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi	Jumlah tindaklanjut hasil pengawasan sarana yang sesuai dan tepat waktu	Jumlah seluruh tindaklanjut	% Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana	% Sardis OBA & SK
Januari	0	0	0	0	0	0	0,00
Februari	0	0	0	0	0	0	0,00
Maret	0	0	0	0	0	0	0,00

9C. % Sardis SK

Bulan	Target	Jumlah realisasi pengawasan sarana	Jumlah target pengawasan inspeksi sesuai renlak	% Kesesuaian Pelaksanaan inspeksi	Jumlah sarana yang diperiksa, dilaporkan lengkap dan tepat waktu	Jumlah sarana yang diperiksa	% Kelengkapan,kualitas pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat
Januari	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Februari	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Maret	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00

Bulan	Jumlah kesimpulan pengawasan sarana yang benar	Jumlah sarana yang selesai diperiksa	% Akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi	Jumlah tindaklanjut hasil pengawasan sarana yang sesuai dan tepat waktu	Jumlah seluruh tindaklanjut	% Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana	% Sardis OBA & SK
Januari	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
Februari	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
Maret	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00

9C. % Sardis Kos

Bulan	Target	Jumlah realisasi pengawasan sarana	Jumlah target tahunan	% Pelaksanaan Inspeksi	Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan tepat waktu	Jumlah seluruh sarana yang diperiksa	% Kelengkapan/kualitas pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat
Januari	0	0	0	0,00	0	0	0,00
Februari	10	10	10	100,00	10	10	100,00
Maret	11	11	11	100,00	11	11	100,00

Bulan	Jumlah kesimpulan pengawasan sarana yang sesuai	Jumlah sarana yang selesai diperiksa	% Akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi	Jumlah tindaklanjut hasil pengawasan sarana yang sesuai dan tepat waktu	Jumlah seluruh tindaklanjut	% Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana	% Sardis Kos
Januari	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
Februari	10	10	100,00	10	10	100,00	100,00
Maret	11	11	100,00	11	11	100,00	100,00

10. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan (termasuk PIRT) yang diperiksa sesuai ketentuan

Bulan	Target	Jumlah Sarana yang Diperiksa	Target Jumlah Sarana yang Diperiksa	% Pemenuhan Target Sarana yang Diperiksa (Bobot 20%)	Jumlah Sarana yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Jumlah Sarana yang Diperiksa	% Ketepatan Tindak Lanjut (Bobot 70%)	Jumlah Sarana yang Diperiksa dan Dilaporkan Tepat Waktu	Jumlah Sarana yang Diperiksa	% Pemenuhan Target Sarana yang Diperiksa (Bobot 10%)	% Sardis PO
Januari	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
Februari	0	1	1	20,00	1	1	70,00	1	1	10,00	100,00
Maret	0	15	15	20,00	15	15	70,00	15	15	10,00	100,00

11. Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan

Bulan	Target	% Iklan Obat	% Iklan Kos	% Iklan OBA	% Iklan SK	% Iklan PO	% Iklan SF dan PO
Januari	85,4	0,00	102,08	0,00	0,00	90,00	96,04
Februari	85,4	100,00	90,46	100,00	100,00	94,35	96,96
Maret	85,4	100,00	106,57	100,00	100,00	96,86	100,69

11A. % Iklan Obat

Bulan	Target	Jumlah iklan yang selesai diawasi	Jumlah target iklan yang diawasi	% Pemenuhan jumlah target pengawasan	Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu	Jumlah target iklan yang diawasi	% Ketepatan waktu pelaporan	% Iklan Obat
Januari	0	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
Februari	6	6	6	100,00	6	6	100,00	100,00
Maret	12	12	12	100,00	12	12	100,00	100,00

11B. % Iklan Kos

Bulan	Target	Capaian jumlah iklan media cetak	Jumlah target media cetak	% Capaian media cetak	Capaian jumlah iklan media luar ruang	Jumlah target media luar ruang	% Capaian media luar ruang	Capaian jumlah iklan media online	Jumlah target media online	% Capaian media online	Capaian jumlah iklan media elektronik	Jumlah target media elektronik	% Capaian media elektronik
Januari	20	2	2	100,00	3	2	150,00	13	13	100,00	2	3	66,67
Februari	40	2	4	50,00	3	4	75,00	30	26	115,38	5	6	83,33
Maret	60	6	6	100,00	9	6	150,00	40	39	102,56	10	10	100,00

Bulan	% Capaian pengawasan iklan yang diawasi pada media sesuai target	Jumlah iklan yang evaluasi dan verifikasi oleh Operator UPT yang tepat waktu	Jumlah iklan yang dievaluasi	% Capaian evaluasi dan verifikasi oleh Operator UPT	Jumlah iklan yang dilaporkan ke Operator Pusat yang tepat waktu	Jumlah iklan yang dievaluasi	% Capaian pelaporan ke Operator Pusat	% Iklan yang dilaporkan tepat waktu	% Iklan Kos
Januari	104,17	20	20	100,00	20	20	100,00	100,00	102,08
Februari	80,93	40	40	100,00	40	40	100,00	100,00	90,46
Maret	113,14	65	65	100,00	65	65	100,00	100,00	106,57

11D. % Iklan SK

Bulan	Target	Jumlah iklan yang selesai diawasi	Jumlah target iklan yang diawasi sd periode pelaporan	% Pemenuhan target pengawasan	Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu	Jumlah iklan yang selesai diawasi sd periode pelaporan	% Ketepatan waktu pelaporan	Jumlah keputusan hasil pengawasan iklan yang sesuai	jumlah seluruh keputusan hasil pengawasan	% Akurasi pengambilan keputusan	% Iklan Suplemen Kesehatan
Januari	0	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
Februari	2	2	2	100,00	2	2	100,00	2	2	100,00	100,00
Maret	3	3	3	100,00	3	3	100,00	3	3	100,00	100,00

11C. % Iklan OBA

Bulan	Target	Jumlah iklan yang selesai diawasi	Jumlah target iklan yang diawasi sd periode pelaporan	% Pemenuhan target pengawasan	Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu	Jumlah iklan yang selesai diawasi sd periode pelaporan	% Ketepatan waktu pelaporan	Jumlah keputusan hasil pengawasan iklan yang sesuai	jumlah seluruh keputusan hasil pengawasan	% Akurasi pengambilan keputusan	% Iklan OBA
Januari	0	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
Februari	4	4	4	100,00	4	4	100,00	4	4	100,00	100,00
Maret	22	22	22	100,00	22	22	100,00	22	22	100,00	100,00

11E. % Iklan PO

Bulan	Target	Jumlah Iklan yang diawasi	Realisasi	Nilai Pemenuhan Target Iklan	Jumlah iklan yang diawasi (Media Cetak 12,5%)	Proporsi Realisasi Media Cetak	Realisasi Media Cetak	Jumlah iklan yang diawasi (Media Online 37,5%)	Proporsi Realisasi Media Online	Realisasi Media Online
Januari	10	10	1	40,00	0	0,00%	0	7	70,00%	1,00
Februari	20	23	1	40,00	1	4,35%	0	11	47,83%	1,00
Maret	30	35	1	40,00	3	8,57%	1	15	42,86%	1,00

Bulan	Jumlah iklan yang diawasi (Media Penyiaran 25%)	Proporsi Realisasi Media Penyiaran	Realisasi Media Penyiaran	Jumlah iklan yang diawasi (Media Luar Ruang 25%)	Proporsi Realisasi Media Luar Ruang	Realisasi Media Luar Ruang	Kesesuaian Proporsi Media Iklan	Jumlah Iklan Tepat Waktu	Ketepatan Waktu Pelaporan Iklan	% Iklan PO
Januari	0	0,00%	0,00	3	30,00%	1,00	10,00	10	40,00	90,00
Februari	8	34,78%	1,00	3	13,04%	0,52	14,35	23	40,00	94,35
Maret	11	31,43%	1,00	6	17,14%	0,69	16,86	35	40,00	96,86

12. Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan

Bulan	Target	Advokasi Lintas Sektor Program SAPA Sekolah	Sosialisasi Keamanan Pangan (Sesuai Batch)	Bimbingan Teknis Keamanan Pangan untuk Kader Keamanan Pangan	Monitoring dan Sertifikasi Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan	Pengawalan	Realisasi
Januari	0,00						0,00
Februari	0,00						0,00
Maret	0,00						0,00

13. Jumlah Desa Pangan Aman

Bulan	Target	Advokasi	Pelatihan kader	Bimtek komunitas	Monev	Pengawalan	Realisasi
Januari	0,00						0,00
Februari	0,00						0,00
Maret	0,00						0,00

14. Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas

Bulan	Target	Forum advokasi Komitmen Pemda dan Lintas Sektor Pasar	Bimtek dan Penyuluhan Komunitas Pasar	Sosialisasi Keamanan Pangan Kepada Komunitas Pasar	Pengawasan Keamanan Pangan dan Monitoring evaluasi	Pengawalan	Realisasi
Januari	0						0,00
Februari	0						0,00
Maret	0						0,00

15. Persentase UMKM memperoleh rekomendasi sertifikat CP OBA, Kos dan_atau IP-CPPOB

Bulan	Target	% UMKM Pangan Olahan	% UMKM OBA	% UMKM Kosmetik	Realisasi
Januari	5	0,00	0,00	0,00	
Februari	15	0,00	0,00	0,00	
Maret	24	10,00	0,00	0,00	10,00

18A. UMKM Pangan Olahan

Bulan	Target	KIE/Sosialisasi Keamanan Pangan	Penetapan UMK pangan olahan target	Bimtek CPPOB	Fasilitasi Pendampingan Penerapan CPPOB	Monev dan Pelaporan	Progress	Jumlah UMK Pangan Olahan yang memperoleh IP-CPPOB	Jumlah UMK Pangan Olahan yang didampingi pada Tahun Berjalan
Januari	0						0,00		
Februari	0						0,00		
Maret	30	0,00	10,00	0,00			10,00		

18B. UMKM OBA

Bulan	Target	Penetapan target UMKM obat tradisional	Bimbingan teknis UMKM Obat Bahan Alam oleh Fasilitator	Pendampingan UMKM Obat Bahan Alam oleh Fasilitator	Sertifikasi	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Progress	Jumlah rekomendasi Sertifikat CPOTB bertahap	Jumlah UMKM OBA yang didampingi pada Tahun Berjalan
Januari	5	0,00					0,00		
Februari	10	0,00					0,00		
Maret	20	0,00					0,00		

18C. UMKM KOS

Bulan	Target	Penetapan target UMKM Kosmetik	Bimbingan teknis UMKM Kosmetik oleh Fasilitator	Pendampingan UMKM Kosmetik oleh Fasilitator	Sertifikasi	Monev dan Pelaporan	Progress	Jumlah rekomendasi SPA CPKB	Jumlah UMKM Kosmetik yang didampingi pada tahun berjalan
Januari	5	0,00					0,00		
Februari	10	0,00					0,00		
Maret	20	0,00	0,00				0,00		

16. Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Bulan	Target Perkara Tahun Berjalan	Target Perkara Carry Over	Realisasi Perkara Tahun Berjalan (SPDP)	Realisasi Perkara Carry Over (SPDP)	Nilai Realisasi SPDP	Realisasi Perkara Tahun Berjalan (Tahap I)	Realisasi Perkara Carry Over (Tahap I)
Januari	2	0	0	0	0	0	0
Februari	2	0	0	0	0	0	0
Maret	2	0	0	0	0	0	0

Bulan	Nilai Realisasi Tahap I	Realisasi Perkara Tahun Berjalan (P21)	Realisasi Perkara Carry Over (P21)	Nilai Realisasi P21	Realisasi Perkara Tahun Berjalan (Tahap II)	Realisasi Perkara Carry Over (Tahap II)	Nilai Realisasi Tahap II	% Keberhasilan Perkara
Januari	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Februari	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Maret	0	0	0	0	0	0	0	0,00

Lampiran 2
Rencana Kinerja Tahun 2025 Balai POM di Pangkal Pinang

BADAN POM
BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PANGKALPINANG
Kompleks Perkantoran Pemprov. Kep. Bangka Belitung, Jl. Pulau Bangka, Air Itam, Pangkalpinang
Telp : (0717) 439278, Fax. (0717) 434874, ULPK : (0717) 434705
email : bpompp@gmail.com dan bpompp@yahoo.com

KEPUTUSAN

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PANGKALPINANG

NOMOR HK.02.02.8B.09.24.386 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KINERJA

BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PANGKALPINANG

TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PANGKALPINANG

Menimbang :

a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkalpinang pada Tahun 2025, perlu menetapkan Rencana Kinerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkalpinang Tahun 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkalpinang tentang Rencana Kinerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkalpinang Tahun 2025;

Mengingat :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Reoublik Indonesia Tahun 2023 Nomor 611);
8. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 311 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan	:	KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PANGKALPINANG TENTANG RENCANA KINERJA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PANGKALPINANG TAHUN 2025.
Kesatu	:	Menetapkan dan memberlakukan Rencana Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkalpinang Tahun 2025 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
Kedua	:	Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan bagi Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkalpinang dalam melakukan penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2025.
Ketiga	:	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 20 September 2024
KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT
DAN MAKANAN DI PANGKALPINANG

AGUS RIYANTO

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BALAI

PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PANGKALPINANG

NOMOR HK.02.02.8B.09.24.379 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KINERJA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PANGKALPINANG TAHUN 2024

RENCANA KINERJA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

DI PANGKALPINANG TAHUN 2025

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase Sediaan Farmasi yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
		Persentase sarana pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM	26
		Persentase pangan olahan dalam kemasan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
		Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100
		Persentase PIRT yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
2	Meningkatnya tindaklanjut rekomendasi hasil pengawasan oleh lintas sektor	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang disampaikan ke stakeholder tepat waktu	100
3	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
		Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
		Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
		Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	100
4	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	Persentase sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
5	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	69,4
6	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	91
		Jumlah sekolah pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	7
		Jumlah desa pangan aman	3
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1
7	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	80
8	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	78

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
9	Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif	Jumlah Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan oleh UPT	14
10	Layanan Publik UPT yang Prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	4,7
11	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	90,55
		Nilai AKIP UPT BPOM	82,36
		Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	90,87
		Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	3,2

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT
DAN MAKANAN DI PANGKALPINANG

AGUS RIYANTO

Lampiran 3

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Balai POM di Pangkal Pinang

BADAN POM

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI POM DI PANGKALPINANG
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: AGUS RIYANTO
Jabatan	: Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkal Pinang

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama	: TARUNA IKRAR
Jabatan	: Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Dalam penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pangkal Pinang, 12 Februari 2025

Pihak Pertama	Pihak Kedua
Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkal Pinang	Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI
AGUS RIYANTO	TARUNA IKRAR

Lampiran

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI POM DI PANGKALPINANG

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1.	01 - Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85
		02 - Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26
		03 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80
		04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100
		05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85
		06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	84
		07 - Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
		08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80
		09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	94.75
		10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
		11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	85.4
2.	03 - Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	73.7
3.	04 - Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	85.99
		02 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	7
		03 - Jumlah desa pangan aman	3
		04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1
4.	05 - Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	80
5.	06 - Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	90
6.	07 - Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90
7.	08 - Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT	4.7
8.	09 - Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	01 - Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	90.3
		02 - Nilai AKIP UPT BPOM	81.7

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
		03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5
		04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2.906

Alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 21,577,684,000 (Dua Puluh Satu Miliar Lima Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah)

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	DR.3165 - Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	14,450,617,000
2.	WA.6384 - Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	7,127,067,000

Pangkal Pinang, 12 Februari 2025

Pihak Pertama
Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkal Pinang

AGUS RIYANTO

Pihak Kedua
Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI

TARUNA IKRAR

Lampiran 4

Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Balai POM di Pangkal Pinang

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI POM DI PANGKALPINANG
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1.	01 - Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	351,455,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QIA.002 - Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	055 - Pengujian laboratorium sampel obat, obat bahan alam, kosmetika, suplemen kesehatan	A - Pengujian Laboratorium Sampel Obat, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik	188,060,000	188,060,000
2.	DR.3165.QIA.002 - Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	053 - Pengadaan sampel obat, obat bahan alam, kosmetika, suplemen kesehatan	A - Pengadaan Sampel	163,395,000	163,395,000

02 - Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO												26	44,500,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QDC.001 - Sarana Pelayanan Kesehatan (RS/PKM/Klinik) yang diberikan KIE Farmakovigilans	051 - Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan (RS/PKM/Klinik) yang diberikan KIE Farmakovigilans	A - Pertemuan Sosialisasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan (RS/PKM/KLINIK)	31,480,000	31,480,000
2.	DR.3165.QDC.001 - Sarana Pelayanan Kesehatan (RS/PKM/Klinik) yang diberikan KIE Farmakovigilans	051 - Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan (RS/PKM/Klinik) yang diberikan KIE Farmakovigilans	B - Monitoring dan Evaluasi Pelaporan Farmakovigilans	13,020,000	13,020,000

03 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	159,645,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengadaan sampel makanan	A - Pengadaan Sampel	55,197,000	55,197,000
2.	DR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengujian laboratorium sampel makanan	A - Pengujian Laboratorium Sampel Makanan	122,880,000	104,448,000

04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	8,601,600

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengujian laboratorium sampel makanan	A - Pengujian Laboratorium Sampel Makanan	122,880,000	8,601,600

05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	9,830,400

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengujian laboratorium sampel makanan	A - Pengujian Laboratorium Sampel Makanan	122,880,000	9,830,400

06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	85,071,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	V - PENINGKATAN KAPASITAS SDM / KEIKUTSERTAAN BALAI/ PERJALANAN KOORDINASI DAN PERJALANAN LAINNYA	85,071,000	85,071,000

07 - Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	29,815,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya	B - PEMERIKSAAN SARANA PRODUKSI PRODUK OMKA OLEH PETUGAS BALAI DI LUAR KOTA	21,770,000	21,770,000
2.	DR.3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya	A - PEMERIKSAAN SARANA PRODUKSI PRODUK OMKA OLEH PETUGAS BALAI DALAM KOTA	8,045,000	8,045,000

08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	12,300,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya	D - PERJALANAN KOORDINASI DI LUAR KOTA	8,220,000	8,220,000
2.	DR.3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya	C - PERJALANAN KOORDINASI DALAM KOTA	4,080,000	4,080,000

09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	94.75	94.75	94.75	94.75	94.75	94.75	94.75	94.75	94.75	94.75	94.75	94.75	361,229,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	A - PEMERIKSAAN SARANA DISTRIBUSI PRODUK OMKA OLEH PETUGAS BALAI DALAM KOTA	31,620,000	31,620,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
2.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	P - Bimbingan Teknis Fasilitator Pendampingan UMKM Obat Bahan Alam di Jakarta	8,310,000	8,310,000
3.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	O - Evaluasi Sampling Kosmetik di Surabaya	6,745,000	6,745,000
4.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	N - Forum Koordinasi dan Komunikasi Perkuatan Pengawasan dan Pelayanan Publik terkait Pemasukan Kosmetik dan Sertifikasi CPKB di Batam	13,498,000	13,498,000
5.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	M - Forum Komunikasi Inspektur Kosmetika di Medan	7,836,000	7,836,000
6.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	L - Forum Komunikasi Teknis Kedeputian II di Jakarta	6,939,000	6,939,000
7.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	K - Peningkatan Kompetensi Petugas Badan POM dan UPT Badan POM Dalam Pendampingan Monitoring Efek Samping OBA, OK dan SK serta Peningkatan Peran Tenaga Medis, Pelaku Usaha dan Masyarakat di Daerah	4,155,000	4,155,000
8.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	J - PENGUATAN AKSI DAN STRATEGI PENANGANAN PEMBERANTASAN OBAT BAHAN ALAM (OBA) MENGANDUNG BAHAN KIMIA OBAT (BKO) MELALUI PROGRAM KSATRIA NUSANTARA (Kolaborasi Jaga Citra Baik Jamu Nusantara)di Jakarta	8,310,000	8,310,000
9.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	I - Pelatihan Sampling OT dan SK di Jakarta	8,310,000	8,310,000
10.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	Q - Bimbingan Teknis Fasilitator Pendampingan UMKM Kosmetik di Jakarta	8,310,000	8,310,000
11.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	G - Pembentukan Inspektur Junior Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan di Jakarta	9,593,000	9,593,000
12.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	C - Rapat Koordinasi Pusat dan Balai dalam Manajemen Sampling(Kegiatan gabungan dengan Kedeputian I di Banjarmasin	6,801,000	6,801,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
	Makanan yang Diperiksa oleh UPT				
13.	OR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	E - Perkuatan Pengawasan Produk Tembakau untuk UPT BPOM di Balikpapan	8,444,000	8,444,000
14.	OR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	D - Perkuatan Strategi dan Pemantapan Teknis Pengawasan Mutu Obat Beredar di Padang	6,756,000	6,756,000
15.	OR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	B - Rapat Koordinasi Pusat dan Balai dalam Manajemen Sampling(Kegiatan gabungan dengan Kedeputian I dan III) di Jakarta	8,310,000	8,310,000
16.	OR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	A - Forum Komunikasi Pengawasan Sarana Distribusi dan Pelayanan ONPP di Bengkulu	6,274,000	6,274,000
17.	OR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	S - Forum Komunikasi Fasilitator UMKM Kosmetik di Jakarta	4,155,000	4,155,000
18.	OR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	R - Forum Komunikasi Fasilitator UMKM Obat Bahan Alam di Jakarta	8,310,000	8,310,000
19.	OR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	B - PEMERIKSAAN SARANA DISTRIBUSI PRODUK OMKA OLEH PETUGAS BALAI DI LUAR KOTA	198,553,000	198,553,000

10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	200,618,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	OR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	T - Workshop registrasi pangan olahan untuk fasilitator di Serang	9,646,000	9,646,000
2.	OR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	U - Workshop Fasilitasi Standardisasi Keamanan, Mutu dan Manfaat Produk Inovasi Pangan Olahan di Padang	13,512,000	13,512,000
3.	OR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	E - FOOD SECURITY	95,490,000	95,490,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
4.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	D - OPERASIONAL LABORATORIUM KELILING DALAM RANGKA PEMERIKSAAN JAJANAN BUKA PUASA	81,970,000	81,970,000

11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	85.4	85.4	85.4	85.4	85.4	85.4	85.4	85.4	85.4	85.4	85.4	85.4	15,611,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	C - PENGAWASAN LABEL, PENANDAAN DAN IKLAN PRODUK OMKA, ROKOK DAN NAPZA	4,700,000	4,700,000
2.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	F - Perkuatan Pengawasan Iklan dan Penandaan Obat Sesudah Beredar (back to back dengan kegiatan Perkuatan Strategi dan Pemantapan Teknis Pengawasan Mutu Obat Beredar di Padang	6,756,000	6,756,000
3.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	H - Peningkatan Kompetensi Petugas UPT Badan POM dalam Kesesuaian Evaluasi Hasil Pengawasan Iklan dan Penandaan OT di Jakarta	4,155,000	4,155,000

2.	03 - Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium			72.9	72.9	72.9	73.1	73.1	73.1	73.2	73.2	73.2	73.7	10,519,163,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.RAB.001 - Alat laboratorium untuk pengujian obat dan makanan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	051 - Pemenuhan/peremajaan alat laboratorium	A - Pengadaan Alat Laboratorium	8,706,800,000	8,706,800,000
2.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	051 - Peningkatan Kompetensi Penguji Laboratorium	A - PENGEMBANGAN KEMAMPUAN LABORATORIUM BB/BALAI POM	29,805,000	29,805,000
3.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	051 - Peningkatan Kompetensi Penguji Laboratorium	B - BIMTEK INTERNAL DENGAN INSTRUKTUR PPPOMN	35,211,000	35,211,000
4.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	051 - Peningkatan Kompetensi Penguji Laboratorium	C - PELATIHAN VERIFIKASI ALAT LABORATORIUM BALAI BESAR/ BALAI/ LOKA	9,935,000	9,935,000
5.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	051 - Peningkatan Kompetensi Penguji Laboratorium	D - Pelatihan Teknis Jejaring Laboratorium Pengujian Pangan Deteksi DNA Spesifik Spesies dan GMO	9,935,000	9,935,000
6.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan	051 - Peningkatan Kompetensi Penguji Laboratorium	E - Bimtek Eksternal / Magang Staf Penguji	69,545,000	69,545,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
	Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium				
7.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	051 - Peningkatan Kompetensi Penguji Laboratorium	F - BIMTEK INTERNAL SISTEM MANAJEMEN MUTU	17,892,000	17,892,000
8.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	052 - Pengadaan alat dan bahan penunjang pengujian	A - PENGADAAN PENUNJANG LABORATORIUM	387,805,000	387,805,000
9.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	052 - Pengadaan alat dan bahan penunjang pengujian	D - PENGUJIAN SAMPEL PIHAK KETIGA	100,000,000	100,000,000
10.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	052 - Pengadaan alat dan bahan penunjang pengujian	B - PENGADAAN SUKU CADANG DAN KOLOM	359,080,000	359,080,000
11.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	052 - Pengadaan alat dan bahan penunjang pengujian	C - Pengadaan Baku pembanding	100,000,000	100,000,000
12.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	054 - Peningkatan ruang lingkup pengujian	A - KALIBRASI ALAT LABORATORIUM OLEH PETUGAS PPPOMN	2,280,000	2,280,000
13.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	054 - Peningkatan ruang lingkup pengujian	B - KALIBRASI EKSTERNAL PERALATAN LABORATORIUM	218,000,000	218,000,000
14.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	054 - Peningkatan ruang lingkup pengujian	C - PEMBELIAN SAMPEL RUANG LINGKUP	3,000,000	3,000,000
15.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	054 - Peningkatan ruang lingkup pengujian	D - Uji Profisiensi Eksternal	6,000,000	6,000,000
16.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	054 - Peningkatan ruang lingkup pengujian	E - PENGADAAN KEBUTUHAN UJI KOLABORASI DAN PROFISIENSI	225,195,000	225,195,000
17.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	054 - Peningkatan ruang lingkup pengujian	F - Perbaikan Alat Laboratorium	150,000,000	150,000,000
18.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	054 - Peningkatan ruang lingkup pengujian	G - BIAYA KEANGGOTAAN KAN	1,500,000	1,500,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
19.	OR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	056 - Pemantauan/evaluasi/koordinasi untuk pengelolaan dan peningkatan kinerja laboratorium	A - WORKSHOP REGIONALISASI LABORATORIUM	87,180,000	87,180,000

3.	04 - Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT			85.99	85.99	85.99	85.99	85.99	85.99	85.99	85.99	85.99	85.99	227,401,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	OR.3165.BDC.001 - Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	051 - Komunikasi, Informasi dan Edukasi oleh UPT	C - Workshop Informasi dan Komunikasi 2025	3,740,000	3,740,000
2.	OR.3165.BDC.001 - Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	051 - Komunikasi, Informasi dan Edukasi oleh UPT	D - Workshop Peningkatan Pelayanan Publik	3,730,000	3,730,000
3.	OR.3165.BDC.001 - Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	051 - Komunikasi, Informasi dan Edukasi oleh UPT	E - Workshop Komunikasi, Informasi, Edukasi dan Pengaduan Masyarakat	3,730,000	3,730,000
4.	OR.3165.BMB.001 - Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT	051 - Pelaksanaan publikasi Obat dan Makanan ke masyarakat	A - TALKSHOW, KIE DI MEDIA CETAK DAN ELEKTRONIK	84,781,000	84,781,000
5.	OR.3165.BMB.001 - Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT	051 - Pelaksanaan publikasi Obat dan Makanan ke masyarakat	B - PERJALANAN KIE;PERJALANAN LAINNYA	14,820,000	14,820,000
6.	OR.3165.BDC.001 - Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	051 - Komunikasi, Informasi dan Edukasi oleh UPT	A - KIE Obat dan Makanan Aman	94,925,000	94,925,000
7.	OR.3165.BDC.001 - Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	051 - Komunikasi, Informasi dan Edukasi oleh UPT	B - Forum Konsultasi Publik	21,675,000	21,675,000

02 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan				20	40	60	60	60	60	75	95	7	335,485,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	OR.3165.QDB.001 - Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	052 - Intervensi keamanan PJAS	A - SOSIALISASI KEAMANAN PANGAN	96,860,000	96,860,000
2.	OR.3165.QDB.001 - Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	051 - Koordinasi lintas sektor	A - PERJALANAN KOORDINASI	9,540,000	9,540,000
3.	OR.3165.QDB.001 - Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	052 - Intervensi keamanan PJAS	B - BIMBINGAN TEKNIS KEAMANAN PANGAN UNTUK KADER KEAMANAN PANGAN SEKOLAH	38,050,000	38,050,000
4.	OR.3165.QDB.001 - Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	052 - Intervensi keamanan PJAS	C - PEMBERIAN PAKET EDUKASI KEAMANAN PANGAN	40,500,000	40,500,000
5.	OR.3165.QDB.001 - Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	052 - Intervensi keamanan PJAS	D - MONITORING PEMBERDAYAAN KADER KEAMANAN PANGAN SEKOLAH	46,220,000	46,220,000
6.	OR.3165.QDB.001 - Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	052 - Intervensi keamanan PJAS	E - SERTIFIKASI SEKOLAH PJAS AMAN	18,920,000	18,920,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
7.	DR.3165.QDB.001 - Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	052 - Intervensi keamanan PJAS	F - PENGAWALAN SEKOLAH	44,645,000	44,645,000
8.	DR.3165.QDB.001 - Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	052 - Intervensi keamanan PJAS	G - OPERASIONAL MOBIL KELILING PJAS	40,750,000	40,750,000

03 - Jumlah desa pangan aman				25	25	45	45	65	65	75	85	3	422,682,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QDB.002 - Desa Pangan Aman	052 - Pemberdayaan komunitas desa	B - FASILITASI PENERAPAN KEAMANAN PANGAN OLEH KADER KEAMANAN PANGAN DESA	18,000,000	18,000,000
2.	DR.3165.QDB.002 - Desa Pangan Aman	051 - Perkuatan kapasitas desa	C - PENGAMBILAN DATA POST INTERVENSI	23,745,000	23,745,000
3.	DR.3165.QDB.002 - Desa Pangan Aman	051 - Perkuatan kapasitas desa	D - PERJALANAN KEGIATAN DESA PANGAN AMAN	34,080,000	34,080,000
4.	DR.3165.QDB.002 - Desa Pangan Aman	052 - Pemberdayaan komunitas desa	A - BIMTEK KOMUNITAS DESA	87,050,000	87,050,000
5.	DR.3165.QDB.002 - Desa Pangan Aman	052 - Pemberdayaan komunitas desa	C - PERJALANAN KEGIATAN DESA PANGAN AMAN	34,080,000	34,080,000
6.	DR.3165.QDB.002 - Desa Pangan Aman	053 - Pengawasan keamanan pangan desa	A - LABORATORIUM KELILING	38,300,000	38,300,000
7.	DR.3165.QDB.002 - Desa Pangan Aman	054 - Pemantauan dan evaluasi terhadap intervensi desa sebelumnya	B - PENGAWALAN	28,400,000	28,400,000
8.	DR.3165.QDB.002 - Desa Pangan Aman	054 - Pemantauan dan evaluasi terhadap intervensi desa sebelumnya	A - MONITORING EVALUASI PROGRAM DESA PANGAN AMAN	30,100,000	30,100,000
9.	DR.3165.QDB.002 - Desa Pangan Aman	051 - Perkuatan kapasitas desa	A - ADVOKASI PROGRAM TERPADU KEAMANAN PANGAN	42,750,000	42,750,000
10.	DR.3165.QDB.002 - Desa Pangan Aman	051 - Perkuatan kapasitas desa	B - PELATIHAN KADER KEAMANAN PANGAN DESA	86,177,000	86,177,000

04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas				20	60	60	60	90	90	100	100	1	142,414,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QDB.003 - Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	053 - Sosialisasi/penyuluhan/pelatihan/bimbingan teknis keamanan pangan dari bahan berbahaya	A - PENYULUHAN KEPADA KOMUNITAS PASAR	27,475,000	27,475,000
2.	DR.3165.QDB.003 - Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	054 - Pemantauan dan evaluasi	A - Sampling dan Pengujian Sampel di Pasar	39,240,000	39,240,000
3.	DR.3165.QDB.003 - Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	053 - Sosialisasi/penyuluhan/pelatihan/bimbingan teknis keamanan pangan dari bahan berbahaya	C - BIMBINGAN TEKNIS PETUGAS PENGAWAS PASAR	31,675,000	31,675,000
4.	DR.3165.QDB.003 - Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	052 - Pengadaan peralatan pendukung	A - Pembelian test kit	28,200,000	28,200,000
5.	DR.3165.QDB.003 - Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	053 - Sosialisasi/penyuluhan/pelatihan/bimbingan teknis keamanan pangan dari bahan berbahaya	B - KAMPANYE PASAR AMAN DARI BB	10,509,000	10,509,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
6.	OR.3165.QDB.003 - Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	051 - Perkuatan lintas sektor	A - SURVEY PASAR	5,315,000	5,315,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	ANGGARAN
4.	05 - Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan			5	10	20	25	30	40	50	60	70	80	28,433,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	OR.3165.QDG.001 - UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	051 - Advokasi dan Pendampingan UMKM	A - PERTEMUAN KOORDINASI FASILITAS UMKM	11,453,000	11,453,000
2.	OR.3165.QDG.001 - UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	051 - Advokasi dan Pendampingan UMKM	B - PENDAMPINGAN UMKM	16,980,000	16,980,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	ANGGARAN
5.	06 - Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT				7.5	27.5	50	50	50	57.5	77.5	90	90	241,644,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	OR.3165.QCD.U66 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BPOM PANGKAL PINANG	051 - Operasi Intelijen	A - Perencanaan Operasi Intelijen Bidang Obat dan Makanan	1,260,000	1,260,000
2.	OR.3165.QCD.U66 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BPOM PANGKAL PINANG	051 - Operasi Intelijen	B - Pelaksanaan Operasi Intelijen Bidang Obat dan Makanan	46,158,000	46,158,000
3.	OR.3165.QCD.U66 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BPOM PANGKAL PINANG	051 - Operasi Intelijen	C - Evaluasi Operasi Intelijen Bidang Obat dan Makanan	1,008,000	1,008,000
4.	OR.3165.QCD.U66 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BPOM PANGKAL PINANG	052 - Gelar Kasus dan Pelaporan	A - Gelar Kasus dan Pelaporan	756,000	756,000
5.	OR.3165.QCD.U66 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BPOM PANGKAL PINANG	053 - Rapat Pembahasan Rencana Penyidikan, Skenario Penindakan dan Olah TKP	A - Rapat Pembahasan Rencana Penyidikan, Skenario Penindakan, dan Olah TKP	1,008,000	1,008,000
6.	OR.3165.QCD.U66 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BPOM PANGKAL PINANG	054 - Operasi Penindakan	A - Operasi Penindakan	48,450,000	48,450,000
7.	OR.3165.QCD.U66 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BPOM PANGKAL PINANG	054 - Operasi Penindakan	B - Penangkapan dan Penahanan	12,750,000	12,750,000
8.	OR.3165.QCD.U66 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BPOM PANGKAL PINANG	055 - Pemberkasan	A - Pemberkasan	56,844,000	56,844,000
9.	OR.3165.QCD.U66 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BPOM PANGKAL PINANG	055 - Pemberkasan	B - Konsultasi Penyelesaian Berkas Perkara	7,008,000	7,008,000
10.	OR.3165.QCD.U66 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BPOM PANGKAL PINANG	055 - Pemberkasan	C - Gelar Perkara	1,864,000	1,864,000
11.	OR.3165.QCD.U66 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BPOM PANGKAL PINANG	055 - Pemberkasan	D - Bantuan Hukum/ Penasehat Hukum	4,000,000	4,000,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
12.	DR.3165.QCD.U66 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BPOM PANGKAL PINANG	055 - Pemberkasan	E - Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti	16,090,000	16,090,000
13.	DR.3165.QCD.U66 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BPOM PANGKAL PINANG	056 - Pengawasan, Pengamatan, Penelitian dan Pemeriksaan (wasmatlitrik)	A - Perencanaan dan Evaluasi Wasmatlitrik	2,016,000	2,016,000
14.	DR.3165.QCD.U66 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BPOM PANGKAL PINANG	056 - Pengawasan, Pengamatan, Penelitian dan Pemeriksaan (wasmatlitrik)	B - Pelaksanaan Wasmatlitrik	42,432,000	42,432,000

6.	07 - Terlaksanansya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	90	99,292,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.AEA.001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	052 - Penyusunan Analisis Data Kerawanan Kejahatan Aktual Obat dan Makanan	B - Pengumpulan Bahan Keterangan/ Koordinasi/ Konsultasi dalam rangka Penyusunan Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan	21,480,000	21,480,000
2.	DR.3165.AEA.001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	054 - Koordinasi Lintas Sektor Kinerja Penindakan Obat dan Makanan	A - Forum Komunikasi Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan	6,640,000	6,640,000
3.	DR.3165.AEA.001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	054 - Koordinasi Lintas Sektor Kinerja Penindakan Obat dan Makanan	B - Forum Koordinasi Intelijen	8,560,000	8,560,000
4.	DR.3165.AEA.001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	054 - Koordinasi Lintas Sektor Kinerja Penindakan Obat dan Makanan	C - Pertemuan Peningkatan Kinerja, Profesionalisme, dan Koordinasi PPNS Badan POM	5,370,000	5,370,000
5.	DR.3165.AEA.001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	054 - Koordinasi Lintas Sektor Kinerja Penindakan Obat dan Makanan	D - Pelatihan PPNS	5,110,000	5,110,000
6.	DR.3165.AEA.001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	052 - Penyusunan Analisis Data Kerawanan Kejahatan Aktual Obat dan Makanan	A - Verifikasi Data Patroli Siber dan Profiling Kejahatan Obat dan Makanan dalam rangka Penyusunan Laporan Patroli Siber	30,800,000	30,800,000
7.	DR.3165.AEA.001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	054 - Koordinasi Lintas Sektor Kinerja Penindakan Obat dan Makanan	E - Bimtek/Pelatihan/Forum/ Coaching Clinic Kegiatan Penindakan Obat dan Makanan	21,332,000	21,332,000

7.	08 - Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT												4.7	108,459,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.BAH.001 - Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	051 - Pemeriksaan dalam rangka sertifikasi	A - AUDIT SERTIFIKASI DI DALAM KOTA	10,960,000	10,960,000
2.	DR.3165.BAH.001 - Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	051 - Pemeriksaan dalam rangka sertifikasi	B - AUDIT SERTIFIKASI DI LUAR KOTA	45,750,000	45,750,000
3.	DR.3165.BAH.001 - Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	051 - Pemeriksaan dalam rangka sertifikasi	C - BIMBINGAN TEKNIS REGISTRASI PANGAN OLAHAN	51,749,000	51,749,000

8.	09 - Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit	01 - Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM (Balai Besar/Balai POM)												90.3	7,371,807,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
	Organisasi yang optimal														

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	WA.6364.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	E - LANGGANAN DAYA DAN JASA	624,407,000	624,407,000
2.	WA.6364.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	D - PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	190,000,000	190,000,000
3.	WA.6364.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	C - PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	263,200,000	263,200,000
4.	WA.6364.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	B - PEMELIHARAAN PERALATAN KANTOR	84,410,000	84,410,000
5.	WA.6364.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	A - PEMELIHARAAN GEDUNG KANTOR	176,271,000	176,271,000
6.	WA.6364.EBA.994 - Layanan Perkantoran	001 - Gaji dan Tunjangan	A - Pembayaran Gaji dan Tunjangan Balai	3,781,175,000	3,781,175,000
7.	WA.6364.EBA.956 - Layanan BMN	054 - Penatausahaan BMN	A - PENGELOLAAN LIMBAH B3	8,000,000	8,000,000
8.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	A - SURVEILAN QMS ISO 9001:2015 BPOM	3,800,000	3,800,000
9.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	C - AUDIT INTERNAL SISTEM MANAJEMEN MUTU	22,800,000	22,800,000
10.	WA.6364.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	T - PERJALANAN KOORDINASI/KONSULTASI PIMPINAN	98,610,000	98,610,000
11.	WA.6364.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	S - JASA PERLENGKAPAN KANTOR	21,500,000	21,500,000
12.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	F - SOSIALISASI/BIMTEK PENGELOLAAN KETATA USAHAAN	4,470,000	4,470,000
13.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	G - PELATIHAN FUNGSIONAL NON PFM	5,460,000	5,460,000
14.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	H - PEMBINAAN BALAI POM OLEH KA. BADAN ATAU ESELON I	4,100,000	4,100,000
15.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	I - Bimtek Awareness QMS ISO 9001:2015 BPOM	6,120,000	6,120,000
16.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	J - Sosialisasi Peraturan Bagi Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar	3,530,000	3,530,000
17.	WA.6364.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	R - PENGADAAN MAKANAN/MINUMAN PENAMBAH DAYA TAHAN TUBUH	129,600,000	129,600,000
18.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	L - Sosialisasi Peraturan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak	3,530,000	3,530,000
19.	WA.6364.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Q - PEMERIKSAAN KESEHATAN RESIKO PEKERJAAN	162,500,000	162,500,000
20.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	O - Bimtek Implementasi Sistem Manajemen Terintegrasi	5,060,000	5,060,000
21.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	P - Bimbingan Teknis Refreshment Iso 19011:2018 Pedoman Audit	4,030,000	4,030,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
22.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	Q - Pelatihan Teknis dan Fungsional PFM	4,030,000	4,030,000
23.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	R - Peningkatan Kompetensi Pimpinan Perubahan dan Agen Perubahan Tahun 2025	4,030,000	4,030,000
24.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi	B - KOORDINASI LINTAS SEKTOR	11,480,000	11,480,000
25.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	P - PENINGKATAN KESEHATAN JASMANI DAN ROHANI	16,400,000	16,400,000
26.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	O - SEWA RUMAH DINAS PIMPINAN	69,000,000	69,000,000
27.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi	F - Rapat Koordinasi Nasional SDM	11,440,000	11,440,000
28.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi	G - Workshop Penyelenggaraan Kearsipan (Digitalisasi Arsip)	4,120,000	4,120,000
29.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi	H - Bimbingan Teknik UKPBJ Badan POM TA 2025	5,320,000	5,320,000
30.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi	I - Lokakarya Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan	6,080,000	6,080,000
31.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi	J - Akselerasi Peningkatan Belanja PDN	5,060,000	5,060,000
32.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi	K - Bimtek Pengelolaan BMN	4,030,000	4,030,000
33.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi	L - Pemutakhiran data semester 1 2025	4,030,000	4,030,000
34.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi	M - Pemutakhiran data tahunan 2024	4,030,000	4,030,000
35.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi	N - Workshop Analisis Kebutuhan dan Perencanaan Pengembangan Kompetensi Tahun 2026	4,030,000	4,030,000
36.	DR.3165.CAN.001 - Perangkat pengolah data dan komunikasi	051 - Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	A - PENGADAAN ALAT PENGOLAH DATA	80,000,000	80,000,000
37.	DR.3165.CAB.001 - Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	053 - Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	A - PENGADAAN PERALATAN FASILITAS PERKANTORAN	50,000,000	50,000,000
38.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	N - PENGADAAN JASA TENAGA OUTSOURCING	1,044,000,000	1,044,000,000
39.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	M - OPERASIONAL PELAPORAN	99,288,000	99,288,000
40.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	L - Honor Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	16,320,000	16,320,000
41.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	K - PENGELOLAAN BMN	4,320,000	4,320,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
42.	WA.6364.EBA.994 - Layanan Perkantoran	003 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	I - PENGADAAN PAKAIAN DINAS	99,400,000	99,400,000
43.	WA.6364.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	H - ADMINISTRASI KEGIATAN	112,920,000	112,920,000
44.	WA.6364.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	G - PERBAIKAN PERALATAN FUNGSIONAL	101,906,000	101,906,000
45.	WA.6364.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	F - PERAWATAN SARANA GEDUNG	6,000,000	6,000,000

02 - Nilai AKIP UPT BPOM (Satker)														81.7	22,300,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	B - Bimtek SAKIP dan Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2024	3,670,000	3,670,000
2.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	N - Bimbingan Teknis Penyusunan Renstra Unit Organisasi/Satker di Lingkungan BPOM Tahun 2025-2029	4,030,000	4,030,000
3.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi	A - RAPAT EVALUASI NASIONAL BPOM TAHUN 2025	7,960,000	7,960,000
4.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi	C - RAPAT KERJA NASIONAL BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2023	6,540,000	6,540,000

03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM (Satker)														5	366,994,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	WA.6364.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	J - PENGELOLAAN SISTEM AKUNTANSI INSTANSI	15,840,000	15,840,000
2.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	D - PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BADAN POM	18,920,000	18,920,000
3.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	K - Sosialisasi dan Bimtek Penyusunan RKA-K/L	8,060,000	8,060,000
4.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	M - Forum Koordinasi Analis Anggaran BPOM	5,910,000	5,910,000
5.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi	E - Asistensi Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan, Laporan Keuangan, dan Laporan DAK NF POM UPT	8,280,000	8,280,000
6.	DR.3165.CBV.001 - Prasarana Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia	051 - Pembangunan/renovasi gedung dan bangunan	A - Penambah Nilai Gedung	619,968,000	309,984,000

04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM														2.906	413,034,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	E - PENINGKATAN KOMPETENSI PETUGAS	35,070,000	35,070,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
2.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi	D - PERJALANAN KOORDINASI PIMPINAN	67,980,000	67,980,000
3.	DR.3165.CBV.001 - Prasarana Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia	051 - Pembangunan/renovasi gedung dan bangunan	A - Penambah Nilai Gedung	619,968,000	309,984,000

Total	21,577,684,000

Pangkal Pinang, 12 February 2025

Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkal Pinang

AGUS RIYANTO

Lampiran 5
SK Indikator Kinerja Utama Tahun 2025-2029 Revisi
Balai POM di Pangkal Pinang

BADAN POM
BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PANGKAL PINANG
Kompleks Perkantoran Pemprov. Kep. Bangka Belitung, Jl. Pulau Bangka, Air Itam, Pangkal Pinang
Telp : (0717) 439278, 434874 ; ULPK : (0717) 434705
email : bpom_pangkalpinang@pom.go.id dan bpompp@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI PANGKAL PINANG
NOMOR HK.02.02.8B.02.25.51 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PANGKAL PINANG TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PANGKAL PINANG,

Menimbang :

a. bahwa untuk mengukur keberhasilan peningkatan kinerja dan akuntabilitas kinerja di lingkungan Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkal Pinang, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkal Pinang;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkal Pinang tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkal Pinang Tahun 2025-2029;

Mengingat :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
2. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/ M.PAN/5/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2021 Tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1570);
9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 930);
10. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 611) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 39);
11. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 83 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PANGKAL PINANG TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PANGKAL PINANG TAHUN 2025-2029.

Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Indikator Kinerja Utama Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkal Pinang Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut Indikator Kinerja Utama Balai POM di Pangkal Pinang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Kedua : Indikator Kinerja Utama Balai POM di Pangkal Pinang sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan untuk menyusun rencana kinerja tahunan, rencana kinerja dan anggaran, perjanjian kinerja, laporan kinerja, serta melakukan evaluasi kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Balai Pengawas Obat dan Makanan di

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Pangkal Pinang.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkal Pinang
pada tanggal 5 Februari 2025

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI PANGKAL PINANG,



AGUS RIYANTO

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT
DAN MAKANAN DI PANGKAL PINANG
NOMOR HK.02.02.8B.02.25.51 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI PANGKAL PINANG TAHUN 2025-2029

INDIKATOR KINERJA UTAMA
BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PANGKAL PINANG
TAHUN 2025-2029

SK 1	**Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BPOM di Pangkal Pinang**
1.1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
1.2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO
1.3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
1.4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh BPOM di Pangkal Pinang
1.5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
1.6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder
1.7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
1.8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
1.9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
1.10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
1.11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan
SK 3	**Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BPOM di Pangkal Pinang**
3.1	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan BPOM di Pangkal Pinang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium
SK 4	**Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja BPOM di Pangkal Pinang**
4.1	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BPOM di Pangkal Pinang
4.2	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

4.3	Jumlah desa pangan aman
4.4	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas
SK 5	**Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu**
5.1	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan
SK 6	**Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja BPOM di Pangkal Pinang**
6.1	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di BPOM di Pangkal Pinang
SK 7	**Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja BPOM di Pangkal Pinang**
7.1	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar
SK 8	**Layanan Publik BPOM di Pangkal Pinang yang prima**
8.1	Indeks Pelayanan Publik BPOM di Pangkal Pinang
SK 9	**Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal**
9.1	Nilai Pembangunan ZI BPOM di Pangkal Pinang
9.2	Nilai AKIP BPOM di Pangkal Pinang
9.3	Nilai Kinerja Anggaran BPOM di Pangkal Pinang
9.4	Indeks Manajemen Risiko BPOM di Pangkal Pinang

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI PANGKAL PINANG,

AGUS RIYANTO

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Lampiran 6

Realisasi IKU Balai POM di Pangkal Pinang Triwulan I Tahun 2025

No.	Nama Indikator	Target Tahun 2025	Bulan	RAPK			Capaian terhadap target tahunan	Anggaran		
				Target	Realisasi sd	Capaian (%)		Pagu 2025	Realisasi sd (SPAN)	Capaian (%)
1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	Jan	-	-	-	-	Rp 351.455.000	Rp 820.000	0,23%
			Feb	85	99,40	116,94%	116,94%	Rp 351.455.000	Rp 22.609.468	6,43%
			Maret	85	94,31	110,95%	110,95%	Rp 351.455.000	Rp 26.281.768	7,48%
2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26	Jan	-	-	-	-	Rp 44.500.000	Rp -	0,00%
			Feb	-	-	-	-	Rp 44.500.000	Rp -	0,00%
			Maret	-	-	-	-	Rp 44.500.000	Rp -	0,00%
3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	Jan	80	85,00	106,25%	106,25%	Rp 159.645.000	Rp -	0,00%
			Feb	80	89,00	111,25%	111,25%	Rp 159.645.000	Rp 5.133.445	3,22%
			Maret	80	98,33	122,92%	122,92%	Rp 159.645.000	Rp 5.495.445	3,44%
4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	Jan	100	0,00	0,00%	0,00%	Rp 8.601.600	Rp -	0,00%
			Feb	100	0,00	0,00%	0,00%	Rp 8.601.600	Rp -	0,00%
			Maret	100	0,00	0,00%	0,00%	Rp 8.601.600	Rp -	0,00%
5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	Jan	-	-	-	-	Rp 9.830.400	Rp -	0,00%
			Feb	85	96,00	112,94%	112,94%	Rp 9.830.400	Rp -	0,00%
			Maret	85	96,00	112,94%	112,94%	Rp 9.830.400	Rp -	0,00%
6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	84	Jan	84	-	-	-	Rp 85.071.000	Rp -	0,00%
			Feb	84	-	-	-	Rp 85.071.000	Rp -	0,00%
			Maret	84	86,67	103,17%	103,17%	Rp 85.071.000	Rp -	0,00%
7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa	100	Jan	100	-	-	-	Rp 29.815.000	Rp -	0,00%
			Feb	100	-	-	-	Rp 29.815.000	Rp -	0,00%

No.	Nama Indikator	Target Tahun 2025	Bulan	RAPK			Capaian terhadap target tahunan	Anggaran		
				Target	Realisasi sd	Capaian (%)		Pagu 2025	Realisasi sd (SPAN)	Capaian (%)
	dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan		Maret	100	-	-	-	Rp 29.815.000	Rp -	0,00%
8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	Jan	80	-	-	-	Rp 12.300.000	Rp -	0,00%
			Feb	80	-	-	-	Rp 12.300.000	Rp -	0,00%
			Maret	80	100,00	125,00%	125,00%	Rp 12.300.000	Rp -	0,00%
9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	94,75	Jan	94,75	-	-	-	Rp 361.229.000	Rp -	0,00%
			Feb	94,75	100,00	105,54%	105,54%	Rp 361.229.000	Rp 5.450.000	1,51%
			Maret	94,75	100,00	105,54%	105,54%	Rp 361.229.000	Rp 10.000.000	2,77%
10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	Jan	80	-	-	-	Rp 200.618.000	Rp -	0,00%
			Feb	80	100,00	125,00%	125,00%	Rp 200.618.000	Rp -	0,00%
			Maret	80	100,00	125,00%	125,00%	Rp 200.618.000	Rp -	0,00%
11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	85,40	Jan	85,4	96,04	112,46%	112,46%	Rp 15.611.000	Rp -	0,00%
			Feb	85,4	96,96	113,54%	113,54%	Rp 15.611.000	Rp 808.250	5,18%
			Maret	85,4	100,69	117,90%	117,90%	Rp 15.611.000	Rp 808.250	5,18%
12	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	73,7	Jan	-	-	-	-	Rp 10.519.163.000	Rp -	0,00%
			Feb	-	-	-	-	Rp 10.519.163.000	Rp 51.263.839	0,49%
			Maret	72,9	74,90	102,74%	101,63%	Rp 10.519.163.000	Rp 60.438.839	0,57%
13	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	85,99	Jan	-	-	-	-	Rp 227.401.000	Rp -	0,00%
			Feb	-	-	-	-	Rp 227.401.000	Rp 7.323.000	3,22%
			Maret	85,99	86,42	100,50%	100,50%	Rp 227.401.000	12.993.000	5,71%
14	Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	7	Jan	-	-	-	-	Rp 335.485.000	Rp -	0,00%
			Feb	-	-	-	-	Rp 335.485.000	484.000	0,14%
			Maret	-	-	-	-	Rp 335.485.000	484.000	0,14%
15	Jumlah desa pangan	3	Jan	-	-	-	-	Rp 422.682.000	Rp -	0,00%

No.	Nama Indikator	Target Tahun 2025	Bulan	RAPK			Capaian terhadap target tahunan	Anggaran		
				Target	Realisasi sd	Capaian (%)		Pagu 2025	Realisasi sd (SPAN)	Capaian (%)
	aman		Feb	-	-	-	-	Rp 422.682.000	0	0,00%
			Maret	-	-	-	-	Rp 422.682.000	3.770.000	0,89%
16	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1	Jan	-	-	-	-	Rp 142.414.000	Rp -	0,00%
			Feb	-	-	-	-	Rp 142.414.000	150.000	0,11%
			Maret	-	-	-	-	Rp 142.414.000	150.000	0,11%
17	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	80	Jan	-	-	-	-	Rp 28.433.000	Rp -	0,00%
			Feb	-	-	-	-	Rp 28.433.000	Rp -	0,00%
			Maret	5,00	10,00	200,00%	12,50%	Rp 28.433.000	0	0,00%
18	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	90	Jan	-	-	-	-	Rp 241.644.000	3.280.000	1,36%
			Feb	-	-	-	-	Rp 241.644.000	6.570.500	2,72%
			Maret	-	-	-	-	Rp 241.644.000	Rp 13.213.000	5,47%
19	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90	Jan	50	50	100,00%	55,56%	Rp 99.292.000	Rp -	0,00%
			Feb	50	50	100,00%	55,56%	Rp 99.292.000	724.000	0,73%
			Maret	50	50,00	100,00%	55,56%	Rp 99.292.000	724.000	0,73%
20	Indeks Pelayanan Publik UPT	4,7	Jan	-	-	-	-	Rp 108.459.000	1.020.000	0,94%
			Feb	-	-	-	-	Rp 108.459.000	Rp 1.020.000	0,94%
			Maret	-	-	-	-	Rp 108.459.000	1.020.000	0,94%
21	Nilai Pembangunan ZI UPT	90,3	Jan	-	-	-	-	Rp 7.371.807.000	334.804.817	4,54%
			Feb	-	-	-	-	Rp 7.371.807.000	777.523.866	10,55%
			Maret	-	-	-	-	Rp 7.371.807.000	1.414.501.921	19,19%
22	Nilai AKIP UPT	81,7	Jan	-	-	-	-	Rp 22.200.000	Rp -	0,00%

No.	Nama Indikator	Target Tahun 2025	Bulan	RAPK			Capaian terhadap target tahunan	Anggaran		
				Target	Realisasi sd	Capaian (%)		Pagu 2025	Realisasi sd (SPAN)	Capaian (%)
			Feb	-	-	-	-	Rp 22.200.000	Rp -	0,00%
			Maret	-	-	-	-	Rp 22.200.000	-	0,00%
23	Nilai Kinerja Anggaran UPT	5	Jan	-	-	-	-	Rp 366.994.000	Rp -	0,00%
			Feb	-	-	-	-	Rp 366.994.000	Rp 950.000	0,26%
			Maret	-	-	-	-	Rp 366.994.000	9.714.400	2,65%
24	Indeks Manajemen Risiko UPT	2,906	Jan	-	-	-	-	Rp 413.034.000	Rp 9.273.656	2,25%
			Feb	-	-	-	-	Rp 413.034.000	9.273.656	2,25%
			Maret	-	-	-	-	Rp 413.034.000	17.088.056	4,14%

Lampiran 7

Matriks Tingkat Efisiensi Kinerja Per Output Balai POM di Pangkal Pinang Triwulan I Tahun 2025

No	Kegiatan	Output			Input			IE	TE	Capaian TE	Keterangan
		T	R	%	T	R	%				
1	Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	**10**	**10**	100,00	Rp 135.709.000	Rp 82.962.990	61,13	**1,64**	**0,64**	**90 %**	**Efisien**
2	Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	**260**	**351**	135,00	Rp 155.853.000	Rp 127.993.689	82,12	**1,64**	**0,64**	**90 %**	**Efisien**
3	Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	**805**	**899**	111,68	Rp 339.300.000	Rp 244.809.400	72,15	**1,55**	**0,55**	**92 %**	**Efisien**
4	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	**0,75**	**0,75**	100,00	Rp 426.380.000	Rp 256.432.361	60,14	**1,66**	**0,66**	**90 %**	**Efisien**
5	Layanan Publikasi keamanan dan mutu Obat dan Makanan oleh UPT	**27**	**28**	103,70	Rp 152.970.000	Rp 97.603.460	63,81	**1,63**	**0,63**	**90 %**	**Efisien**
6	Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	**0,5**	**0,6**	120,00	Rp 1.627.897.000	Rp 91.500.000	5,62	**21,35**	**20,35**	**75 %**	**Tidak Efisien**
7	Perangkat pengolah data dan komunikasi	**3**	**3**	100,00	Rp 33.500.000	Rp 33.500.000	100,00	**1,00**	**0,00**	**100 %**	**Efisien**
8	Prasarana Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia	**0**	**0,05**	-	Rp 192.736.000	Rp -	0,00	**-**	**-**	**75 %**	**Tidak Efisien**
9	Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	**0,75**	**0,81**	108,00	Rp 2.004.708.000	Rp 1.504.696.546	75,06	**1,44**	**0,44**	**92 %**	**Efisien**
10	Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di BPOM Pangkal Pinang	**1,4**	**1,4**	100,00	Rp 241.644.000	Rp 146.702.000	60,71	**1,65**	**0,65**	**90 %**	**Efisien**
11	Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	**0,55**	**0,55**	100,00	Rp 757.848.000	Rp 481.533.679	63,54	**1,57**	**0,57**	**92 %**	**Efisien**
12	Desa Pangan Aman	**0,4**	**0,55**	137,50	Rp 1.072.915.000	Rp 741.775.965	69,14	**1,99**	**0,99**	**88 %**	**Efisien**
13	Pasar aman dari bahan berbahaya	**0,75**	**0,75**	100,00	Rp 284.828.000	Rp 220.549.926	77,43	**1,29**	**0,29**	**95 %**	**Efisien**
14	UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	**9**	**9**	100,00	Rp 42.592.000	Rp 42.300.000	99,31	**1,01**	**0,01**	**100 %**	**Efisien**
15	Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	**209**	**209**	100,00	Rp 236.618.000	Rp 203.756.674	86,11	**1,16**	**0,16**	**100 %**	**Efisien**

No	Kegiatan	Output			Input			IE	TE	Capaian TE	Keterangan
		T	R	%	T	R	%				
16	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	**672**	**675**	100,45	Rp 509.026.000	Rp 393.416.762	77,29	**1,30**	**0,30**	**95 %**	**Efisien**
17	Sampel pangan fortifikasi yang di periksa oleh UPT	**75**	**75**	100,00	Rp 49.448.000	Rp 41.565.700	84,06	**1,19**	**0,19**	**100 %**	**Efisien**
18	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	**28**	**30**	107,14	Rp 67.325.000	Rp 22.218.000	33,00	**3,25**	**2,25**	**75 %**	**Tidak Efisien**
19	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	**362**	**366**	101,10	Rp 982.255.000	Rp 459.448.771	46,77	**2,16**	**1,16**	**86 %**	**Tidak Efisien**
20	Alat Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	**0,5**	**0,50**	100,00	Rp 2.749.000.000	Rp 75.000.000	2,73	**36,65**	**35,65**	**75 %**	**Tidak Efisien**
21	Layanan Perkantoran	**0,75**	**0,75**	100,00	Rp 10.116.367.000	Rp 7.396.903.362	73,12	**1,37**	**0,37**	**95 %**	**Efisien**
	TOTAL			**106,23**	**22.178.919.000**	**12.664.669.285**	**57,10**	**1,86**	**0,86**	**88 %**	**Efisien**

Lampiran 8

Matriks Tingkat Efisiensi Kinerja Per Indikator Balai POM di Pangkal Pinang Triwulan I Tahun 2025

No	Indikator	Output			Input (Anggaran)			IE	TE	Capaian
		T	R	%	Target (RPD TW I)	Realisasi	%			
1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	94,31	110,95	25.849.000	26.281.768	101,67	**1,09**	**0,09**	**100% (Efisien)**
2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	-	-	-	0	0	-	**-**	**-**	
3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	98,33	122,91	6.063.000	5.495.445	90,64	**1,36**	**0,36**	**95% (Efisien)**
4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	0	0,00	0	0	-	**-**	**-**	
5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	96	112,94	0	0	-	**-**	**-**	
6	Persentase keputusan/ rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	84	86,67	103,18	0	0	-	**-**	**-**	
7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100	0	0,00	0	0	-	**-**	**-**	
8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	100	125,00	0	0	-	**-**	**-**	
9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	94,8	100	105,54	15.320.000	10.000.000	65,27	**1,62**	**0,62**	**90% (Efisien)**

No	Indikator	Output			Input (Anggaran)			IE	TE	Capaian
		T	R	%	Target (RPD TW I)	Realisasi	%			
10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	100	125,00	0	0	-	-	-	
11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	85,4	100,69	117,90	810.000	808.250	99,78	**1,18**	**0,18**	**100% (Efisien)**
12	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	72,9	74,9	102,74	67.980.000	60.438.839	88,91	**1,16**	**0,16**	**100% (Efisien)**
13	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	86	86,42	100,50	9.250.000	12.993.000	140,46	**0,72**	**-0,28**	**Tidak Efisien**
14	Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	-	-	-	484.000	484.000	100,00	-	-	
15	Jumlah desa pangan aman	-	-	-	0	3.770.000	-	-	-	
16	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	-	-	-	0	150.000	-	-	-	
17	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	5	10	200,00	510.000	0	0,00	-	-	
18	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	-	-	-	15.115.997	13.213.000	87,41	-	-	

No	Indikator	Output			Input (Anggaran)			IE	TE	Capaian
		T	R	%	Target (RPD TW I)	Realisasi	%			
19	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50,00	100,00	724.000	724.000	100,00	**1,00**	**0,00**	**100% (Efisien)**
20	Indeks Pelayanan Publik UPT	-	-	-	2.153.000	1.020.000	47,38	**-**	**-**	
21	Nilai Pembangunan ZI UPT	-	-	-	1.381.533.817	1.414.501.921	102,39	**-**	**-**	
22	Nilai AKIP UPT	-	-	-	0	0	-	**-**	**-**	
23	Nilai Kinerja Anggaran UPT	-	-	-	9.714.400	9.714.400	100,00	**-**	**-**	
24	Indeks Manajemen Risiko UPT	-	-	-	17.088.056	17.088.056	100,00	**-**	**-**	
	TOTAL			**101,91**	**125.996.000**	**116.741.302**	**92,65**	**1,10**	**0,100**	**100% (Efisien)**

Lampiran 9

Matriks Tingkat Efisiensi Kinerja Per Sasaran Strategis Balai POM di Pangkal Pinang Triwulan I Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Output	Input (Anggaran)			IE	TE	Capaian	Keterangan
		%	Target (RPD TW I)	Realisasi	%				
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	92,34	48.042.000	42.585.463	88,64	**1,04**	**0,04**	**100% (Efisien)**	
2	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	102,74	67.980.000	60.438.839	88,91	**1,16**	**0,16**	**100% (Efisien)**	
3	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	100,50	9.734.000	17.397.000	178,72	**0,56**	**-0,44**	**Tidak Efisien**	
4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	200,00	510.000	0	0,00	**-**	**-**		Tidak Dapat Dihitung Efiensinya
5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	-	15.115.997	13.213.000	87,41	**-**	**-**		Tidak Dapat Dihitung Efiensinya
6	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	100,00	724.000	724.000	100,00	**1,00**	**0,00**	**100% (Efisien)**	
7	Layanan Publik UPT yang prima	-	2.153.000	1.020.000	47,38	**-**	**-**		Tidak Dapat Dihitung Efiensinya
8	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	-	1.408.336.273	1.441.304.377	102,34	**-**	**-**		Tidak Dapat Dihitung Efiensinya
	TOTAL	**98,90**	**126.480.000**	**121.145.302**	**95,78**	**1,03**	**0,033**	**100% (Efisien)**	

Lampiran 10

RAPK Triwulan I Tahun 2025 BPOM di Pangkal Pinang

No	Indikator	Target 2025	Realisasi s.d bulan JANUARI				Realisasi s.d bulan FEBRUARI				Realisasi s.d bulan MARET				Link Kertas Kerja Perhitungan	Link Sumber Data
			Target	Realisasi	%Capaian thd Target bulan n	%Capaian thd Target tahun n	Target	Realisasi	%Capaian thd Target bulan n	%Capaian thd Target tahun n	Target	Realisasi	%Capaian thd Target bulan n	%Capaian thd Target tahun n		
1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	-	-	-	-	85	99,40	116,94	116,94	85	94,31	110,95	110,95	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1b_eUwj5Ngb7jAI01EiCS_5ZIL6YcBSrIEhvLid0KVML/edit?usp=drive_link	https://docs.google.com/spreadsheets/d/16Pu9ruUkFfa2aWWHhQrG9_pONI3Jln/edit#gid=2061650702&gid=2061650702
2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1B3mFyLosENrYW4W4Tn1I9Tle6KWIqeiUG_oE6U_6/edit?usp=drive_link	https://drive.google.com/drive/folders/1GaRbuhIL7aJF1C4823ln1TeBcqvn1ll
3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	80	85,00	106,25	106,25	80	89,00	111,25	111,25	80	98,33	122,91	122,91	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1V1KeleETVC_ABn2eo5_p1qgZwXe9W6p1T35Q3BGu-VE/edit?usp=drive_link	Link sumber data 1 : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1k_mgprr1PdaTWQmPxI5DtleM5R_lwSbr/edit?usp=sharing&ouid=117762703129853491095&rtpof=true&sd=true Link Sumber data 2 : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vlTP8YC6asOpvffvlwI5dCPLBFG0wvDt4/edit?usp=sharing&ouid=117762703129853491095&rtpof=true&sd=true
4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	100	0,00	0,00	0,00	100	0,00	0,00	0,00	100	0,00	0,00	0,00	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Lg3aiEpGbjpTAnJg65euQA3tZvELk9W3O1qIX4fPYV0/edit?usp=drive_link	Link sumber data 1 : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1k_mgprr1PdaTWQmPxI5DtleM5R_lwSbr/edit?usp=sharing&ouid=117762703129853491095&rtpof=true&sd=true Link Sumber data 2 : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vlTP8YC6asOpvffvlwI5dCPLBFG0wvDt4/edit?usp=sharing&ouid=117762703129853491095&rtpof=true&sd=true
5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	-	-	-	-	85	96,00	112,94	112,94	85	96,00	112,94	112,94	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1fcnlARBP6vyev4SEIHnhLvfNrXwonsZYzfi/U1qrUyo/edit?usp=drive_link	Link sumber data 1 : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1k_mgprr1PdaTWQmPxI5DtleM5R_lwSbr/edit?usp=sharing&ouid=117762703129853491095&rtpof=true&sd=true -
																Link Sumber data 2 : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vlTP8YC6asOpvffvlwI5dCPLBFG0wvDt4/edit?usp=sharing&ouid=117762703129853491095&rtpof=true&sd=true

No	Indikator	Target 2025	Realisasi s.d bulan JANUARI				Realisasi s.d bulan FEBRUARI				Realisasi s.d bulan MARET				Link Kertas Kerja Perhitungan	Link Sumber Data
			Target	Realisasi	%Capaian thd Target bulan n	%Capaian thd Target tahun n	Target	Realisasi	%Capaian thd Target bulan n	%Capaian thd Target tahun n	Target	Realisasi	%Capaian thd Target bulan n	%Capaian thd Target tahun n		
6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti	84	84	0	0,00	0,00	84	0	0,00	0,00	84	86,67	103,18	103,18	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1suV5ssuAaT2uH2rBdtvyWiic-lu9KDLRh2B0cyuFZEQdxM/edit?usp=drive_link	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1IMGKdpUnilQBKIN_PLKaCiEFYnkWlp2vCnxroj6h766/edit?gid=797471594#gid=797471594
7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100	100	0	0,00	0,00	100	0	0,00	0,00	100	0	0,00	0,00	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1smFYGE5WvXx0x1_nHG5n25dwvsAvNQEcXIJFFYkw6A0/edit?usp=drive_link	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1IMGKdpUnilQBKIN_PLKaCiEFYnkWlp2vCnxroj6h766/edit?gid=1511150350#gid=1511150350
8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	80	0	0,00	0,00	80	0	0,00	0,00	80	100	125,00	125,00	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1bnJsPsTEvp5pO27TGuk3TCqlo6J7d913_xaEkQqb9E0/edit?usp=drive_link	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ofjv0-oZv3bBpcwK6xxmRULoc7Uvw/edit?gid=1448153965#gid=1448153965
9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	94,75	94,75	0	0,00	0,00	94,75	100	105,54	105,54	94,75	100	105,54	105,54	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1uXzn2MdpLmmqh-lk-SicI7ZY5SHTE6T_AffkO5aErnLxw/edit?usp=drive_link	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ofjv0-oZv3bBpcwK6xxmRULoc7Uvw/edit?gid=1448153965#gid=1448153965
10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	80	0,00	0,00	0,00	80	100,00	125,00	125,00	80	100,00	125,00	125,00	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Vp_K7vW0a3fDprKKriZeGuus-Gv6tOSs3sKAUp5psUM/edit?usp=drive_link	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ofjv0-oZv3bBpcwK6xxmRULoc7Uvw/edit?gid=1448153965#gid=1448153965
11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	85,40	85,4	98,04	112,46	112,46	85,4	96,96	113,54	113,54	85,4	100,69	117,90	117,90	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1nYaaJIdzABhEHpVxdaGbqDh5PIJwevF_zmLuoZZVnw/edit?usp=drive_link	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1IMGKdpUnilQBKIN_PLKaCiEFYnkWlp2vCnxroj6h766/edit?gid=390557823#gid=390557823
12	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	73,7	-	-	-	-	-	-	-	-	73	74,90	102,74	101,63	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lRvSIxtI3vnRve94p_HNULRCy-HIB20qNXDT0X5Y/edit?usp=drive_link	https://drive.google.com/drive/folders/1LRQaZNwE2r1XUJ67 1vcQ8W_IHAJ9o3R
13	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	85,99	-	-	-	-	-	-	-	-	86	86,42	100,50	100,50	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ufE-qpBqxuMsACMtvHWi21daJvTaZNsQOwwQoRnMhc/edit?usp=drive_link	https://drive.google.com/drive/folders/1vAqrSuvVeQ--YLOLlY9vZT6yK10HS5c-?usp=sharing
14	Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	https://docs.google.com/spreadsheets/d/151cMy-cA3-C2-aSWPvfRp2lewQana2nnQiHw71SpssA/edit?usp=drive_link	https://drive.google.com/drive/folders/1_JEv2vW87BeZ8Pk2A4qwZ47zhenfN?usp=sharing
15	Jumlah desa pangan aman	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1mzQdlX01DpvA7SLBGGnpCaoy7wwgyXTl0l2hR54w8/edit?usp=drive_link	https://drive.google.com/drive/folders/13mRUtwK_G9mz5CnbBn7MstpBqBsAlX-?usp=sharing
16	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1XJWEYKqiE0MMYvbS8kax_4MZi7lbVASZlwl4LVUVEk/edit?usp=drive_link	https://drive.google.com/drive/folders/1IU1fKnsk5x2Sd_UU4u11760Jp6D7lxq4?usp=sharing

No	Indikator	Target 2025	Realisasi s.d bulan JANUARI				Realisasi s.d bulan FEBRUARI				Realisasi s.d bulan MARET				Link Kertas Kerja Perhitungan	Link Sumber Data
			Target	Realisasi	%Capaian thd Target bulan n	%Capaian thd Target tahun n	Target	Realisasi	%Capaian thd Target bulan n	%Capaian thd Target tahun n	Target	Realisasi	%Capaian thd Target bulan n	%Capaian thd Target tahun n		
17	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	80	-	-	-	-	-	-	-	-	5	10,00	200,00	12,50	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1x970_gJmnsug8E397EQ4FVSe7ycoO66uGZB3.lhmiLKE/edit?usp=drive_link	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1LrN5QT9gLXn2yWGhfBAfPsjusuYKkn/edit?gid=1833733391#gid=1833733391
18	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1pphqrUy62i1o06K_fqtqorCMCPnyL5mvjZO1kJEXTUM/edit?usp=drive_link	https://simpan.pom.go.id/index.php/s/4TpkXq7TqpJW25D?path=%2F2025%2F3.%20PD.03%20PENYIDIKAN%2FPD.03.02%20OPERASI%20PENYIDIKAN%2F2%20LAPJUL%2FMONEV%2F1.%20LAPORAN%20PATSI
19	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90	50	50,00	100,00	55,56	50	50,00	100,00	55,56	50	50,00	100,00	55,56	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JDUBkNiITGb4TmyTbuqxhNOuGnAFYJ0mPx5ZDHAiWiQ/edit?usp=drive_link	Sumber 1 https://simpan.pom.go.id/index.php/s/4TpkXq7TqpJW25D?path=%2F2025%2F4.%20PD.04%20SIRENS%2F1%20LAPORAN%20PATSI Sumber 2 https://simpan.pom.go.id/index.php/s/4TpkXq7TqpJW25D?path=%2F2025%2F4.%20PD.04%20SIRENS%2F6%20LAPORAN%20PROFILING Sumber 3 https://simpan.pom.go.id/index.php/s/4TpkXq7TqpJW25D?path=%2F2025%2F4.%20PD.04%20SIRENS%2F7%20EVALUASI%20PATSI
20	Indeks Pelayanan Publik UPT	4,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Nilai Pembangunan ZI UPT	90,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Nilai AKIP UPT	81,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Nilai Kinerja Anggaran UPT	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Indeks Manajemen Risiko UPT	2,906	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Pangkal Pinang, 15 Agustus 2025
Kepala Balai POM di Pangkal Pinang

Agus Riyanto, S.Farm, Apt

Lampiran 11

Nilai IKPA Triwulan I Tahun 2025

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PANGKAL PINANG

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : MARET

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	015	063	672842	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PANGKAL PINANG	Nilai	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100%	0.00	100.00
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		100.00				100.00				

Lampiran 12

Tabel Keselarasan Data Kinerja Triwulan I Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	No	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Laporan Kinerja Interim Triwulan I (Revisi)		Laporan Evaluasi Internal (Revisi)		Sumber Data (Madu Pelawan)	
				Realisasi	% Capaian	Realisasi	% Capaian	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	94,31	110,95%	94,31	110,95%	94,31	110,95%
		2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	-	-	-	-	-	-
		3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	98,33	122,91%	98,33	122,91%	98,33	122,91%
		4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	96,00	112,94%	96,00	112,94%	96,00	112,94%
		6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	86,67	103,18%	86,67	103,18%	86,67	103,18%

No	Sasaran Strategis	No	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Laporan Kinerja Interim Triwulan I (Revisi)		Laporan Evaluasi Internal (Revisi)		Sumber Data (Madu Pelawan)	
				Realisasi	% Capaian	Realisasi	% Capaian	Realisasi	% Capaian
		7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
		8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100	125,00%	100	125,00%	100	125,00%
		9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100	105,54%	100	105,54%	100	105,54%
		10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100,00	125,00%	100,00	125,00%	100,00	125,00%
		11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	100,69	117,90%	100,69	117,90%	100,69	117,90%
2	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	12	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	74,90	102,74%	74,90	102,74%	74,90	102,74%

No	Sasaran Strategis	No	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Laporan Kinerja Interim Triwulan I (Revisi)		Laporan Evaluasi Internal (Revisi)		Sumber Data (Madu Pelawan)	
				Realisasi	% Capaian	Realisasi	% Capaian	Realisasi	% Capaian
3	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	13	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	86,42	100,50%	86,42	100,50%	86,42	100,50%
		14	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	-	-	-	-	-	-
		15	Jumlah desa pangan aman	-	-	-	-	-	-
		16	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	-	-	-	-	-	-
4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	17	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	10	200,00%	10	200,00%	10	200,00%
5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	18	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	-	-	-	-	-	-
6	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	19	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	100,00%	50	100,00%	50	100,00%
7	Layanan Publik UPT yang prima	20	Indeks Pelayanan Publik UPT	-	-	-	-	-	-
8	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi	21	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	-	-	-	-	-	-

No	Sasaran Strategis	No	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Laporan Kinerja Interim Triwulan I (Revisi)		Laporan Evaluasi Internal (Revisi)		Sumber Data (Madu Pelawan)	
				Realisasi	% Capaian	Realisasi	% Capaian	Realisasi	% Capaian
	yang optimal	22	Nilai AKIP UPT BPOM	-	-	-	-	-	-
		23	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	-	-	-	-	-	-
		24	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	-	-	-	-	-	-

Lampiran 13

Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Tahun 2025

Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Target Tahun 2025	Realisasi Triwulan I	% Capaian Terhadap Target Tahunan	Kategori
Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85,00	94,31	110,95 ▲	Tercapai/ Melampaui
Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26,00	-	-	
Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80,00	98,33	122,91 ▲	Tercapai/ Melampaui
Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100,00	0,00	0,00 ▼	Perlu Upaya Keras
Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85,00	96,00	112,94 ▲	Tercapai/ Melampaui
Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	84,00	86,67	103,18 ▲	Tercapai/ Melampaui
Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100,00	0,00	0,00 ▼	Perlu Upaya Keras
Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80,00	100,00	125,00 ▲	Tercapai/ Melampaui
Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	94,75	100,00	105,54 ▲	Tercapai/ Melampaui
Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80,00	100,00	125,00 ▲	Tercapai/ Melampaui
Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	85,40	100,69	117,90 ▲	Tercapai/ Melampaui
Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	73,70	74,90	101,63 ▲	Tercapai/ Melampaui

Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Target Tahun 2025	Realisasi Triwulan I	% Capaian Terhadap Target Tahunan	Kategori
Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	85,99	86,42	100,50 ▲	**Tercapai/ Melampaui**
Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	100	-	-	
Jumlah desa pangan aman	100	-	-	
Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	100	-	-	
Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	80,00	10,00	12,50 ▼	**Perlu Upaya Keras**
Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	90,00	-	-	
Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90	50,00	55,56 ▼	**Perlu Upaya Keras**
Indeks Pelayanan Publik UPT	4,7	-	-	
Nilai Pembangunan ZI UPT	90,3	-	-	
Nilai AKIP UPT	81,70	-	-	
Nilai Kinerja Anggaran UPT	5,00	-	-	
Indeks Manajemen Risiko UPT	2,91	-	-	

Lampiran 14

Penyesuaian anggaran

No	Jenis Revisi Anggaran	Dasar/Latar Belakang	Perubahan yang dilakukan
1	Revisi POK (Kewenangan KPA)	• Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya. Mengikuti Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024. • Kebutuhan pembelian sampel kosmetik pada kegiatan Verifikasi Data Patroli Siber dan Profiling Kejahatan Obat dan Makanan dalam rangka Penyusunan Laporan Patroli Siber yang harganya lebih tinggi dari perencaaan yang berkenaan dengan IKU Jumlah Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan oleh UPT • Adanya pelaksanaan Kegiatan Terpadu Workshop Kerja Sama Dalam Negeri yang mempengaruhi nilai Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	• Revisi pemisahan anggaran perjalanan dinas yang di blokir sebesar 50% dari pagu total dengan pagu yang bisa digunakan. • Penambahan anggaran pembelian sampel pada kegiatan Verifikasi Data Patroli Siber dan Profiling Kejahatan Obat dan Makanan dalam rangka Penyusunan Laporan Patroli Siber • Penambahan anggaran pada KRO KIE Obat dan Makanan Aman
2	Revisi POK (Kewenangan KPA)	Revisi dilakukan karea adanya kebutuhan anggaran kegiatan workshop yang mempengaruhi pada IKU Nilai Pembangunan ZI	Penyesuaian anggaran pada sub komponen Workshop Penyelenggaraan Kearsipan
3	Revisi DJA	Menindaklanjuti Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025 tentang Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja	Rekontsruksi anggaran belanja pelaksanaan APBN Tahun 2025 pemblokiran secara mandiri dan mencantumkan dalam halaman IV DIPA sesuai dengan besaran yang telah

No	Jenis Revisi Anggaran	Dasar/Latar Belakang	Perubahan yang dilakukan
		Negara Tahun Anggaran 2025.	ditetapkan untuk masing-masing unit kerja.
4	Revisi DJA	Menindaklanjuti surat Sekretaris Utama Nomor B-PR.05.03.2.01.25.07 Tanggal 3 Januari 2025 Hal Penyampaian Mekanisme Izin Pemanfaatan Optimalisasi Sisa Anggaran TA 2025	Penyesuaian anggaran revisi optimalisasi anggaran Belanja Modal (khusus yang bersumber dari RM) untuk pemenuhan kebutuhan anggaran PPNPN selama tahun 2025. Besaran optimalisasi anggaran yang telah ditetapkan untuk masing masing unit kerja
5	Revisi POK (Kewenangan KPA)	• Kebutuhan anggaran perjalanan dinas pelaksanaan kegiatan Fasilitas Penerapan Keamanan Pangan Oleh Kader Keamanan Pangan Desa yang mempengaruhi IKU Jumlah desa pangan aman • Adanya kesalahan penggunaan akun honor pejabat pengadaan barang dan jasa yang berkenaan dengan Nilai Pembangunan ZI	• Penambahan anggaran perjadin RO QDB.002 Desa Pangan Aman • Penggantian akun honor pejabatan pengadaan barang dan jasa dari akun 521213 (Belanja Honor Output Kegiatan) ke akun 521115 (Belanja Honor Output Satuan Kerja)
6	Revisi DJA	Menindaklanjuti surat Sekretaris Utama Nomor B-PR.05.03.2.03.25.171 tanggal 21 Maret 2025 Hal Revisi Relaksasi Pemanfaatan Blokir Anggaran TA 2025	Pemanfaatan kembali blokir anggaran sesuai dengan besaran yang telah ditetapkan pada masing masing Rincian Output (RO) tanpa mengubah peruntukan anggaran yang sudah tertera di DIPA. KRO yang dibuka blokir adalah KRO PDD, QCD, QIA, dan QIC.

Lampiran 15

Matriks Reviu Target Indikator

MATRIKS A2 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
Satker: 7B - BALAI POM DI PANGKALPINANG

KODE	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	REALISASI			REKOMENDASI UNIT PENGAMPU	TARGET RENSTRA/RKT 2025	TARGET 2025	JUSTIFIKASI	APPROVAL	REVIEW APPROVAL
		2023	2024							
DR.3165.01.01	Persentase sampel Sediaan Farmasi tertoko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	0	0		80	85.00	85.00	Adapun target awalnya ditetapkan oleh masing-masing unit pengampu kemudian disepakati dengan UPT (Unit Pelaksana Teknis) sehingga menjadi target UPT untuk 5 tahun ke depan. Target ditetapkan unit berdasarkan: a. Data kinerja tahun sebelumnya, b. Sumberdaya yang tersedia baik SDM maupun anggaran Kenaikan target per tahun sudah disesuaikan dengan kemungkinan pencapaiannya dengan asumsi bahwa target tersebut adalah data rata-rata kemampuan UPT untuk memenuhi target pada komoditi Obat, Obat Tradisional dan Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik. Target bulanan dimulai dari B2 karena: 1. Di bulan Januari, sampling yang dilakukan hanya 5 sampel obat yang masuk pada minggu ke 4 Januari (23 januari 2025), sedangkan untuk komoditi Obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan dan kosmetik mulai disampling di bulan Februari. 2. Belum ada sampel Obat yang selesai uji di bulan Januari karena sampel masuk di akhir bulan dan adanya cuti bersama pada akhir Januari 2025. 3. Adanya arahan dari deputi 2 di wag forum sampling deputi 2, untuk perhitungan capaian mulai dari B02	✓	ok

KODE	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	REALISASI			REKOMENDASI UNIT PENGAMPU	TARGET RENSTRA/RKT 2025	TARGET 2025	JUSTIFIKASI	APPROVAL	REVIEW APPROVAL
		2023	2024							
DR.3165.01.02	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	0	0		26	26.00	26.00	**Berdasarkan pada rata-rata persentase capaian nasional tahun sebelumnya untuk pelaporan KTD/ESO**	✓	ok
DR.3165.01.03	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	0	0		80	80.00	80.00	**Penetapan target dilakukan dengan melakukan pembahasan antara pengampu kebijakan dengan UPT. Penetapan target dan baseline berdasarkan percobaan menggunakan parameter perhitungan yang digunakan dengan percobaan perhitungan capaian pada tahun 2023 dan 2024. Target yang disepakati oleh UPT dan unit pengampu didasarkan pada rata-rata capaian nasional.**	✓	ok
DR.3165.01.04	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	0	0		100	100.00	100.00	**Penetapan target dilakukan dengan melakukan pembahasan antara pengampu kebijakan dengan UPT. Penetapan target dan baseline berdasarkan percobaan menggunakan parameter perhitungan yang digunakan dengan percobaan perhitungan capaian pada tahun 2023 dan 2024. Target yang disepakati oleh UPT dan unit pengampu didasarkan pada rata-rata capaian nasional.**	✓	ok
DR.3165.01.05	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	0	0		85	85.00	85.00	**Penetapan target dilakukan dengan melakukan pembahasan antara pengampu kebijakan dengan UPT. Penetapan target dan baseline berdasarkan percobaan menggunakan parameter perhitungan yang digunakan dengan percobaan perhitungan capaian pada tahun 2023 dan 2024. Target yang disepakati oleh UPT dan unit pengampu didasarkan pada rata-rata capaian nasional.**	✓	ok
DR.3165.01.06	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	80	83		-	84.00	84.00	**Berdasarkan hal tersebut dan melihat dari baseline realisasi tahun 2022-2024 dengan tetap mempertimbangkan adanya rekomendasi yang tidak ditindaklanjuti sesuai timeline maka untuk target Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan Balai POM di**	✓	ok

KODE	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	REALISASI			REKOMENDASI UNIT PENGAMPU	TARGET RENSTRA/RKT 2025	TARGET 2025	JUSTIFIKASI	APPROVAL	REVIEW APPROVAL
		2023	2024							
								Pangkalpinang di tahun 2025 dapat dinaikan yaitu sebesar 84 dengan mempertimbangkan respon dari pemangku kepentingan yang masih cukup fluktuatif untuk setiap tahunya.		
DR.3165.01.07	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	0	0		-	90.00	100.00	Dari perhitungan dan *exercise* yang telah dilakukan diperoleh data baseline Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan untuk tahun 2023 sebesar 79 % dan 2024 sebesar 86. Berdasarkan baseline tahun sebelumnya tersebut maka target renstra tahun 2025-2029 dapat dinaikan	✓	ok
DR.3165.01.08	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	0	80		80	80.00	80.00	Dari perhitungan dan *exercise* yang telah dilakukan diperoleh data baseline Persentase sarana produksi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada tahun sebelumnya sebesar 79,67 %. Berdasarkan baseline tahun sebelumnya tersebut maka target renstra tahun 2025-2029 dapat dinaikkan	✓	ok
DR.3165.01.09	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	0	0		95.50	94.75	94.75	Dari perhitungan dan *exercise* yang telah dilakukan diperoleh data baseline Persentase sarana distribusi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada tahun sebelumnya sebesar 92,23%. Berdasarkan baseline tahun sebelumnya tersebut maka target renstra tahun 2025-2029 dapat dinaikkan dari baseline	✓	ok
DR.3165.01.10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	0	0		80	80.00	80.00	Dari perhitungan dan *exercise* yang telah dilakukan diperoleh data baseline Persentase sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada tahun sebelumnya sebesar 79,34 %. Berdasarkan baseline tahun sebelumnya tersebut maka target renstra tahun 2025-2029 dapat dinaikkan	✓	ok
DR.3165.01.11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang	0	0		85.43	85.40	85.40	Dari perhitungan dan *exercise* yang telah dilakukan diperoleh data baseline Persentase iklan	✓	ok

KODE	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	REALISASI			REKOMENDASI UNIT PENGAMPU	TARGET RENSTRA/RKT 2025	TARGET 2025	JUSTIFIKASI	APPROVAL	REVIEW APPROVAL
		2023	2024							
	diawasi sesuai ketentuan							sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan 85%. Berdasarkan baseline tahun sebelumnya tersebut maka target renstra tahun 2025-2029 dapat dinaikkan		
DR.3165.03.01	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	83	86		69.41	73.70	73.70	Target ditetapkan sesuai dengan perencanaan peningkatan pada masing-masing komponen SKL menggunakan tools asesmen 2025-2029. PPPOMN kemudian menyesuaikan target yang direncanakan balai dengan target nasional. Target mulai 83 karena nilai baru keluar di 83.		ok
DR.3165.04.01	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	95	96		-	85.99	85.99	Pada Tahun 2025 terjadi Perubahan Komponen dari Survei Kuesioner Efektivitas KIE sehingga meskipun melihat dari tren realisasi tahun 2021-2024 yang selalu meningkat maka untuk target Indeks Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Balai POM di Pangkalpinang di tahun 2025 yaitu 85,99. Pada Tahun 2025 target Indeks Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yaitu 85,99. Hal ini disebabkan karena terjadi pengurangan anggaran di tahun 2025 sehingga target menjadi berkurang.		ok
DR.3165.04.02	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	12	12		7	7.00	7.00	Pada Tahun 2025 target Sekolah yang diintervensi sebanyak 7 Sekolah. Hal ini disebabkan karena terjadi pengurangan anggaran di tahun 2025 sehingga target menjadi berkurang. Target program Sekolah tidak dimulai dari B01 dikarenakan progres pertama tahapan pada saat rapat Advokasi, sementara kegiatan tersebut dilaksanakan di bulan April.		ok
DR.3165.04.03	Jumlah desa pangan aman	7	6		3	3.00	3.00	Pada Tahun 2025 target Desa/Kelurahan yang diintervensi sebanyak 3 Desa/Kelurahan. Hal ini disebabkan karena terjadi pengurangan anggaran di tahun 2025 sehingga target menjadi berkurang. Target program desa tidak dimulai dari B01 dikarenakan progres pertama tahapan pada saat rapat Advokasi, sementara kegiatan		ok

KODE	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	REALISASI			REKOMENDASI UNIT PENGAMPU	TARGET RENSTRA/RKT 2025	TARGET 2025	JUSTIFIKASI	APPROVAL	REVIEW APPROVAL
		2023	2024					tersebut dilaksanakan di bulan April.		
DR.3165.04.04	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	2	2		1	1.00	1.00	Penentuan target pada tahun 2025 adalah sebanyak 1 (Satu) pasar, hal ini dikarenakan pasar yang ada di provinsi jumlahnya terbatas sehingga targetnya menjadi 1 (Satu) pasar pada tahun 2025. Target Program Pasar tidak dimulai dari B01 dikarenakan progres pertama tahapan pada saat rapat Advokasi sementara kegiatan tersebut dilaksanakan di bulan April.	✓	ok
DR.3165.05.01	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	100	100		80	60.00	60.00	Untuk tahun 2025 jumlah sarana yang didampingi sebanyak 8 UMKM. UMKM yang didampingi meliputi UMKM Pangan Olahan, Obat Bahan Alam (OBA) dan Kosmetik. Untuk tahun 2025 UMKM Kosmetik yang dilakukan pendampingan masih terbatas, sehingga mempengaruhi perhitungan target indikator pada tahun 2025. Untuk penetapan target tahun 2026- 2029 diharapkan terdapat peningkatan UMKM Kosmetik maupun UMKM OBA yang dilakukan pendampingan sehingga terdapat peningkatan terhadap target indikator. Target tidak dari B1 karena 1. Menunggu penetapan target fiks dari unit pengampu 2. Masih menunggu dan memilah target sarana yg akan dipilih dan ditetapkan karena pengurangan sarana	✓	ok
DR.3165.06.01	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	93	100		90	90.00	90.00	Dari perhitungan menggunakan *tools* perhitungan yang baru yang telah dilakukan dari data 2021-2024 diperoleh data baseline tersebut dan hasil exercise nilai pada tahun 2025 maka target renstra tahun 2025-2029 dapat dinaikkan dibanding target tahun sebelumnya. Target tidak dari B1 karena perhitungan IKU Penyidikan dimulai dari SPDP. Sementara untuk mendapatkan 1 SPDP harus ada serangkaian kegiatan intelijen yang dilakukan dimana tidak masuk dalam perhitungan IKU.	✓	ok

KODE	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	REALISASI			REKOMENDASI UNIT PENGAMPU	TARGET RENSTRA/RKT 2025	TARGET 2025	JUSTIFIKASI	APPROVAL	REVIEW APPROVAL
		2023	2024							
DR.3165.07.01	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	0	0		90	90.00	90.00	Dari perhitungan dan *exercise* yang telah dilakukan diperoleh data baseline ersentase Kepatuhan Penyampaian Laporan Analisis Penjajakan Digital yang Diselesaikan oleh UPT BPOM pada tahun sebelumnya sebesar 89,64%. Berdasarkan baseline tahun sebelumnya tersebut maka target renstra tahun 2025-2029 dapat dinaikkan dari baseline.	✓	ok
DR.3165.08.01	Indeks Pelayanan Publik UPT	5	5		4.7	4.70	4.70	Target Indeks Pelayanan Publik BPOM di Pangkalpinang tahun 2025 adalah sebesar 4,7. Hal ini disebabkan karena terjadinya perubahan *Tools* penilaian sehingga targetnya disesuaikan	✓	ok
DR.3165.09.01	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	91	90		90.3	90.30	90.30	Dengan pertimbangan hal tersebut di atas yaitu terkait capaian Indeks RB selama 5 tahun, peluang peningkatan yang dapat dilakukan serta potensi penurunan nilai melalui penurunan capaian kinerja tahun 2024 dibandingkan tahun sebelumnya	✓	ok
DR.3165.09.02	Nilai AKIP UPT BPOM	80	82		82.8	81.70	81.70	Dengan mempertimbangkan hal-hal yang telah dijelaskan di atas yaitu : 1. Tren Nilai AKIP BPOM Pangkalpinang dan baseline pada tahun 2024 2. Hasil *exercise* nilai AKIP thn 2025 3. serta Ketentuan penetapan target tidak boleh lebih rendah dari capaian tahun 2024 Maka ditetapkanlah target Renstra Nilai AKIP BPOM di Pangkalpinang periode tahun 2025 sd 2029 dengan kenaikkan target sebesar 0,1 poin setiap tahunnya	✓	ok
DR.3165.09.03	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	0	5		5	5.00	5.00	Dengan mempertimbangkan capaian NKA tahun sebelumnya dan hasil exercise NKA tahun 2025, dimana diperoleh nilai diatas 90,01 dan dengan melakukan konversi nilai sesuai manual IKU (nilai 90,01 sd 100 mendapat konversi nilai sebesar 5), maka ditetapkan target renstra tahun 2025 sampai	✓	ok

KODE	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	REALISASI			REKOMENDASI UNIT PENGAMPU	TARGET RENSTRA/RKT 2025	TARGET 2025	JUSTIFIKASI	APPROVAL	REVIEW APPROVAL
		2023	2024							
								dengan 2029 yaitu sebesar 5		
DR.3165.09.04	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	3	3		-	2.91	2.91	Dengan melihat baseline nilai maturitas risiko Balai POM di Pangkal Pinang pada tahun 2023 dan 2024 dimana nilai belum mampu mencapai angka 3 serta dibutuhkannya waktu untuk berproses dalam upaya meningkatkan nilai maturitas risiko pada Balai POM di Pangkal Pinang, maka kami mengusulkan target Nilai Maturitas risiko Tahun 2025 sebesar 2.906	✓	ok

Lampiran 16

Nota Dinas Pemberitahuan Indikator yang Dikecualikan dari Perhitungan Nilai Kinerja Organisasi (NKO)

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN

NOTA DINAS
NOMOR : PR.04.02.21.04.25.124

Yth.	:	Kepala UPT di seluruh Indonesia
Dari	:	Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan
Hal	:	Pemberitahuan Indikator yang Dikecualikan dari Perhitungan Nilai Kinerja Organisasi (NKO)
Tanggal	:	28 April 2025

Sehubungan dengan nota dinas Sekretaris Utama nomor PR.08.02.2.04.25.207 tanggal 14 April 2025 hal Permintaan Pelaporan Capaian Kinerja dan Anggaran s.d. Triwulan I Tahun 2025, dengan ini kami sampaikan informasi sebagai berikut:

1. Terdapat 3 (tiga) indikator kinerja UPT dengan manual IKU dan kertas kerja perhitungan capaian yang masih dalam proses pembahasan dengan unit pusat sampai dengan batas akhir pelaporan triwulan I pada tanggal 16 April 2025 yaitu:
   a. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar.
   b. Persentase Sarana Distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.
   c. Persentase sarana produksi Pangan Olahan (termasuk IRTP) yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.
2. Ketiga indikator tersebut belum dapat dilakukan pengukuran kinerja pada triwulan I dan selanjutnya akan dikecualikan dari perhitungan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) pada aplikasi SIMETRIS menu e-performance.
3. Ketiga indikator tersebut tetap dicantumkan dalam pembahasan pada Laporan Kinerja Interim (BAB III) dengan mencantumkan justifikasi seperti pada poin nomor 1.
4. Perhitungan NKO pada Laporan Kinerja Interim dilakukan secara manual oleh masing-masing UPT mengacu pada Surat Edaran Sekretaris Utama Nomor PR.09.01.2.03.25.10 tanggal 11 Maret 2025 tentang Pengukuran dan Pelaporan Kinerja Unit/Satuan Kerja di Lingkungan BPOM dengan pengecualian terhadap ketiga indikator pada poin nomor 1.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih.



Antonius Tarigan

Tembusan:

1. Kepala Biro Sumber Daya Manusia
2. Inspektur I
3. Inspektur II
4. Direktur Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor
5. Direktur Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan
6. Direktur Pengawasan Produksi Pangan Olahan
7. Plt. Direktur Pengawasan Peredaran Pangan Olahan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Lampiran 17

Perbandingan Capaian Kinerja TW I 2025 dengan Target Jangka Menengah

No	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Target Tahun 2029	Realisasi Triwulan I 2025	% Capaian Terhadap Target Jangka Menengah	Kategori
1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91,25	94,31	103,35	**Tercapai/Melampaui**
2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	30	-	-	
3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	88	98,33	111,74	**Tercapai/Melampaui**
4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	0,00	0,00	**Perlu Upaya Keras**
5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	95	96,00	101,05	**Tercapai/Melampaui**
6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	88	86,67	98,49	**Akan Tercapai**
7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100	0,00	0,00	**Perlu Upaya Keras**
8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90	100,00	111,11	**Tercapai/Melampaui**
9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	98,75	100,00	101,27	**Tercapai/Melampaui**
10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90	100,00	111,11	**Tercapai/Melampaui**
11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	91,4	100,69	110,16	**Tercapai/Melampaui**

No	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Target Tahun 2029	Realisasi Triwulan I 2025	% Capaian Terhadap Target Jangka Menengah	Kategori
12	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	84,3	74,90	88,85	**Akan Tercapai**
13	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	89,43	86,42	96,63	**Akan Tercapai**
14	Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	18	-	-	
15	Jumlah desa pangan aman	7	-	-	
16	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1	-	-	
17	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	84	10,00	11,90	**Perlu Upaya Keras**
18	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	94	-	-	
19	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	94	50,00	53,19	**Perlu Upaya Keras**
20	Indeks Pelayanan Publik UPT	4,9	-	-	
21	Nilai Pembangunan ZI UPT	90,7	-	-	
22	Nilai AKIP UPT	82,1	-	-	
23	Nilai Kinerja Anggaran UPT	5	-	-	
24	Indeks Manajemen Risiko UPT	3,062	-	-	

Lampiran 18

Permohonan Perubahan Data pada Aplikasi Simetris

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
BALAI POM DI PANGKAL PINANG

NOTA DINAS
NOMOR : PR.09.02.7B.07.25.252

Yth.	:	Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan u.p Kelompok Substansi Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Kinerja
Dari	:	Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkal Pinang
Lampiran	:	2 (Dua) Lembar
Hal	:	Permohonan Perubahan Data pada Aplikasi Simetris
Tanggal	:	22 Juli 2025

Berkaitan dengan Surat Dinas dari Direktur Pengawasan Peredaran Pangan Olahan Nomor T-PW.04.05.54.07.25.1368 tanggal 15 Juli 2025 Perihal Hasil Evaluasi Persentase Iklan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan, terdapat penyesuaian rumus perhitungan pada Form RHPK iklan pangan olahan yang dilakukan oleh Direktorat Pengawasan Pangan Olahan, khususnya komponen Kesesuaian Proporsi Media Iklan sehingga menyebabkan perubahan realisasi indikator Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan Balai POM di Pangkal Pinang Bulan Januari-Maret 2025 sebagai berikut.

Indikator	SEMULA			MENJADI		
	Januari	Februari	Maret	Januari	Februari	Maret
Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan	95,29	97,06	101,19	96,04	96,96	100,69

Berdasarkan hal tersebut, kami mohon untuk dibukakan akses pada Aplikasi Simetris dalam rangka perbaikan pelaporan kinerja Balai POM di Pangkal Pinang.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Agus Riyanto

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran
Nota Dinas Kepala Balai POM di Pangkal Pinang
Nomor : PR.09.02.7B.07.25.252
Tanggal : 22 Juli 2025

KERTAS KERJA CAPAIAN INDIKATOR

Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan

1. Pada Triwulan II (pada bulan April) terdapat penyesuaian rumus perhitungan pada Form RHPK iklan pangan olahan yang dilakukan oleh Direktorat Pengawasan Pangan Olahan, khususnya pada indikator Kesesuaian Proporsi Media Iklan yang menyebabkan perubahan realisasi pada Triwulan I (dari bulan Januari hingga Maret 2025)
2. Menindaklanjuti surat dari Direktur Pengawasan Peredaran Pangan Olahan nomor T-PW.04.05.54.07.25.1368 perihal Hasil Evaluasi Persentase Iklan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan
3. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Balai POM di Pangkal Pinang **mengajukan usulan perubahan realisasi IKU** untuk **indikator Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan**.

Berikut perhitungan RHPK semula dan menjadi :

1. **Semula**

- Terdapat perubahan rumus pada kolom Realisasi Media Online dari bulan Januari hingga bulan Maret 2025

Bulan	Target	Jumlah Iklan yang diawasi	Realisasi	Nilai Pemenuhan Target Iklan	Jumlah iklan yang diawasi (Media Cetak 12,5%)	Proporsi Realisasi Media Cetak	Realisasi Media Cetak	Jumlah iklan yang diawasi (Media Online 37,5%)	Proporsi Realisasi Media Online	Realisasi Media Online
Januari	10	10	1	40,00	0	0,00%	0	7	70,00%	0,70
Februari	20	23	1	40,00	1	4,35%	0	11	47,83%	1,10
Maret	30	35	1	40,00	3	8,57%	1	15	42,86%	1,50
April	30	35	1	40,00	3	8,57%	0,69	15	42,86%	1,00
Mei	50	57	1	40,00	12	21,05%	1	21	36,84%	1,00
Juni	60	67	1	40,00	17	25,37%	1	24	35,82%	1,00

Bulan	Target	% Iklan Obat	% Iklan Kos	% Iklan OBA	% Iklan SK	% Iklan PO	% Iklan SF dan PO
Januari	85,4	0,00	102,08	0,00	0,00	88,50	95,29
Februari	85,4	100,00	90,46	100,00	100,00	94,85	97,06
Maret	85,4	100,00	106,57	100,00	100,00	99,36	101,19
April	85,4	100,00	105,29	100,00	100,00	96,86	100,43
Mei	85,4	104,17	105,66	100,00	100,00	98,42	101,65
Juni	85,4	100,00	104,85	100,00	100,00	97,76	100,52

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2. Menjadi

- Terdapat perubahan rumus pada kolom Realisasi Media Online dari bulan Januari hingga bulan Maret 2025

Bulan	Target	Jumlah Iklan yang diawasi	Realisasi	Nilai Pemenuhan Target Iklan	Jumlah iklan yang diawasi (Media Cetak 12,5%)	Proporsi Realisasi Media Cetak	Realisasi Media Cetak	Jumlah iklan yang diawasi (Media Online 37,5%)	Proporsi Realisasi Media Online	Realisasi Media Online
Januari	10	10	1	40.00	0	0.00%	0	7	70.00%	1.00
Februari	20	23	1	40.00	1	4.35%	0	11	47.83%	1.00
Maret	30	35	1	40.00	3	8.57%	1	15	42.86%	1.00
April	30	35	1	40.00	3	8.57%	0.69	15	42.86%	1.00
Mei	50	57	1	40.00	12	21.05%	1	21	36.84%	1.00
Juni	60	67	1	40.00	17	25.37%	1	24	35.82%	1.00

Bulan	Target	% Iklan Obat	% Iklan Kos	% Iklan OBA	% Iklan SK	% Iklan PO	% Iklan SF dan PO
Januari	85.4	0.00	102.08	0.00	0.00	90.00	96.04
Februari	85.4	100.00	90.46	100.00	100.00	94.35	96.96
Maret	85.4	100.00	106.57	100.00	100.00	96.86	100.69
April	85.4	100.00	105.29	100.00	100.00	96.86	100.43
Mei	85.4	104.17	105.66	100.00	100.00	98.42	101.65
Juni	85.4	100.00	104.85	100.00	100.00	97.76	100.52

Agus Riyanto

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran 19

Surat Direktur Pengawasan Peredaran Pangan Olahan terkait Hasil Evaluasi Persentase Iklan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan

BADAN POM

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax : 4245139
Email : halobpom@pom.go.id ; Website : www.pom.go.id

Nomor : T-PW.04.05.54.07.25.1368 Jakarta, 15 Juli 2025
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Hasil Evaluasi Persentase Iklan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan

Yth. Kepala UPT Badan POM
di Seluruh Indonesia

Sehubungan dengan indikator kinerja RPJMN Tahun 2025–2029, yaitu "Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan", maka diperlukan monitoring dan evaluasi terhadap kesesuaian data realisasi pada komponen indikator dimaksud. Salah satu komponen indikator tersebut adalah "Persentase Iklan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan" yang dilaporkan melalui Form Penilaian Mandiri Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Kegiatan (RHPK) BPOM (http://bit.ly/capaianUPTtahun2025) sebagaimana Lampiran 1.

Bersama ini kami sampaikan hasil evaluasi terhadap data hasil pengawasan iklan pangan olahan yang telah Saudara input sampai dengan tanggal 02 Juli 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2. Adapun evaluasi mencakup:
1. Kesesuaian antara jumlah iklan tepat waktu pada Form Penilaian Mandiri RHPK dengan data SIPT yang telah dikirim ke Pusat
2. Kesesuaian rumus perhitungan pada kolom realisasi media cetak, online, penyiaran, dan luar ruang
3. Ketepatan metode penginputan secara akumulatif pada target dan jumlah iklan yang diawasi, baik jumlah total maupun jumlah per media

Sehubungan dengan hal tersebut, UPT diminta agar:
1. melakukan penginputan data pada Form Penilaian Mandiri RHPK dengan mengacu pada data hasil pengawasan yang telah dilaporkan melalui SIPT. (Hasil pengawasan SIPT dilaporkan ke Pusat paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya).
2. memantau pelaksanaan pengawasan iklan sesuai pada Surat Edaran Mekanisme Pengawasan Iklan.
3. menjadikan hasil evaluasi ini sebagai acuan dalam pelaksanaan penilaian mandiri pada bulan berikutnya

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Demikian disampaikan. Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Pengawasan Peredaran
Pangan Olahan,



Dr. Didik Joko Pursito, S.Pt, M.Si

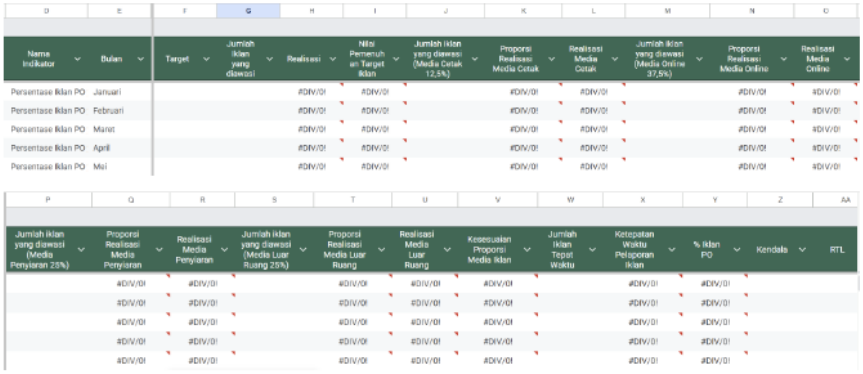
Tembusan :

1. Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan
2. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

LAMPIRAN I
Surat Dinas Direktur Pengawasan Peredaran Pangan Olahan
Nomor : T-PW.04.05.54.07.25.1368
Tanggal : 15 Juli 2025

Format Penilaian Mandiri RHPK Iklan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan



Nama Indikator	Bulan	Target	Jumlah iklan yang diawasi	Realisasi	Nilai Pemenuhan Target Iklan	Jumlah iklan yang diawasi (Media Cetak 12,5%)	Proporsi Realisasi Media Cetak	Realisasi Media Cetak	Jumlah iklan yang diawasi (Media Online 37,5%)	Proporsi Realisasi Media Online	Realisasi Media Online
Persentase Iklan PO	Januari			#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
Persentase Iklan PO	Februari			#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
Persentase Iklan PO	Maret			#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
Persentase Iklan PO	April			#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
Persentase Iklan PO	Mei			#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!

Jumlah iklan yang diawasi (Media Penyiaran 25%)	Proporsi Realisasi Media Penyiaran	Realisasi Media Penyiaran	Jumlah iklan yang diawasi (Media Luar Ruang 25%)	Proporsi Realisasi Media Luar Ruang	Realisasi Media Luar Ruang	Kesesuaian Proporsi Media Iklan	Jumlah iklan Tepat Waktu	Ketepatan Waktu Pelaporan Iklan	% Iklan PO	Kendala	RTL
	#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!		
	#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!		
	#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!		
	#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!		
	#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!		

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

LAMPIRAN II
Surat Dinas Direktur Pengawasan Peredaran Pangan Olahan
Nomor : T-PW.04.05.54.07.25.1368
Tanggal : 15 Juli 2025

Hasil Evaluasi Indikator Persentase Iklan Pangan Olahan Yang Diawasi Sesuai Ketentuan

No	UPT BPOM	Hasil Evaluasi
1	Balai Besar POM di Banda Aceh	Berdasarkan data SIPT yang dikirim ke Pusat, per tanggal 10 Juni 2025 sebanyak 199 iklan (100% tepat waktu). Namun pada form penilaian mandiri, jumlah iklan tepat waktu (Kolom W) tidak sesuai.
2	Balai Besar POM di Bandar Lampung	Tidak ada catatan
3	Balai Besar POM di Bandung	Pengisian data pada form penilaian mandiri tidak menggunakan rumus. Agar menggunakan form sesuai format (yang sudah menggunakan rumus).
4	Balai Besar POM di Jakarta	Tidak ada catatan
5	Balai Besar POM di Medan	Tidak ada catatan
6	Balai Besar POM di Padang	Tidak ada catatan
7	Balai Besar POM di Palembang	Tidak ada catatan
8	Balai Besar POM di Pekanbaru	Berdasarkan data SIPT yang dikirim ke Pusat, per tanggal 10 Juni 2025 sebanyak 128 iklan, dengan rincian laporan 127 iklan tepat waktu dan 1 iklan tidak tepat waktu. Namun pada form penilaian mandiri, jumlah iklan tepat waktu (Kolom W) tidak sesuai
9	Balai Besar POM di Pontianak	Berdasarkan data SIPT yang dikirim ke Pusat, per tanggal 10 Juni 2025 sebanyak 121 iklan (100% tepat waktu). Namun pada form penilaian mandiri, jumlah iklan tepat waktu (Kolom W) tidak sesuai
10	Balai Besar POM di Semarang	Tidak ada catatan
11	Balai Besar POM di Serang	Berdasarkan data SIPT yang dikirim ke Pusat, per tanggal 10 Juni 2025 sebanyak 209 iklan (100% tepat waktu). Namun pada form penilaian mandiri, jumlah iklan tepat waktu (Kolom W) tidak sesuai

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No	UPT BPOM	Hasil Evaluasi
12	Balai Besar POM di Surabaya	Berdasarkan data SIPT yang dikirim ke Pusat, per tanggal 10 Juni 2025 sebanyak 233 iklan (100% tepat waktu). Namun pada form penilaian mandiri, jumlah iklan tepat waktu (Kolom W) tidak sesuai.
13	Balai Besar POM di Yogyakarta	1. Berdasarkan data SIPT yang dikirim ke Pusat, per tanggal 10 Juni 2025 sebanyak 217 iklan (100% tepat waktu). Namun pada form penilaian mandiri, jumlah iklan tepat waktu (Kolom W) tidak sesuai. 2. Rumus penghitungan Realisasi Media Online (kolom O), Realisasi Media Penyiaran (kolom R), dan Realisasi Media Luar Ruang (kolom U) bulan Februari - Maret belum sesuai 3. Jumlah iklan yang diawasi pada masing-masing media (kolom J,M,P, dan S) agar diisi dengan data akumulasi.
14	Balai Besar POM di Denpasar	1. Rumus penghitungan realisasi media online (kolom O), media penyiaran (kolom R), dan media luar ruang (kolom U) bulan Januari - Juni sudah sesuai, namun Juli - Desember belum sesuai (masih menggunakan rumus realisasi media cetak); 2. Berdasarkan data SIPT yang dikirim ke Pusat, per tanggal 10 Juni 2025 sebanyak 132 iklan (100% tepat waktu). Namun pada form penilaian mandiri, jumlah iklan tepat waktu (Kolom W) tidak sesuai
15	Balai Besar POM di Makassar	Berdasarkan data SIPT yang dikirim ke Pusat, per tanggal 10 Juni 2025 sebanyak 99 iklan (100% tepat waktu). Namun pada form penilaian mandiri, jumlah iklan tepat waktu (Kolom W) tidak sesuai.
16	Balai Besar POM di Manado	Jumlah iklan yang diawasi (Kolom G, J, M, P, S dan W) agar diisi dengan data akumulasi. Pada bulan Januari-April kolom-kolom tersebut diisi dengan data per bulan.
17	Balai Besar POM di Mataram	1. Berdasarkan data SIPT yang dikirim ke Pusat, per tanggal 10 Juni 2025 sebanyak 104 iklan (100% tepat waktu). Namun pada form penilaian mandiri, jumlah iklan tepat waktu (Kolom W) tidak sesuai.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No	UPT BPOM	Hasil Evaluasi
		2. Rumus penghitungan realisasi media luar ruang (kolom U) belum sesuai (masih menggunakan rumus realisasi media cetak)
18	Balai Besar POM di Palangka Raya	Jumlah iklan yang diawasi (Kolom G) seharusnya tidak lebih kecil daripada jumlah iklan tepat waktu (Kolom W). Pada bulan April Jumlah Iklan yang diawasi lebih kecil daripada Jumlah Iklan Tepat Waktu.
19	Balai Besar POM di Samarinda	Tidak ada catatan
20	Balai Besar POM di Jayapura	1. Berdasarkan data SIPT yang dikirim ke Pusat, per tanggal 10 Juni 2025 sebanyak 137 iklan, dengan rincian laporan 107 iklan tepat waktu dan 30 iklan tidak tepat waktu. Namun pada form penilaian mandiri, jumlah iklan tepat waktu (Kolom W) tidak sesuai 2. Jumlah iklan yang diawasi (Kolom G, J, M, P, S dan W) agar diisi dengan data akumulasi.
21	Balai Besar POM di Gorontalo	Jumlah iklan yang diawasi (Kolom G, J, M, P, S dan W) agar diisi dengan data akumulasi. Pada bulan Januari sampai April kolom-kolom tersebut diisi dengan data per bulan.
22	Balai Besar POM di Kupang	Berdasarkan data SIPT yang dikirim ke Pusat, per tanggal 10 Juni 2025 sebanyak 81 iklan, dengan rincian laporan 69 iklan tepat waktu dan 12 iklan tidak tepat waktu. Namun pada form penilaian mandiri, jumlah iklan tepat waktu (Kolom W) tidak sesuai
23	Balai Besar POM di Banjarbaru	Rumus penghitungan realisasi media online (kolom O), media penyiaran (kolom R), dan media luar ruang (kolom U) belum sesuai (masih menggunakan rumus realisasi media cetak)
24	Balai POM di Kendari	1. Berdasarkan data SIPT yang dikirim ke Pusat, per tanggal 10 Juni 2025 sebanyak 55 iklan (100% tepat waktu). Namun pada form penilaian mandiri, jumlah iklan tepat waktu (Kolom W) tidak sesuai 2. Jumlah iklan yang diawasi (Kolom J, M, P, dan S) agar diisi dengan data akumulasi sesuai dengan jumlah iklan permedia yang diawasi (agar tidak diisi sama dengan jumlah iklan yang diawasi (Kolom G) dan jumlah iklan tepat waktu (Kolom W))
25	Balai POM di Mamuju	Rumus pada Proporsi Realisasi Media Cetak, Online, dan Penyiaran (kolom K, N, Q) agar dipastikan bahwa denominator (pembagi) sesuai dengan bulan masing-masing (contoh:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No	UPT BPOM	Hasil Evaluasi
		kolom Q di bulan Mei, Juli s/d Desember, pada saat ini denominator merujuk pada Jumlah Iklan yang diawasi pada bulan Maret.
26	Balai POM di Palopo	Rumus penghitungan realisasi media online (kolom O), media penyiaran (kolom R), dan media luar ruang (kolom U) belum sesuai (masih menggunakan rumus realisasi media cetak)
27	Balai POM di Palu	1. Berdasarkan data SIPT yang dikirim ke Pusat, per tanggal 10 Juni 2025 sebanyak 48 iklan dengan rincian 45 iklan tepat waktu dan 3 iklan tidak tepat waktu. Namun pada form penilaian mandiri, jumlah iklan tepat waktu (Kolom W) tidak sesuai 2. Jumlah iklan yang diawasi (Kolom G, J, M, P, S dan W) agar diisi dengan data akumulasi.
28	Balai POM di Tarakan	Tidak ada catatan
29	Balai POM di Ambon	1. Jumlah iklan yang diawasi pada masing-masing media (kolom J,M,P, dan S) agar diisi dengan data akumulasi 2. Berdasarkan data SIPT yang dikirim ke Pusat, per tanggal 10 Juni 2025 sebanyak 47 iklan dengan rincian 44 iklan tepat waktu dan 3 iklan tidak tepat waktu. Namun pada form penilaian mandiri, jumlah iklan tepat waktu (Kolom W) tidak sesuai
30	Balai POM di Manokwari	Tidak ada catatan
31	Balai POM di Sofifi	Berdasarkan data SIPT yang dikirim ke Pusat, per tanggal 10 Juni 2025 sebanyak 63 iklan (100% tepat waktu). Namun pada form penilaian mandiri, jumlah iklan tepat waktu (Kolom W) tidak sesuai.
32	Balai POM di Bima	Rumus penghitungan realisasi media online (kolom O), media penyiaran (kolom R), dan media luar ruang (kolom U) belum sesuai (masih menggunakan rumus realisasi media cetak)
33	Balai POM di Ende	Jumlah iklan yang diawasi (Kolom G) seharusnya tidak lebih kecil daripada jumlah iklan tepat waktu (Kolom W)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No	UPT BPOM	Hasil Evaluasi
34	Balai POM di Tabalong	1. Kesesuaian Proporsi Media Iklan mulai bulan April dan seterusnya agar mengikuti rumus yang sudah disediakan. 2. Berdasarkan data SIPT yang dikirim ke Pusat, per tanggal 10 Juni 2025 sebanyak 35 iklan (100% tepat waktu). Namun pada form penilaian mandiri, jumlah iklan tepat waktu (Kolom W) tidak sesuai
35	Balai POM di Balikpapan	Berdasarkan data SIPT yang dikirim ke Pusat, per tanggal 10 Juni 2025 sebanyak 25 iklan, dengan rincian laporan 24 iklan tepat waktu dan 1 iklan tidak tepat waktu. Namun pada form penilaian mandiri, jumlah iklan tepat waktu (Kolom W) tidak sesuai
36	Balai POM di Bau-Bau	Tidak ada catatan
37	Balai POM di Batam	Tidak ada catatan
38	Balai POM di Bengkulu	1. Jumlah iklan yang diawasi (Kolom G) seharusnya tidak lebih kecil daripada jumlah iklan tepat waktu (Kolom W) 2. Jumlah iklan yang diawasi (Kolom G, J, M, P, S dan W) agar diisi dengan data akumulasi. 3. Berdasarkan data SIPT yang dikirim ke Pusat, per tanggal 10 Juni 2025 sebanyak 75 iklan (100% tepat waktu). Namun pada form penilaian mandiri, jumlah iklan tepat waktu (Kolom W) tidak sesuai
39	Balai POM di Bogor	Berdasarkan data SIPT yang dikirim ke Pusat, per tanggal 10 Juni 2025 sebanyak 44 iklan (100% tepat waktu). Namun pada form penilaian mandiri, jumlah iklan tepat waktu (Kolom W) tidak sesuai
40	Balai POM di Jambi	1. Rumus penghitungan Realisasi Media Online (kolom O), Realisasi Media Penyiaran (kolom R), dan Realisasi Media Luar Ruang (kolom U) bulan Februari - Desember belum sesuai (masih menggunakan rumus realisasi media cetak) 2. Jumlah iklan yang diawasi pada masing-masing media (kolom J,M,P, dan S) agar diisi dengan data akumulasi.
41	Balai POM di Jember	Tidak ada catatan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No	UPT BPOM	Hasil Evaluasi
42	Balai POM di Kediri	1. Pengawasan Iklan tidak dilaksanakan secara rutin setiap bulan (hasil pengawasan bulan April sama dengan bulan Mei) 2. Berdasarkan data SIPT yang dikirim ke Pusat, per tanggal 10 Juni 2025 sebanyak 51 iklan (100% tepat waktu). Namun pada form penilaian mandiri, jumlah iklan tepat waktu (Kolom W) tidak sesuai
43	Balai POM di Pangkalpinang	Rumus penghitungan realisasi media online (kolom O) pada bulan Januari sampai Maret belum sesuai.
44	Balai POM di Payakumbuh	Tidak ada catatan
45	Balai POM di Surakarta	Rumus penghitungan realisasi media online (kolom O), media penyiaran (kolom R), dan media luar ruang (kolom U) belum sesuai (masih menggunakan rumus realisasi media cetak).
46	Balai POM di Tangerang	Berdasarkan data SIPT yang dikirim ke Pusat, per tanggal 10 Juni 2025 sebanyak 52 iklan (100% tepat waktu). Namun pada form penilaian mandiri, jumlah iklan tepat waktu (Kolom W) tidak sesuai
47	Balai POM di Tasikmalaya	Tidak ada catatan
48	Balai POM di Banyumas	1. Berdasarkan data SIPT yang dikirim ke Pusat, per tanggal 10 Juni 2025 sebanyak 25 iklan, dengan rincian laporan 19 iklan tepat waktu dan 6 iklan tidak tepat waktu. Namun pada form penilaian mandiri, jumlah iklan tepat waktu (Kolom W) tidak sesuai. 2. Rumus penghitungan realisasi media online (kolom O), media penyiaran (kolom R), dan media luar ruang (kolom U) belum sesuai (masih menggunakan rumus realisasi media cetak).
49	Balai POM di Indragiri Hulu	Berdasarkan data SIPT yang dikirim ke Pusat, per tanggal 10 Juni 2025 sebanyak 41 iklan (100% tepat waktu). Namun pada form penilaian mandiri, jumlah iklan tepat waktu (Kolom W) tidak sesuai
50	Balai POM di Sanggau	1. Penilaian Mandiri baru sampai bulan April

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No	UPT BPOM	Hasil Evaluasi
		2. Berdasarkan data SIPT yang dikirim ke Pusat, per tanggal 10 Mei 2025 sebanyak 29 iklan (100% tepat waktu). Namun pada form penilaian mandiri, jumlah iklan tepat waktu (Kolom W) tidak sesuai 3. Rumus penghitungan realisasi media online (kolom O), media penyiaran (kolom R), dan media luar ruang (kolom U) belum sesuai (masih menggunakan rumus realisasi media cetak)
51	Balai POM di Tulang Bawang	1. Rumus penghitungan realisasi media online (kolom O), media penyiaran (kolom R), dan media luar ruang (kolom U) belum sesuai (masih menggunakan rumus realisasi media cetak). 2. Jumlah iklan yang diawasi (Kolom G, J, M, P, S dan W) agar diisi dengan data akumulasi.
52	Balai POM di Dumai	Tidak ada catatan
53	Balai POM di Tanjungbalai	1. Penilaian Mandiri baru sampai bulan April 2. Berdasarkan data SIPT yang dikirim ke Pusat, per tanggal 10 Juni 2025 sebanyak 21 iklan (100% tepat waktu). Namun pada form penilaian mandiri, jumlah iklan tepat waktu (Kolom W) tidak sesuai. 3. Jumlah iklan yang diawasi (Kolom G, J, M, P, S dan W) agar diisi dengan data akumulasi.
54	Loka POM di Kabupaten Banggai	Berdasarkan data SIPT yang dikirim ke Pusat, per tanggal 10 Juni 2025 sebanyak 24 iklan (100% tepat waktu). Namun pada form penilaian mandiri, jumlah iklan tepat waktu (Kolom W) tidak sesuai.
55	Loka POM di Kabupaten Belu	Tidak ada catatan
56	Loka POM di Kabupaten Buleleng	Tidak ada catatan
57	Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat	Tidak ada catatan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No	UPT BPOM	Hasil Evaluasi
58	Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat	1. Rumus penghitungan realisasi media online (kolom O), media penyiaran (kolom R), dan media luar ruang (kolom U) belum sesuai (masih menggunakan rumus realisasi media cetak).
59	Loka POM di Kabupaten Sambas	1. Penilaian Mandiri baru sampai bulan Maret 2. Realisasi Media Online (kolom O) agar menggunakan rumus yang telah diberikan. Saat ini pada bulan Jan-Mar masih ditulis manual.
60	Loka POM di Kabupaten Sumba Timur	1. Jumlah iklan yang diawasi (Kolom G, J,M,P, S dan W) agar diisi dengan data akumulasi. 2. Rumus penghitungan realisasi media online (kolom O) belum sesuai (masih menggunakan rumus realisasi media cetak) 3. Berdasarkan data SIPT, per tanggal 10 Juni 2025 sebanyak 32 iklan, dengan rincian laporan 25 iklan tepat waktu dan 7 iklan tidak tepat waktu. Namun pada form penilaian mandiri, jumlah iklan tepat waktu (Kolom W) tidak sesuai
61	Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu	1. Jumlah iklan yang diawasi (Kolom G, J, M, P, S dan W) agar diisi dengan data akumulasi. 2. Berdasarkan data SIPT yang dikirim ke Pusat, per tanggal 10 Juni 2025 sebanyak 28 iklan (100% tepat waktu). Namun pada form penilaian mandiri, jumlah iklan tepat waktu (Kolom W) tidak sesuai.
62	Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe	Tidak ada catatan
63	Loka POM di Kabupaten Merauke	Berdasarkan data SIPT yang dikirim ke Pusat, per tanggal 10 Juni 2025 sebanyak 32 iklan (100% tepat waktu). Namun pada form penilaian mandiri, jumlah iklan tepat waktu (Kolom W) tidak sesuai.
64	Loka POM di Kabupaten Mimika	Berdasarkan data SIPT yang dikirim ke Pusat, per tanggal 10 Juni 2025 sebanyak 31 iklan, dengan rincian laporan 29 iklan tepat waktu dan 2 iklan tidak tepat waktu. Namun pada form penilaian mandiri, jumlah iklan tepat waktu (Kolom W) tidak sesuai

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No	UPT BPOM	Hasil Evaluasi
65	Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai	Berdasarkan data SIPT yang dikirim ke Pusat, per tanggal 10 Juni 2025 sebanyak 38 iklan (100% tepat waktu). Namun pada form penilaian mandiri, jumlah iklan tepat waktu (Kolom W) tidak sesuai.
66	Loka POM di Kabupaten Sorong	1. Berdasarkan data SIPT, per tanggal 10 Juni 2025 sebanyak 30 iklan (100% tepat waktu). Namun pada form penilaian mandiri, jumlah iklan tepat waktu (Kolom W) tidak sesuai. 2. Rumus pada Realisasi Media Cetak (kolom L) sudah benar namun tidak berfungsi, agar dilakukan perbaikan (dapat berupa menyalin rumus dari baris pertama ke seluruh baris)
67	Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar	Berdasarkan data SIPT yang dikirim ke Pusat, per tanggal 10 Juni 2025 sebanyak 44 iklan (100% tepat waktu). Namun pada form penilaian mandiri, jumlah iklan tepat waktu (Kolom W) tidak sesuai.
68	Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	Rumus penghitungan realisasi media online (kolom O), media penyiaran (kolom R), dan media luar ruang (kolom U) belum sesuai (masih menggunakan rumus realisasi media cetak)
69	Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah	1. Rumus penghitungan realisasi media cetak (kolom L) pada bulan Maret sampai Mei; media online (kolom O), media penyiaran (kolom R) dan media luar ruang (U) masing - masing bulan Februari sampai Mei belum sesuai. 2. Berdasarkan data SIPT yang dikirim ke Pusat, per tanggal 10 Juni 2025 sebanyak 40 iklan (100% tepat waktu). Namun pada form penilaian mandiri, jumlah iklan tepat waktu (Kolom W) tidak sesuai.
70	Loka POM di Kabupaten Belitung	Tidak ada catatan
71	Loka POM di Kabupaten Bungo	Tidak ada catatan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No	UPT BPOM	Hasil Evaluasi
72	Loka POM di Kabupaten Sijunjung	Berdasarkan data SIPT yang dikirim ke Pusat, per tanggal 10 Juni 2025 sebanyak 39 iklan, dengan rincian laporan 39 iklan tepat waktu dan 0 iklan tidak tepat waktu. Namun pada form penilaian mandiri, jumlah iklan tepat waktu (Kolom W) tidak sesuai
73	Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong	1. Jumlah iklan yang diawasi (Kolom G, J, M, P, S dan W) agar diisi dengan data akumulasi. Pada bulan Januari-Maret kolom-kolom tersebut diisi dengan data per bulan. 2. Rumus penghitungan realisasi media online (kolom O), media penyiaran (kolom R), dan media luar ruang (kolom U) belum sesuai (masih menggunakan rumus realisasi media cetak)
74	Loka POM di Kabupaten Toba	Jumlah iklan yang diawasi (Kolom G, J, M, P, S dan W) agar diisi dengan data akumulasi. Pada bulan Januari-Maret kolom-kolom tersebut diisi dengan data per bulan.
75	Loka POM di Kota Lubuklinggau	Berdasarkan data SIPT yang dikirim ke Pusat, per tanggal 10 Juni 2025 sebanyak 35 iklan, dengan rincian laporan 29 iklan tepat waktu dan 6 iklan tidak tepat waktu. Namun pada form penilaian mandiri, jumlah iklan tepat waktu (Kolom W) tidak sesuai
76	Loka POM di Kota Tanjungpinang	1. Berdasarkan data SIPT yang dikirim ke Pusat, per tanggal 10 Juni 2025 sebanyak 34 iklan, dengan rincian laporan 29 iklan tepat waktu dan 5 iklan tidak tepat waktu. Namun pada form penilaian mandiri, jumlah iklan tepat waktu (Kolom W) tidak sesuai. 2. Jumlah iklan yang diawasi pada masing-masing media (kolom J,M,P, dan S) agar diisi dengan data akumulasi.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Direktur Pengawasan Peredaran
Pangan Olahan,

Dr. Didik Joko Pursito, S.Pt, M.Si

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Lampiran 20

Penghargaan BPOM Pangkal Pinang

BPOM di Pangkal Pinang berhasil mendapatkan predikat WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi) pada tahun 2024



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN REPUBLIK INDONESIA

Berkolaborasi dengan Tim Penilai Nasional:
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi,
Komisi Pemberantasan Korupsi, Badan Intelijen Negara, dan Ombudsman Republik Indonesia
menetapkan

Balai POM di Pangkalpinang

sebagai unit kerja berpredikat menuju

WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK)

Jakarta, 27 Desember 2024
Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

TARUNA IKRAR

Tim Agen Perubahan Reformasi Birokrasi Terbaik II Tahun 2024, Kategori Unit Pelaksana Teknis



BADAN POM

PIAGAM

PENGHARGAAN

Penghargaan ini diberikan kepada Tim Agen Perubahan

alai POM di Pangkalpinang

Sebagai Tim Agen Perubahan Reformasi Birokrasi Terbaik II Tahun 2024

Kategori: Unit Pelaksana Teknis

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

Prof. dr. Taruna Ikrar , M.Biomed., Ph.D.

BPOM di Pangkal Pinang meraih Penghargaan "Unit Kerja dengan Penilaian Kinerja Organisasi tertinggi Ke-1 Tahun 2024



BADAN POM

1500533
HALO BPOM

bpompangkalpng
bpom.pangkalpinang
Jl. Pulau Bangka, Air Itam, Pangkalpinang
bpom.pangkalpinang@pom.go.id
(0717) 439278, 434705